



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN *MEDIA RELATIONS* DI LEMBAGA
PEMERINTAH DARI SUDUT PANDANG PRAKTISI HUMAS
KEMENTERIAN DAN WARTAWAN**

**(Studi Kasus : *Media relations* di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi
program dan kebijakan kementerian)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**ELSYA YUNITA
0806346016**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Elsy Yunita

NPM : 0806346016

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Elsy Yunita

NPM : 0806346016

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Media Relations* Di Lembaga Pemerintah Dari Sudut Pandang Praktisi Humas Kementerian Dan Wartawan.

(Studi Kasus : *Media relations* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi program dan kebijakan kementerian)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :

Drs. Eman Sulaeman

()

Penguji :

Dra. Vida Parady, M.A.

()

Ketua Sidang :

Dra. Ken Reciana, M.A.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Januari 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Eman Sulaeman, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dra. Vida Parady, M.A., selaku dosen penguji ahli yang telah menyediakan waktunya untuk menguji skripsi ini;
3. Rekan-rekan Humas dan wartawan di Kemendikbud yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan;
4. Dra. Ken Reciana, M.A., selaku Ketua Program S1 Reguler Departemen Ilmu Komunikasi;
5. Dra. Henny S. Widyaningsih, M.Si., selaku penasihat akademik yang telah memberikan banyak masukan dan arahan bagi peneliti selama ini;
6. Seluruh dosen, staf pengajar serta pegawai sekretariat Program S1 Reguler Ilmu Komunikasi FISIP UI;
7. Bapak, (Alm.) Ibu, Mas Edwin, Edo, dan seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Saya sangat sayang kalian;
8. Garry Marwin, yang selalu sabar dan tak henti memberikan semangat meskipun sedang menjalani masa-masa pendidikan yang juga berat di Cirebon;

9. Teman-teman ambless: Nur Fithry Amalia, Elisabeth Maria, Carla Valencia, Catherina Intan, dan Edwar Andiko yang selalu menyemangati dan membantu peneliti dalam penyusunan sampai presentasi sidang skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat Komunikasi angkatan 2008 (We Are One. Go, Fight, Win!). Saya akan selalu merindukan kenangan-kenangan kita bersama;
11. Semua orang yang mungkin lupa peneliti cantumkan namanya dan telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini;

Akhir kata, peneliti berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Januari 2012

Penulis

Elsya Yunita

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsy Yunita
NPM : 0806346016
Program Studi : Hubungan Masyarakat
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pelaksanaan *Media Relations* Di Lembaga Pemerintah Dari Sudut Pandang Praktisi Humas Kementerian Dan Wartawan (Studi Kasus : *Media relations* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi program dan kebijakan kementerian)

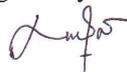
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juni 2012

Yang Menyatakan



(Elsya Yunita)

vi

ABSTRAK

Nama : Elsy Yunita
Program Studi : Hubungan Masyarakat
Judul : Pelaksanaan *Media Relations* Di Lembaga Pemerintah Dari Sudut Pandang Praktisi Humas Kementerian Dan Wartawan. (Studi Kasus : *Media relations* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka sosialisasi program dan kebijakan kementerian)

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *media relations* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian, serta bagaimana peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan *media relations* dengan baik, di mana dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan fungsi *media relations* itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik

Kata kunci : Hubungan Media, Kementerian, Peran Humas, Wartawan

ABSTRACT

Name : Elsy Yunita
Study Program : Public Relations
Title : The Implementation of Media Relations in Government Agency From Public Relations Practitioner of the Ministry and Journalist Standpoint. (Case Study : Media Relations at Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia in socializing programs and policies of the ministry)

This study discusses the implementation of media relations at Ministry of Education and Culture in socializing programs and policies, as well as examining the importance of PR. This study utilizes constructivist paradigm and descriptive qualitative approach. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection. The result of this study demonstrates how PR has been able successful in performing various activities of media relations, in which PR has been delegated to act as communication technician and facilitator of communication. However, the implementation of media relations's function is yet to be at its best since PR has not been performing up to par as a source of information.

Key words : Media Relations, Ministry, Roles of Public Relations, Journalist

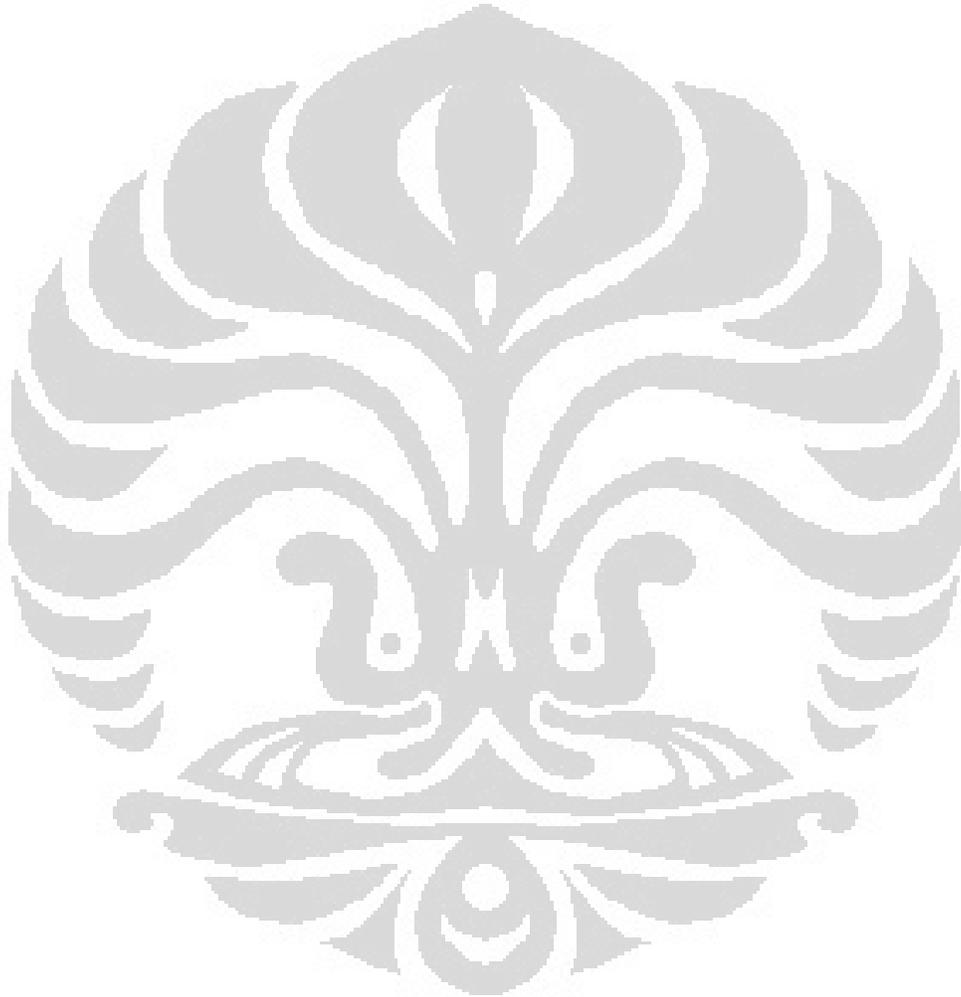
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Signifikansi Penelitian	11
1.5.1 Signifikansi Akademis	11
1.5.2 Signifikansi Praktis	11
1.5.3 Signifikansi Sosial	12
2. KERANGKA PEMIKIRAN	13
2.1 <i>Media Relations</i>	13
2.1.1 Kegiatan <i>Media Relations</i>	17
2.1.2 Hubungan Humas dengan Wartawan	19
2.2 Humas Pemerintah	23
2.3 Media Massa	28
3. METODOLOGI	36
3.1 Paradigma Penelitian	36
3.2 Pendekatan Penelitian	36
3.3 Sifat Penelitian	37
3.4 Strategi Penelitian	38
3.5 Metode Pengumpulan Data	39
3.6 Metode Pemilihan Informan	40
3.7 Metode Analisis Data	41
3.8 Kualitas Penelitian	42
3.9 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian	43
4. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	44
4.1 Profil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	44
4.1.1 Sejarah	44
4.1.2 Tugas dan Fungsi	46
4.1.3 Visi dan Misi	47

4.2 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	48
4.2.1 Struktur Organisasi PIH	49
4.2.2 Strategi Kegiatan Humas	53
5. ANALISIS DATA	55
5.1 Profil Informan	55
5.2 Temuan Data	58
5.2.1 Pemahaman Fungsi <i>Media Relations</i> di Lembaga Pemerintah	58
5.2.2 Kegiatan <i>Media Relations</i>	62
5.2.3 Akses Informasi Bagi Wartawan	68
5.2.4 Fasilitas Peliputan	75
5.2.5 Tanggapan Humas Terhadap Berita yang Bernada Negatif	79
5.2.6 Hal-hal Yang Menghambat Pelaksanaan <i>Media Relations</i>	86
5.2.7 Hal-hal Yang Mendukung Pelaksanaan <i>Media Relations</i>	94
5.2.8 Saran Untuk Peningkatan Pelaksanaan <i>Media Relations</i>	97
6. INTERPRETASI DATA	103
7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	118
7.1 Kesimpulan	118
7.2 Rekomendasi	121
7.2.1 Rekomendasi Akademis	121
7.2.2 Rekomendasi Praktis	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arus Komunikasi Dalam Praktik <i>Media Relations</i>	16
Gambar 2.2 Pertentangan Fungsi dan Tugas Antara Humas dan Wartawan	20
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	52



DAFTAR LAMPIRAN

Panduan wawancara Humas	Lampiran 1
Panduan wawancara Wartawan	Lampiran 2
Transkrip wawancara 1	Lampiran 3
Transkrip wawancara 2	Lampiran 4
Transkrip wawancara 3	Lampiran 5
Transkrip wawancara 4	Lampiran 6
Transkrip wawancara 5	Lampiran 7
Transkrip wawancara 6	Lampiran 8
Transkrip wawancara 7	Lampiran 9
Transkrip wawancara 8	Lampiran 10
Transkrip wawancara 9	Lampiran 11
Transkrip wawancara 10.....	Lampiran 12
Transkrip wawancara 11	Lampiran 13
Transkrip wawancara 12.....	Lampiran 14
Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Lampiran 15
Daftar Kegiatan Jumpa Pers Sub Bidang Kemitraan Media.....	Lampiran 16
Daftar Kegiatan Liputan Daerah Subbidang Kemitraan Media	Lampiran 17
Daftar Kegiatan Liputan Subbidang Kemitraan Media	Lampiran 18
Contoh Siaran Pers – Kemendikbud	Lampiran 19
Contoh Berita – Media Indonesia	Lampiran 20
Contoh Berita – LKBN Antara	Lampiran 21
Matriks Temuan Penelitian	Lampiran 22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkan dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah menjadi babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP seakan menjadi wujud konkret dari proses demokratisasi di Indonesia, yang menandai masuknya masyarakat Indonesia ke dalam sebuah era yang baru, yaitu era transparansi atau keterbukaan. Berdasarkan data dari *Freedom of Information Center* di Inggris, sekurang-kurangnya ada 50 negara di dunia yang telah memiliki UU tentang kebebasan atas informasi, termasuk di dalamnya adalah Indonesia, serta ada 30 negara lainnya yang sedang berada dalam tahap penyusunan UU tersebut (Depkominfo, 2008, p.1).

Era transparansi mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan informasi publik yang seluas-luasnya secara transparan kepada masyarakat, salah satu di antara badan publik tersebut adalah lembaga pemerintah. Adanya transparansi terhadap setiap informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pemerintahannya (Depkominfo, 2008, p.2). Dengan demikian, setiap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Dari situ akan terbentuk opini publik terhadap performa pemerintah dan lembaga-lembaganya, yang pada akhirnya akan berujung pada pembentukan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Oleh karena itu, keberadaan humas di lembaga pemerintah semakin dibutuhkan di era transparansi ini, terutama sebagai penghubung antara lembaga pemerintah dengan masyarakat. Peranan humas dalam lembaga pemerintah sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak tahun 1970-an. Saat itu, penerapan

peranan humas dalam lembaga pemerintah ditujukan untuk menjembatani, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan-pesan lembaga tersebut kepada publik (Sularso, 2006, p.26). Pada perkembangannya, selain membantu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan lembaga pemerintah kepada masyarakat, humas juga membantu mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah agar tetap selaras dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Humas di lembaga pemerintah secara khusus bertugas memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat tersebut dalam bentuk *feedback* kepada pimpinan lembaga-lembaga pemerintah yang bersangkutan sebagai *input* (Rachmadi, 1996, p.78). Dalam hal ini, humas pemerintah dituntut untuk mampu menerjemahkan kepentingan aktual masyarakat (Sularso, 2006, p.27). Perhatian yang besar terhadap perkembangan peran humas di lembaga pemerintah pada akhirnya mendorong pemerintah membentuk sebuah organisasi atau wadah bagi humas pemerintah dengan nama Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) pada tahun 1971, yang mana anggotanya terdiri dari humas kementerian, lembaga negara, serta unit usaha negara (BUMN) (Sularso, 2006, p.26).

Berbeda dengan humas di sektor usaha komersil yang berorientasi menghasilkan laba, humas di lembaga pemerintah lebih bersifat nirlaba sebab menekankan kegiatannya pada *public service* atau pemberian pelayanan kepada masyarakat (Sularso, 2006, p.27). Pelayanan tersebut diberikan dalam bentuk pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga humas pemerintah sebenarnya mengemban tugas yang sangat berat, di mana mereka tidak hanya sekedar membangun dan mempertahankan citra lembaga di lingkungannya sendiri, melainkan juga harus dapat mencerminkan citra pemerintah serta citra negara dan bangsa di mata masyarakat maupun dunia internasional (Sularso, 2006, p.26). Namun demikian, bukanlah suatu hal yang mudah bagi humas pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi khalayaknya.

Keterbatasan humas pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang begitu luas tersebut menjadikan peran media massa begitu penting dalam rangka

mendukung aktivitas komunikasi yang dilakukan sebuah lembaga pemerintah kepada masyarakat. Media massa dapat dikatakan sebagai penjaga gerbang atau penyaring tempat praktisi humas menjangkau publik umum dan kelompok lainnya yang dukungannya dibutuhkan (Latimore et al., 2010, p.200). Oleh karena itu, humas pemerintah perlu menjalin hubungan baik dengan media massa, atau yang biasa dikenal dengan istilah *media relations*. Menurut Frank Jefkins (2004), kegiatan menjalin hubungan baik dengan media massa atau pers merupakan sebuah upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (p.98).

Alasan lain humas menggunakan *media relations* untuk menyebarkan pesan dan informasi lembaganya adalah karena kemampuan membentuk opini publik yang dimiliki oleh media massa (Theaker, 2004, p.147). Media massa memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang dilihat, dibaca dan didengarkan masyarakat secara umum, atau yang biasa disebut dengan fungsi *agenda setting* media. Fungsi tersebut menjadi sangat penting terlebih di era keterbukaan ini, sebab media massa menentukan hal-hal apa saja yang dianggap mempunyai nilai berita ataupun *newsworthy* untuk disampaikan kepada publik.

Faktanya, jarang sekali konsumen media massa yang memperbincangkan isu-isu yang tidak dimuat oleh media massa, meskipun bisa jadi isu tersebut justru merupakan isu yang penting untuk diketahui publik. Hal ini dikarenakan masyarakat melihat media massa sebagai satu dari sejumlah kecil sumber yang kredibel untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa yang sedang terjadi saat ini (Holtz, 2002, p.158). Salah satu dampak dari fungsi *agenda setting* media ini adalah lahirnya gambaran realitas yang menempel di benak masyarakat sebagaimana media mengkonstruksikannya (Hamad, 2004, p.24). Bila media menggambarkan sebuah realitas dengan warna merah, niscaya merah jugalah gambaran yang tertanam dalam benak khalayak (Sudibyodkk., 2001, p.91).

Samsup & Yungwook (2004) menjelaskan bahwa *media relations* yang dijalankan sebuah lembaga tidak hanya berupa melaksanakan aktivitas rutin

seperti penulisan berita serta *follow-up* dan *monitoring* pelayanan lembaga, melainkan juga termasuk memelihara hubungan pertemanan dengan media massa (p.302). Media massa yang dimaksud tidak sebatas pada hubungan humas dengan media massa sebagai sebuah organisasi media massa, melainkan juga hubungan humas dengan personil-personil yang menggerakkan organisasi media massa tersebut, mulai dari pemimpin redaksi, redaktur dan asisten redaktur, redaktur pelaksana, korektor bahasa, pegawai bagian *layout*, pegawai bagian percetakan, pegawai bagian distribusi, dan yang tidak kalah penting adalah reporter atau wartawan sebagai pihak yang terjun langsung ke lapangan dan berhubungan dengan pihak humas secara langsung. Untuk itu, humas perlu menjalin komunikasi yang baik dengan media dan secara intens membina hubungan dengan wartawan yang menjadi jembatan pada setiap perusahaan untuk mengkomunikasikan programnya melalui media (Isnaini, 2006, p.21).

Media relations idealnya tidak hanya merupakan sebuah hubungan yang menguntungkan bagi humas pemerintah saja. Sebaliknya, wartawan dan media massa pun diuntungkan dengan adanya hubungan dengan humas pemerintah tersebut. Oleh wartawan, humas dianggap sebagai sumber informasi yang mampu membuat pekerjaan wartawan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu, di samping mampu menyediakan informasi yang belum tersedia (Baskin, Aronoff & Lattimore, 1997, p.199-200). Menurut Supa & Zoch (2009), *media relations* merupakan hubungan yang sistematis (Kendall, 1996), terencana (Lesly, 1991), memiliki tujuan tertentu (Miller, 1984), dan saling menguntungkan (Guth & Marsh, 2003) antara wartawan di media massa dan praktisi humas (p.2). Dalam pelaksanaan *media relations*, seorang humas berfungsi sebagai pemberi informasi yang objektif kepada wartawan, sekaligus sebagai pemegang kontrol terhadap pemberitaan mengenai lembaganya yang dimuat di media massa; sedangkan fungsi wartawan adalah dalam hal peliputan, yaitu mencari, menulis dan menyebarkan informasi. Kedua fungsi yang dilakukan di atas harus dilandasi dengan hubungan kemitraan yang tidak dengan maksud saling mendistorsi fungsi dan peran masing-masing (Mursito, 2006).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud untuk penyebutan selanjutnya) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mulai melaksanakan *media relations* dalam memaksimalkan penyebaran informasi guna peningkatan pelayanannya kepada masyarakat. Sebagai lembaga tertinggi yang mengurus sektor pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbud berperan dalam membangun sistem pendidikan berbasis budaya yang tepat di Indonesia (Jusuf, 2011, para. 3).

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor pendidikan di Indonesia tahun 2011 ini, yakni sekitar 20% dari APBN tahun 2011. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, pada pasal 28 disebutkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2011 adalah sebesar Rp248.978.493.061.200,00 (dua ratus empat puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), di mana dalam anggaran tersebut, anggaran yang dikhususkan untuk Kemendikbud (yang saat itu bernama Kemendiknas) mencapai Rp 55,5 triliun dan menjadi anggaran terbesar dibandingkan kementerian negara lainnya, seperti Kementerian Agama dengan total anggaran Rp 27,2 triliun, serta Kementerian Kesehatan dengan total anggaran Rp 1,9 triliun.

Pada pertengahan tahun 2011, pemerintah melakukan perubahan terhadap APBN tahun 2011, di mana dalam Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011 poin 4.2.2 mengenai Perubahan Anggaran Pendidikan, ditetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari pagu anggaran sebelumnya, atau bertambah sekitar Rp 17.962,1 miliar menjadi Rp 266.940,6 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan tahun 2011 mencapai 20,2% dari total APBN-P tahun 2011. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran pendidikan dengan perubahan volume belanja negara dalam APBN-P 2011 sehingga tetap memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menjelaskan bahwa “Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Dari peningkatan alokasi anggaran pendidikan tersebut, alokasi anggaran untuk Kemendikbud (yang saat itu bernama Kemendiknas) pun ikut meningkat menjadi sekitar RP 55,6 triliun.

Sebagai kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dibandingkan kementerian negara lainnya, pertanggungjawaban Kemendikbud kepada masyarakat pun menjadi lebih besar, terutama dalam penggunaan anggaran tersebut. Kemendikbud tentu dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, melalui pembuatan serta pelaksanaan program dan kebijakan dalam rangka membangun sektor pendidikan yang berbasis budaya di seluruh pelosok Indonesia, sehingga dalam kondisi ini, peran media massa menjadi sangat penting untuk membantu mengkomunikasikan setiap informasi dari Kemendikbud kepada seluruh masyarakat Indonesia, seperti diungkapkan demikian:

“Pertama karena semua kebijakan, program, kegiatan itu didedikasikan untuk rakyat. Tugas Humas menyampaikan kebijakan, program, kegiatan itu. Kalau tidak dibantu oleh media, itu tidak sampai. Dan kalau mau disampaikan sendiri oleh pemerintah itu sangat amat mahal sekali, misalnya melalui iklan, melalui sosialisasi ke daerah-daerah, ngga sanggup seluruh Indonesia. Tapi dengan berhubungan baik dengan wartawan, wartawan menulis, besoknya sudah tersebar.” (HI, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud)

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara Humas Kemendikbud dan media massa sehingga proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimal.

1.2 Permasalahan

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai pemberitaan terkait kebijakan dan program Kemendikbud banyak diberitakan di berbagai media massa nasional maupun lokal, sebut saja mengenai Ujian Nasional, penerimaan siswa/mahasiswa baru, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rehabilitasi sekolah, sertifikasi guru, program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), klaim budaya Indonesia oleh negara lain, serta perubahan struktur Kemendikbud sendiri, dari yang semula bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)

menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pemberitaan yang ada tentu tidak terus-menerus bernada positif. Tak jarang wartawan pun menulis pemberitaan-pemberitaan yang bernada negatif, dalam artian pemberitaan yang ditulis bersifat mengkritik berbagai kekurangan, kelemahan serta kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kebijakan Kemendikbud tanpa secara berimbang memperlihatkan sisi positif dari pelaksanaan program dan kebijakan tersebut. Beberapa contoh pemberitaan negatif tentang Kemendikbud adalah mengenai keterlambatan penyaluran dana BOS di beberapa daerah selama tahun 2011 yang dimuat dalam kompas.com dengan judul “Kusutnya Penyaluran Dana BOS” (Akuntono, 2011), serta pemberitaan mengenai kegagalan Program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang dimuat dalam mediaindonesia.com dengan judul berita “Pemerintah Tidak Serius Kelola RSBI?” (Admin, 2011).

Pemberitaan yang cenderung bernada negatif tersebut pada akhirnya akan sangat rentan dalam membentuk opini publik yang kurang baik terhadap Kemendikbud. Untuk itu, menjadi penting bagi Humas Kemendikbud untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak media, terutama wartawan, bukan semata-mata untuk mendapatkan pelayanan yang istimewa dari pihak media, melainkan untuk menciptakan hubungan yang profesional dan dinamis, di mana wartawan diharapkan dapat memberikan pemberitaan yang berimbang dan tidak semata-mata menyudutkan Kemendikbud.

Dalam sebuah penelitian berjudul “*Media or Personal Relations? Exploring Media Relations Dimensions in South Korea*”, Samsup & Yungwook (2004) menemukan bahwa hubungan yang baik dengan pihak wartawan akan memberikan pengaruh positif terhadap citra sebuah lembaga (p.300). Lebih lanjut, dalam temuannya dijelaskan bahwa hubungan yang baik akan melahirkan loyalitas dan kostumer yang loyal. Dengan demikian, jika lembaga tersebut melakukan sebuah kesalahan, maka wartawan akan melihat kesalahan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima. Sebaliknya, lembaga yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan wartawan akan diperlakukan secara ketat, dalam artian, sebuah berita yang sepele sekalipun akan dapat diubah oleh

wartawan menjadi sebuah pemberitaan buruk bagi lembaga tersebut. Dalam hal ini, hubungan personal memainkan peranan penting dalam meminimalisasi pemberitaan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bagaimana pentingnya *media relations* yang dijalankan oleh humas pemerintah dalam menyebarkan informasi seputar kebijakan pemerintah, sekaligus membantu menciptakan citra lembaga pemerintah yang positif di mata masyarakat. Namun demikian, masih banyak anggapan negatif yang ditujukan pada humas pemerintah dan aktivitas *media relations* yang dilaksanakannya. Humas di lembaga pemerintah, termasuk di Kemendikbud, kerap dianggap tidak berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan *media relations* di lembaganya, terutama dalam membantu wartawan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan untuk pembuatan sebuah berita, seperti diungkapkan salah seorang wartawan berikut :

“Tapi kalau aku pribadi, mendingan ngga usah pakai Humas karena Humas itu bikin ribet. Ribetnya itu Humas di sebagian besar lembaga pemerintah, termasuk di Kemendikbud, itu tidak berfungsi profesional.” (AL)

Permasalahan lainnya yang muncul dalam hubungan antara humas dengan wartawan adalah adanya perbedaan persepsi di antara kedua pihak terkait pelaksanaan fungsi dan kegiatan *media relations*. Vivi Andari (2002), merancang sebuah penelitian tentang *media relations* yang berfokus pada bagaimana jenis pekerjaan mempengaruhi persepsi wartawan dan praktisi Humas mengenai pelaksanaan fungsi dan kegiatan *media relations*. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini menemukan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh terhadap persepsi mengenai pelaksanaan fungsi kegiatan *media relations*, di mana wartawan dan praktisi Humas memiliki perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan fungsi kegiatan *media relations* yang pada akhirnya menghambat kerjasama yang baik di antara kedua pihak sehingga hubungan keduanya dinilai tidak harmonis.

Permasalahan-permasalahan di atas pada akhirnya dapat memicu konflik dan keretakan hubungan di antara kedua pihak tersebut. Padahal Humas dan wartawan serta media massa idealnya memiliki hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Terkait hal itu, peneliti terdorong untuk menggali

lebih dalam mengenai pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud. Penelitian ini juga menjadi penting untuk diteliti mengingat keberadaan Kemendikbud sebagai kementerian negara dengan alokasi APBN terbesar di Indonesia. Peneliti berasumsi, dengan anggaran yang besar, maka jumlah kebijakan dan program kegiatan yang dimiliki Kemendikbud pun tentu besar, sehingga berdampak pada intensitas kegiatan *media relations* yang tinggi pula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana kementerian dengan alokasi APBN terbesar di Indonesia melaksanakan *media relations* di lingkungan kementerianya dalam mensosialisasikan berbagai program dan kebijakan sebagai wujud pertanggungjawaban kementerian kepada masyarakat.

Selain itu, peneliti juga mengambil pelaksanaan *media relations* di lembaga pemerintah, yaitu Kemendikbud, sebagai fokus utama dalam penelitian ini sebab kebanyakan dari studi mengenai Humas lebih berfokus pada komunikasi yang dibangun oleh Humas dalam organisasi bisnis, sedangkan hubungan komunikasi yang dibangun oleh Humas di sektor publik, salah satunya lembaga pemerintah, dikesampingkan meskipun menghadapi permasalahan yang tidak kalah unik (Laursen & Valentini, 2010, p.1).

Pada penelitian ini, peneliti membatasi objek penelitian hanya pada pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud periode bulan Juli – Desember 2011, di mana peneliti melihat bagaimana pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud dalam masa normal (*business as usual*) dan bukan pelaksanaan *media relations* dalam masa krisis. Batasan tersebut diberikan agar penelitian ini lebih terarah, sekaligus menghindari pembahasan yang terlalu luas.

Terkait dengan beberapa poin di atas, peneliti kemudian merumuskan sebuah permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

“Bagaimana pelaksanaan *media relations* yang dilakukan oleh Humas Kemendikbud dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan turunan terkait permasalahan di atas, antara lain :

1. Bagaimana peran humas dalam pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud?
2. Apa saja kegiatan *media relations* yang dilaksanakan oleh Humas Kemendikbud?
3. Bagaimana akses informasi yang diberikan oleh Humas Kemendikbud bagi wartawan yang meliput di lingkungan Kemendikbud?
4. Bagaimana fasilitas peliputan yang disediakan oleh Humas Kemendikbud bagi wartawan yang meliput di lingkungan Kemendikbud?
5. Bagaimana tanggapan humas terhadap pemberitaan negatif seputar Kemendikbud yang ditulis oleh wartawan?
6. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan *media relations* antara Humas Kemendikbud dan wartawan di lingkungan Kemendikbud?
7. Apa saja pendukung dalam pelaksanaan praktik *media relations* antara Humas Kemendikbud dan wartawan di lingkungan Kemendikbud?

1.4 Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang megacu kepada pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas, yaitu untuk:

1. Mengetahui peran humas dalam pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud.
2. Mengetahui kegiatan *media relations* yang dilaksanakan oleh Humas Kemendikbud

3. Mengetahui akses informasi yang diberikan oleh Humas Kemendikbud bagi wartawan yang meliput di lingkungan Kemendikbud
4. Mengetahui fasilitas peliputan yang disediakan oleh Humas Kemendikbud bagi wartawan yang meliput di lingkungan Kemendikbud
5. Mengetahui tanggapan humas terhadap pemberitaan negatif seputar Kemendikbud yang ditulis oleh wartawan
6. Mengetahui hal-hal yang menghambat pelaksanaan *media relations* antara humas dan wartawan di lingkungan Kemendikbud.
7. Mengetahui hal-hal yang mendukung pelaksanaan *media relations* antara humas dan wartawan di lingkungan Kemendikbud.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian ilmiah humas dalam Ilmu Komunikasi, khususnya mengenai *media relations* dan upaya membangun serta membina hubungan yang baik antara lembaga pemerintah dengan media massa. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian sejenis yang terdahulu, sekaligus dapat membuka jalan bagi berbagai penelitian lanjutan yang secara khusus memberikan penjelasan baru mengenai pentingnya lembaga pemerintah membangun hubungan baik dengan media massa.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Humas Kemendikbud dalam merumuskan kembali dan mengoptimalkan fungsi *media relations* yang telah dijalankan selama ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pihak wartawan dan media massa, sehingga meminimalisasi terjadinya

konflik dalam hubungan profesionalitas keduanya. Selain itu, informasi ini juga dapat dijadikan acuan bagi wartawan yang bertugas di Kemendikbud dalam membina hubungan baik dengan Humas Kemendikbud dalam rangka mendukung aktivitas jurnalismenya.

1.5.3 Signifikansi Sosial

Dalam tataran sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana humas di lembaga pemerintah, khususnya kementerian, melaksanakan praktik *media relations* dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian kepada masyarakat luas melalui perantara wartawan dan media massa. Lembaga pemerintah sebagai sebuah institusi sosial diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam melaksanakan praktik *media relations* yang lebih optimal agar penyebaran informasi berupa program dan kebijakan lembaga kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat terhadap setiap program dan kebijakan tersebut semakin meningkat sehingga pelaksanaan program dan kebijakan tersebut pun dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 *Media Relations*

Humas, dalam hemat Jefkins (2004), merupakan sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (p.9). Komunikasi ke dalam merujuk pada komunikasi yang dilakukan praktisi humas kepada publik internalnya, yaitu kepada para karyawan perusahaannya, sedangkan komunikasi ke luar merujuk pada komunikasi yang dilakukan praktisi humas kepada publik eksternalnya, yaitu pihak-pihak yang berada di luar perusahaan namun memiliki pengaruh bagi kelangsungan aktivitas perusahaan. Menjalin hubungan baik dengan media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi ke luar yang dilakukan oleh praktisi humas. Inilah yang dikenal dengan sebutan *media relations*.

Yosal Iriantara (2005) mengartikan *media relations* sebagai bagian dari *public relations* (PR) eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan organisasi (p.32). Sedangkan menurut Frank Jefkins (2004), *media relations* merupakan usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (p.113). Dengan adanya penyebaran informasi yang akurat dan memadai, diharapkan pemberitaan yang simpang siur dapat dihindari dan dapat terbentuk citra yang positif terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Jefkins (2004, p.19) mengungkapkan demikian :

“Citra tidak selamanya mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya atas sesuatu hal karena citra semata-mata berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan demikian, informasi yang benar, akurat, lengkap, memadai dan tidak

memihak benar-benar penting bagi munculnya citra yang tepat. Variasi informasi mengakibatkan variasi citra walaupun subyek yang terlibat sama.”

Lebih lanjut mengenai tujuan dilakukannya *media relations*, terdapat sekurang-kurangnya 5 tujuan utama *media relations* menurut Wardhani (2008), antara lain : (1) untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah lembaga/organisasi yang baik untuk diketahui umum; (2) untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, objektif dan seimbang/*balance*) mengenai hal-hal yang menguntungkan lembaga/organisasi; (3) untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan lembaga/organisasi; (4) untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan lembaga/organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian (*assesment*) secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga/perusahaan; serta (5) mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati (p.13).

Inti dari hubungan dengan media massa adalah proses memberi dan melayani, bukannya meminta sesuatu kepada kalangan pers (Anggoro, 2000, p.173). Oleh karena itu, dalam menjalankan praktik *media relations* tersebut, hendaknya para praktisi humas memperhatikan beberapa prinsip berikut (Jefkins, 2004, p.101) :

- **Memahami dan melayani media**

Seorang praktisi humas harus memiliki pengetahuan mengenai cara memahami dan melayani media, sehingga dapat menjalin kerja sama dengan pihak media/pers dan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

- **Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya**

Praktisi humas harus selalu siap menyediakan atau memasok materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja. Ini terkait dengan pekerjaan manajer humas sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media

massa (Jefkins, 2004, p.33). Dengan cara ini humas akan dinilai sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh media.

- **Menyediakan salinan yang baik**

Menyediakan salinan yang baik dapat dilakukan dengan menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik, dan jelas.

- **Bekerja sama dalam penyediaan materi**

Sebagai contoh, seorang praktisi humas dan pers dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara atau jumpa pers dengan tokoh-tokoh tertentu.

- **Menyediakan fasilitas verifikasi**

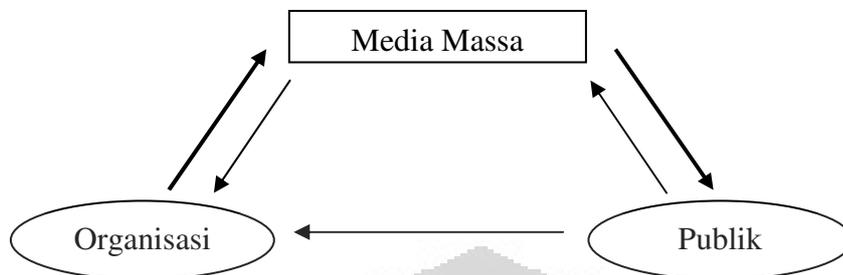
Praktisi humas perlu memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk melakukan verifikasi (pembuktian kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contohnya, yaitu dengan mengizinkan para wartawan untuk langsung melihat fasilitas atau kondisi organisasi yang hendak diberitakan, meskipun memang tidak semua organisasi atau perusahaan mengizinkan wartawan untuk mengetahui seluruh “isi perut” perusahaan.

- **Membangun hubungan personal yang kokoh**

Hubungan personal yang kokoh akan tercipta dan terpelihara jika dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, dan sikap saling menghormati profesi masing-masing. Hubungan baik itu juga perlu dibangun dengan landasan profesionalisme masing-masing.

Sebagai mitra kerja yang strategis, seorang praktisi humas tidak hanya mengemban tugas untuk menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan media massa dalam arti organisasinya, melainkan juga media dalam arti personal, yaitu wartawan-wartawan yang tergabung di dalamnya. Komunikasi yang dibangun dengan pihak wartawan tersebut hendaknya bersifat dua arah dan dilakukan secara berkesinambungan, mengingat opini publik bersifat sangat dinamis, di mana dapat berubah-ubah seiring dengan informasi yang diberitakan

oleh pihak media. Berikut merupakan gambaran sederhana dari arus komunikasi dalam praktik *media relations* (Iriantara, 2005, p.31) :



Gambar 2.1
Arus komunikasi dalam praktik *media relations*

Dari bagan di atas dapat dilihat bagaimana arus komunikasi yang terbentuk antara organisasi, media massa dan publik. Garis tipis memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh publik, sedangkan garis tebal memperlihatkan arus komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Dalam bagan di atas, tergambar bahwa media berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publik. Organisasi dapat menyampaikan informasi-informasinya kepada publik melalui media massa. Publik pun menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya kepada suatu organisasi melalui media massa. Meskipun terkadang publik memiliki akses langsung untuk menyampaikan aspirasinya kepada organisasi, namun penyampaian aspirasi melalui media massa cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar dan lebih kuat mengingat kemampuan media massa yang besar dalam mempengaruhi opini publik dan citra suatu organisasi.

Menurut Pat Bowman & Nigel Ellis, jika praktisi humas ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang suatu hal, maka ia harus dapat menginterpretasikan media (Andari, 2002). Demikian pula jika praktisi humas ingin menyampaikan suatu hal atau isu kepada masyarakat, media adalah sarana utamanya. Hal tersebut, secara tidak langsung, telah menempatkan media sebagai barometer untuk mengukur kecenderungan baik-buruknya citra suatu organisasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat.

2.1.1 Kegiatan *Media Relations*

Praktik *media relations* tidak hanya sekedar berupa memiliki hubungan yang baik dengan pihak media massa secara organisasional maupun personal, seperti melalui penyelenggaraan acara formal (*press conference, press tour, press briefing, press interview*) dan acara informal (*press gathering, press reception*). Lebih daripada itu, banyak hal-hal teknis lainnya yang juga menjadi bagian dari praktik *media relations*. Dalam buku “*Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*”, dijelaskan bahwa praktik *media relations* mencakup teknik pembuatan produk-produk publikasi, informasi dan berita dalam bentuk seperti *Press Release, Photo Press, News Letter, News, Featuris, Video Release, PR Advertising, PR Writing, Company Profile, Annual Report Publication*, yang konsekuensinya pihak praktisi humas harus memiliki kemampuan dalam bidang tulis-menulis berita, melalui penguasaan teknik-teknik penulisan wartawanik, dan sebagai presenter, yaitu sebagaimana dikenal pembuatan berita dengan formula 5W+1H, struktur kalimat berita yang mengacu pada cara penulisan “piramida terbalik”, sistematis, logis, singkat, dan padat, serta *press clear* lain sebagainya (Ruslan, 2001, p.160-163).

Dalam buku yang berjudul *Press Relations: Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, dijelaskan beberapa kegiatan pokok *media relations*, antara lain (Abdullah, 2001, p.80-97):

1. Penyebaran Siaran Pers

Siaran pers biasanya disebut juga dengan *press release*. Kegiatan pembuatan dan penyebaran siaran pers merupakan kegiatan *media relations* yang paling efisien. Lembaga atau individu yang menyebarkannya tak perlu repot membentuk panitia, menyediakan konsumsi, sewa tempat, menyediakan alat, dan lain-lain. Siaran pers biasanya berupa lembaran siaran berita mengenai suatu peristiwa yang terkait dengan organisasi tertentu, yang disebarkan kepada wartawan atau media massa.

2. Konferensi Pers atau Jumpa Pers

Konferensi pers atau jumpa pers merupakan satu kegiatan *media relations* yang paling dikenal, selain penyebaran siaran pers. Jumpa pers biasanya dilakukan menjelang, menghadapi, ataupun setelah terjadi peristiwa atau kegiatan penting dan besar. Kelebihan kegiatan ini dibanding siaran pers adalah pada aspek diskusi atau tanya jawab.

3. Kunjungan Pers

Kunjungan pers, atau terkadang disebut *press tour*, dilakukan dengan mengajak kalangan wartawan untuk berkunjung ke suatu lokasi, baik yang berada di lingkungannya, maupun ke tempat atau lokasi yang memiliki kaitan erat dengan kiprah lembaga tersebut. Hasil laporan jurnalistik yang dibuat oleh wartawan dari kunjungan pers tersebut, selain bermanfaat sebagai kegiatan kehumasan, juga bermanfaat sebagai ajang promosi perusahaan.

4. Resepsi Pers

Resepsi pers adalah mengundang insan media massa dalam sebuah resepsi atau acara yang khusus diselenggarakan untuk para pemburu berita. Acaranya bisa berupa makan siang bersama, atau makan malam yang dilanjutkan dengan acara hiburan. Kegiatan ini merupakan acara untuk mempererat hubungan antara humas dengan media massa.

5. Peliputan Kegiatan

Acara-acara yang diliput wartawan bisa bersifat massal, seperti pembukaan pameran, seminar, pelatihan, diskusi panel, wisuda, pertandingan olahraga, pergelaran kesenian, dan lain-lain. Untuk memudahkan pekerjaan wartawan, biasanya disediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh rekan pers, yang seringkali berbentuk *press kit* di mana di dalamnya dapat dimasukkan bingkisan atau kenang-kenangan yang ingin diberikan kepada wartawan.

6. Wawancara Pers

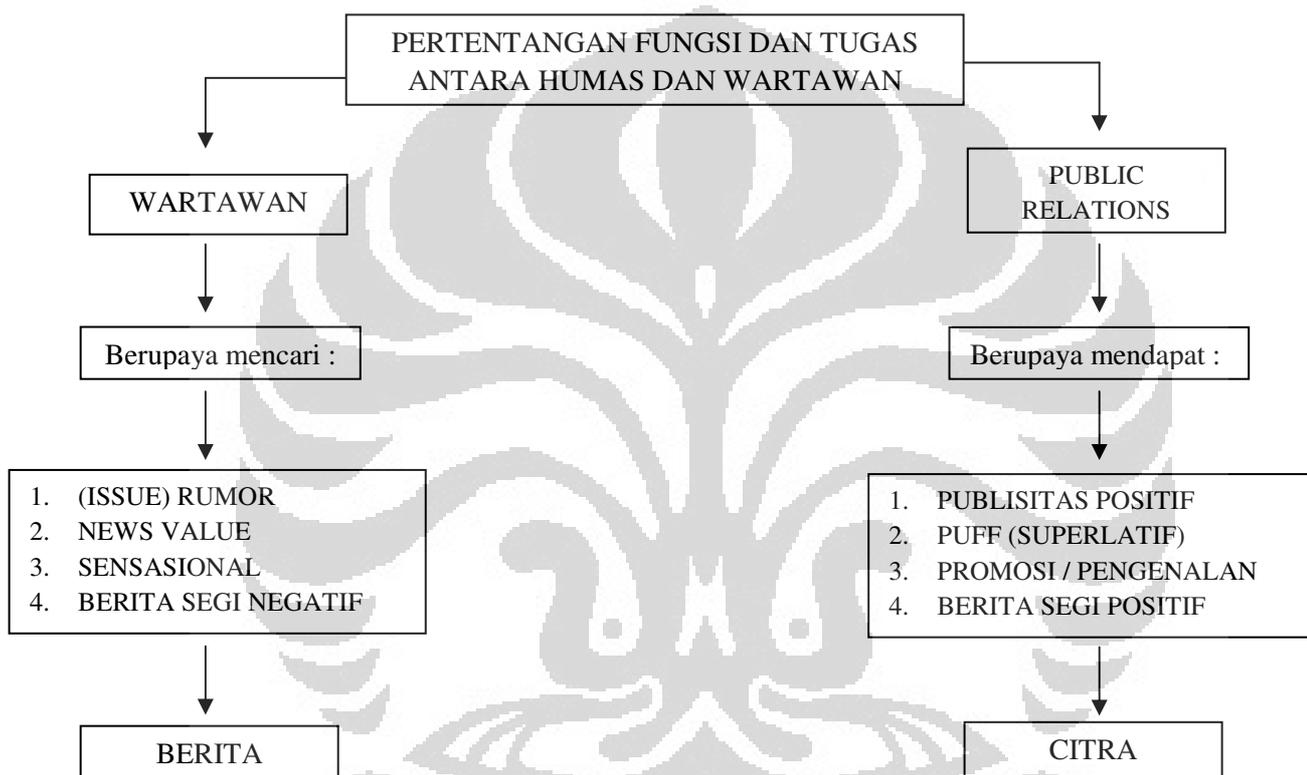
Wawancara pers datang dari inisiatif media massa. Wawancara yang berlangsung dapat berupa wawancara yang dipersiapkan maupun wawancara spontan.

Selain enam kegiatan di atas, kegiatan lainnya yang juga tidak kalah penting untuk menjalin hubungan media adalah kunjungan Humas ke kantor media massa itu sendiri, atau yang sering disebut dengan *media visit*. Selain untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang dimiliki pemerintah, kunjungan ke kantor redaksi media juga dapat dimanfaatkan untuk membangun maupun mempererat silaturahmi antara humas dan lembaganya dengan media secara keseluruhan (Hutabarat, 1993, p.89-90).

2.1.2 Hubungan Humas dengan Wartawan

Berbicara mengenai hubungan humas dan media massa tak bisa dilepaskan dengan hubungan humas dengan wartawan, sebab media massa hanyalah sebuah organisasi; media massa dapat berjalan karena digerakkan oleh pihak-pihak di dalamnya, salah satunya oleh wartawan sebagai pihak yang berperan besar dalam menghasilkan berita-berita yang dimuat atau disiarkan oleh media massa. Praktisi humas tentu berharap agar adanya hubungan baik dengan wartawan dapat membantu menghasilkan pemberitaan yang positif seputar organisasinya, mengingat hasil temuan Samsup & Yungwook (2004) secara jelas memperlihatkan bahwa hubungan yang baik dengan pihak wartawan akan memberikan pengaruh positif terhadap citra sebuah lembaga (p.300). Namun menurut DeFleur dan Dennis, praktisi humas dan organisasinya seringkali mengalami hambatan dalam memperoleh pemberitaan yang positif dari pihak media. Halangan yang pertama adalah karena media massa merupakan entitas independen yang memiliki tujuan sendiri yang dapat berkonflik dengan pencari publisitas, dan halangan yang kedua adalah adanya kompetisi yang hebat untuk mendapatkan ruang serta waktu yang terbatas dalam media (DeFleur & Dennis, 1998, p.356).

Pihak media pun seringkali enggan dengan mudah memberikan pemberitaan yang positif mengenai suatu organisasi karena merasa apa yang mereka harap mereka dapatkan pada kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh praktisi Humas dan organisasi yang diwakilinya. Kondisi tersebut pada akhirnya sering menimbulkan konflik dan pertentangan di antara pihak Humas dan wartawan. Pertentangan antara pihak Humas dan wartawan secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut (Ruslan, 2008, p.161) :



Gambar 2.2
Pertentangan Fungsi dan Tugas Antara Humas dan Wartawan

Dari bagan di atas terlihat bahwa pada dasarnya, kegiatan humas dan wartawan mempunyai tujuan akhir yang berbeda, di mana humas bertujuan membentuk citra yang positif bagi organisasinya, sementara wartawan bertujuan menghasilkan berita yang memiliki *news value*. Untuk mendapatkan pencitraan yang positif, humas tentu membutuhkan pemberitaan yang positif. Di sisi lain, wartawan tidak selalu membutuhkan berita yang positif untuk menghasilkan

berita yang memiliki *news value*. Seringkali, berita negatif pun dapat menjadi sebuah berita yang bernilai tinggi bagi wartawan; inilah yang sering dikenal dengan istilah "*bad news is good news*".

Meskipun dalam bagan di atas diperlihatkan bagaimana pertentangan yang terjadi antara humas dan wartawan, namun tak dapat dipungkiri pula bahwa pada kenyataannya, wartawan membutuhkan orang-orang humas sebagaimana orang-orang humas juga membutuhkan wartawan sebab keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi (Parsons, 2008, p.90). Menurut DeFleur dan Dennis (1998), praktisi humas dan wartawan merupakan dua pihak yang memiliki kesalingtergantungan satu sama lain, atau yang mereka sebut dengan istilah "*mutual dependency*" (p.356). Bagi humas, wartawan dan media massa merupakan mitra yang sangat membantu dalam menyebarkan informasi organisasi kepada masyarakat luas (Clear & Weideman, 2004, p.20). Media massa dapat dikatakan sebagai penjaga gerbang atau penyaring tempat praktisi humas menjangkau publik umum dan kelompok lainnya yang dukungannya dibutuhkan (Latimore et al., 2010, p.200). Sedangkan bagi wartawan sendiri, humas merupakan sumber informasi yang mampu membuat pekerjaan wartawan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu, di samping mampu menyediakan informasi yang belum tersedia (Baskin, Aronoff & Lattimore, 1997, p.199-200).

Agar hubungan kemitraan dengan wartawan dan media massa dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan, humas perlu menerapkan kiat dan strategi bekerja sama dalam merancang produk-produk publikasi sehingga mampu menarik perhatian media massa (Ruslan, 2008, p.154). Disebutkan bahwa praktisi humas harus terlebih dahulu menguasai berbagai teknik dan kemampuan dasar dalam menulis naskah kehumasan (*PR Writing Skill*) seperti pembuatan *press release/ news release* yang mengandung unsur nilai berita (*news value*) yang tinggi. Ketidakmampuan praktisi humas dalam membuat *press release* seringkali dikritik wartawan dan menimbulkan konflik di antara keduanya.

Menurut Jethwaney, Varma, dan Sarkar (1994), ada tujuh poin penting yang diharapkan media massa dari Humas, antara lain : (1) media mengharapkan informasi yang terbaru dari humas dan eksekutif sebuah organisasi; (2) reporter

mengharapkan tidak ada yang disembunyikan dari mereka; (3) eksekutif, yang merepresentasikan organisasi, diharapkan memberikan informasi lebih cepat dari sumber lainnya; (4) surat kabar berjuang dengan sungguh-sungguh untuk memasukkan muatan berita sebanyak mungkin dengan ruang yang terbatas. Oleh karena itu, tidak bijak memberikan detail yang tidak menarik bagi pembaca; (5) pemikiran yang sungguh-sungguh dan jelas jenis informasi apa yang akan diberikan kepada media: apakah akan memberikan berita, latar belakang, atau informasi untuk *feature*; serta (6) penyediaan gambar grafik, atau diagram yang berhubungan dengan organisasi dan dibutuhkan oleh media (p.95-97).

Selain itu, untuk menghindari pertentangan-pertentangan yang seringkali terjadi antara humas dan wartawan, keduanya dapat mengembangkan hubungan yang berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan serta menghargai tugas dan peran masing-masing, juga bertindak sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Beberapa prinsip hubungan pers yang positif, antara lain (Ruslan, 2008, p.157) :

1. Sikap yang terus terang, ramah tetapi tetap tegas dan konsekuen serta profesional.
2. Saling memahami fungsi, kewajiban dan tugas profesi yang diemban serta ketertarikan pada kode etik profesi masing-masing.
3. Saling mengenal baik, cukup akrab antara kedua belah pihak baik secara individual maupun fungsional, namun tetap menjaga jarak demi terciptanya ketertiban dan kerahasiaan lembaga/perusahaan.
4. Kenali Pemimpin Redaksi (Pemred), Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred), Redaktur Pelaksana (Redpel), Redaktur Halaman dan reporter yang bertugas di setiap bidang liputannya.
5. Meminta kartu nama. Biasanya setiap wartawan resmi dilengkapi dengan kartu PWI, kartu pers, dan kartu nama pihak pengelola media (penerbit).
6. Tidak menutup saluran informasi dan komunikasi pada saat perusahaan/lembaga atau humas menghadapi isu negatif.

7. Menerima kedatangan wartawan dalam peliputan, konfirmasi berita, wawancara dan sebagainya dalam batas yang wajar tanpa menunjukkan sikap ragu-ragu atau kecurigaan.
8. Melayani permintaan *interview* dengan sebaik-baiknya, termasuk permintaan *interview* mendadak dengan catatan segala sesuatunya dipersiapkan dan dievaluasi terlebih dahulu dengan membedakan informasi yang pantas dan tidak pantas untuk dipublikasikan.
9. Mengirim kartu ucapan selamat, baik kepada individu maupun lembaga penerbit pada saat ulang tahun, Lebaran, Tahun Baru, Natal, dan lain-lain sebagai bentuk perhatian untuk hubungan yang lebih baik.
10. Pemberian iklan *goodwill*, yaitu iklan secara insidental di luar iklan promosi (komersial). Misalnya iklan layanan masyarakat yang bekerja sama dengan media massa bersangkutan. Selain itu, humas dan media massa juga dapat melakukan bentuk kerjasama lain, seperti misalnya dalam menanggulangi bencana alam, kepedulian lingkungan dan pelestarian alam sebagai upaya untuk menarik simpati dan empati dari berbagai pihak.
11. Membangun suatu proyek publikasi atau promosi bersama dengan pihak media elektronik atau media cetak melalui *coverage* televisi atau penulisan artikel/featuris tentang produk atau jasa yang ingin dikampanyekan secara efektif melalui kerjasama antara humas dan pers.

Agar hubungan yang terjalin semakin baik, praktisi humas perlu melihat wartawan sebagai mitra kerja. Dengan memosisikan wartawan sebagai mitra, maka posisi antara praktisi humas dan wartawan adalah setara (Iriantara, 2005, p.18). Dengan begitu, diharapkan kepercayaan kerja wartawan terhadap praktisi humas dapat terbentuk, begitu pula sebaliknya.

2.2 Humas Pemerintah

Dalam buku “*Public Relations Profesi dan Praktik*” dijelaskan bahwa humas merupakan sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan organisasi (Lattimore et al., 2010, p.4). Secara lebih terperinci, pakar humas internasional, Cutlip, Center dan Canfield, menjelaskan berbagai 5 fungsi utama humas dalam sebuah lembaga, antara lain : (1) menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama; (2) membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran; (3) mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya; (4) melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama; serta (5) menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Ruslan, 2008, p.19).

Begitu vitalnya fungsi yang diemban oleh humas telah melahirkan kebutuhan tersendiri akan profesi humas di setiap organisasi, termasuk di lembaga pemerintah. Di samping kelima fungsi penting di atas, humas juga mengemban dua peranan mendasar dalam sebuah lembaga, antara lain (Theaker, 2004, p.57-58) :

1. Teknisi Komunikasi (*The Communication Technician*)

Peran sebagai teknisi komunikasi menuntut keterampilan yang tinggi dari seorang humas untuk melaksanakan program dan aktivitas komunikasi seperti menulis rilis berita, mengedit *in-house magazine* serta mengembangkan *website* organisasi. Peranan ini juga terkait dengan peran humas dalam menentukan mekanisme komunikasi yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2. Manajer Komunikasi (*The Communication Manager*)

Peranan ini menempatkan humas sebagai pihak yang merencanakan, mengelola dan memfasilitasi program komunikasi, memberikan nasihat kepada manajemen, serta membuat keputusan kebijakan. Peran sebagai manajer komunikasi memiliki beberapa peran turunan lainnya, yaitu :

a. Penasihat Ahli (*The Expert Prescriber*)

Sebagai penasihat ahli, humas melakukan penelitian dan menentukan permasalahan-permasalahan humas, mengembangkan program komunikasi dan mengimplementasikannya bersama dengan bagian-bagian lain dalam sebuah organisasi. Humas harus sangat berhati-hati dalam menjalankan peran ini sebab peran sebagai penasihat ahli seringkali menjadikan praktisi humas terlalu percaya diri (*overconfident*) dan menganggap dirinya sebagai pemegang wewenang yang besar dengan pengetahuan yang eksklusif.

b. Fasilitator Komunikasi (*The Communication Facilitator*)

Dalam hal ini, humas berperan dalam menginterpretasi, memediasi dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya. Humas juga menjadi perwakilan organisasi yang dipercaya oleh para *stakeholder* dan juga organisasinya, serta bertindak untuk kepentingan bersama. Sebagai fasilitator komunikasi, humas berusaha menghilangkan batasan-batasan dan menciptakan hubungan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Basis dari peran ini adalah *mutual understanding* untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang menguntungkan semua pihak.

c. Fasilitator Pemecahan Masalah (*The Problem-Solving Facilitator*)

Dalam peran ini, humas bekerja bersama bagian lain dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan-

permasalahan organisasi. Humas terlibat dalam berbagai keputusan strategis, mulai dari menentukan tujuan-tujuan, menetapkan kebutuhan komunikasi, hingga memberikan saran dalam pengimplementasian program-program organisasi. Sebagai fasilitator pemecahan masalah, humas dituntut untuk memiliki keterampilan dalam membantu pihak lain menganalisis dan menemukan solusi, serta terkadang diundang untuk terlibat dalam koalisi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

Humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat (Rachmadi, 1996, p.77). Saat ini hampir setiap lembaga pemerintah di pusat maupun daerah memiliki petugas humas. Kedudukan petugas humas dalam lembaga pemerintah pun berbeda-beda, ada yang baru memiliki bagian yang menjalankan fungsi humas, namun ada pula yang sudah memiliki bagian humas dalam struktur kelembagaannya. Ada dua alasan penting mengapa lembaga pemerintah perlu melaksanakan kegiatan kehumasan, antara lain (Sularso, 2006, p.27) :

1. Pemerintah yang demokratis wajib melaporkan kegiatannya kepada warga negaranya. Apabila pemerintah tidak memberitahu maka publik akan bertanya kepada lembaga yang tidak berkompetensi dan informasi yang diperoleh dapat dipastikan tidak akurat sehingga merugikan pemerintah.
2. Pelaksanaan pemerintah yang efektif senantiasa memerlukan partisipasi dan dukungan aktif warga negaranya.

Selain kedua alasan tersebut, humas juga menjadi penting bagi lembaga pemerintah mengingat beberapa fungsi pokok yang dimiliki humas dalam mendukung kinerja suatu lembaga pemerintah, antara lain : (1) mengamankan kebijaksanaan pemerintah; (2) memberikan pelayanan, dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat; (3) menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang produktif dalam menjembatani kepentingan instansi

pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya; serta (4) berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Ruslan, 2008, p.340).

Humas pemerintah merupakan subsistem dari sistem penerangan secara keseluruhan dan merupakan bagian dari kegiatan komunikasi sosial (Rachmadi, 1996, p.79). Berbeda dengan humas di organisasi swasta/ komersil yang berorientasi *profit-making*, humas di lembaga pemerintah lebih mengarahkan kegiatannya untuk meraih kepercayaan dan dukungan nyata masyarakat dalam rangka menyukseskan berbagai kebijakan pembangunan yang ditetapkannya. Kepercayaan dan dukungan tersebut akan dapat tumbuh jika masyarakat mengetahui dengan jelas setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, humas lembaga pemerintah bertugas untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat mengenai langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah agar masyarakat memahami dan dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Lebih khusus, tugas humas lembaga pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut (Rachmadi, 1996, p.78):

1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif.
2. Memberi bantuan kepada media berita (*news media*) berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan.

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri maupun khalayak luar negeri.
4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk *feedback* kepada pimpinan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan sebagai *input*.

Pada praktiknya, peran yang dijalankan oleh humas di lembaga pemerintah menyangkut dua hal utama, yaitu peran secara taktis dan secara strategis. Secara taktis (jangka pendek), humas berupaya memberikan pesan dan informasi kepada masyarakat sebagai target sarasannya melalui komunikasi dua arah untuk mempengaruhi opini masyarakat, sedangkan secara strategis (jangka panjang), humas berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui pemberian ide, saran dan gagasan guna menyukseskan program pembangunan nasional lembaga pemerintah sehingga tercipta citra atau opini masyarakat yang positif terhadap lembaga pemerintah (Ruslan, 2008, p.344).

2.3 Media Massa

Penyebarluasan informasi mengenai kebijakan sebuah lembaga pemerintah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan media massa atau pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dijelaskan bahwa media massa atau pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lembaga atau organisasi media massa itu sendiri digerakkan oleh sekelompok orang yang memegang jabatan fungsional sebagai wartawan, dengan jabatan struktural yang beragam, mulai di pimpinan umum,

pemimpin redaksi, sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, koordinator liputan, reporter, dan lain sebagainya.

Media massa memiliki fungsi strategis bagi masyarakat atau khalayak, yaitu fungsi menyiarkan info (*to inform*), fungsi mendidik (*to educate*), fungsi menghibur (*to entertain*), dan fungsi mempengaruhi (*to influence*) (Effendy, 1994, p.150). Fungsi mempengaruhi (*to influence*) merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh media massa, yang seringkali dikaitkan dengan fungsi *agenda setting*. Douglas Carter, pengarang buku *The Fourth Branch of Government*, menjelaskan fungsi *agenda setting* pers sebagai berikut (Lattimore et al., 2010, p.201) :

“Kekuatan esensial dari pers adalah terkait dengan kapasitasnya dalam memilih apa yang menjadi berita. Setiap hari di kota Washington, ada puluhan ribu kata diucapkan yang dianggap penting oleh mereka yang mengucapkannya. Ada ratusan peristiwa terjadi setiap hari dan peristiwa tersebut dianggap layak untuk diberitakan oleh mereka yang mengadakannya. Pers mempunyai kekuatan untuk memilih – memutuskan peristiwa mana yang akan ditempatkan di halaman pertama atau yang akan menjadi berita utama TV dan berita mana yang diabaikan.”

Kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi berita itu jugalah yang pada akhirnya membuat banyak praktisi humas dari berbagai perusahaan berlomba-lomba menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Dengan hubungan yang baik tersebut, diharapkan media massa dapat memberikan publikasi yang positif dan berimbang terhadap perusahaan tersebut sehingga dapat menumbuhkan citra positif perusahaan tersebut di mata publiknya melalui berita-berita yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardhani (2008) yang menyebutkan bahwa bagi organisasi, media massa mempunyai peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada khalayak untuk mendapatkan pencitraan yang baik (p.7).

Lebih lanjut, Harold D. Laswell dan Charles Wright menyebutkan ada 4 fungsi sosial yang dimiliki oleh media massa, antara lain (Naina et al., 2008, p.461):

1. Pengamatan sosial (*social surveillance*)

Fungsi pengamatan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang obyektif oleh media massa seputar berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan melakukan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Korelasi sosial (*social correlation*)

Fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian informasi dan interpretasi oleh media massa, yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain, atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.

3. Sosialisasi (*socialization*)

Fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi atau kelompok ke generasi atau kelompok lainnya yang dilakukan oleh media massa.

4. Hiburan (*entertainment*)

Fungsi hiburan merujuk pada upaya yang dilakukan media massa untuk memberikan informasi dalam berbagai variasi berita yang bertujuan untuk memberikan hiburan (yang sehat) dan kesenangan bagi masyarakat.

Selain keempat fungsi sosial di atas, media massa juga memiliki beberapa peranan yang dapat dilihat dari enam perspektif yang berbeda (McQuail, 2000, p.66). Pertama, media massa dilihat sebagai *window on events and experience*. Dalam hal ini, media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak “melihat” apa yang sedang terjadi di luar sana. Kedua, media seringkali juga dianggap sebagai *a mirror of events in society and the world, implying a faithful reflection*. Dalam hal ini, media massa menjadi cermin dari berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa yang terjadi secara apa adanya. Ketiga, media massa dipandang sebagai filter atau *gatekeeper* yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Dalam hal ini, media

senantiasa memilih isu informasi atau bentuk konten lainnya berdasarkan standar para pengelolanya. Keempat, media massa seringkali juga dianggap sebagai *guide*, penunjuk jalan, atau interpreter yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam. Kelima, media massa juga bisa dilihat sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik. Yang terakhir, media massa dapat juga berperan sebagai “teman bicara” yang tidak hanya sekedar tempat berlalu-lalangnya informasi, melainkan juga sebagai *partner* komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang interaktif.

Dari berbagai perspektif di atas, dapat dilihat bahwa peran media dalam kehidupan sosial masyarakat tidak sebatas sebagai sarana hiburan atau pelepas ketegangan semata, sebab isi dan informasi yang disajikan pun mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial (Afdjani, 2007, p.2). Dengan kata lain, gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media massa inilah yang nantinya akan mendasari respon dan sikap khalayak terhadap berbagai objek sosial.

Di negara-negara demokrasi, media massa juga kerap dianggap sebagai pilar kekuatan keempat yang bertugas mengawal setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Media massa dianggap sebagai sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lain (McQuail, 1996, p.3). Dalam sebuah seminar bertajuk “Seminar Nasional Hubungan Komunikasi dan Wacana”, Amir Purba (2011), Dosen Ilmu Komunikasi USU, menjelaskan demikian (Hapriyani, 2011, para.1):

“Indonesia yang menganut paham demokrasi, menempatkan pers sebagai kekuatan politik keempat yang sejajar dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dampaknya akan membawa sistem pers yang mulanya otoriter menjadi liberal. Pers yang liberal berarti bahwa pers adalah lembaga yang independen, bebas, dan mengutamakan kepentingan rakyat.”

Sebagai lembaga yang independen, bebas, dan mengutamakan kepentingan rakyat, media massa harus menyiarkan seluruh informasi dan berita yang menyangkut kepentingan umum dengan terbuka dan berimbang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat karena pers dianggap sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan rakyat di sebuah negara demokrasi.

Saat ini, media massa dapat dibedakan menjadi 3 jenis besar, yaitu media cetak (*printed media*), media elektronik (*electronic media*), dan media online (*cybermedia*). Media cetak terdiri dari surat kabar, majalah dan tabloid; media elektronik terdiri dari radio, televisi, dan film; sedangkan media online terdiri dari *website* internet. Dalam penelitian ini, media massa yang akan dianalisis oleh peneliti terkait pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud adalah media cetak surat kabar dan media online, sedangkan media elektronik tidak dianalisis oleh peneliti dikarenakan media elektronik tidak memiliki wartawan yang khusus ditugaskan untuk meliput di Kemendikbud.

Surat kabar cetak, atau yang lebih sering disebut koran, merupakan salah satu media massa yang berperan penting dalam pendistribusian informasi kepada khalayak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau koran didefinisikan sebagai lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar (berita), yang terbagi dalam kolom-kolom (8-9 kolom), dan biasanya terbit setiap hari atau secara periodik. Sebagai bagian dari media massa, surat kabar memiliki lima karakteristik, antara lain (Ardianto & Erdinaya, 2005, p.104-106):

1. Publisitas

Publisitas yang dimaksud adalah bahwa surat kabar diperuntukkan untuk umum, sehingga berita, tajuk rencana, artikel, dan lainnya harus pula menyangkut kepentingan umum. Salah satu karakteristik komunikasi massa adalah pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak di berbagai tempat karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum, atau menarik bagi khalayak umum. Sebagai bagian dari medium komunikasi

massa, surat kabar harus memenuhi kriteria tersebut, yaitu ditujukan untuk khalayak umum.

2. Periodesitas

Periodesitas merujuk pada keteraturan terbitnya suatu surat kabar, seperti harian, mingguan atau dwi mingguan. Sifat periodesitas sangat penting dimiliki media massa, khususnya surat kabar sebab suatu penerbitan baru dapat dikatakan sebagai surat kabar jika penerbitan tersebut diterbitkan secara periodik dan teratur.

3. Universalitas

Universalitas yang dimaksud adalah bahwa surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lainnya.

4. Aktualitas

Aktualitas yang dimaksud merujuk pada kecepatan penyampaian laporan mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi yang paling baru.

5. Terdokumentasikan

Karakteristik yang terakhir ini mengandung artian bahwa berita-berita yang disiarkan oleh surat kabar tersusun dalam alinea, kalimat dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf, yang dicetak pada kertas. Dengan demikian, setiap peristiwa atau hal yang diberitakan terekam sedemikian rupa sehingga dapat dibaca setiap saat dan dapat diulangkaji, bisa dijadikan dokumentasi dan bisa dipakai sebagai bukti untuk keperluan tertentu.

Sebagai salah satu media massa yang berperan penting dalam mendistribusikan informasi kepada khalayak, surat kabar seringkali dianggap memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini masyarakat adalah surat kabar. Hal ini dikarenakan surat kabar merupakan media cetak yang memungkinkan berita-berita yang disiarkan dapat dibaca setiap saat dan berulang-ulang, serta terdokumentasi sehingga dapat dijadikan bukti otentik untuk suatu keperluan. Di samping itu, surat kabar pun lebih intens dibaca oleh masyarakat karena sifat penerbitannya yang harian, berbeda dengan media cetak lain seperti majalah yang biasanya diterbitkan secara mingguan. Surat kabar memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bentuk media massa lainnya, antara lain (Hynds, 1975, p.22-23): (1) surat kabar menawarkan variasi berita dan informasi yang lebih luas dibandingkan media lainnya. Surat kabar juga menyajikan berita yang lebih mendetail dibandingkan media elektronik; (2) surat kabar bersifat lebih mudah menyesuaikan diri terhadap konsumennya bila dibandingkan dengan *broadcast media*. Pembaca dapat memilih apa yang akan dibaca dan kapan akan dibaca sesuai dengan keinginannya sendiri; (3) surat kabar bersama media cetak lainnya sesuai dengan bentuk komunikasi yang dideskripsikan sebagai sesuatu yang linear, tersegmen dan mengandung informasi; (4) surat kabar dapat menyajikan berbagai jenis hiburan, seperti teka-teki silang, yang lebih efektif bila dibandingkan dengan *broadcast media*; serta (5) surat kabar lebih efektif dalam menyajikan informasi, mengembangkan isu dan memotivasi tindakan pada level lokal.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini tak ayal ikut mempengaruhi keberadaan surat kabar itu sendiri. Surat kabar yang awalnya berbentuk analog (media cetak), saat ini mulai melakukan ekspansi ke dunia dalam jaringan (daring) yang berbentuk digital (media *online*), yang sering dikenal dengan sebutan surat kabar *online*. Surat kabar *online* merupakan surat kabar yang berbasis internet, artinya berita-berita yang disajikan dalam jaringan internet. Surat kabar *online* sendiri terbagi ke dalam dua jenis, yaitu surat kabar daring dan surat kabar hibrid. Surat kabar daring merujuk pada surat kabar berbasis internet yang tidak disertai dengan surat kabar versi cetak, seperti

misalnya antaranews.com dan detik.com. Jenis surat kabar *online* kedua, yaitu surat kabar hibrid, merupakan surat kabar berbasis internet yang juga menyediakan pemberitaannya dalam bentuk media cetak, seperti misalnya kompas.com yang memiliki versi cetak berupa surat kabar Kompas.

Pemimpin detik.com, Budiono Darsono (2011), menjelaskan bahwa kehadiran media online telah mengubah paradigma baru pemberitaan, yakni *event on the making*. Maksudnya, berita yang muncul tidak disiarkan beberapa menit, jam, hari, atau minggu, tetapi langsung diunggah ke dalam situs *web* media *online* begitu berita tersebut didapat (Musa, 2011, para.1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu keunggulan utama dari surat kabar berbasis internet adalah fleksibilitas dalam hal penyiaran berita. Hal ini menjadi nilai tambah bagi surat kabar *online* dibandingkan dengan surat kabar cetak, mengingat dalam surat kabar cetak, proses produksi berita harus melalui tahap yang sangat panjang sebelum akhirnya sampai kepada pembaca, yakni harus melalui reporter, pegawai pencari iklan, redaktur dan asisten redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, korektor bahasa, pegawai bagian *lay-out*, pegawai bagian percetakan, pegawai bagian distribusi, distributor dari pihak luar, serta penjual eceran (Admin, 2011, para.4). Karena tahapan produksi yang lebih pendek, maka proses produksi berita pada surat kabar *online* pun menjadi relatif lebih rendah dibandingkan surat kabar cetak.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003, p.3). Dalam konstruktivis, setiap individu dipandang memiliki pengalaman yang unik, yang terkonstruksi dari kehidupan masing-masing individu.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis untuk melihat bagaimana pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud dalam rangka mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian dari sudut pandang Humas Kemendikbud dan wartawan. Bagaimana kedua profesi tersebut memandang pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud adalah relatif, sesuai dengan konstruksi yang dibentuk oleh lingkungan masing-masing.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006, p.6). Pendekatan kualitatif lebih mementingkan makna dan tidak ditentukan oleh kuantitasnya. Metode ini lebih mendasarkan pada definisi yang diberikan oleh individu dan individu dalam memberikan makna dipengaruhi oleh nilai yang dipegangnya, sehingga akan banyak variasi makna yang diberikan. Peneliti kualitatif percaya bahwa “kebenaran” (*truth*) adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi

sosial kesejarahan (Danim, 2002, p.35). Menurut Sugiyono (2005, p.9), karakteristik penelitian kualitatif, antara lain :

- Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- Penelitian kualitatif lebih menjangkau pada proses daripada produk atau *outcome*.
- Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Menurut Moleong (2004), dalam penelitian kualitatif, desain penelitian bersifat sementara dan fleksibel, yakni desain dapat disesuaikan terus menerus sesuai kenyataan di lapangan. Sebabnya, satu, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan; dua, tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang akan berubah; dan tiga, bermacam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Sehingga, penelitian akan dapat menggambarkan realitas sosial secara lebih akurat dan mendalam karena tidak terpaku pada desain yang telah disusun peneliti pada awal penelitian. Hal-hal yang ditemukan di lapangan akan memperkaya pengetahuan peneliti dan menyumbangkan pemahaman peneliti terhadap realitas sosial.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menggali dan memberikan realitas sosial yang lebih kaya dan mendalam tentang pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, dengan menggali informasi sebanyak mungkin dari Humas Kemendikbud dan wartawan yang beraktivitas di lingkungan Kemendikbud.

3.3 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian mencoba memaparkan situasi atau peristiwa serta pengumpulan data secara spesifik dan mendetil mengenai sebuah situasi, ruang atau hubungan sosial. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam dalam masyarakat, serta tata cara yang

berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 2002, p.54). Penelitian deskriptif berfokus pada "bagaimana" dan "siapa" yang dapat menjelaskan sesuatu dapat terjadi (Moleong, 2004). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah (Suryabrata, 1998, p.19):

1. Untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mendeskripsikan gejala yang ada.
2. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung.
3. Untuk membuat komparasi dan evaluasi.
4. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan rencana masa depan.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan paparan dan deskripsi secara mendetail tentang pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud dari sudut pandang Humas Kemendikbud dan wartawan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas *media relations* tersebut.

3.4 Strategi Penelitian

Strategi dalam penelitian ini adalah *case study* (studi kasus). Studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian untuk mengembangkan analisis mendalam dengan pokok masalah "apa/apakah", "bagaimana" atau mengapa" tentang satu kasus atau kasus majemuk dari fenomena kontemporer dengan pendekatan/metode penelitian kualitatif. Karakteristik dari strategi studi kasus, yaitu: (1) mengidentifikasi "kasus" untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut merupakan sebuah "sistem yang terikat" oleh waktu dan tempat; (3) studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan

“menghabiskan waktu” dalam menggambarkan konteks atau *setting* untuk suatu kasus (Craswell, 1998).

Peneliti melakukan penelusuran secara mendalam mengenai realitas sosial secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai realitas sosial tersebut. Penelitian dengan strategi studi kasus melibatkan teknik wawancara mendalam dan observasi yang merupakan teknik yang lazim digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial (Neuman, 2006, p.40).

Dalam penelitian ini, kasus *media relations* yang akan diangkat menjadi sebuah studi adalah pelaksanaan *media relations* yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memperlihatkan secara spesifik bagaimana pelaksanaan *media relations* yang dilakukan di Kemendikbud.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) peneliti dengan informan. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu. Melalui metode ini, peneliti dapat masuk ke perspektif orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menjaga agar wawancara tidak keluar dari konteks yang diteliti. Metode wawancara semi terstruktur memiliki ciri, antara lain (Mason, 2007) :

1. Interaksi atau melakukan dialog dengan informan secara langsung maupun menggunakan telepon, atau internet.
2. Relatif informal, misalnya dengan dialog dibanding menggunakan pertanyaan rigid yang sangat formal.
3. Tematik, berorientasi pada topik, dan dengan pendekatan naratif.

4. Kontekstual. Peneliti harus mampu membawa konteks yang dimaksud sehingga informan dapat mengeluarkan “pengetahuan”-nya.

Sementara, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi literatur, antara lain materi siaran pers milik Kemendikbud, buku, artikel internet, jurnal, laporan penelitian yang membahas tentang praktik *media relations*.

3.6 Metode Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Dalam metode ini, peneliti memutuskan sendiri informan berdasarkan tujuan penelitian ini dan untuk menemukan data sebanyak mungkin (Patton, 2002, p.230). Dengan demikian, diharapkan peneliti dapat menggali dengan lebih mendalam dari informan yang dipilih. Adapun teknik pemilihan yang digunakan adalah *maximum variation*, guna mewakili keseluruhan khalayak secara lebih dekat. *Maximum variation* adalah teknik pemilihan informan di mana informan tersebut sengaja dipilih dari pengaturan yang mewakili berbagai pengalaman yang terkait dengan fenomena yang menarik perhatian peneliti.

Dalam penelitian ini, informan berasal dari dua bidang profesi yang terkait erat dengan praktik *media relations* di Kemendikbud yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, yaitu Humas Kemendikbud dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media sebagai praktisi humas dari dalam Kemendikbud, serta wartawan yang memiliki kekhususan tugas peliputan di lingkungan Kemendikbud dan sedang terlibat dalam hubungan profesional dengan Humas Kemendikbud.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 informan di mana 4 informan berasal dari pihak Kemendikbud dan 8 informan berasal dari pihak wartawan. Informan dari dalam Kemendikbud terdiri dari Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan, Kepala Subbidang Kemitraan Media, dan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media. Alasan pemilihan keempat informan tersebut adalah karena mereka merupakan pihak-pihak yang bertugas melaksanakan praktik *media relations* dan secara langsung berhubungan dengan wartawan.

Sementara itu, informan yang mewakili pihak wartawan berasal dari beberapa jenis media, yaitu Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Jurnal Nasional, Koran Jakarta, dan Waspada yang mewakili media cetak, serta LKBN Antara dan Kompas Online yang mewakili media online. Jumlah informan wartawan dari media cetak lebih banyak dibandingkan informan wartawan media online mengacu pada proporsi penempatan wartawan media cetak di Kemendikbud yang memang lebih besar dibandingkan dengan wartawan media online. Hal ini dikarenakan banyak media cetak yang memiliki kolom khusus pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki wartawan yang khusus meliput di Kemendikbud. Sedangkan hanya sedikit media online yang memiliki ruang berita khusus pendidikan dan kebudayaan, sehingga hanya sejumlah kecil media online yang menempatkan wartawannya untuk khusus meliput di Kemendikbud.

3.7 Metode Analisis Data

Penelitian ini akan diteliti dengan menggunakan metode analisis tematik. Analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan ‘pola’ yang pihak lain tidak melihatnya secara jelas. Pola atau tema tersebut tampil seolah secara acak dalam tumpukan informasi yang tersedia. Setelah kita menemukan pola, peneliti akan mengklarifikasi atau meng-*encode* pola tersebut dengan memberi label, definisi, atau deskripsi (Boyatzis, 1998). Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena, dan secara maksimal memungkinkan interpretasi fenomena. Tema – tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah, atau diperoleh secara deduktif dari teori atau penelitian – penelitian sebelumnya (Boyatzis, 1998).

Analisis tematik memiliki tujuan, yakni (Boyatzis, 1998) :

1. Suatu cara ”melihat” (*a way of seeing*)
2. Suatu cara ” memberi / membuat makna ” terhadap materi – materi yang secara awam terlihat tidak saling terkait.
3. Suatu cara menganalisis informasi kualitatif
4. Suatu cara sistematis mengamati manusia, interaksi, kelompok, situasi, organisasi, ataupun budaya tertentu.

5. Suatu cara "mengubah" atau "memindahkan" informasi kualitatif menjadi data – data kuantitatif

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh tema secara induktif, di mana peneliti membuat pola atau tema berdasarkan informasi mentah yang didapat dari hasil wawancara dengan Humas Kemendikbud dan wartawan.

3.8 Kualitas Penelitian

Untuk memeriksa dan menjaga kriteria kualitas penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004, p.330). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Teknik ini membandingkan dan mengecek silang konsistensi informasi yang didapat pada waktu dan cara yang berbeda. Cara tersebut, antara lain (Patton, 2002, p.559):

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Mengecek konsistensi dari apa yang orang katakan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berbeda.
4. Membandingkan perspektif orang dari sudut pandang yang berbeda.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen lain yang terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *cross check* data antara pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Humas Kemendikbud dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh wartawan, serta pernyataan yang dikeluarkan antar sesama humas dan antar sesama wartawan. Peneliti juga melakukan *cross check* data antara pernyataan yang dikeluarkan oleh humas dan wartawan dengan dokumen dan literatur yang terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan *quality control* terhadap penelitian ini dengan cara membuat pedoman wawancara yang konsisten, integratif dan objektif bagi pihak Humas Kemendikbud dan wartawan.

3.9 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian

- **Kelemahan :**

- Tidak adanya alternatif informan wartawan yang berasal dari media elektronik televisi dan radio. Hal ini dikarenakan tidak ada wartawan dari televisi dan radio yang memiliki kekhususan peliputan bidang pendidikan di Kemendikbud, sehingga dalam penelitian ini, informan wartawan hanya berasal dari media cetak dan media online.
- Penelitian ini tidak dilengkapi dengan data sekunder berupa analisis kliping berita mengenai Kemendikbud dikarenakan adanya keterbatasan akses yang dimiliki peneliti dalam memperoleh data tersebut.

- **Keterbatasan :**

- Penelitian ini hanya melihat pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud dalam situasi normal (*business as usual*) selama bulan Juli – Desember 2011.
- Penelitian ini hanya memaparkan bagaimana pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud tanpa menyertakan variabel *output* dan *outcome* dari pelaksanaan *media relations* tersebut sehingga penelitian ini tidak dapat menilai efektivitas pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud.
- Penelitian terhadap pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud ini dilakukan secara kualitatif, sehingga hasil yang didapat hanya berlaku di dalam Kemendikbud itu sendiri dan tidak bisa digeneralisasi ke seluruh lembaga pemerintah atau kementerian di Indonesia.
- Pengumpulan data dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan saat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) baru berubah nama dan struktur menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sehingga baik data primer maupun data sekunder yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini lebih banyak melihat pelaksanaan *media relations* terkait isu dan masalah pendidikan, sedangkan isu dan masalah kebudayaannya cenderung kurang terangkat.

BAB 4

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Profil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

4.1.1 Sejarah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang pada awal dibentuknya bernama Kementerian Pengajaran, merupakan salah satu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, yaitu bidang pendidikan. Lahirnya kementerian yang mengurus bidang pendidikan ini didasarkan pada pemikiran akan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4 :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Pemikiran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut semakin diperkuat dengan adanya UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka pada tahun 1945 dibentuklah sebuah lembaga yang khusus mengurus masalah pendidikan, serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu Kementerian Pengajaran. Pada perjalanannya, Kementerian Pengajaran beberapa kali mengalami perubahan nama dan ruang lingkup, hingga akhirnya saat ini bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut perincian perubahan tersebut :

- Periode 1945-1948 bernama Kementerian Pengajaran;
- Periode 1948-1959 bernama Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;

- Periode 1959-1962 bernama Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- Periode 1962-1966 bernama Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- Periode 1966-1999 bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Periode 1999-2009 bernama Departemen Pendidikan Nasional;
- Periode 2009-2011 bernama Kementerian Pendidikan Nasional;
- Periode 2011-sekarang bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelum menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti saat ini, kementerian ini bernama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), di mana kementerian ini khusus mengurus bidang pendidikan seperti awal dibentuknya kementerian, sedangkan bidang kebudayaan masuk ke dalam ruang lingkup Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Namun pada bulan Oktober 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan keputusan untuk menggabungkan bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan, sehingga Kementerian Pendidikan Nasional pun mengalami perubahan nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut beliau, pertimbangan disatukannya pendidikan dan kebudayaan adalah karena pendidikan sangat terkait dengan kebudayaan, di mana pembentukan karakter bangsa yang berbudaya bisa dicapai antara lain melalui pendidikan (Jusuf, 2011, para. 3).

Dalam struktur organisasi, Kemendikbud dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan memiliki dua orang wakil, yaitu Wakil Menteri Bidang Pendidikan dan Wakil Menteri Bidang Kebudayaan. Saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Mohammad Nuh, dengan Musliar Kasim sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan dan Wiendu Nuryati sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan.

4.1.2 Tugas dan Fungsi

Seluruh aktivitas dalam struktur lembaga Kemendikbud saat ini masih mengacu pada Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Belum adanya peraturan khusus terkait organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebabkan karena peraturan tersebut masih dalam tahap penggodokan, mengingat Kemendikbud baru mengalami perubahan nama dan ruang lingkup pada pertengahan Oktober 2011 yang lalu, sehingga saat ini masih merampungkan peraturan yang baru. Dalam Permendiknas No.36 Tahun 2010 pasal 2 dijelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Nasional, atau yang saat ini bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Adapun untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kemendikbud menyelenggarakan fungsi, antara lain :

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional;
- b. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4.1.3 Visi dan Misi

VISI

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif

MISI

- **Ketersediaan**

Meningkatkan KETERSEDIAAN layanan pendidikan. Sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya.

- **Keterjangkauan**

Memperluas KETERJANGKAUAN layanan pendidikan. Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat.

- **Kualitas**

Meningkatkan KUALITAS/MUTU dan relevansi layanan pendidikan. Sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa.

- **Kesetaraan**

Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender.

- **Kepastian Jaminan**

Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.

4.2 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) merupakan unit pelaksana tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan informasi dan publikasi pendidikan serta hubungan masyarakat. PIH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam format Kemendiknas, PIH memiliki visi utama menciptakan citra Kemendiknas yang terpercaya di bidang pendidikan. Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi pendukung, antara lain membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan nasional; menciptakan PIH Kemendiknas sebagai lembaga profesional di bidang informasi dan humas; tersedianya berbagai layanan informasi dan kehumasan pendidikan yang diperlukan dan mudah diakses oleh masyarakat dan *stakeholder* pendidikan; serta terciptanya hubungan dan kesepahaman dengan prinsip *mutual benefit* antara Kemendiknas dengan kalangan media massa.

Dalam aktivitas Kemendikbud, PIH bertugas melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, publikasi, dan pencitraan pendidikan. Lebih lanjut, dalam acara serah terima Kapus PIH tanggal 1 Februari 2011, Mendikbud (yang saat itu bernama Mendiknas), memberikan arahan terkait empat tugas besar PIH, antara lain:

1. Mengemas bahan informasi dari kebijakan-kebijakan pendidikan untuk disosialisasikan dan dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan tersebut.
2. Memantau berbagai informasi di media cetak, elektronik, maupun *online* untuk selanjutnya memberikan penjelasan, koreksi, dan dukungan terhadap pemberitaan tersebut.
3. Menangkap aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung, melalui surat, telepon, email, dan sebagainya untuk ditanggapi dan dijawab.
4. Membuat analisis kajian pemberitaan yang perlu direspon secepatnya.

Untuk mendukung tugas tersebut, PIH menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang informasi dan hubungan masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan;
- c. pengelolaan dan pembinaan kearsipan dan dokumen Kementerian;
- d. pengelolaan perpustakaan Kementerian;
- e. pengembangan kemitraan dengan lembaga, media dan masyarakat;
- f. publikasi dan pencitraan Kementerian;
- g. koordinasi pelaksanaan publikasi kebijakan dan kegiatan strategis Kementerian;
- h. pemberian layanan informasi dan kehumasan bidang pendidikan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan administrasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

4.2.1 Struktur Organisasi PIH

Saat ini, PIH terdiri dari satu bagian, tiga bidang dan satu kelompok. Bagian, bidang dan kelompok tersebut memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda-beda, antara lain :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, barang milik negara,

kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. Bagian Tata Usaha terdiri dari tiga subbagian, antara lain:

- a. Subbagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perpustakaan, barang milik negara, keprotokolan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Pusat.
- b. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan analisis jabatan, analisis dan penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, pertimbangan dan bantuan hukum, dan penyusunan bahan koordinasi kerja sama, dan urusan perencanaan, pengadaan, mutasi, pengembangan, dan pemberhentian pegawai, serta penyusunan laporan Pusat.
- c. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembiayaan, perbendaharaan, evaluasi, dan laporan keuangan Pusat.

2. Bidang Informasi

Bidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pendidikan serta pengelolaan dan pembinaan arsip, dokumen, dan perpustakaan Kementerian. Bidang Informasi terdiri dari tiga subbidang, antara lain :

- a. Subbidang Integrasi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi bidang pendidikan.
- b. Subbidang Arsip dan Dokumentasi, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan arsip dan dokumen Kementerian.

- c. Subbidang Perpustakaan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan Kementerian.

3. Bidang Pengembangan Kemitraan

Bidang Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan fasilitasi kemitraan dengan lembaga negara, media, dan masyarakat. Bidang Pengembangan Kemitraan terdiri dari tiga subbidang, antara lain :

- a. Subbidang Kemitraan Lembaga Negara, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana pengembangan, bahan informasi, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan lembaga negara.
- b. Subbidang Kemitraan Media, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana pengembangan, bahan informasi, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan media.
- c. Subbidang Kemitraan Lembaga Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, rencana pengembangan, bahan informasi, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kemitraan dengan masyarakat.

4. Bidang Pencitraan Publik

Bidang Pencitraan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, kajian aspirasi masyarakat, publikasi di bidang pendidikan serta pencitraan Kementerian. Bidang Pencitraan Publik terdiri dari :

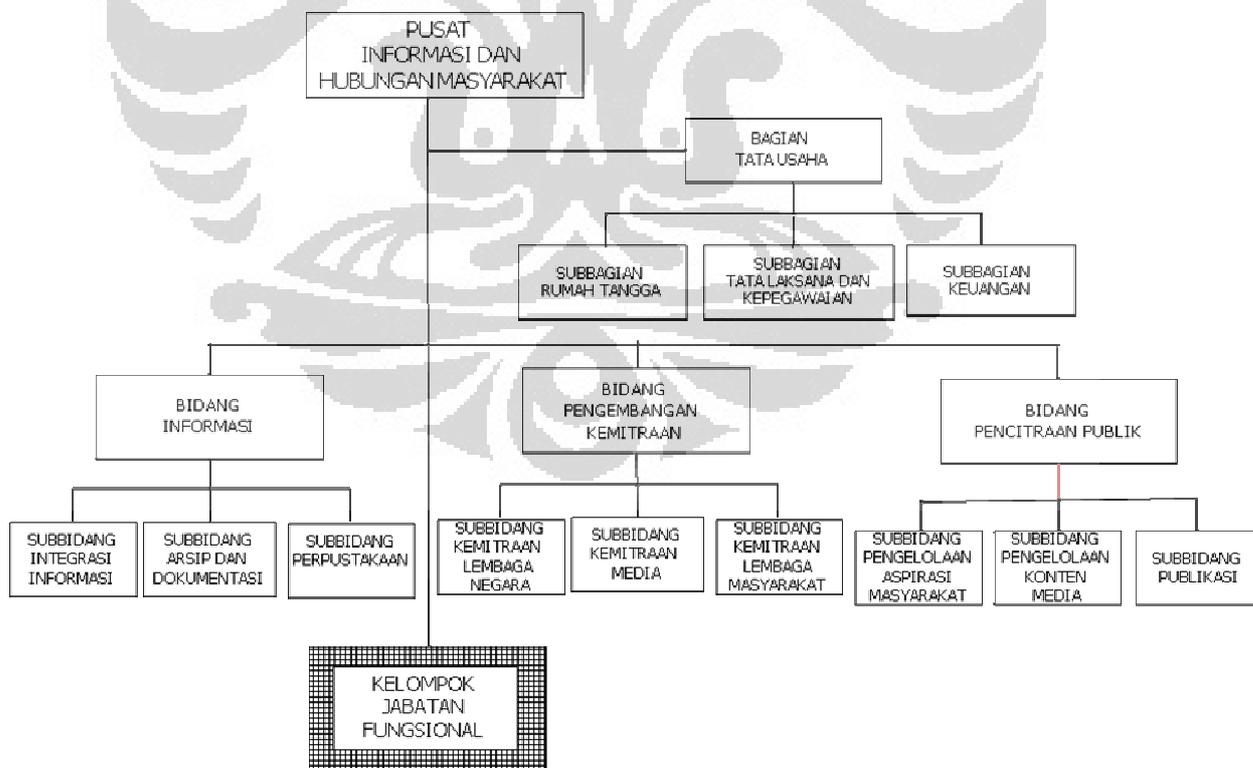
- a. Subbidang Pengelolaan Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan tanggapan aspirasi masyarakat di bidang pendidikan.

- b. Subbidang Pengelolaan Konten Media, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kajian teknis, analisis, dan penyusunan bahan informasi di bidang pendidikan melalui media.
- c. Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan penyusunan bahan publikasi di bidang pendidikan dan pencitraan Kementerian

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini dipimpin oleh tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

Berikut bagan struktur organisasi PIH yang menggambarkan posisi dan kedudukan masing-masing bagian, bidang dan kelompok :



Gambar 4.1

Bagan Organisasi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat

4.2.2 Strategi Kegiatan Humas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PIH menggunakan beberapa jenis saluran media untuk memaksimalkan penyebaran informasi kepada publiknya. Saluran media tersebut, antara lain :

1. Media Cetak, mencakup:
 - a. Liputan/jumpa pers
 - b. Kunjungan pers (*press tour*)
 - c. Iklan Layanan Masyarakat (ILM)
 - d. Penerbitan berkala media informasi
 - e. Penerbitan buku kerja dan kalender tahunan Kemendikbud
2. Media Elektronik, mencakup:
 - a. Liputan/jumpa pers
 - b. Dialog/*talkshow* TV/radio
 - c. Paket spot TV/radio
 - d. Siaran berita
 - e. *Website*
3. Media luar ruang, mencakup:
 - a. Billboard
 - b. Videotron
 - c. Poster
 - d. Spanduk
4. Media tatap muka, mencakup:
 - a. Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik)

- b. Forum Badan Koordinasi Humas (Bakohumas)
 - c. Seminar/*workshop*
 - d. Pameran
 - e. *Roadshow* media cetak
5. Media kemitraan, mencakup:
- a. Rapat Kerja Mendikbud dengan DPR RI/DPD
 - b. Rapat Dengar Pendapat Eselon I dengan DPR RI
 - c. Pertemuan konsultasi/koordinasi dengan Lembaga Negara/LSM, pendamping kunjungan kerja DPR RI
6. Pengumpulan dan pengolahan informasi pendidikan dan kebudayaan, mencakup:
- a. Penyusunan kliping berita
 - b. Analisis berita surat kabar
 - c. Evaluasi berita media cetak
 - d. Kajian aspirasi masyarakat
 - e. Penilaian artikel surat kabar
7. Dokumentasi foto/audiovisual, mencakup: kegiatan pimpinan/kementerian dan peristiwa penting lainnya.
8. Pengembangan mutu SDM, mencakup:
- a. Pelatihan teknis kehumasan
 - b. Pelatihan jurnalistik
 - c. Pelatihan komputer
 - d. Pengadaan *media center*
 - e. Pengadaan *press room*

BAB 5

ANALISIS DATA

5.1 Profil Informan

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 12 informan untuk memperoleh data yang memadai terkait pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud. Yang menjadi informan dalam penelitian ini berasal dari dua pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, yaitu praktisi humas di Kemendikbud dan wartawan yang aktif meliput di lingkungan Kemendikbud. Untuk menjaga identitas informan dari hal-hal yang tidak diinginkan, peneliti hanya akan menggunakan inisial samaran sebagai penanda identitas informan. Berikut profil masing-masing informan.

- **Informan dari pihak praktisi humas Kemendikud**

1. Informan 1 : HI

Informan 1 menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat di Kemendikbud, tepatnya sejak 1 Februari 2010. Beliau juga merupakan guru besar Ilmu Komunikasi di salah satu universitas negeri di Indonesia.

2. Informan 2 : TS

Informan berusia 52 tahun ini merupakan Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan di Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud.

3. Informan 3 : DT

Informan 3 menjabat sebagai Kepala Subbidang Kemitraan Media di Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud dan telah bergelut di bidang hubungan media ini selama kurang lebih 5 tahun.

4. Informan 4 : KS

Informan 4 berlatar belakang pendidikan S2 bidang *business administration* ini merupakan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media dan bertugas memberikan saran serta masukan kepada Menteri dan PIH terkait hubungan dengan media di lingkungan Kemendikbud.

- **Informan dari pihak wartawan**

1. Informan 5 : AL

Informan 5 merupakan reporter salah satu media massa terdepan (*leading media*) yang berlokasi di Jakarta Selatan. Informan ini telah memiliki pengalaman meliput di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dulu bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata), *desk* Minggu, dan sudah dua tahun terakhir mulai aktif meliput di Kemendikbud.

2. Informan 6 : AR

Informan 6 telah dua tahun mendalami profesinya sebagai reporter di salah satu media massa yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Satu tahun belakangan ini, ia mulai aktif meliput di Kemendikbud.

3. Informan 7 : OS

Informan 7 merupakan reporter yang memiliki pengalaman meliput di Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (dulu bernama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata), serta meliput isu-isu kriminal dan politik. Informan yang berkantor di wilayah Jakarta Barat ini telah dua tahun terakhir membidangi isu-isu pendidikan dan aktif meliput di Kemendikbud.

4. Informan 8 : FD

Informan 8 merupakan reporter di salah satu media massa yang berlokasi di Jakarta Pusat. Ia telah satu tahun belakangan aktif meliput di Kemendikbud. Sebelumnya, ia pernah meliput isu-isu di bidang olahraga dan kriminal.

5. Informan 9 : LC

Informan 9 merupakan reporter salah satu koran daerah di wilayah Jakarta. Ia telah meliput di Kemendikbud selama dua tahun terakhir. Selain di Kemendikbud, ia juga pernah meliput di KPK, Mabes Polri, dan kementerian-kementerian yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat.

6. Informan 10 : WD

Informan 10 merupakan reporter salah satu koran daerah yang kantor pusatnya berlokasi di Sumatera Utara. Ia bergabung dengan surat kabar tersebut sejak tahun 2003, namun mulai aktif meliput di Kemendikbud sendiri sejak tahun 2004. Sebelumnya, ia lebih banyak meliput di KPU.

7. Informan 11 : MZ

Informan 11 telah bekerja sebagai wartawan selama hampir 21 tahun di salah satu media online berita terdepan di Indonesia. Saat ini, ia menjadi redaktur dan reporter senior di media online tersebut dan sudah delapan tahun terakhir meliput di Kemendikbud.

8. Informan 12 : AI

Informan 12 merupakan salah satu reporter media online yang telah 1 tahun belakangan aktif meliput isu-isu pendidikan di Kemendikbud. Sebelumnya, informan yang berkantor di Jakarta Selatan ini lebih banyak meliput bidang otomotif dan *entertainment*.

5.2 Temuan Data

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 12 informan, peneliti menemukan beberapa temuan menarik, yang kemudian peneliti kelompokkan ke dalam tema-tema berikut ini.

5.2.1 Pemahaman Mengenai Fungsi *Media Relations* di Lembaga Pemerintah

Pengetahuan informan terhadap fungsi *media relations* di lembaga pemerintah merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui sebelum peneliti menganalisis lebih dalam terkait pandangan informan mengenai *media relations* di Kemendikbud.

Ketika ditanya mengenai fungsi *media relations* di lembaga pemerintah, seluruh informan secara umum memiliki pandangan yang sama bahwa hubungan media di lembaga pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut informan 1 sebagai praktisi humas Kemendikbud, fungsi *media relations* sangat penting dalam membantu humas menyampaikan program dan kebijakan kementerian kepada masyarakat. Tanpa bantuan wartawan dan media, program dan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat tidak akan mungkin bisa sampai ke masyarakat yang dituju.

“Jadi pemerintah itu kan banyak programnya, banyak kegiatannya, banyak kebijakannya. Nah kebijakan, program, kegiatan itu kan seluruhnya didedikasikan untuk masyarakat, untuk rakyat ya. Kalau a.. kebijakan itu, maksud saya kebijakan itu harus sampai ke masyarakat. Nah di sinilah titik pentingnya. Seandainya nih tidak dibantu oleh wartawan, oleh media, itu yang namanya kebijakan pemerintah, program, kegiatan, ngga mungkin sampai ke masyarakat, padahal harus sampai.” (Informan 1).

Jika informan 1 melihat *media relations* sebagai salah satu cara untuk menjangkau masyarakat, informan 2 yang juga merupakan praktisi humas Kemendikbud lebih melihat *media relations* dalam hubungannya dengan wartawan itu sendiri, di mana adanya *media relations* dapat memperlancar arus informasi antara humas dan wartawan .

“Jadi memang kita memandang media relations itu penting agar arus informasi antara Kemendikbud dengan wartawan itu lancar.” (Informan 2)

Sementara itu, informan 4 memiliki pandangan yang lebih jauh mengenai fungsi *media relations* di sebuah lembaga pemerintah seperti Kemendikbud. Menurut informan 4, hubungan dengan media perlu terus dibangun karena adanya pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa sebuah lembaga pemerintah baru dianggap telah bekerja dengan baik jika pekerjaan tersebut telah diberitakan oleh media, seperti diungkapkan oleh informan 4 :

“Jadi a.. di era informasi ini, hubungan dengan media menjadi penting. Karena apa? Karena seringkali orang melihat bahwa pekerjaan itu apa yang dilakukan, apa yang ditulis, atau apa yang disuarakan media.” (Informan 4)

Pemberitaan yang dilakukan melalui media massa, menurut informan 4, merupakan suatu bentuk tanggung jawab lembaga pemerintah terhadap masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap pekerjaan mereka, sebuah lembaga pemerintah merasa perlu untuk menjalin hubungan dengan media dan diharapkan melalui media tersebut, lembaga pemerintah mampu mengkomunikasikan apa yang telah mereka kerjakan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat.

Di sisi lain, informan yang berasal dari pihak wartawan memiliki jawaban yang cukup bervariasi terkait pemahaman mereka akan pentingnya fungsi *media relations* di sebuah lembaga pemerintah. Beberapa informan mengaku bahwa adanya *media relations* sebenarnya hanya membantu wartawan untuk mengetahui agenda acara lembaga saja, dan selebihnya, wartawan bisa berjalan sendiri mencari informasi tanpa bantuan Humas. Seperti misalnya informan 5, ia mengakui mengakui bahwa fungsi *media relations* memang terkadang penting untuk menginformasikan agenda-agenda acara, namun menurutnya, sebagai seorang wartawan, dirinya sebenarnya tidak betul-betul perlu berhubungan dengan Humas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sebagai wartawan.

“Nah itu, ya penting. Humas yang menjalankan media relations itu kan menjadi penghubung kita toh. Jadi kalau misalnya wartawan itu ngga ada a.. ngga ada Humas, sebenarnya bisa saja. Kita itu tanpa Humas bisa. Yang selama ini dilakukan teman-teman Kompas itu juga sebenarnya tanpa Humas. Kita jalan saja sendiri cari isu. Tapi ada kalanya Humas dan media relations itu menjadi penting ketika mereka mengadakan konferensi pers yang Menteriya a.. Jadi Humas itu hanya diperlukan untuk mendukung acara.” (Informan 5)

Informan 6 pun menganggap fungsi *media relations* penting hanya untuk memberitahukan informasi seputar acara, kegiatan atau program apa yang sedang dijalankan oleh sebuah lembaga pemerintah.

“Kalau buat ngasih informasi acara itu sih penting, buat.. jadi kita tau program apa saja yang lagi dijalankan Kementerian, terus apa aja yang sudah dicapai. Jadi pentingnya itu ya a.. untuk memperlancar arus informasi seperti itu tadi.” (Informan 6)

Meskipun beberapa informan wartawan menilai fungsi *media relations* di lembaga pemerintah hanya sebatas sebagai sarana untuk mengetahui agenda acara saja, namun ada juga informan wartawan memahami fungsi *media relations* lebih dari itu. Informan 7 misalnya, menilai fungsi *media relations* sebagai suatu hal yang penting sebab adanya fakta di lapangan di mana seringkali wartawan kesulitan menghubungi unit-unit di dalam lembaga pemerintah itu sendiri. Sehingga adanya hubungan media yang dibangun oleh humas lembaga tersebut dapat mempermudah wartawan untuk mendapatkan data, informasi ataupun berita yang mereka butuhkan ketika pucuk pimpinan atau narasumber lainnya sulit ditemui.

“Ya penting dong, sangat penting malah, apalagi di era sekarang. Media relations itu kan hubungan kita sebagai wartawan dengan suatu lembaga, dengan Humasnya. Humas itu semacam jubitnya, jadi Menteri, Dirjen, ngga selalu harus bicara, cukup dengan Humasnya itu. Selain jadi jubit itu, dia juga corong dan a.. back up, jadi kalau misalnya Menteri susah dihubungi, dia harus siap jawab itu. Jadi pentinglah, terutama untuk mendapatkan berita atau klarifikasi berita. Jadi kita ngga perlu selalu menghubungi Menteri atau Dirjennya, bisa melalui Humasnya saja.” (Informan 7)

Idealnya menurut informan 7, humas harus mampu menyediakan akses informasi yang mudah dan menguasai setiap isu-isu dalam bidang yang diwakilinya agar fungsi *media relations* yang dijalankannya itu dapat berjalan optimal.

“Idealnya ya yang pasti akses informasinya mudah a.. lalu yang tadi itu, Humasnya harus menguasai isu-isu yang ada di bidangnya, terutama yang sering ditanya oleh wartawan karena itu menyangkut citra lembaga tersebut.” (Informan 7)

Informan 10 menambahkan bahwa *media relations* di lembaga pemerintah penting sebab berfungsi sebagai perantara antara wartawan dengan pihak di dalam

sebuah lembaga yang dapat membantu pertukaran informasi dengan lebih teratur. Dalam hal ini, terlihat bahwa informan 10 memandang humas sebagai pihak yang kredibel dalam mewakili lembaganya untuk berhubungan dengan wartawan.

“Ya penting, ya dia kan perantara antara kita sama lembaganya kan, nah kadang-kadang memang kalau kita mau menemui kliennya langsung itu dia ngga paham, jadi fungsi media relations itu kan untuk namanya media relations begitu kan, jadi penghubung antara media dengan pihak yang diwakilinya itu supaya kita data-datanya lebih teratur.” (Informan 10)

Menurut informan 11, adanya fungsi *media relations* yang dijalin dengan humas juga dapat membantu menghubungkan wartawan dengan narasumber yang diperlukannya, terutama ketika wartawan tersebut tidak memiliki akses sendiri untuk bertemu narasumber tersebut. Dalam hal ini, humas dapat membantu wartawan dalam memberikan informasi dan data terkait narasumber yang diinginkan maupun secara langsung mempertemukan wartawan dengan narasumber yang diperlukannya.

“Pentinglah, penting... Alasannya karena begini, dalam konteks kita ya, dalam media relasi itu kita memerlukan Humas sebagai jembatan ketika kita membutuhkan informasi yang terkait dengan narasumber, terus data-data, kemudian yang lebih spesifik lagi itu kita ingin mempunyai kesempatan misalnya untuk ke yang tidak punya akses begitu, nah itu Humas dan media relasi itu menjadi sangat penting.” (Informan 11)

Informan 11 menambahkan, hubungan dengan media yang ideal dapat terbangun jika Humas memahami kebutuhan wartawan akan informasi yang bernilai berita dan aktual, seperti diungkapkan berikut ini :

“Lalu a.. yang mengerti wartawan, dalam artian mengerti bahwa wartawan itu perlu informasi yang aktual dan punya nilai berita, dan harus cepat dalam menyediakan informasi itu agar keaktualannya terjaga.” (Informan 11)

Dari berbagai pernyataan di atas dapat terlihat bahwa pada dasarnya, semua informan melihat fungsi *media relations* di lembaga pemerintah sebagai suatu hal yang penting. Namun ‘penting’ yang dimaksud oleh masing-masing informan memiliki konteks yang berbeda-beda.

5.2.2 Kegiatan *Media Relations* di Kemendikbud

Seperti di kebanyakan lembaga pemerintah pada umumnya, seluruh informan wartawan mengatakan bahwa kegiatan *media relations* yang paling sering dilakukan di Kemendikbud adalah jumpa pers, pendistribusian rilis kepada wartawan, serta peliputan. Ruang lingkup Kemendikbud yang sangat luas merupakan salah satu alasan utama mengapa jumpa pers dan pendistribusian rilis menjadi kegiatan *media relations* yang paling sering dilakukan oleh Humas Kemendikbud, seperti diungkapkan oleh informan 9 berikut ini:

“Karena mereka intensitas kegiatannya termasuk banyak ya, lumayan ramai, jadi setiap minggu suka ada sih rilis-rilis apa.” (Informan 9)

Selain jumpa pers dan rilis, informan dari kalangan wartawan juga menyebut peliputan kegiatan sebagai salah satu kegiatan *media relations* yang juga sering dilakukan oleh Humas Kemendikbud. Dalam peliputan kegiatan ini, wartawan biasanya diikutsertakan mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Menteri atau pejabat Kemendikbud lainnya dengan harapan agar kegiatan tersebut dapat diliput oleh wartawan. Informan 3 yang merupakan praktisi humas Kemendikbud menjelaskan demikian :

“Jadi katakanlah Pak Menteri kunjungan kerja ke daerah gitu ya, kita biasanya membawa wartawan-wartawan nasional ya.. untuk ikut kunjungan kerja Pak Menteri dengan tujuan untuk nanti mereka bisa mempublikasikan, mensosialisasikan, memberitakan kegiatan-kegiatan Pak Menteri di sana.” (Informan 3)

Masih menurut informan 3, intensitas penyelenggaraan jumpa pers dan peliputan kegiatan di Kemendikbud memang terbilang paling besar bila dibandingkan dengan kegiatan lainnya, seperti yang diungkapkannya berikut ini :

“Kalau misalnya kita kuantitatif gitu, itu setahun untuk jumpa pers, liputan pers gitu, itu hampir 300-an. Jadi hampir setiap hari ada kegiatan-kegiatan itu.” (Informan 3)

Meskipun rilis cukup sering dan rutin diberikan setiap kali humas mengadakan jumpa pers ataupun peliputan kegiatan, namun beberapa informan wartawan mengaku bahwa rilis hanya diberikan oleh humas ketika ada *event* saja, misalnya saat jumpa pers atau konferensi pers. Informan 8 mengungkapkan :

“Jadi kalau ngga ada acara, ngga ada rilis. A.. tapi pernah juga sih ngga dikasih rilis pas acara haha.”(Informan 8)

Informan 11 pun membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, di luar jumpa pers, Humas di Kemendikbud bisa dikatakan tidak menyediakan rilis bagi wartawan. Berikut pernyataannya :

“Bisa dibilang di luar jumpa pers itu mereka tidak menyediakan rilis ya, padahal sebenarnya rilis itu kalau menurut saya harus rutin dikirim setiap minggu meskipun tidak ada acara atau jumpa pers di sini karena kita kan setiap saat a.. setiap saat kan kita harus punya ibaratnya a.. membuat berita.” (Informan 11)

Menurut informan 11, rilis idealnya tidak hanya diberikan saat Kemendikbud mengadakan jumpa pers saja, melainkan juga di luar jumpa pers, minimal satu rilis setiap minggunya. Hal ini dikarenakan sebagai wartawan, ia harus terus memproduksi berita setiap hari dengan kondisi ada atau tidak ada jumpa pers. Sehingga menurutnya, meskipun tidak ada jumpa pers, humas harus mampu menciptakan kreasi-kreasi dari data-data yang dimilikinya untuk menghasilkan rilis yang dapat didistribusikan secara rutin setiap minggu kepada wartawan.

Informan 5 menambahkan, beberapa kali ia pun mendapati humas tidak memberikan rilis ketika mengadakan jumpa pers. Menurutnya, hal ini dikarenakan kurangnya personil humas yang memiliki kemampuan menulis rilis yang baik. Ia mengungkapkan demikian :

“Dulu itu ngga ada yang bisa buat rilis. Itu dulu saya yang minta, saya bilang ada ngga orang Humas yang tertairk belajar buat media release yang bener gitu, lalu ada Agung ini. Nah kita itu sekarang membantu Agung itu untuk membuat rilis yang bagus... Nah, Humas-Humas itu sayangnya ngga seperti Agung ini, mereka ngga mau belajar.” (Informan 5)

Informan 5 mengungkapkan bahwa dulu ia dan rekan wartawan lainnya merasa tidak ada personil humas di Kemendikbud yang mampu menulis rilis sesuai dengan kaidah jurnalistik. Didorong oleh permasalahan tersebut, akhirnya muncul inisiatif dari wartawan untuk mengajarkan cara menulis rilis yang baik kepada personil humas, namun sayangnya tak banyak yang berminat untuk belajar.

Di samping jumpa pers dan rilis, Humas Kemendikbud juga mengadakan beberapa kegiatan *media relations* lainnya, seperti *press tour*, kunjungan ke kantor media, *workshop* dan forum wartawan. *Press tour* biasanya dilakukan dengan cara mengajak wartawan berkunjung ke lokasi atau tempat pelaksanaan program Kemendikbud, di mana di sana wartawan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi seluruh informasi yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan program Kemendikbud tersebut. Hal tersebut diutarakan oleh informan 4 :

“Kemudian mengajak kunjungan ke tempat-tempat a.. program Kemdiknas. Misalnya kemarin mau ada Hari Aksara Internasional. Kita koordinasi dengan unit yang menangani itu, lalu kita buat kunjungan ke tempat-tempat pemberantasan buta aksara.” (Informan 4)

Informan 4 menambahkan bahwa di Kemendikbud, rutin juga dilakukan kunjungan Menteri dan Humas ke kantor media atau yang sering dikenal sebagai *media visit*. Selain untuk mensosialisasikan kebijakan baru, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk membina hubungan baik dengan pihak media secara menyeluruh.

“Kadang-kadang kita siapkan kunjungan Pak Menteri ke kantor medianya, itu rutin. Terutama kalau ada kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya masif dan menyeluruh, termasuk ke media-media besar di daerah.” (Informan 4)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa humas berusaha untuk tidak membeda-bedakan media dalam kunjungan yang dilaksanakannya, di mana informan 4 menjelaskan bahwa kunjungan media tidak hanya dilakukan bagi media-media nasional di ibukota saja, melainkan juga media-media di daerah. Adanya kunjungan ke kantor media inipun dibenarkan oleh informan 5 yang berasal dari salah satu media cetak nasional di Indonesia. Di samping itu, informan 10 yang berasal dari media cetak daerah pun mengaku kantornya pernah dikunjungi oleh Humas Kemendikbud.

“...lalu pernah juga kunjungan ke kantorku sepertinya.” (Informan 5)

“Oh pernah, ke kantor pusatnya kan, kalau saya ya di Medan kantor pusatnya. Biasanya setiap ganti Menteri itu, mereka kunjungan. Atau kalau ada kunjungan ke daerah juga mampir.” (Informan 10)

Namun pelaksanaan *media visit* di Kemendikbud terlihat belum berjalan secara optimal seperti kegiatan *media relations* lainnya. Hal ini terlihat dari

sebagian besar informan yang mengaku belum pernah menerima kunjungan dari Humas Kemendikbud di kantornya. Dari kedelapan informan yang berasal dari kalangan wartawan, hanya 2 informan di atas yang mengaku pernah menerima kunjungan dari humas, sedangkan 6 informan lainnya mengaku belum pernah menerima kunjungan tersebut.

Kegiatan *media relations* selanjutnya adalah *workshop* dan seminar, di mana menurut informan 10, dalam kegiatan yang difasilitasi oleh humas tersebut, wartawan bertindak sebagai peserta kegiatan.

“Oh iya, workshop, seminar, kadang penulisan buku. Jadi mereka yang adakan, biasa setahun sekali, kita jadi pesertanya.” (Informan 10)

Diakui oleh informan 2 yang merupakan praktisi humas Kemendikbud, adanya kegiatan *workshop* bagi wartawan di lingkungan Kemendikbud memang lahir dari inisiatif wartawan itu sendiri. Permintaan datang dari wartawan dan humas yang bertindak sebagai penghubung antara wartawan dengan pihak internal Kemendikbud berusaha memfasilitasi keinginan dan permintaan wartawan tersebut sebagai bentuk pelayanan humas terhadap kebutuhan dan keinginan wartawan.

“Workshop ini memang dikembangkan oleh teman-teman wartawan sendiri, itu rutin dilakukan setahun sekali. Wartawan di sini cukup proaktif ya, kalau ada sesuatu yang baru itu dia kerjasama dengan unit-unit kerja di sini.” (Informan 2)

Selain kegiatan *media relations* yang bersifat formal dan resmi, Humas Kemendikbud juga menyelenggarakan beberapa kegiatan yang sifatnya informal yang bertujuan untuk membina dan menjaga hubungan baik dengan wartawan dalam suasana yang santai dan akrab, salah satunya adalah forum wartawan bernama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik). Forum ini berisi wartawan-wartawan yang sering meliput di sektor pendidikan, khususnya di Kemendikbud. Dalam Fortadik ini, humas hanya berperan memfasilitasi saja, sedangkan pelaksanaan teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada wartawan, seperti diungkapkan oleh informan 1 berikut ini :

“Jadi di sini, di Kemdiknas, sejak lama sebelum saya ada yang namanya Fortadik. Fortadik itu adalah kumpulan forum wartawan yang meliput bidang

pendidikan. Nah, Kemdiknas sampai hari ini memilih posisi hanya memfasilitasi. Dalam pengertian hanya menyediakan ruang, menyediakan a.. peralatan seperlunya, tapi tata kelolanya, memilih ketuanya segala macam itu mereka sendiri.” (Informan 1)

Forum ini seringkali dimanfaatkan oleh humas dan wartawan untuk bertukar pikiran mengenai kebijakan kementerian maupun isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat dalam format yang santai, seperti dikemukakan oleh informan 3 :

“Jadi begini a.. Forum Wartawan Pendidikan itu tidak melulu caranya serius gitu lho, tidak melulu kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kita secara lebih mendalam gitu kan, tapi itu juga kita barengi dengan gathering.” (Informan 3)

Seluruh informan sepakat bahwa Fortadik sangat membantu menjembatani antara Humas dengan Wartawan. Seperti diakui oleh informan 11, bagi wartawan, adanya Fortadik sangat membantu terutama dalam mewakili wartawan ketika harus berhubungan dengan humas. Menurutnya, jika ada wartawan yang memiliki ide atau isu yang ingin dibahas bersama humas, maka ia tidak perlu secara personal datang ke humas, melainkan dapat dibicarakan melalui Fortadik ini.

“Iya, saya lihat banyak manfaatnya. Misalnya a.. ada suatu hal atau ide yang kita pikirkan, ada isu yang ingin kita bahas, nah itu saya ngga perlu langsung ketemu Humas. Itu bisa melalui Fortadik ini untuk ayo dong disusun pertemuan dengan si ini.” (Informan 11)

Menurut informan 9, adanya Fortadik juga memperkuat keberadaan wartawan ketika berhadapan dengan narasumber. Ia menjelaskan, wartawan mungkin akan lebih kesulitan jika harus mencari narasumber sendiri. Dengan mengatasnamakan Fortadik, narasumber biasanya akan lebih mudah untuk ditemui dan diwawancarai sehingga keberadaan Fortadik sangat menguntungkan bagi wartawan.

“Biasanya itu karena ada Fortadik, karena kita bareng-bareng jadi lebih kuat sih. Kalau kita jalan sendiri cari narasumber itu akan lebih susah pasti, tapi kalau mengatasnamakan Fortadik itu biasanya lebih diperhatikan lah.” (Informan 9)

Selain itu, adanya Fortadik juga menguntungkan bagi sesama wartawan, di mana melalui forum ini, wartawan biasanya dapat bertukar informasi, baik berupa

nomor kontak narasumber, ataupun bertukar data-data untuk keperluan pembuatan berita. Sedangkan untuk humas sendiri, selain membantu menghubungkan dengan wartawan dalam momen-momen tertentu, adanya Fortadik juga sangat membantu dalam menyaring wartawan-wartawan yang meliput di Kemendikbud. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan 2 :

“Forum itu juga secara tidak langsung membantu kami ya Humas untuk memfilter wartawan-wartawan yang abal-abal haha. Itu kan namanya Fortadik ya, jadi biasanya kalau wartawan yang datangnya hanya sekali-sekali begitu tidak masuk dalam Fortadik.” (Informan 2)

Namun menurut informan 1, keberadaan Fortadik hanya menjembatani kepentingan antara humas dengan wartawan yang ada di Jakarta saja, sedangkan wartawan yang ada di daerah belum cukup terjangkau dengan adanya Fortadik ini, sehingga humas perlu menjalin hubungan yang baik juga dengan wartawan atau media yang ada di daerah di luar Jakarta. Berikut diungkapkan informan 1:

“Kalau untuk menjembatani kami dengan wartawan di sini sih sudah cukup, kami cukup dekat juga, sering tukar ide lewat forum ataupun sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi kalau secara keseluruhan Fortadik saja belum cukup ya, kegiatan Kemdiknas itu kan tidak hanya di Jakarta saja, banyak yang di daerah juga. Jadi di luar Fortadik pun, kami membangun hubungan dengan partner-partner di daerah.” (informan 1)

Di luar kegiatan forum Fortadik tersebut, informan 7 dari kalangan wartawan merasa saat ini humas jarang mengadakan kegiatan yang sifatnya informal dan santai. Padahal menurutnya, humas idealnya dapat melaksanakan kegiatan informal tersebut rutin setiap bulannya agar hubungan yang terjalin antara humas dan wartawan tetap terjaga dengan baik dan intens. Informan 7 mengaku, sempat ada usulan agar kegiatan yang sifatnya informal dapat dilakukan setiap bulannya, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak humas terkait usulan tersebut.

“Dulu sih kita pernah mencetuskan untuk diadakan setiap bulan, tapi ya gatau ya gimana itu a.. ngga ada kelanjutannya. Ngga jalan sih sepertinya.” (Informan 7)

Beberapa informan lainnya pun merasakan hal yang serupa. Informan 8, 9, 10, 11, dan 12 misalnya, mengungkapkan bahwa kegiatan yang sifatnya informal seperti *media gathering* hanya dilakukan setahun sekali dan biasanya dilakukan

bertepatan dengan momen tertentu, seperti misalnya buka puasa atau peresmian ruang pers baru. Di luar momen-momen tersebut, humas hampir tidak pernah mengadakan kegiatan yang sifatnya informal.

5.2.3 Akses Informasi Bagi Wartawan

Dalam menjalin hubungan dengan media, akses informasi menjadi suatu hal yang sangat penting sebab media sebagai mitra kerja humas membutuhkan akses informasi yang memadai agar dapat menghasilkan pemberitaan yang maksimal. Kementerian yang cenderung bersifat birokratif seringkali mempersulit wartawan untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkannya sebab banyak prosedur yang harus dilewati oleh wartawan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Informan 3 pun mengakui hal tersebut. Menurutnya, secara formal, setiap wartawan yang ingin memperoleh akses informasi dari setiap unit di Kemendikbud memang harus melalui Pusat Informasi Humas (PIH) terlebih dahulu sebagai pihak yang menjalankan fungsi Humas di Kemendikbud. Hal ini sebenarnya bukan dimaksudkan untuk mempersulit kerja wartawan, melainkan untuk mempermudah humas mengontrol informasi yang keluar-masuk di lingkungan Kemendikbud. Namun pada pelaksanaannya ternyata tidaklah demikian. Banyak wartawan yang diperbolehkan langsung menghubungi narasumber yang diinginkan tanpa perlu melalui PIH, seperti diungkapkan oleh informan 3 :

“Formal, memang harus melalui PIH. Secara personal, tidak bisa dibatasi. Silahkan sepanjang pejabatnya mau.” (Informan 3)

Menurut informan 4, akses wartawan untuk mendapatkan informasi di Kemendikbud memang tidak dibatasi karena hal tersebut merupakan perintah langsung dari Mendikbud sendiri.

“Jadi kita memang tidak pernah membatasi akses informasi. Yang dibatasi oleh Pak Menteri itu satu, tidak boleh menghambat orang lain untuk mencari informasi. Nah itu yang digariskan.” (Informan 4)

Adanya pemberian arahan langsung dari Mendikbud terkait kebebasan dan keterbukaan arus informasi di lingkungan Kemendikbud bagi wartawan

memperlihatkan bahwa pucuk pimpinan telah memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai pentingnya informasi yang cepat bagi wartawan. Hal ini tersebut tentu sangat baik dalam mendukung pelaksanaan hubungan media yang optimal di Kemendikbud.

Informan 1 menambahkan, humas lebih mengambil posisi sebagai fasilitator dalam seluruh pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, dalam artian, humas tidak menempatkan diri sebagai sumber utama bagi wartawan untuk mendapatkan informasi, melainkan membantu mengarahkan wartawan untuk mendapatkan narasumber yang sesuai dan menguasai isu.

“Pada prinsipnya, semua informasi, semua narasumber dibuka, silahkan wartawan akses ke setiap pejabat. Bahkan Humas, kami di sini menempatkan diri sebagai fasilitator. Ingin ketemu siapa? Ingin masalah apa? Masalah sertifikasi guru misalnya, langsung ke Bapak ini karena bagian sertifikasi guru. Kalau ingin tentang beasiswa atau isu-isu kediktian, langsung ke Dikti. Saya lebih banyak menyarankan wartawan itu untuk langsung ke ahlinya saja lah.” (Informan 1)

Masih menurut informan 1, di Kemendikbud sendiri tidak ada kebijakan yang menjadikan humas sebagai satu-satunya corong dalam mencari informasi. humas memang diberi kekuasaan untuk memberikan tanggapan seputar berbagai isu yang beredar di masyarakat, namun sebagai salah satu praktisi humas di Kemendikbud, informan 1 mengaku hanya memberikan tanggapan sebagai pengulangan terhadap apa yang disampaikan Menteri sebelumnya.

“Dan kebijakan dasar dari kementerian juga tidak menjadikan Humas satu-satunya corong di sini. Artinya semua orang boleh bicara. Saya pun diberikan kebebasan oleh Pak Menteri untuk memberi tanggapan, tapi kan saya sebagai Humas, siapapun Kepala Humas harus mengucapkan kembali apa yang diucapkan pimpinan kan.” (Informan 1)

Kebebasan wartawan untuk mengakses informasi langsung melalui narasumber yang diinginkan bukan serta-merta berarti humas tidak berperan sebagai penjaga pintu utama keluar-masuknya arus informasi di lingkungan Kemendikbud. Seperti diungkapkan oleh informan 2, PIH tetap menjadi pintu utama keluar masuknya informasi bagi publik umum. Setiap informasi yang diminta oleh publik, baik informasi yang berasal dari PIH maupun unit lain, haruslah atas sepengetahuan dan seizin PIH. Namun memang kebijakan satu pintu

tersebut hanya berlaku bagi publik umum saja dan tidak berlaku bagi wartawan. Diakui oleh informan 2, wartawan diberikan keistimewaan dalam hal akses informasi di Kemendikbud karena kemitraan yang sudah terjalin di antara keduanya, di mana wartawan diberikan kebebasan untuk langsung menghubungi narasumber dari unit manapun yang mereka butuhkan tanpa harus melalui prosedur formal di PIH.

“Nah layanan informasi publik itu, setiap publik yang meminta informasi itu harus melalui satu pintu yaitu Pusat Informasi dan Humas (PIH), yaitu di bidang pencitraan di sub-bidang aspirasi masyarakat yang bagiannya adalah di gerai informasi di bawah itu. Itu pintu masuk segala informasi terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik... Nah tapi kalau wartawan itu memang agak istimewa, itu a.. karena ya kemitraan itu, jadi kita berikan kemudahan yang sifatnya membuka a.. ruang selebarnya kepada wartawan untuk memperoleh informasi, tetapi tetap kita pantau sepanjang itu memang informasi yang dikuasai.” (Informan 2)

Informan 6 dan 7 yang berasal dari kalangan wartawan mengakui bahwa akses informasi yang disediakan oleh humas cukup baik dan wartawan pun mudah mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkannya dari humas :

“Jadi ketika saya minta informasi, agenda, data ke Humas sih gampang lah kalau di sini, akses informasinya gampang lah.” (Informan 6)

“Ya sementara cukup baik saja haha.. Artinya informasi-informasi kegiatan cukup sering diberikan, disms, diemail.” (Informan 7)

Dari ungkapan kedua informan di atas, terlihat bahwa akses informasi yang dimaksud oleh mereka merujuk pada akses informasi untuk mengetahui agenda kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Informan 8 pun melihat bahwa akses informasi yang disediakan oleh humas cukup baik dan informasinya mudah diakses. Menurut informan 8, seringkali ia menerima materi-materi yang dipresentasikan saat jumpa pers menunjukkan betapa mudah dan terbukanya humas di Kemendikbud. Hal tersebut menurutnya sangat membantu dalam menyusun latar belakang berita yang dibuatnya.

“Selama ini sih a.. lumayan gampang ya, kalau misalkan dari mereka, Humas itu kalau ngasih data itu ya lengkap karena data yang dipaparin dari Menteri itu biasanya dikirim ke kita. Jadi kita kalau mau buat tulisan lagi, backgroundnya uda ada lah gitu.” (Informan 8)

Pengiriman seluruh materi jumpa pers ternyata tidak serta merta dianggap sebagai hal yang membantu bagi wartawan. Informan 10 misalnya mengungkapkan bahwa terkadang hal tersebut justru mengganggu wartawan sebab tidak semua wartawan memiliki banyak waktu untuk membaca seluruh materi yang dikirimkan. Masih menurut informan 10, dirinya justru merasa lebih terbantu jika humas langsung mengirimkan materi-materi yang diberikan saat jumpa pers dalam bentuk rilis yang sudah rapi.

“Kadang paparan slide-slide itu juga mereka kasih, ah tapi jadi menuh-menuhin saja, jangan seperti ini dong, maunya yang sudah dalam bentuk rapi begitu, dalam bentuk rilis yang rapi, jangan dalam bentuk slide proyektor dikasih semua, bikin tambah pusing.” (Informan 10)

Informan 9 yang memiliki pengalaman meliput di Kementerian lain mengungkapkan bahwa meskipun akses informasi di Kemendikbud belumlah benar-benar baik, namun akses informasi yang diberikan cenderung lebih baik dibandingkan dengan akses informasi di Kementerian lain.

“A.. kalau menurutku nih ya, ya mungkin ada yang bilang Diknas itu jelek, tapi kalau dibanding dengan Kementerian lain, dari yang jelek-jelek itu, ya Diknas inilah yang paling mending.” (Informan 9)

Informan 5 memiliki pandangan yang agak berbeda mengenai akses informasi yang disediakan oleh humas. Dirinya merasa akses informasi yang disediakan oleh humas masih sangat terbatas. Ketidakmampuan humas dalam menyediakan informasi serta data yang dibutuhkannya menjadi alasan utama mengapa dirinya menganggap akses informasi yang disediakan masih sangat terbatas. Hal tersebut tergambar dalam penuturannya berikut ini :

“Ya aku sih masih merasa terbatas, kan harus nyari sendiri toh. Ya ngga apa-apa sih, aku ngga keberatan karena memang harus seperti itu, hanya kadang-kadang ada hal-hal yang ngga bisa kita tembus tapi bisa ditembus oleh teman-teman Humas.” (Informan 5)

Berdasarkan penuturan di atas, akses informasi yang dimaksud oleh informan 5 tidak hanya sebatas informasi agenda saja, melainkan lebih kepada informasi maupun data yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu berita. Informan 11 pun sependangan dengan informan 5. Informan 11 merasa humas kurang proaktif dalam menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh wartawan

dan wartawan harus memiliki inisiatif sendiri untuk meminta data dan informasi yang diperlukannya.

“Akses informasi menurut saya cenderung terbatas ya kalau dari Humas, lebih banyak dari Menteri atau pejabat eselon. Itupun inisiatif sendiri kita mencari mereka, misalnya doorstop Menteri atau dari acara doorstop lagi.” (Informan 11)

Sedangkan menurut informan 12, informasi dari humas cenderung mudah diakses jika berkaitan dengan berita-berita yang bernada positif, namun iapun seringkali masih merasa sulit mengakses informasi dari humas, terutama untuk berita-berita yang cenderung bernada negatif dan dirasa membahayakan Kemendikbud.

“Kalau untuk informasi yang bernada positif sih mereka cukup terbuka ya, dalam artian kalau kita minta ya kadang dicarikan, kadang ya harus cari sendiri, tapi terbuka begitu lho. Tapi kalau terkait berita yang kurang menguntungkan bagi mereka atau cenderung mengancam, hampir kebanyakan mereka susah ditembus untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan itu.” (Informan 12)

Ketidakpuasan terhadap penyediaan akses informasi oleh humas pada akhirnya menyebabkan beberapa informan wartawan cenderung lebih sering mencari narasumber langsung secara personal untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya ketimbang menghubungi humas untuk meminta bantuan dalam mendapatkan informasi tersebut.

Informan 12 mengaku ketika baru pertama kali meliput di Kemendikbud, ia sering datang ke bagian humas untuk menanyakan informasi-informasi yang dibutuhkannya terkait pemberitaan yang akan ditulisnya. Namun adanya pembatasan-pembatasan yang secara tidak langsung dilakukan oleh humas pada akhirnya mendorong informan 12 untuk lebih sering menghubungi narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi atau berita yang diinginkannya.

“Dulu waktu pertama meliput di sini, yang kita gedor-gedor pertama kali Humas. Tapi ya mereka begitu, udahlah jangan terlalu begini, udahlah jangan terlalu begitu, jadi akhirnya lebih suka langsung cari ke personal narasumbernya saja.” (Informan 12)

Selain adanya pembatasan-pembatasan, humas seringkali juga dirasa tidak mampu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh wartawan secara

cepat sehingga mengakibatkan wartawan jarang mengandalkan humas sebagai sumber informasinya, seperti yang dijelaskan oleh informan 5 :

“Aku sih lebih suka langsung ke personalnya saja supaya ngga ribet. Ya abis tanya ke mereka juga mereka ngga tahu, ngga punya gitu lho data-datanya.” (Informan 5)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wartawan seringkali hanya mencari humas ketika memerlukan data-data yang sifatnya pendukung saja, atau bahkan hanya sekedar untuk mencari informasi seputar agenda kegiatan saja, tidak lebih dari itu. Hal ini mungkin terjadi karena humas dirasa kurang kredibel dalam memberikan pernyataan kepada wartawan sehingga pernyataannya dinilai kurang memiliki nilai berita, seperti yang diungkapkan oleh informan 9 :

“Ngga lah, lebih sering langsung ke narasumber yang terkait, mungkin ke Pak Menteri atau Dirjen. Kalau dari internalku sendiri, dari kantorku, itu Humas itu ngga bisa a.. ada kan kalau di tempat lain itu Humas boleh bicara, Humas ada nilai beritanya, nah kalau di tempatku itu ngga bisa.” (Informan 9)

Kebebasan akses informasi bagi wartawan yang diterapkan di Kemendikbud ternyata tidak dipandang sebagai sebuah hambatan oleh humas dalam mengontrol keluar-masuknya informasi di lingkungan Kemendikbud. Menurut informan 1 yang merupakan praktisi humas di lingkungan Kemendikbud, pengontrolan terhadap informasi yang keluar-masuk di lingkungan Kemendikbud saat ini sudah semakin lebih baik karena adanya penerapan azas saling percaya antar setiap pihak, yaitu antara humas, pejabat Kemendikbud, dan wartawan itu sendiri. Menurutnya, kesalingpercayaan itu yang diakui mempermudah tugas humas dalam mengontrol arus informasi yang ada.

“Jadi media relations di sini dibangun atas dasar trust, kepercayaan. Kita percaya dengan media, media juga demikian ke kita. Kita percaya dengan seluruh pejabat juga akan memberikan pernyataan yang positif untuk institusi, semua saling trust saja. Pak Menteri juga demikian, tidak pernah beliau mengarahkan kalau semua keterangan harus dari Humas, itu ngga ada arahan seperti itu.” (Informan 1)

Peneliti kemudian mencoba mendalami informasi/ data seperti apa yang biasanya diinginkan oleh wartawan. Dari pemaparan para informan, peneliti menemukan bahwa informasi yang kebanyakan diminati oleh wartawan adalah informasi yang aktual yang sedang menjadi *trend* pemberitaan saat itu, serta yang

menyangkut kepentingan banyak orang, seperti misalnya diungkapkan oleh informan 9 berikut ini:

“Nah kalau koranku itu sih lebih suka ke informasi yang menyangkut semakin banyak orang itu semakin suka. Misalnya sertifikasi guru, dana BOS, ya begitu. Pertama karena pembacanya akan banyak, terus kan menyangkut kepentingan orang banyak.” (Informan 9)

Temuan yang menarik menurut peneliti adalah apa yang disampaikan oleh informan 6. Menurutnya, media tempatnya bekerja cenderung menyukai berita-berita yang sifatnya mengkritisi pemerintah, sehingga mau tidak mau iapun lebih banyak mencari informasi yang terkait dengan kekurangan-kekurangan dalam program ataupun kebijakan pemerintah, bukan dalam artian untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk dikritisi dan diberikan masukan.

“Itu sih tergantung medianya ya. Kalau misalnya dari koran saya itu biasanya mencari a.. ya lebih mencari kritik untuk pemerintah, kurangnya dari program ini apa, kurangnya dari pemerintah pusat untuk jalanin program ini apa, masih jalan atau ngga program itu, masyarakat merasakan program itu atau ngga.” (Informan 6).

Terlihat bahwa informasi yang dicari atau diminati wartawan sangat bergantung pada media tempat ia bernaung karena masing-masing media memiliki karakter pemberitaan yang berbeda-beda sehingga wartawan pun pada akhirnya harus menyesuaikan berita yang ditulisnya dengan media tempat ia bekerja.

Menurut informan wartawan, tidak semua informasi yang mereka inginkan dapat disediakan oleh humas. Untuk informasi yang sifatnya positif, humas terkadang bisa menyediakan klarifikasi ataupun data-data pendukung yang dibutuhkan, namun ada kalanya wartawan juga harus mencari langsung data maupun informasi yang dibutuhkannya itu ke narasumber atau unit kerja yang terkait dengan isu atau informasi yang sedang dicari. Khusus untuk informasi yang sifatnya negatif, mayoritas informan wartawan menilai bahwa humas cukup terbuka menanggapi. Namun untuk mendapatkan klarifikasi terhadap pemberitaan seperti itu, merekalah yang harus proaktif bertanya kepada humas, seperti misalnya diungkapkan oleh informan 6 berikut ini:

“Kalau yang seperti itu biasanya harus kita yang proaktif mencari ya karena kalau dari mereka selama ini sepertinya kebanyakan berita-berita yang positif ya yang dikasih tahu. Kalau yang negatif biasanya sih kita sendiri yang harus nanya haha.. Tapi mereka cukup terbuka sih kalau ditanya-tanya seputar yang agak negatif gitu.” (Informan 6)

Menurut informan 11, meskipun humas selalu berusaha memberikan informasi yang sifatnya positif dan menguntungkan bagi Kemendikbud, namun sejak Pak Nuh menjabat sebagai Mendikbud, humas dirasa lebih terbuka untuk menyampaikan berita yang baik maupun yang kurang baik. Namun humas meminta agar pemberitaan yang dibuatpun tetap berimbang, di mana wartawan harus secara jelas menunjukkan mana bagian yang dirasa masih kurang dan mana bagian yang dirasa sudah berhasil.

“Tetapi belakangan ini, dengan adanya Pak Nuh, eranya Pak Nuh ini lebih terbuka. Kalau jelek mereka katakan jelek tapi mereka minta agar kita juga fair, jadi jeleknya di mana, bagusnya di mana.” (Informan 11)

Meskipun seringkali wartawan harus lebih proaktif dalam menanyakan informasi yang bersifat negatif, namun keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang positif maupun menjawab pemberitaan yang negatif memperlihatkan upaya yang baik dari humas dalam menerapkan keterbukaan di lingkungan Kemendikbud. Humas yang baik memang seharusnya tidak menutup-nutupi informasi apapun kepada wartawan. Bahkan untuk informasi yang bersifat negatif pun, humas harus mampu membalutnya menjadi sebuah pemberitaan yang tetap berimbang tanpa harus menyembunyikannya dari hadapan wartawan.

5.2.4 Fasilitas Peliputan

Dalam menjalin hubungan dengan media, fasilitas peliputan yang disediakan oleh humas menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Fasilitas yang baik dapat mendukung dan mempermudah tugas peliputan wartawan di sebuah lembaga. Sebaliknya, fasilitas yang kurang baik tentu dapat menghambat tugas peliputan wartawan.

Di Kemendikbud, fasilitas yang disediakan untuk mendukung dan mempermudah tugas peliputan wartawan adalah ruang pers. Menurut informan 4,

ruang pers yang disediakan oleh humas dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mempermudah kerja wartawan di Kemendikbud, seperti misalnya komputer dan internet. Karena kemitraan yang telah terbangun dengan rekan-rekan wartawan di kemendikbud, maka humas pun menyerahkan pengelolaan ruang pers tersebut langsung kepada wartawan.

“Jadi kita berikan ruangan khusus wartawan, dikelola oleh wartawan. Jadi ada komputer, ada dispenser, silahkan dipakai dan dirawat. Kita berikan juga akses internet di sana. Jadi ada ngga ada jumpa pers, di ruangan itu pasti ada wartawan.” (Informan 4)

Ditambahkan oleh informan 2, adanya fasilitas komputer dan internet dimaksudkan untuk mempermudah wartawan dalam pembuatan dan pengiriman berita ke kantornya masing-masing. Humas memahami kewajiban para wartawan untuk menghasilkan berita yang aktual, sehingga humas pun memberikan fasilitas seperti komputer dan internet agar segera setelah Kemendikbud mengadakan acara, wartawan dapat langsung mengirimkan beritanya dari tempat itu juga.

“Teman-teman wartawan itu kita fasilitasi dengan press room yang berada di Gedung C lantai dasar. Di situ kita sediakan komputer yang terhubung dengan akses internet sehingga bisa mengirim berita saat liputan di sini. Katakanlah siang ini dia meliput pelantikan Pak Menteri, selesai pelantikan dia bisa langsung bekerja dan mengirim berita di bawah.” (Informan 2)

Adanya ruangan khusus wartawan yang disediakan untuk mendukung tugas peliputan wartawan di Kemendikbud merupakan suatu bukti pelayanan yang berusaha diberikan oleh humas bagi wartawan. Menurut informan 1, penyediaan ruang khusus wartawan itu juga merupakan bukti adanya hubungan pertemanan yang baik antara humas dengan wartawan.

“Nah, press room itu juga hasil persahabatan kita dengan wartawan. Jadi tadinya ruangan wartawan itu gabung dengan ada namanya gerai informasi di bawah itu.” (Informan 1)

Seluruh informan wartawan pun membenarkan adanya ruang pers tersebut. Menurut informan 5, fasilitas ruang pers yang disediakan oleh Kemendikbud termasuk lebih baik jika dibandingkan dengan kementerian lainnya.

“Ya ruangan pers itu, itu kan ada komputer, lalu ada jaringan wifi. Ya itu saja, itu sudah lebih baik sih. Menurutku itu baguslah dibandingkan dengan.. ngga tau, kata teman-teman yang pernah di Kesehatan sih Dikbud lumayan lebih

bagus. Di Deplu juga, aku pernah di Deplu, itu jauh lebih bagus di sini.”
(Informan 5)

Meskipun demikian, masih banyak pula informan wartawan yang mengeluhkan fasilitas di dalam ruang pers yang sering rusak sehingga pada akhirnya penyediaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak dapat benar-benar secara optimal mendukung tugas peliputan wartawan. Seperti misalnya informan 7 yang menilai bahwa fasilitas yang disediakan oleh Humas Kemendikbud sekarang masih tergolong kurang untuk ukuran kementerian besar seperti Kemendikbud.

“Ya ini saja sepertinya, ruangan pers, a.. sudah cukup, ya walaupun untuk ukuran lembaga besar seperti Kemdikbud harusnya lebih memadai lagi.”
(Informan 7)

Informan 9 pun menambahkan bahwa Kemendikbud yang merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar seharusnya mampu menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi wartawan, misalnya seperti koneksi internet yang kuat agar mempermudah pembuatan serta pengiriman berita ke kantor media.

“Ya kalau fasilitas sih sama ya di mana-mana. Di Diknas itu lumayan sih ada ruang khusus pers, tapi yang sering kita keluhkan itu kan Diknas itu anggarannya yang paling besar begitu ya, a.. jauhlah sama departemen-departemen lain yang anggarannya kecil, itu termasuk memble ya, internetnya.” (Informan 9)

Informan 10 bahkan membandingkan Kemendikbud dengan kementerian lain yang menurutnya memiliki anggaran lebih sedikit dibandingkan Kemendikbud, yaitu Kementerian Agama (Kemenag). Menurut informan 10, Kemenag yang memiliki anggaran lebih kecil dibanding Kemendikbud mampu menyediakan fasilitas yang lebih memadai bagi para wartawan yang meliput di sana, seperti koneksi internet yang kuat dan fasilitas komputer yang memadai. Meskipun hal tersebut terkesan teknis dan kecil, namun sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan karena berpengaruh terhadap kegiatan peliputan wartawan di suatu kementerian.

“Padahal sebenarnya sudah bagus ada ruang pers, tapi sarananya harus ditingkatkan lagi, lebih dibagusin lagi. Ini banyak yang ngga berfungsi sih. Saya bingung apalagi yang lain ya Kementerian yang uangnya lebih sedikit. Tapi Kementerian yang lain ya, Kementerian Agama itu bagus internetnya

konek semua, besar-besar lagi lagi. Jadi ternyata uang banyak itu tidak berpengaruh, tidak berbanding lurus, tergantung willnya begitu.” (Informan 10)

Adanya anggapan bahwa Kemendikbud memiliki anggaran yang besar ternyata ditanggapi berbeda oleh informan 2 sebagai Humas Kemendikbud. Menurutnya selama ini ada persepsi keliru yang beredar di masyarakat, termasuk di kalangan wartawan, mengenai anggaran yang dimiliki oleh Kemendikbud. Masyarakat menilai Kemendikbud memiliki anggaran yang besar sehingga seharusnya dapat memberikan pelayanan yang memadai bagi setiap *stakeholdernya*, namun informan 2 mengatakan bahwa pada kenyataannya, anggaran yang diterima Kemendikbud tidaklah sebesar yang diperkirakan berbagai pihak.

“Banyak persepsi yang keliru di masyarakat tentang anggaran 20% dari total APBN itu ke Kemdiknas, itu keliru. Total 20% dari APBN itu sekitar 287 triliun, yang diterima Kemdiknas itu hanya 57 triliun, sisanya itu tersebar di 14 kementerian lembaga, itu ada di Depkes, di Depag dan lainnya.” (Informan 2)

Informan 2 mengaku bahwa humas beserta segenap jajaran di Kemendikbud telah berusaha mengklarifikasi kekeliruan persepsi tersebut, namun hingga kini mereka belum berhasil merubah kekeliruan persepsi yang ada di masyarakat.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam penyediaan fasilitas di Kemendikbud, namun tersedianya ruang khusus wartawan dinilai sebagai suatu gebrakan baik yang dilakukan oleh Humas Kemendikbud. Menurut beberapa informan dari kalangan wartawan, sebelumnya ruang pers di Kemendikbud bergabung dengan gerai informasi dan media. Gerai yang juga digerakkan oleh humas tersebut menyediakan berbagai informasi seputar Kemendikbud yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Menurut penuturan beberapa informan, gerai tersebut diisi oleh beberapa pegawai yang bertugas memberikan informasi-informasi yang diminta oleh masyarakat umum, sehingga terkadang wartawan merasa kurang bebas ketika harus mencari atau membuat berita di gerai tersebut. Oleh karena itu, ketika humas menyediakan ruang khusus pers, wartawan sangat menyambut baik hal tersebut.

Informan 7 mengaku, ruang pers yang ada saat ini merupakan suatu pencapaian yang baik bagi humas di Kemendikbud karena sebelumnya, selama puluhan tahun, humas belum mampu menyediakan fasilitas khusus bagi wartawan seperti sekarang ini.

“Tapi ini sebuah terobosan. Ini baru beberapa bulan lho. Sekian puluh tahun kita belum bisa terobos. Kita terobos terus Pak Ibnu dan Pak Staf Khusus Menteri, baru bisa ini.” (Informan 7)

Informan 8 menambahkan, adanya ruang khusus pers sangat membantu para wartawan untuk dapat menghasilkan berita dengan lebih fokus. Menurutnya, ketika masih bergabung dengan gerai informasi, wartawan cenderung merasa terbatas dengan adanya pegawai-pegawai yang ada di gerai tersebut.

Apa ya a.. ya paling ini aja sih ruang wartawan. Ini udah lumayan juga sih, karena kita sebelumnya itu kan gabung sama Gerai Informasi. Ya kan maksudnya kalau di sini, kita jadi jauh lebih bisa a.. berkreasi lah bahasanya haha.. dibandingkan kalau kemarin-kemarin kan ngga enak, kalau mau bercanda atau apa gitu kan susah.” (Informan 8)

Adanya ruang pers yang dilengkapi dengan fasilitas komputer dan internet memang ditujukan humas untuk membantu mempermudah pekerjaan wartawan saat harus membuat berita di lingkungan Kemendikbud. Sayangnya, perawatan fasilitas yang kurang memadai dari pihak humas pada akhirnya membuat fasilitas yang disediakan menjadi tidak dapat digunakan secara optimal oleh wartawan. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas bagi wartawan yang disediakan oleh Humas Kemendikbud terbilang belum memadai.

5.2.5 Tanggapan Humas Terhadap Berita Yang Bernada Negatif atau Tidak Dimuat

Sebelumnya telah disinggung mengenai perbedaan kepentingan yang dimiliki humas dan wartawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. humas yang mewakili sebuah lembaga tentu menginginkan adanya pemberitaan yang positif terhadap lembaganya, sebaliknya yang diinginkan wartawan bukanlah semata-mata berita yang bernada positif. Wartawan cenderung ingin menulis berita yang memiliki *news value* dan terkadang bersifat mengkritisi.

Berita yang mengkritisi itu seringkali dianggap Humas sebagai pemberitaan yang memojokkan lembaganya, padahal dari sisi wartawan, pemberitaan itu diangkat semata-mata untuk menjalankan fungsi kontrol sosial yang diembannya.

Hampir seluruh informan wartawan mengaku pernah menulis berita yang cenderung bernada negatif. Bernada negatif di sini merujuk pada penulisan berita yang sifatnya mengkritisi kekurangan, kelemahan serta kegagalan program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ketika ditanya mengenai tanggapan dari humas terhadap pemberitaan tersebut, informan dari kalangan praktisi humas Kemendikbud mengatakan bahwa biasanya humas bersama Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media akan mendiskusikan terlebih dahulu pemberitaan negatif yang beredar itu, apakah perlu diberikan tanggapan atau tidak. Jika perlu, maka tindakan yang akan dilakukan adalah mengadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan yang dianggap keliru. Berikut diungkapkan informan 2:

“Berita negatif yang perlu mendapat tanggapan akan kita tanggapi, biasanya yang memojokkan Kemdiknas kita analisis, kita diskusikan dengan Staf Khusus Mendiknas Bidang Media, apakah itu diberikan hak jawab atau tidak. Kalau perlu, kita susun berita untuk hak jawab, tapi kalau itu sifatnya mengkritik untuk memberi masukan, itu kita diskusikan lalu biasanya kita siapkan penjelasan yang akan diberikan melalui biasanya jumpa pers.” (Informan 2)

Menurut informan 2, jumpa pers dipilih sebagai tindakan untuk menanggulangi pemberitaan yang negatif agar semua wartawan mengetahui bagaimana duduk persoalan yang sesungguhnya. Humas memang tidak ingin memojokkan media atau wartawan tertentu yang menulis pemberitaan negatif seputar Kemendikbud. Lebih lanjut, informan 4 mengungkapkan bahwa adanya pemberitaan negatif tersebut justru menjadi kesempatan bagi Humas dan Kemendikbud untuk dapat memberikan penjelasan dan fakta-fakta yang sebenarnya kepada wartawan.

“Jadi jangan kita sudutkan media yang memberitakan seperti itu, justru kita berterima kasih. Jadi pemberitaan negatif itu wajar, tinggal kita balik untuk menjadi positif. Jadikan pemberitaan negatif itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya.” (Informan 4)

Namun dari sisi wartawan, informan 9 melihat, jumpa pers biasanya diadakan ketika ada pemberitaan negatif yang berskala nasional, di mana biasanya berita-berita tersebut ditulis oleh media-media berskala nasional. Ia mengaku beberapa kali pernah menulis pemberitaan yang bernada negatif atau bersifat mengkritisi, namun jarang sekali mendapat tanggapan dari humas. Menurutnya, hal ini dikarenakan dirinya yang berasal dari media cetak daerah, bukan media yang berskala nasional.

“Tergantung juga itu media nasional atau lokal. Seperti misalnya Kompas. Kompas itu menulis apa saja pasti akan selalu menapat perhatian dari Kemendikbud, ya dari Humasnya ya dari unit lainnya. Hampir setiap Kompas menulis jelek pasti besoknya ada konferensi pers, itu hampir selalu. Nah kalau aku itu karena koranku bukan koran apa-apa ya haha, jadi ya jarang ada tanggapan atau dibuat konferensi pers begitu kalau ada berita-berita jelek yang kita tulis.” (Informan 9)

Selain tanggapan secara institusional berupa jumpa pers, pendekatan secara personal kepada wartawan pun seringkali dilakukan oleh humas. Informan 1 mengaku pendekatan personal yang biasa ia lakukan adalah melakukan perbincangan yang “menyentil” namun dalam suasana santai dan bercanda. Ia menuturkan demikian:

“Kalau ada misalnya, saya secara pribadi juga suka ‘wah bagaimana nih, kunjungan dengan menteri tapi yang jadi headline bukan menteri’ haha ketawa mereka. Jadi sifatnya sambil bercanda tapi nyentil gitu lho haha.” (Informan 1)

Beberapa informan dari kalangan wartawan pun mengaku pernah didekati secara personal oleh humas terkait pemberitaan negatif yang dibuat oleh mereka. Informan 8 misalnya, ia mengaku pernah didekati secara personal oleh humas ketika menulis masalah konteks massal. Ia mengungkapkan bahwa humas meminta agar ia tidak menulis berita yang terlalu keras. Berikut penuturannya :

“Oh saya kebetulan dulu pernah seperti itu haha. Waktu itu saya menulis tentang konteks massal atau apa gitu ya, terus saya dihubungi oleh Humas di sini, dibilangin kalau beritanya jangan keras-keras.” (Informan 8)

Berbeda dengan informan 8 yang pernah didekati secara personal oleh humas, informan 5 justru langsung dihubungi oleh Mendikbud jika menulis pemberitaan yang bernada negatif.

“Langsung ditelepon Pak Nuh haha, ditanyalah tentang pemberitaan itu, lalu kalau saya sih biasanya minta mereka buat bantahannya saja. Jadi mereka itu biasanya buat konpres.” (Informan 5)

Informan 5 mengaku tidak pernah dihubungi oleh humas ketika menulis pemberitaan yang negatif. Tindakan justru datang dari Mendikbud langsung. Menurut informan 5, kondisi seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi. Ia beranggapan, humaslah yang seharusnya memberikan tanggapan jika ada pemberitaan yang kurang menguntungkan bagi Kemendikbud, bukan Mendikbud. Menurutnya, Kepala Humas kurang asertif dalam menanggapi pemberitaan yang beredar di media massa padahal seharusnya, sebelum pejabat setingkat Menteri mengetahui pemberitaan tersebut, humas sudah terlebih dahulu mengetahuinya dan mencari tahu penyebab timbulnya pemberitaan seperti, sehingga Menteri tidak perlu turun tangan untuk menyelesaikannya.

“Seharusnya Pak Ibnu itu lebih, nah ini dia, ngga tahu ini salahnya siapa tapi seharusnya Pak Ibnu itu sebagai kepala lebih asertif untuk mencari tahu gitu, kenapa Pak Nuh bicara tentang ini, kenapa kok sampai keluar isu ini, supaya kalau misalnya Pak Nuh atau siapa itu berhalangan, atau wartawan manapun telepon Pak Ibnu itu Pak Ibnu bisa menjelaskan.” (Informan 5)

Melihat penjelasan di atas, terlihat bahwa informan 5 menganggap humas belum bisa menjalankan tugasnya sebagai juru bicara kementerian sebab menurutnya, humas tidak selalu mengetahui seluk-beluk timbulnya pemberitaan negatif di media. Padahal untuk mejadi juru bicara dan memberikan penjelasan ataupun klarifikasi kepada media, humas setidaknya harus mengetahui apa penyebab munculnya isu atau pemberitaan negatif itu.

Adanya pemberitaan negatif seringkali dikaitkan dengan permasalahan uang amplop. Budaya memberi uang amplop memang seringkali dilakukan oleh humas demi mendapatkan pemberitaan yang positif di sebuah media. Menanggapi hal tersebut, informan 4 yang dua tahun belakangan telah menjalin hubungan profesional dengan wartawan mengaku bahwa di lingkungan Kemendikbud, uang amplop merupakan sesuatu yang dilarang. Informan 4 mengatakan, Kemendikbud hanya memberikan uang jika wartawan mengikuti aktivitas Kemendikbud ke luar kota. Uang yang diberikan pun bukan merupakan uang amplop, melainkan biaya

untuk akomodasi dan transportasi, di mana biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

“... karena memang kita menganut asas tidak memberikan sesuatu kepada wartawan. Jumpa pers ya jumpa pers. Jadi kalau Anda mengharapkan amplop, jangan ke Diknas. Tapi kalau Anda mengharapkan informasi, cari ke Diknas... Kita biasanya memberikan uang ke wartawan kalau mereka ikut aktivitas, misal kunjungan Menteri ke mana. Nah itu kita kasih dalam bentuk uang hotel, uang saku harian, jadi bisa dipertanggungjawabkan.” (Informan 4)

Informan 2 menambahkan, di luar peliputan ke daerah, beberapa wartawan dari media yang berskala menengah ke bawah memang terkadang masih mengharapkan uang transport kepada pihak humas ketika mereka melakukan liputan bersama Kemendikbud. Informan 2 mengakui, untuk kegiatan yang dilakukan di luar Kemendikbud, terkadang humas menyediakan uang transport.

“Persoalan yang agak sulit itu kan beberapa teman media yang masih dalam tanda petik masih meminta uang transport saat liputan seperti itu, biasanya media yang sifatnya menengah ke bawah. Tapi kalau yang media nasional itu ngga. Yang menengah ke bawah itu yang saya lihat masih sangat mengharapkan seperti itu. Tapi kita tidak bisa memfasilitasi setiap kegiatan itu ada.” (Informan 2)

Kata “mengharapkan” di atas menunjukkan bahwa wartawan tidak serta-merta memaksa humas untuk memberikan uang kepada mereka. Informan 1 menegaskan bahwa wartawan yang tergabung dalam Fortadik tidak pernah meminta uang dalam bentuk apapun kepada humas. Menurutnya, humas memang terkadang memberikan uang transport, namun hanya jika ada kelebihan uang yang dimiliki oleh humas dan bukan karena permintaan wartawan.

“Tapi kalau yang liputan-liputan yang press conference, itu ngga ada. Dan dari Fortadik pun ngga ada yang minta..... Kadang memang kalau ada kelebihan dana, ya kita berikan sebagai uang transport bagi mereka, tapi mereka tidak minta karena semua wartawan yang meliput di sini terdaftar di Fortadik. Itu juga tapi tidak selalu.” (Informan 1)

Informan 1 menjelaskan, di luar uang peliputannya, setiap tahun humas selalu memberikan uang hari raya kepada wartawan, dan kembali ditegaskan bahwa itu bukan merupakan suatu bentuk sogokan untuk pemberitaan yang positif

melainkan sebagai bentuk perhatian humas dan Kemendikbud terhadap wartawan sebagai mitra kerjanya.

“Karena kami juga tidak pernah pesan berita, mereka juga tidak pernah dikasih amplop, jadi fair saja akhirnya, enak jadinya. Tapi bahwasanya kita memperhatikan wartawan, misalnya mau lebaran begitu ya, kita kasih uang lebaran pernah, tapi bukan berarti setiap press conference ada amplop, tidak ada, tidak seperti itu. Jadi presscon ngga ada, kalau bonus lebaran misalnya, pernah, selebihnya tidak. Ya karena itu tadi prinsipnya, kita ngga pernah pesan berita ke mereka. “ (Informan 1)

Tak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi humas kepada wartawan yang telah meliput di Kemendikbud, setiap akhir tahun humas mengaku memberikan penghargaan kepada wartawan-wartawan yang selama setahun telah aktif memberikan liputan yang berimbang bagi Kemendikbud.

“Iya, (penghargaan diberikan bagi) yang menulisnya bagus, bagus bukan dalam artian yang memuji-muji kita ya, bagus yang berimbang maksudnya, lalu yang penulis terbanyak seperti itu.” (Informan 1)

Informan 4 yang mewakili pihak Kemendikbud menegaskan bahwa diterapkannya azas tidak memberi uang amplop kepada wartawan tidak berdampak buruk pada pemberitaan yang ditulis oleh wartawan di Kemendikbud. Pengalamannya sebagai wartawan membentuk pandangannya bahwa wartawan merupakan profesi yang profesional, di mana mereka bekerja bukan berdasarkan materi yang diberikan di tempat mereka meliput. Menurutnya, wartawan yang cenderung menuntut adanya imbalan materi hanyalah merupakan wartawan jadi-jadian yang tidak jelas keberadaan medianya.

“Saya rasa tidak ya. Wartawan itu kan profesi yang profesional juga, jadi mereka menulis berita bukan atas dasar apa yang mereka terima, melainkan apa yang memang terjadi di sekeliling masyarakat. Jadi a.. saya rasa tidak berpengaruh sama sekali ya. Biasa itu kan yang minta uang amplop kalau dari media yang tidak jelas.” (Informan 4)

Informan 1 menjelaskan bahwa pada prinsipnya, humas tidak pernah memesan pemberitaan positif kepada wartawan. Itu sebabnya pemberian uang dalam bentuk akomodasi, transportasi, ataupun bentuk lainnya bukan dilihat sebagai suatu bentuk uang amplop dengan tujuan untuk mendapatkan pemberitaan positif di media massa. Menurut informan 1, pemberian uang dalam bentuk

akomodasi, transportasi dan lainnya hanya merupakan bentuk penggantian biaya perjalanan semata, tidak lebih.

“Jadi intinya kami hanya memberikan biaya-biaya untuk kalau perjalanan ke daerah karena itu kan istilahnya biaya pengganti begitu ya, mereka sudah mau ikut kita, meninggalkan kantornya, masa kita biarkan begitu saja? Tentu kita sediakan secukupnya akomodasi, transport, dan lainnya. merupakan biaya pengganti bagi para wartawan.” (Informan 1)

Dilihat dari sisi wartawan, informan 9 yang berasal dari media cetak daerah bahkan menyebutkan, dirinya sama sekali tidak tergantung dari ‘uang transport’ yang terkadang disediakan oleh humas. Menurutnya, ia bekerja sebagai wartawan yang mandiri, di mana ia menulis berita berdasarkan menarik atau tidaknya isu tersebut, bukan berdasarkan hal-hal materi di luar itu. Hal ini tergambar dari ungkapannya berikut ini :

“Tapi ya kadang meskipun ngga diundang ya kita sih tetap datang kalau memang bagus beritanya. Kadang misalnya kita ngga dapat transport, ya kita datang saja sendiri. Pada prinsipnya kita itu kerja mandiri, ada atau tanpa Humas kita bisa kerja.” (Informan 9)

Bahkan meskipun terkadang humas menyediakan uang transport bagi wartawan, informan 12 mengaku hal tersebut tidak mempengaruhi independensinya sebagai seorang wartawan.

“Kita juga wartawan sebenarnya kan ngga bergantung sama uang transport atau apapun itu ya. Intinya sih mandiri saja... Kalau aku sih prinsipnya berimbang saja ya, apa yang baik ya diberitakan baik, apa yang buruk yang diberitakan buruk. Aku sering juga kok menulis pemberitaan yang mengkritisi atau negatif begitu.” (Informan 12)

Informan 7 yang merupakan salah satu wartawan anggota Fortadik mengatakan bahwa semua anggota Fortadik adalah wartawan yang profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah.

“Saya percaya yang di Fortadik ini semua bekerjanya profesional ya, jadi memang pemberitaannya tidak bergantung dari uang transport, yang lainnya.” (Informan 7)

Isu uang amplop memang bukan merupakan hal baru yang mewarnai hubungan antara humas dengan wartawan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya,

humas mengaku tidak menerapkan pemberian uang amplop untuk tujuan mendapatkan pemberitaan positif. Uang hanya diberikan untuk kondisi tertentu, seperti misalnya perjalanan ke luar kota atau pada saat hari raya besar. Apakah pemberian uang tersebut termasuk dalam kategori uang amplop atau tidak kembali kepada individu masing-masing dalam memaknai pemberian uang tersebut.

5.2.6 Hal-hal Yang Menghambat Pelaksanaan *Media Relations*

Dalam penerapan fungsi *media relations* di lingkungan Kemendikbud, baik informan dari kalangan humas maupun wartawan mengaku mengalami beberapa hambatan, baik hambatan secara internal maupun eksternal. Informan 1 yang berasal dari kalangan humas misalnya, mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan pemerataan frekuensi bagi wartawan terkait kegiatan peliputan ke daerah. Menurutnya, begitu banyaknya wartawan yang meliput di Kemendikbud menyebabkan humas belum mampu memenuhi keinginan setiap pihak tersebut secara sempurna, salah satunya dalam hal peliputan kegiatan ke daerah tersebut. Diakui oleh informan 1 bahwa beberapa rekan wartawan mengeluh jarang diajak meliput ke daerah. Berikut diungkapkan informan 1:

“Jadi tanpa bermaksud besar kepala, pendidikan itu kan masalah yang penting bagi semua orang, kepentingan semua orang. Wartawan pun melihat pendidikan sebagai sesuatu yang penting untuk diberitakan, jadi banyak wartawan yang akhirnya meliput. Jadi itu hambatannya, kami tidak bisa secara persis memuaskan keinginan semua pihak. Ada yang merasa ‘kok si itu-itu terus’. Jadi hambatannya itu dalam hal pemerataan.” (Informan 1)

Menurut informan 3, anggaran yang terbatas menyebabkan humas tidak bisa mengakomodasi keinginan semua media untuk ikut meliput ke daerah. Menurutnya, humas memang lebih sering mengajak media-media nasional karena jangkauan pemberitaannya yang lebih luas dibandingkan dengan media-media daerah.

“Saya pikir a.. apa ya a.. ya kita kan berhitung ya, berhitung. Prinsip ekonomi juga berjalan di sana. Pasti kita lebih memprioritaskan media-media nasional dan oplahnya tinggi gitu ya, pengaruhnya besar gitu ya.” (Informan 3)

Selain itu, seringkali permintaan terkait media yang diajak meliput ke daerah datang dari Menteri langsung. Humas mengaku, ketika nama-nama media sudah datang dari permintaan Menteri langsung, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengubahnya. Menurutnya, humas baru bisa melakukan rotasi atau pergiliran terhadap media yang diajak meliput jika Menteri menyerahkan pemilihan media sepenuhnya kepada humas.

“Tapi itu juga bukan melulu kebijakan Humas. Kadang kalau ada kunjungan ke daerah itu, pimpinan yang menentukan mau media apa. Kalau sudah permintaan beliau kan tidak bisa diubah. Kalau misalnya Pak Menteri menyerahkan kepada Humas siapa yang diajak, baru bisa kami terapkan pemerataan tadi itu.” (Informan 1)

Informan 2 pun menyampaikan hal yang serupa mengenai pertimbangan memilih media-media tertentu dalam suatu peliputan. Menurutnya, humas telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadakan peliputan ke daerah, sehingga humas tentu mengharapkan pemberitaan yang jangkauannya nasional, sehingga mau tidak mau media nasional-lah yang menjadi prioritas dalam setiap peliputan ke daerah. Namun informan 2 menambahkan, untuk kegiatan yang sifatnya nasional, humas berusaha mengundang semua wartawan tanpa memprioritaskan media-media tertentu.

“Jadi kalau event yang sifatnya nasional itu kita ajak semua, katakanlah rembuk nasional pendidikan, itu semua media kita undang. Tetapi di saat sifatnya ke daerah, itu kan anggarannya terbatas, tidak bisa semua, paling hanya 3-5 media, jadi kita pilih dong. Karena kita kan juga ingin supaya media yang jangkauannya nasional itu bisa cepat kan menyampaikan informasi ke masyarakat.” (Informan 2)

Selain itu, humas juga terkadang mengalami kesulitan untuk mengundang atau mengajak wartawan menghadiri jumpa pers maupun peliputan kegiatan ke daerah, seperti diungkapkan oleh informan 2 :

“Hambatan itu ya kalau kita mengundang jumpa pers, saya paham ya keterbatasan waktu, jadi kalau misalnya kami undang jam 9, biasanya tidak datang tepat waktu mungkin karena sebelumnya pulang malam atau bagaimana..... Yang kedua juga kami ingin mengajak wartawan ke daerah, kita minta koran A, B, C itu terkadang tidak semudah a.. harapan kita karena sama redaksi terkadang tidak dikirim. Itu sebetulnya event penting yang harus diikuti mereka tapi jadi tidak ikut. Hambatan lain itu ya harapan kami, setiap ada jumpa pers, penjelasan atau apa, langsung dipublikasikan, tapi

kenyataannya tidak, apalagi yang sifatnya seremonial itu sulit untuk mereka angkat, itu juga menjadi kendala di kita.” (Informan 2)

Meskipun humas mencoba memahami bahwa wartawan memiliki keterbatasan waktu untuk dapat menghadiri setiap undangan yang diberikan oleh humas, namun peneliti melihat ada harapan yang sangat besar dari humas agar wartawan selalu menyempatkan diri untuk datang dan meliput ke setiap acara yang diadakan oleh Kemendikbud. Informan 2 juga mengungkapkan bahwa seringkali wartawan tidak langsung mempublikasikan berita-berita yang diberikan oleh Humas Kemendikbud, terutama untuk berita yang sifatnya seremonial. Padahal bagi humas, berita-berita seremonial merupakan hal yang tidak kalah penting untuk diberitakan di media.

Informan 4 menambahkan, hambatan yang juga muncul dalam menjalankan hubungan media adalah wartawan seringkali teguh pada *mindset* yang dimilikinya. Hal tersebut pada akhirnya mempersulit humas dalam menyebarkan informasi maupun fakta-fakta yang berasal sudut pandang humas dan Kemendikbud.

“Jadi kalau mereka mau datang ke kementerian mau nanya, mereka itu sudah punya mindset tentang ini ini ini. Tapi ya menurut saya ngga apa-apa, kita berikan saja pengertian-pengertian. Jadi seringkali wartawan kukuh pada mindset awal yang ingin dia bangun dan kita paham itu.” (Informan 4)

Informan 4 menilai, hal tersebut masih dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan dapat diatasi dengan memberikan pengertian-pengertian kepada wartawan agar setidaknya tetap dapat membuat pemberitaan yang berimbang dan tidak hanya sesuai dengan *mindset* yang dibangunnya saja.

Selain itu, terbatasnya jumlah SDM yang secara khusus mengurus bidang hubungan media di Kemendikbud diakui oleh informan 3 menjadi salah satu hambatan tersendiri dalam pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud. Kegiatan Mendikbud bersama wartawan yang sangat banyak ternyata tidak dapat diimbangi oleh humas yang mengurus hubungan media. Akibatnya, seringkali humas tidak bisa selalu mendampingi wartawan dan menteri yang melakukan kegiatan di luar kementerian.

“Di Kemitraan Media itu personilnya cuma ada 6 orang gitu lho, sementara kita mencover seluruh kegiatan kementerian. Apalagi kalau dapat menteri seperti Pak Nuh gitu kan, yang orangnya sangat enerjik gitu kan, jalan-jalan melulu, kegiatannya banyak sekali dan itu kan kita.. ngga bisa ngga terlibat di sana.” (Informan 3)

Meskipun mengakui kekurangan SDM secara kuantitas, namun secara kualitas, informan 2 menilai SDM yang ada di dalam Pusat Informasi dan Humas (PIH), terutama yang ada di dalam subbidang Kemitraan Media, sudah cukup memadai meskipun tidak semuanya memiliki latar belakang kehumasan maupun jurnalistik. Hal tersebut dikarenakan setiap personil humas telah dibekali dengan keterampilan-keterampilan kehumasan dan jurnalistik melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan di Kemendikbud. Hanya saja terkadang kesulitan dialami ketika personil humas harus membuat sebuah tulisan atau berita. Kesulitan ini dikarenakan tidak semua personil humas memiliki latar belakang jurnalistik.

“Kalau dari pandangan saya sih, dari sisi teman-teman Humas itu sudah mencukupi. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan terkait hubungan dengan media. Jadi kalau dari sisi personilnya sih tidak ada masalah meskipun tidak ada latar belakang Humas atau jurnalistiknya, secara relasi itu tidak menghambat, mungkin hanya sedikit kesulitan kalau harus menulis berita kalau tidak punya latar belakang jurnalistik ya, tapi selebihnya sih tidak menghambat.” (Informan 2).

Hambatan lain yang datang dari internal Kemendikbud dalam pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya *media relations* dari unit-unit lain di dalam Kemendikbud. Hal ini diakui oleh informan 4 yang mengungkapkan bahwa masih ada jajaran pejabat, bahkan dari pejabat eselon I, yang mempertanyakan mengapa Kemendikbud harus melayani wartawan.

“Yang tidak kalah menarik adalah perasaan, kekhawatiran teman-teman di dalam. Tidak hanya di bawah, tapi di Eselon I saja ada yang pernah bertanya kenapa kita harus melayani rekan-rekan wartawan, wartawan kan begini begini begini.” (Informan 4)

Hal tersebut menjadi temuan yang menarik dalam penelitian ini sebab menggambarkan bagaimana kurangnya pemahaman pejabat eselon I yang menduduki posisi pimpinan unit-unit kerja dalam Kemendikbud akan fungsi *media relations*. Padahal, pimpinan unit-unit kerja di Kemendikbud seringkali

dijadikan narasumber oleh wartawan ketika wartawan sedang menulis berita yang berada di bawah kewenangan unit tersebut. Ketika pemahaman akan *media relations* kurang, maka tentu pelayanan yang diberikan kepada wartawan pun akhirnya tidak maksimal.

Tidak hanya pemahaman akan pentingnya *media relations* yang dirasa masih kurang, pemahaman akan pentingnya humas pun, menurut informan 3, masih kurang di beberapa unit kerja di dalam Kemendikbud. Informan 3 mengilustrasikan, ketika ada pemberitaan yang membutuhkan klarifikasi dari unit kerja tertentu, Humas terkadang kesulitan meminta klarifikasi dari unit kerja tersebut karena setiap unit kerja sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa unit kerja belum melihat media sebagai mitra yang harus diprioritaskan dan segera dilayani. Hal tersebut diungkapkan demikian:

“Kemudian juga banyak unit kerja yang masih apa ya.. tidak menganggap penting Kehumasan ini sehingga mereka lebih asik dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri.” (Informan 3)

Seringkali humas memang perlu berkoordinasi dengan unit-unit kerja di dalam Kemendikbud untuk melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap suatu berita. Koordinasi tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan penguasaan personil humas terhadap isu, program, maupun kebijakan yang ada di Kemendikbud. Humas berdalih, ruang lingkup isu Kemendikbud yang begitu luas, ditambah dengan jumlah personil humas yang terbatas, yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak memahami secara mendalam setiap isu maupun kebijakan terkait Kemendikbud.

“Terus karena orangnya sedikit, isu pendidikannya sangat banyak, sehingga penguasaan isunya jadi tidak apa ya.. tidak terlalu maksimal. Sehingga ya itu, kita membutuhkan komunikasi yang lancar. Jadi kalau suatu saat ada wartawan nanya, baik melalui daftar pertanyaan atau lisan begitu, ya harusnya kita dapat apa.. layanan yang anulah ya.. yang segera juga gitu lho. Tapi ternyata saya merasa itu masih apa.. belum optimal.” (Informan 3)

Keterbatasan humas dalam menguasai isu-isu pendidikan yang berada dalam lingkup Kemendikbud itulah yang dianggap wartawan sebagai salah satu hambatan mereka dalam berhubungan dengan humas. Informan 11 mengungkapkan :

“Nah itu, kalau saya lihat sepertinya itu masih ada perbedaan persepsi antara pihak Humas, mulai dari pimpinan sampai staf, dengan wartawan. Wartawan butuh berita cepat, wartawan tidak ingin birokrasi, wartawan ingin segera dilayani. Nah di satu sisi mereka masih bersikap seperti birokrat, harus pakai prosedur lah, mereka tidak menguasai materi jadinya lama kalau minta data ke mereka karena mereka harus tanya dulu ke pihak yang bersangkutan.” (Informan 11)

Menurut informan 11, humas di Kemendikbud masih belum benar-benar memahami bahwa wartawan memerlukan berita secara cepat, sehingga penguasaan materi yang kurang kurang dari humas akan menghambat wartawan untuk memperoleh berita secara cepat. Dijelaskan oleh informan 11 bahwa ketika ia membutuhkan data dan bertanya ke humas, humas justru tidak menguasai materi dan harus berkoordinasi dulu dengan unit kerja terkait sehingga memakan waktu yang lebih lama.

Bagi informan 5, kondisi di atas memperlihatkan bagaimana fungsi *media relations* yang dijalankan oleh Humas Kemendikbud belum berjalan sebagaimana mestinya. Memang patut diakui bahwa sulit bagi humas untuk dapat menguasai seluruh isu pendidikan yang ditangani Kemendikbud. Namun menurut informan 5, hal tersebut sebenarnya bisa diatasi jika humas lebih asertif dalam menanggapi kebutuhan wartawan, dalam artian bahwa sebelum wartawan meminta, humas sebaiknya terlebih dahulu menyiapkan dan memberikan data-data yang dibutuhkan oleh wartawan. Sayangnya, humas dirasa cenderung pasif dan baru bergerak ketika wartawan meminta data atau informasi terkait suatu isu.

“Ya yang tadi itu, Humas itu ngga berfungsi sebagaimana mestinya. Aku sih merasa mereka kurang asertif terhadap wartawan, apa sih yang dibutukan wartawan, mereka perlu data-data yang seperti apa sih, jadi mereka cenderung diam saja menunggu kita wartawan yang datang untuk minta data, jadi bukan dipasok sebelum diminta. Mereka itu hanya aktif kalau ngundang untuk datang ke jumpa pers atau liputan, ya yang pokoknya ngundang-ngundang lah haha.” (Informan 5)

Informan 5 kembali menegaskan bahwa Humas Kemendikbud hanya terlihat aktif ketika mengundang wartawan untuk datang ke acara atau kegiatan yang diadakan oleh Kemendikbud. Hal ini menimbulkan kesan di benak wartawan bahwa humas hanya proaktif mendekati wartawan ketika humas memiliki kepentingan tertentu saja. Lebih lanjut, informan 5 juga menjelaskan alasan lain

dirinya menganggap fungsi *media relations* di Kemendikbud belum berjalan dengan baik. Menurutnya, humas yang ideal adalah humas yang tanggap terhadap kebutuhan wartawan, tidak hanya kebutuhan dalam bentuk informasi, melainkan juga kebutuhan lain untuk mendukung tugas peliputan wartawan. Informan 5 mencontohkan perpindahan ruang wartawan dari gerai informasi ke ruang pers yang saat ini sebagai bukti ketidaktanggapan humas terhadap kebutuhan wartawan. Menurutnya, perpindahan ruangan tersebut bukanlah atas dasar inisiatif humas, melainkan dorongan dari wartawan sendiri yang sudah merasa kurang nyaman bekerja di gerai informasi.

“Kurang asertifnya juga kelihatan saat kita pindah ruangan dari gerai informasi ke ruang pers.... Ya mereka ngga tanggap gitu lho kalau wartawan itu butuh ruangan sendiri, perlu kita yang minta langsung ke staf khusus Menteri.” (Informan 5)

Informan 5 mengaku bahwa dirinya dan teman-teman wartawan pernah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki ruang kerja khusus wartawan kepada humas, namun tidak ada tindak lanjut dari humas sampai pada akhirnya wartawan memutuskan untuk menyampaikan langsung permintaan tersebut kepada Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media. Setelah berbicara dengan Staf Khusus itulah kemudian akhirnya disediakan ruang khusus untuk wartawan.

Hambatan lainnya yang ditemui wartawan dalam berhubungan dengan humas adalah adanya perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh humas. Hambatan ini terutama dirasakan oleh wartawan dari media daerah dan media online. Informan 9 dan 10 misalnya, keduanya merupakan wartawan yang berasal dari media cetak daerah. Mereka mengaku seringkali masih merasakan perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh humas, terutama dalam hal pengundangan.

“Kalau yang paling mengganggu aku sih adalah karena aku bukan dari media yang besar begitu, kadang kendalanya itu mereka suka mengundang itu pilih-pilih begitu. Padahal informasi itu kan seharusnya dibuka seluas-luasnya kepada media.... Tapi ya kadang meskipun ngga diundang ya kita sih tetap datang kalau memang bagus beritanya.” (Informan 9)

“Ya paling kadang mereka suka a.. liputan itu suka, karena ini kata mereka terkait anggaran, jadi misalnya liputan ke daerah itu ngga semua dibawa. Itu saja hambatannya, padahal kan sebenarnya penting. Tapi untung ada media center itu kan, jadi mereka bisa kasih infonya untuk yang ngga ikut pergi ke luar kota.” (Informan 10)

Kedua informan memahami bahwa terkadang humas terbentur masalah anggaran ketika harus mengundang wartawan datang meliput ke suatu kegiatan. Namun kedua informan tetap menyayangkan karena mereka merasa hanya media nasional yang diprioritaskan oleh humas, sedangkan media daerah cenderung dinomorduakan. Padahal sebenarnya semua wartawan dari semua media berhak mendapatkan akses informasi yang sama. Untuk menanggulangi situasi itu, informan 10 seringkali memanfaatkan *media center* yang berupa *emailgroup* untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kegiatan di mana ia tidak ikut berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan informan 9 terkadang memutuskan untuk tetap datang ke acara yang diadakan oleh Kemendikbud jika acara tersebut dirasa dapat memberikan berita yang menarik, meskipun ia tidak diundang ke acara tersebut.

Informan 6 pun terkadang merasa dibedakan dalam hal pengundangan acara. Informan 6 yang berasal dari media cetak nasional yang tergolong kritis terhadap pemerintah mengaku beberapa kali tidak menerima pemberitahuan acara dari humas. Ia terkadang justru mendapat informasi tersebut dari sesama wartawan.

“Hmm.. kadang sih saya masih suka ngga terima sms kalau ada acara dari Humasnya. Jadi biasanya malah dapat dari teman-teman wartawan yang lain.” (Informan 6)

Informan 6 mengaku tidak tahu alasan mengapa dirinya sering tidak menerima undangan dari humas, namun menurut humas, tidak ada alasan khusus melainkan hanya terlewat saja ketika melakukan pengundangan melalui sms.

Hambatan lainnya dalam menjalani hubungan dengan humas, menurut beberapa informan wartawan, adalah masih adanya personil humas yang dirasa belum benar-benar memahami ritme kerja wartawan. Beberapa wartawan mengaku terkadang menerima undangan kegiatan beberapa jam sebelum acara dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan wartawan untuk bisa hadir ke peliputan

tersebut karena hampir semua wartawan yang meliput di Kemendikbud juga melakukan liputan di tempat lain di luar Kemendikbud. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan 8 :

“Palingan a.. informasi itu dadakan. Jadi kayak 3 jam sebelum acara, biasanya kan kalau informasi acara itu dua atau tiga hari sebelumnya ya, kalau di sini kadang pas hari-H baru dikasih tahu.” (Informan 8)

Selain itu, informan 7 juga menilai sebagian humas masih berpatokan bahwa setiap informasi harus selalu diberitakan melalui media cetak. Padahal menurutnya, media cetak memiliki kolom yang terbatas sehingga tidak semua berita bisa masuk ke media cetak. Berbeda halnya dengan media online yang dapat menampung semua pemberitaan karena tidak ada batasan kolom.

“Kemudian masalah berita, kadang suka ditanyain mana beritanya, padahal sudah dimuat di online. Jadi kadang ada yang masih berpikir beritanya harus keluar di cetak, tapi ada juga yang sudah paham kalau tidak harus di cetak. Ya seperti itu.” (Informan 7)

Peneliti melihat, hambatan utama yang dihadapi oleh humas dalam menjalankan *media relations* adalah adanya keterbatasan anggaran dan SDM, serta kurangnya koordinasi dengan unit kerja lain. Sedangkan hambatan utama yang dihadapi oleh wartawan ketika berhubungan dengan humas adalah kurang tersedianya informasi yang memadai dari humas akibat kurang asertifnya humas terhadap kebutuhan wartawan serta masih adanya kesan pembedaan-pembedaan media yang dilakukan oleh humas.

5.2.7 Hal-hal Yang Mendukung Pelaksanaan *Media relations*

Terkait dengan pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, seluruh informan dari kalangan humas sepakat bahwa dukungan, perhatian dan keterbukaan yang diberikan oleh Mendikbud selaku pimpinan pusat Kemendikbud menjadi hal utama yang mendukung terciptanya hubungan media yang baik di lingkungan Kemendikbud.

“Beliau sangat akrab dengan wartawan dan kita juga didorong untuk terus membina hubungan dengan wartawan.” (Informan 1)

“Yang jelas itu PIH mendapat dukungan dari Pak Nuh sendiri supaya informasi apapun diberikan kepada wartawan, Perhatian beliau terhadap media itu sangat besar dan selalu berpesan kepada kita untuk mengurus teman-teman media.” (Informan 2)

“Saya pikir a.. dukungan dan kebukaan dari Pak Menteri ya, itu sangat membantu kami sekali dalam memberikan pelayanan yang juga terbuka kepada wartawan yang meliput di sini.” (Informan 3)

“Yang jelas dukungan Pak Menteri itu cukup membawa dan memberi arti kepada pelaksanaan media relations di sini.” (Informan 4)

Dari pihak wartawan pun mengakui bahwa keterbukaan yang diterapkan oleh Mendikbud dan segenap jajarannya sangat membantu terciptanya hubungan yang baik dengan humas. Adanya keterbukaan yang diterapkan oleh pucuk pimpinan mau tidak mau diikuti oleh seluruh unit kerja di bawahnya, termasuk humas. Hal inipun diungkapkan oleh beberapa informan :

“Kalau yang mendukung itu orang-orang di sini sangat terbuka sama kita. Ngga hanya Humasnya, Pak Menteri, Dirjen dan yang lainnya juga sangat terbuka. Hmm apa lagi ya.. a.. ya itu sih terutama, mereka sangat terbuka.” (Informan 7)

“Keterbukaan mereka, karena kita sudah kenal lama ya. Tak kenal maka tak sayang haha.” (Informan 10)

“Nomor satu karena keterbukaan Menteri ya. Mau tidak mau karena Menteri terbuka, maka Humas juga akan dituntut untuk terbuka.” (Informan 11)

Selain keterbukaan yang berusaha diterapkan di lingkungan Kemendikbud, kemudahan dalam menghubungi pihak humas pun menjadi salah satu pendukung terciptanya hubungan media yang baik antara wartawan dengan humas. Hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dari *media relations* mengingat berita yang berkembang di masyarakat sangat dinamis, sehingga ketika wartawan tiba—tiba memerlukan satu dan lain hal dari humas terkait dengan pemberitaannya tersebut, wartawan dapat dengan mudah langsung menghubungi humas, seperti yang diungkapkan oleh informan 6 dan 12 :

“Hmm.. Humas itu gampang dihubungi. Mereka cukup terbuka juga ya.” (Informan 6)

“A.. mereka kalau ditanya untuk klarifikasi sih cukup menguasai ya, walaupun hanya kulit-kulitnya sih, tapi ya lumayan lah. Mereka dihubungi juga ngga

pernah sulit, ngga pernah karena mereka tahu kalau mereka itu ngga akan pernah bisa memuaskan dahaga kita begitu haha.” (Informan 12)

Bahkan informan 9 menambahkan, kemudahan yang ia rasakan tidak hanya sebatas kemudahan untuk menghubungi humas, melainkan juga pihak-pihak lain, seperti Menteri dan Dirjen.

“Keterbukaan mereka. Kalau dicari itu relatif mudah ditemui dan ditelepon atau disms pun pasti dijawab. Tidak hanya Humasnya ya. Nah ini satu kelebihan di Dikbud, di Dikbud itu hampir sangat mudah untuk bertemu atau membuat janji dengan pejabatnya, ya Pak Menteri, ya Dirjen, itu semua sangat mudah ditemui.” (Informan 9)

Kemudahan dan keterbukaan untuk dijangkau oleh wartawan yang diterapkan oleh hampir seluruh unit kerja di Kemendikbud menjadi sebuah nilai tambah bagi Kemendikbud di tengah penilaian publik yang seringkali melihat kementerian sebagai lembaga yang tertutup dan terlalu birokratif. Selain itu, keluwesan humas dalam berinteraksi dengan wartawan dirasakan informan 8 sebagai salah satu hal yang mendukung adanya hubungan media yang baik di antara keduanya. Informan 8 menyampaikan demikian :

“Yang mempermudah a.. ya itu, Humasnya mungkin sudah biasa bergaul sama wartawan jadinya ya orangnya a.. ngga kaku-kaku banget, sudah luwes lah.... Selain itu a..info-info kegiatan juga cukup lancar dikasih tahu. Meskipun terkadang suka mendadak ngasih tahunya, tapi seringkali juga dikasih tahu beberapa hari sebelumnya. Ya seperti itu sih.” (Informan 8)

Keluwesan yang dimiliki oleh humas secara tidak langsung dapat membuat wartawan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan humas. Rasa nyaman itulah yang pada akhirnya dapat menimbulkan hubungan yang baik dan dekat sebagai mitra kerja. Meskipun tidak semua personil humas memiliki latar belakang kehumasan maupun jurnalistik, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keluwesan humas dalam menghadapi wartawan. Peneliti menilai, pengalaman langsung berhubungan dengan wartawanlah yang kemudian dapat membentuk keluwesan seorang humas, khususnya humas di lembaga birokratif seperti Kemendikbud.

5.2.8 Saran Untuk Peningkatan Pelaksanaan *Media relations*

Banyak tugas rumah yang harus diselesaikan oleh Humas Kemendikbud untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi penerapan fungsi *media relations* di lingkungan Kemendikbud. Informan 3 mengakui masih banyak kekurangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud. Menurutnya, faktor SDM secara kualitas dan kuantitas menjadi salah satu hal krusial yang perlu segera dibenahi saat ini.

“Ya saya pikir perlu ditingkatkan terus lah ya, perlu ditingkatkan terus. Seperti yang saya bilang tadi, kita dari segi SDM secara kuantitas masih kurang untuk mem-back up kegiatan kementerian yang sangat besar ini. Kemudian juga a.. penerimaan pegawai negeri itu kan kadang-kadang tidak me.. tidak melihat latar belakang pendidikan gitu ya, ngga taulah ke depan ke depannya ini bagaimana. Kita di sinikan perlu teman-teman yang basicnya apalah.. ilmu komunikasi gitu ya, sehingga kalau misalnya mereka punya latar belakang ilmu komunikasi, jurnalistik gitu kan, itu kan jadi lebih mudah untuk tune in kerja di sini kan.” (Informan 3)

Informan 3 menilai, selain penambahan secara kuantitas, penambahan SDM secara kualitas juga menjadi salah satu hal yang penting. Caranya adalah dengan melakukan penerimaan personil humas yang memiliki latar belakang pendidikan terkait. Hal ini bukan berarti informan 3 menganaktirikan personil humas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan terkait bidang komunikasi. Ia hanya menilai bahwa adanya latar belakang pendidikan yang sesuai akan sangat membantu personil humas untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sebagai humas tersebut. Informan 3 juga berharap perlu adanya tambahan anggaran untuk dapat memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media massa sebab banyak hal positif yang sebenarnya perlu dilakukan oleh Humas Kemendikbud namun seringkali gagal dilaksanakan karena terbentur masalah anggaran.

“Kemudian tentu juga a.. perlu dukungan anggaran ya kan. Saya bilang dukungan anggaran ya itu, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk keberadaan Humas ya, untuk bagaimana a.. pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan kita ini bisa lebih luas lagi daya jangkauannya, tentu perlu adanya dukungan dana.” (Informan 3)

Informan 4 mencoba melihat keseluruhan pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, humas masih perlu

meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja lainnya di dalam Kemendikbud karena informan 4 merasa, koordinasi yang dilakukan selama ini masih lemah sehingga dapat mengganggu pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud.

“Ya harapannya satu, ada koordinasi yang lebih baik antara unit-unit utama yang memang punya anggaran masing-masing terkait kegiatan media relations itu. Selama ini, saya melihat titik koordinasinya masih lemah.” (Informan 4)

Koordinasi yang masih lemah itu pada akhirnya membuat penyediaan dan pemberian informasi kepada wartawan cenderung terbatas. Karena lingkup isu yang begitu luas, ditambah dengan kurangnya koordinasi dengan unit-unit kerja yang menanangi isu-isu pendidikan di Kemendikbud, humas pada akhirnya dirasa belum mampu menjadi sumber informasi yang memadai bagi wartawan. Penguasaan isu-isu yang kurang dari humas pada akhirnya mendorong wartawan untuk mencari lagi sendiri informasi-informasi yang dibutuhkannya. Hal ini pun diungkapkan oleh informan 11 :

“A.. belum bagus ya, belum maksimal. Jadi a.. banyak hal yang mereka belum pahami apa yang menjadi kebutuhan wartawan, misalnya kita setiap saat harus membuat berita, tapi kita harus mencari sendiri. Memang betul itu tugas kita, tapi ada baiknya a.. kan saya meliput di tempat lain juga, kalau di tempat lain itu Humasnya sudah proaktif mendekati wartawan, mereka itu bisa memahami apa yang wartawan butuhkan, wartawan itu dianggap istimewa lho karena wartawan itu bisa jadi corong.” (Informan 11)

Selain lebih menguasai informasi, humas juga perlu lebih terbuka lagi terhadap informasi yang diberikannya, dalam artian humas harus meningkatkan lagi keterbukaan yang sudah mulai diterapkannya saat ini. Informan 12 mengatakan, humas harus berusaha tetap berimbang dalam memberikan informasi, jangan hanya memberikan informasi yang positif saja dan baru memberikan informasi atau klarifikasi isu yang negatif saat diminta oleh wartawan.

“Ya informasi itu saja sih itu yang penting, jangan pelit informasi, baik itu informasi yang menguntungkan maupun yang mereka nilai kurang menguntungkan. Jangan hanya yang manis-manis saja, jadi terbuka dalam kondisi apapun lah. Ya begitu saja lah haha.” (Informan 12)

Menurut informan 8, keterbukaan itu diperlukan atas dasar saling membutuhkan. Humas membutuhkan wartawan untuk mempublikasikan program

dan kebijakannya, wartawan pun membutuhkan humas untuk memperoleh informasi-informasi seputar Kemendikbud.

“A.. lebih terbuka lagi ya, karena bagaimanapun juga kita sama-sama butuh, selain itu untuk kedekatan kita-kita juga.” (Informan 8)

Informan 7 menambahkan, masalah teknis seperti fasilitas ruang pers juga perlu menjadi perhatian humas. Kemendikbud sebagai lembaga besar harus mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi wartawan, agar wartawan pun semakin maksimal dalam memberikatak berbagai isu dan kebijakan strategis yang dimiliki oleh Kemendikbud kepada masyarakat. Selain itu, informan 7 juga berharap agar kegiatan informal dengan wartawan ditingkatkan frekuensinya untuk dapat semakin mendekatkan hubungan humas dengan wartawan.

“Kalau secara teknis sih ya fasilitasnya ya ditambah, kan ini lembaga besar, jadi perlu fasilitas yang memadai. Kegiatan informal juga perlu ditambah, dibuat rutin gitu ya berapa bulan sekali. Kalau setahun sekali rasanya sangat kurang. Forum-forum juga sekarang sudah jarang dilakukan a.. saya pikir itu perlu dihidupkan kembali ya.” (Informan 7)

Terkait masalah kegiatan informal tersebut, informan 2 yang berasal dari pihak Kemendikbud pun memiliki harapan yang serupa, yakni agar humas tidak hanya berfokus pada kegiatan *media relations* yang sifatnya formal saja, namun juga mulai memperhatikan kegiatan-kegiatan informal yang sangat penting dalam membangun relasi yang baik di antara humas dan wartawan. Informan 2 yang berasal dari kalangan humas pun mengusulkan untuk menambah frekuensi pengadaan kegiatan informal dengan wartawan.

Ya harapannya kalau untuk Humas ya dan media relations di sini, ya ke depannya perlu ditingkatkan lagi lah kegiatan-kegiatan media relations di sini ya, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Terutama ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal ya, ya kumpul-kumpul dengan wartawan itu perlu ditingkatkan intensitasnya supaya hubungan yang terbangun juga baik dan dekat ya. (Informan 2)

Satu masukan yang menurut peneliti sangat penting untuk diperhatikan humas adalah mengenai kekuatan yang dimiliki humas. Beberapa media masih merasa dibedakan oleh humas terkait akses informasi yang diberikan oleh humas. Hal seperti yang diungkapkan oleh informan 6 :

“Saran ya? A.. yang tadi satu itu kali ya, kalau mengirim undangan ngga usah dibeda-bedakan. Soalnya saya juga pernah ngobrol dengan beberapa teman wartawan, ada sih yang merasa dibeda-bedakan juga gitu, tapi saya ngga bisa sebut medianya ya, jangan haha..” (Informan 6)

Di sisi lain, humas mengaku tidak pernah bermaksud membeda-bedakan media massa dan wartawan yang meliput di Kemendikbud. Humas berdalih bahwa anggaran yang terbatas lah yang pada akhirnya memunculkan pemikiran bahwa humas membeda-bedakan media dan cenderung memprioritaskan media yang berskala nasional. Menurut informan 11, hal tersebut sebenarnya bisa dihindari dengan memperkuat *power* yang dimiliki humas.

“Tapi seharusnya sebagai Humas, mereka itu bisa meyakinkan Pak Menteri bahwa semua media itu sama penting, mau mingguan, mau harian, mau daerah, mau nasional, itu penting. Kalau mereka dari Humasnya saja mampu meyakinkan Menteri atau pejabat bahwa semua media penting, saya yakin bahwa a.. informasi dari Mendiknas ini akan lebih maksimal, pemberitaan tentang Mendiknas akan maksimal.” (Informan 11)

Humas sebagai pihak yang memahami media massa harus mampu meyakinkan pimpinan pusat bahwa semua media sama pentingnya. Menurut informan 11, adanya pemrioritasan media mungkin terjadi karena pimpinan pusat tidak sepenuhnya memahami bahwa saat ini, semua media sama pentingnya dan memiliki porsinya masing-masing untuk memberitakan informasi seputar Kemendikbud, baik itu media nasional atau daerah, maupun media cetak atau online. Berikut penuturannya :

“Pandangan mereka itu kalau menurut saya masih berfokus ke media besar, padahal itu salah. Media kecil tapi kalau dia media daerah, contoh media daerah kalau dia berada di daerahnya itu menjadi leading, nah itu penting kan untuk dipahami Humas. Misalnya lagi media online, media online selalu dianggap sebelah mata, bukan karena saya kantor berita online ya karena kita memasok berita ke semua, tapi media-media online lainnya yang tidak kalah penting. Harusnya Humas itu memahami bahwa sekarang itu sudah bukan hanya media cetak, mereka harusnya sadar dan bisa mengimbangi juga dengan media lain karena semua media penting.” (Informan 11)

Secara keseluruhan, ada empat poin utama yang harus diperhatikan oleh Humas guna meningkatkan pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud. Pertama adalah masalah SDM dan anggaran, di mana humas perlu menambah lagi personilnya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mengimbangi kegiatan

Kemendikbud yang begitu luas cakupannya, serta memaksimalkan penggunaan anggaran *media relations* agar pelaksanaan *media relations* tetap optimal dengan anggaran yang ada. Kedua, humas perlu meningkatkan lagi penguasaan terhadap isu-isu di lingkungan Kemendikbud, yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi humas dengan setiap unit kerja yang menangani isu-isu penting seputar Kemendikbud. Ketiga, humas perlu menerapkan azas sama rata kepada semua wartawan dari segala jenis media dalam hal akses informasi. Humas sebisa mungkin harus menjauhkan diri dari perbedaan ataupun pengkotak-kotakan wartawan untuk menghindari adanya hubungan yang kurang baik di antara keduanya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat *power* humas di dalam Kemendikbud, terutama dalam meyakinkan pimpinan pusat bahwa setiap media sama pentingnya dan sama-sama memberikan kontribusi bagi Kemendikbud sesuai porsi masing-masing. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah masalah fasilitas, di mana humas perlu meningkatkan lagi fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mendukung tugas peliputan wartawan di Kemendikbud, seperti misalnya penyediaan komputer dan koneksi internet yang baik.

BAB 6

INTERPRETASI DATA

Dalam sebuah lembaga pemerintah, *media relations* memegang peranan penting terutama dalam menghubungkan media massa yang diwakili oleh wartawan dengan lembaga pemerintah itu sendiri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, baik humas maupun wartawan di lingkungan Kemendikbud telah sama-sama memahami arti penting hubungan media tersebut, meskipun dalam konteks yang berbeda-beda. Dari sisi praktisi humas, hubungan media dipandang sebagai salah satu cara untuk dapat menyalurkan serta mempublikasikan berbagai kebijakan lembaganya kepada masyarakat luas agar masyarakat memahami dan memberikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Ini sesuai dengan pendapat Jefkins (2004) yang memahami *media relations* sebagai usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (p.113).

Di samping itu, kekuatan untuk membentuk opini publik yang dimiliki oleh media massa juga pada akhirnya mendorong humas untuk membangun hubungan yang baik dengan media. Berdasarkan pengamatan peneliti, muncul persepsi di masyarakat bahwa informasi yang penting adalah informasi yang diberitakan oleh media massa dan itu mendorong masyarakat untuk menaruh perhatian lebih terhadap apa yang diberitakan di media massa ketimbang apa yang digembargemborkan pemerintah secara langsung. Dalam hal ini, media berfungsi sebagai *agenda setting*, di mana menurut Ibnu Hamad (2004), lahirnya gambaran realitas yang menempel di benak masyarakat sangat bergantung pada bagaimana media mengkonstruksikannya (p.24). Hal itulah yang juga menjadi salah satu alasan Humas Kemendikbud menjalin relasi yang baik dengan media.

Wartawan pun memahami *media relations* sebagai salah satu fungsi penting yang dapat mendukung tugas-tugas wartawan, terutama dalam meliput dan

membuat berita di sebuah lembaga pemerintah. Menurut wartawan, *media relations* yang diterapkan secara optimal akan sangat membantu wartawan dalam memperoleh informasi dan data yang dibutuhkannya untuk keperluan pembuatan berita. Namun pada perjalanannya, beberapa wartawan merasa *media relations* yang dijalankan oleh humas hanya sebatas membantu wartawan untuk memperoleh informasi seputar agenda acara atau kegiatan saja. Berdasarkan data yang dihimpun, peneliti menemukan bahwa seringkali wartawan tidak berhasil mendapatkan data atau informasi secara maksimal mengenai suatu isu atau kebijakan dari humas di lembaga pemerintah akibat kurangnya penguasaan Humas terhadap isu-isu tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat Rachmadi (1996) yang menjelaskan bahwa humas di lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat (p.77). Dari pernyataan tersebut tergambar bahwa humas idealnya mampu menjadi sumber informasi terkait kebijakan, program, maupun kegiatan yang dimiliki oleh lembaganya.

Terkait hal tersebut, Humas Kemendikbud memang mengakui bahwa mereka hanya memahami isu-isu secara umum saja, sedangkan untuk isu-isu yang lebih teknis, humas lebih memilih untuk mengarahkan wartawan kepada narasumber yang menguasai isu tersebut. Hal tersebut bukan dalam artian humas lepas tangan, melainkan humas lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator bagi para wartawan. Sebagai fasilitator komunikasi, humas berusaha menghilangkan batasan-batasan dan menciptakan hubungan di antara pihak-pihak yang berkepentingan (Theaker, 2004).

Sebagai sebuah kementerian besar dengan *stakeholder* media yang cukup banyak, Kemendikbud yang difasilitasi oleh humas hingga kini secara rutin terus menyelenggarakan berbagai kegiatan *media relations* untuk menjalin hubungan baik dengan wartawan. Abdullah (2001) mengungkapkan ada beberapa kegiatan yang kerap dilakukan oleh humas untuk menjalin hubungan dengan wartawan, antara lain penyebaran siaran pers, konferensi atau jumpa pers, kunjungan pers, resepsi pers, peliputan kegiatan, serta wawancara pers. Dari sekian banyak

kegiatan *media relations* tersebut, penyebaran siaran pers, jumpa pers, dan wawancara pers-lah yang paling sering dilaksanakan oleh Humas Kemendikbud.

Menurut peneliti, ketiga kegiatan tersebut memang merupakan sarana yang paling mudah untuk menyebarkan informasi secara serentak kepada media dalam jumlah yang besar. Namun sayangnya, dalam setiap kegiatan tersebut, peneliti melihat humas hanya bertindak sebagai teknisi komunikasi saja, di mana humas hanya berperan sebagai pelaksana program dan aktivitas komunikasi (Theaker, 2004). Sebagai contoh, berdasarkan data dari Subbidang Kemitraan Media, dalam jumpa pers yang telah dilakukan oleh humas sepanjang bulan Juli - Desember 2011, hanya ada satu jumpa pers yang menempatkan humas sebagai pembicara dalam jumpa pers tersebut. Humas hanya bertugas mengundang wartawan, membuat dan membagikan rilis, serta mendampingi pelaksanaan jumpa pers tersebut. Hal ini memperlihatkan belum optimalnya penerapan fungsi Humas dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebagai teknisi komunikasi, humas juga mengemban tugas penting dalam menghasilkan rilis atau siaran pers yang baik sesuai dengan kaidah jurnalistik. Terkait hal itu, Humas Kemendikbud mengakui bahwa banyak personil humas yang masih kesulitan dalam menulis siaran pers yang baik dikarenakan kebanyakan personil humas di Kemendikbud memang tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun keterampilan terkait humas ataupun jurnalistik. Adanya temuan mengenai ketidakmampuan sebagian besar personil Humas Kemendikbud dalam menulis berita siaran pers yang baik tersebut mendorong peneliti untuk melakukan analisis sederhana terhadap salah satu contoh siaran pers yang disebar oleh Humas Kemendikbud, yaitu “Penyaluran Dana Rehabilitasi Sekolah Berjalan Lancar” (Lamp.19). Peneliti kemudian membandingkan isi siaran pers tersebut dengan hasil pemberitaan yang ditulis oleh dua media, yaitu Media Indonesia dan LKBN Antara (Lamp.20-21).

Berdasarkan analisis sederhana yang dilakukan terhadap satu siaran pers dan dua berita tersebut, peneliti menemukan bahwa tidak semua yang ditulis humas dalam siaran pers tersebut dianggap bernilai berita oleh wartawan. Hal ini terlihat dari banyaknya poin-poin informasi dalam siaran pers yang tidak dimasukkan

oleh wartawan ke dalam berita yang mereka tulis. Dari 7 poin informasi yang ada dalam siaran pers, hanya 1 poin informasi yang dimuat dalam berita milik Media Indonesia dan hanya 3 poin informasi yang dimuat oleh berita milik LKBN Antara. Selebihnya, wartawan menambahkan pemberitaan mereka dengan informasi-informasi yang mereka himpun sendiri saat melakukan peliputan terkait. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Humas Kemendikbud belum dapat merumuskan sebuah siaran pers yang benar-benar berisi informasi yang mengandung nilai berita bagi wartawan.

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa siaran pers yang dibuat oleh Humas kemendikbud belum benar-benar mengikuti prinsip-prinsip siaran pers yang baik. Dari segi teknis penulisan, rilis yang baik terdiri dari minimal 7 bagian, yaitu logo perusahaan, judul siaran pers, sub-judul siaran pers, *lead* (paragraf pembuka), isi siaran pers, *boiler plate* (informasi/profil singkat seputar perusahaan), dan *contact person* (nomor kontak pihak perusahaan yang dapat dihubungi). Dalam salah satu contoh siaran pers milik Kemendikbud (lamp.19), dapat dilihat bahwa masih ada beberapa bagian yang tidak dicantumkan oleh humas. Beberapa hal penting yang tidak dicantumkan tersebut di antaranya adalah logo Kemendikbud, *boiler plate*, dan *contact person*.

Dalam penelitian ini, siaran pers yang dijadikan contoh oleh peneliti merupakan siaran pers yang bersumber dari situs resmi Kemendikbud. Berdasarkan asumsi peneliti, pihak humas mungkin tidak mencantumkan ketiga poin penting di atas karena berpikir informasi tersebut dapat diperoleh wartawan di bagian lain dari situs tersebut, misalnya *boiler plate* yang dapat dilihat di dalam situs bagian profil Kemendikbud. Menurut hemat peneliti, hal tersebut sedikit keliru karena humas idealnya dapat menyediakan informasi tanpa harus mempersulit wartawan untuk mencari informasi tersebut. Di samping itu, wartawan seringkali tidak punya banyak waktu untuk mengutak-atik isi situs Kemendikbud untuk mencari apa yang mereka butuhkan, sehingga akan lebih baik jika humas dapat bersikap proaktif menyediakan siaran pers yang lengkap dengan berbagai informasi pendukung seperti profil Kemendikbud dan *contact person* pihak humas atau pihak lain yang berkepentingan dengan isi siaran pers.

Untuk bagian lain dalam siaran pers seperti judul, *lead*, serta isi siaran pers, peneliti pun melihat masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dari contoh siaran pers yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa judul siaran pers yang dibuat oleh Humas Kemendikbud perlu dibuat lebih menarik. Dalam contoh siaran pers di lampiran 19 misalnya, humas membuat siaran pers dengan judul “Penyaluran Dana Rehabilitasi Sekolah Berjalan Lancar”. Menurut hemat peneliti, judul tersebut memang bersifat positif namun kurang menarik bagi wartawan. Mungkin akan lebih menarik jika dalam judul tersebut misalnya disebutkan persentase keberhasilan penyaluran dana rehabilitasi sekolah tersebut, sehingga tidak hanya sekedar menyebutkan bahwa penyaluran dana tersebut lancar. Selain itu juga, humas dapat menambahkan subjudul untuk memberikan informasi tambahan yang mendukung judul penelitian.

Dari sisi *lead* siaran pers, peneliti hanya menemukan unsur “what” dari berita yang ditulis, yaitu mengenai penyaluran dana rehabilitasi yang berjalan lancar. *Lead* dalam siaran pers Kemendikbud akan dapat menjadi lebih baik jika dilengkapi dengan unsur 5W+1H lainnya dari berita tersebut, yaitu *who* (siapa), *when* (kapan), *where* (di mana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Sedangkan untuk bagian isi siaran pers, humas memang belum benar-benar sempurna dalam merumuskan informasi penting apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam siaran pers. Namun demikian, peneliti melihat bahwa ada beberapa poin informasi yang sudah tepat dimasukkan ke dalam isi siaran pers, seperti misalnya poin 3, 4a, 5, 6, dan 7a. Secara keseluruhan, dari segi teknis penulisan maupun konten siaran pers, Humas Kemendikbud masih perlu lebih mengasah keterampilannya agar dapat menghasilkan siaran pers yang sesuai dengan kebutuhan wartawan dan prinsip siaran pers itu sendiri,

Untuk kegiatan *media relations* berikutnya yaitu kunjungan media, humas mengaku secara rutin bersama Pak Menteri selalu menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan media ke kantor-kantor media. Kunjungan media terutama dilakukan ketika ada kebijakan baru yang ingin disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu, kunjungan ke kantor redaksi media juga dapat dimanfaatkan untuk membangun maupun mempererat silaturahmi antara humas

dan lembaganya dengan media secara keseluruhan (Hutabarat, 1993). Namun berdasarkan temuan peneliti, belum semua media yang menempatkan wartawannya di Kemendikbud pernah menerima kunjungan dari pihak Kemendikbud. Peneliti menemukan adanya kecondongan Humas Kemendikbud untuk melakukan kunjungan media hanya ke media-media besar yang dirasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyebaran berita di masyarakat, seperti misalnya Kompas untuk koran nasional dan Waspada untuk koran daerah. Terbukti berdasarkan data yang diperoleh dari Subbidang Kemitraan Media, ternyata memang selama bulan Juli - Desember 2011, Humas bersama Mendikbud belum sama sekali melakukan kunjungan ke kantor media. Selama tahun 2011 sendiri, humas baru sekali melakukan kunjungan ke kantor media, yaitu ke kantor Kompas pada bulan Juni 2011.

Minimnya kunjungan ke kantor media ini mungkin terjadi karena adanya keterbatasan waktu dan anggaran dari pihak Humas Kemendikbud, sehingga humas belum mampu mengunjungi seluruh media yang sering meliput di Kemendikbud. Hal ini menurut peneliti perlu lebih diperhatikan lagi oleh humas mengingat kunjungan media sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara Kemendikbud dengan media massa secara keseluruhan.

Kegiatan lainnya yang menurut peneliti belum dilaksanakan secara maksimal adalah peliputan ke daerah atau *press tour*. Peneliti memahami bahwa peliputan ke daerah memang diadakan dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga tidak memungkinkan humas untuk mengajak semua wartawan melakukan peliputan dalam satu waktu secara bersamaan. Wartawan yang berasal dari media daerah atau media berskala menengah ke bawah seringkali menjadi pihak yang merasa dirugikan dalam peliputan ini. Sebagai kementerian yang memiliki khalayak yang sangat banyak, Kemendikbud tentu ingin kegiatan yang dilakukannya diketahui secara luas. Ini menyebabkan seringkali Humas Kemendikbud memprioritaskan media-media nasional untuk diajak meliput kegiatan Kemendikbud. Meskipun demikian, menurut pandangan peneliti, pemerataan melalui strategi rotasi media yang digunakan oleh humas dalam menentukan media yang diikutsertakan dalam peliputan merupakan suatu bukti

bahwa humas berusaha mengkomodir semua media dan tidak membedakannya.

Seperti diungkapkan oleh humas, biasanya dalam suatu peliputan, humas pasti mengikutsertakan minimal satu wartawan dari media daerah atau media yang berskala menengah ke bawah. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat mengenai pelaksanaan liputan ke daerah milik Kemendikbud selama bulan Juli-Desember 2011, yang memperlihatkan bahwa pada beberapa kesempatan, wartawan dari media berskala kecil seperti Koran Jakarta, Suara Karya dan Pelita memang diikutsertakan dalam peliputan ke daerah bersama-sama dengan media besar seperti Kompas dan Sindo (Lamp.17). Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan rotasi media tersebut belum dapat dinilai optimal sebab masih banyak keluhan yang muncul dari wartawan karena merasa jarang diikutsertakan dalam peliputan tersebut.

Sedangkan untuk resepsi pers, baik humas dan wartawan mengaku rutin mengadakannya sekali sampai dua kali setahun. Resepsi pers biasanya diadakan dalam bentuk acara yang semiformal maupun informal, seperti seminar, *workshop*, buka puasa bersama, dan juga dalam bentuk pertemuan Fortadik, serta pemberian penghargaan bagi insan pers yang meliput di Kemendikbud. Menurut analisis peneliti, frekuensi tersebut sangat kurang untuk ukuran kementerian besar seperti Kemendikbud. Meskipun resepsi pers cenderung bersifat informal dan biasanya tidak dipublikasikan oleh wartawan, namun resepsi pers merupakan salah satu sarana penting untuk membangun keakraban dengan pihak wartawan. Adanya keakraban tersebut dapat menimbulkan rasa nyaman di antara wartawan dan humas, sehingga diharapkan pelaksanaan *media relations* dapat lebih berjalan dengan baik dan optimal. Adanya penghargaan yang diberikan Humas kepada wartawan setiap akhir tahun juga merupakan satu nilai tambah untuk menjalin hubungan yang baik di antara keduanya. Hal itu memperlihatkan bahwa Humas menganggap wartawan sebagai mitra yang penting untuk mendukung tugas-tugas Humas.

Kegiatan *media relations* di atas akan dapat berjalan dengan lebih optimal jika didukung oleh akses informasi yang baik bagi wartawan. Adanya keterbukaan

dan kebebasan akses yang diberikan humas bagi wartawan untuk langsung menghubungi narasumber menjadi satu nilai tambah bagi Humas Kemendikbud. Ini berarti humas memahami kebutuhan wartawan akan informasi yang cepat dan akurat dan juga mengerti bahwa wartawan tidak menyukai aturan birokrasi yang berbelit-belit untuk mendapatkan suatu informasi. Namun peneliti melihat, adanya kebebasan tersebut tidak disertai dengan adanya sikap asertif dan proaktif dari humas untuk mengawal informasi yang keluar dari setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

Adanya azas saling percaya dengan pihak wartawan memang merupakan hal yang penting karena itu berarti humas menempatkan wartawan sebagai mitra kerja atau pihak yang sejajar. Namun demikian, humas tetap perlu mengawal setiap informasi yang keluar dari setiap unit kerja di Kemendikbud dan tidak boleh lepas tangan begitu saja, sebab salah satu fungsi yang diemban humas adalah menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Ruslan, 2008, p.19).

Humas perlu memahami bahwa pemerintah merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi media massa sebab sebagai pilar ke-4 dalam negara demokrasi, media mengembang fungsi kontrol sosial yang mengharuskannya mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, humas di lembaga pemerintah mengemban tugas yang berat, yakni bertugas memberi bantuan kepada media berita (*news media*) berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi yang penting (Rachmadi, 1996, hal. 78). Sayangnya, peneliti menemukan bahwa wartawan jarang sekali menjadikan humas sebagai sumber untuk memperoleh informasi-informasi penting seputar kebijakan atau isu-isu penting yang menyangkut Kemendikbud.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, wartawan mengaku humas seringkali tidak menguasai isu atau kebijakan yang ditanyakan oleh wartawan, sehingga wartawan cenderung mencari narasumber lain yang dirasa lebih

kredibel. Wartawan lebih sering mencari humas untuk mengetahui agenda kegiatan saja, tidak lebih. Padahal, salah satu prinsip penting dalam melaksanakan *media relations* adalah humas harus mampu membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Jefkins (2004), praktisi humas harus selalu siap menyediakan atau memasok materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja (p.101). Dengan cara ini Humas akan dinilai sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh media.

Humas mengakui bahwa ruang lingkup Kemendikbud yang begitu luas menjadi salah satu hambatan mereka untuk menguasai semua isu seputar Kemendikbud, sehingga mereka memilih posisi sebagai fasilitator saja, membantu pihak wartawan menemukan narasumber yang tepat untuk berita yang akan dibuatnya. Penempatan diri sebagai fasilitator inilah yang menurut interpretasi peneliti menjadi salah satu permasalahan dalam *media relations* di Kemendikbud. Di satu sisi, Humas memosisikan dirinya sebagai fasilitator sehingga cenderung mengarahkan wartawan untuk mendapatkan narasumber yang lebih sesuai. Namun di sisi lain, wartawan melihat hal tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan Humas melayani kebutuhan informasi wartawan. Wartawan merasa Humas selalu melempar mereka ke pihak lain, sehingga pada akhirnya wartawan memilih untuk langsung menghubungi narasumber tanpa melalui Humas. Terkait hal tersebut, humas memang mengakui bahwa tidak ada peraturan di Kemendikbud yang mengharuskan segala informasi keluar hanya melalui Humas. Yang diberikan batasan hanyalah terkait pihak yang boleh menyampaikan informasi kepada wartawan, di mana dalam hal ini adalah menteri, pejabat eselon I dan Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) selaku pihak yang menjalankan fungsi humas di lingkungan Kemendikbud. Dengan demikian, baik menteri maupun pejabat eselon I dapat dengan leluasa memberikan pernyataan kepada wartawan tanpa harus melalui Kepala PIH sebab secara struktur organisasi, PIH berada di bawah menteri maupun pejabat eselon I.

Menyambung yang dikatakan Rachmadi (1996) sebelumnya bahwa humas juga harus membantu menyediakan fasilitas peliputan kepada rekan-rekan media yang meliput di tempatnya, menurut hemat peneliti, tersedianya ruangan khusus

untuk wartawan merupakan sebuah langkah baik yang dilakukan oleh Humas Kemendikbud, mengingat berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kementerian lain cenderung belum memberikan pelayanan fasilitas sebaik di Kemendikbud. Sayangnya, humas belum melakukan pengontrolan secara berkala terhadap fasilitas yang disediakan di dalam ruang pers, terbukti dengan masih banyaknya komputer dan koneksi internet yang rusak. Hal ini menyebabkan fasilitas yang disediakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wartawan.

Selain fasilitas yang belum memadai tersebut, berdasarkan informasi yang dihimpun selama penelitian, peneliti melihat ada beberapa hambatan utama lainnya yang dialami oleh humas dan wartawan dalam menjalani *media relations* di Kemendikbud. Pertama adalah masalah informasi dan data. PIH merupakan unit kerja yang menjalankan fungsi Humas di Kemendikbud. Dilihat dari namanya, sudah semestinya PIH menjadi salah satu sumber utama bagi wartawan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu berita. Menurut Jefkins (2004), salah satu pekerjaan manajer Humas adalah menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi utama bagi kalangan media massa. Sayangnya, fungsi penyedia informasi ini belum dapat dipenuhi secara maksimal oleh Humas Kemendikbud karena pada kenyataannya, PIH belum benar-benar menjadi pusat informasi bagi wartawan. Hal ini mungkin dikarenakan humas yang memosisikan dirinya hanya sebagai fasilitator, sehingga ada kecenderungan dari wartawan untuk mencari data langsung ke unit kerja lain.

Menurut hemat peneliti, sebagai salah satu kementerian yang paling banyak disorot masyarakat, humas harus sigap dalam menghimpun dan menyimpan seluruh data-data dan informasi terbaru seputar Kemendikbud. Dari pengamatan peneliti, data-data tersebut sebenarnya tersedia di unit kerja lain yang terkait, namun kadangkala humas kurang proaktif untuk meminta data dan informasi tersebut. Berdasarkan sudut pandang wartawan, humas dinilai pasif dalam melayani kebutuhan wartawan. Humas biasanya baru bergerak setelah diminta wartawan. Tentu saja hal ini menjadi sangat menghambat kerja wartawan untuk mendapatkan informasi secara cepat. Ketidaksiapan humas dalam menyediakan

informasi yang dibutuhkan wartawan tersebut dapat membentuk pemikiran bahwa humas tidak menguasai informasi maupun isu-isu seputar Kemendikbud.

Sebagai ujung tombak kementerian dalam menyebarkan informasi guna pembentukan citra positif di mata *stakeholder*-nya, humas dinilai belum memiliki pengetahuan yang memadai seputar informasi-informasi Kemendikbud yang dibutuhkan oleh wartawan. Padahal, informasi menjadi kunci utama dalam membangun citra positif kementerian. Kurangnya informasi yang dimiliki humas akan berpengaruh pada pembentukan citra kementerian itu sendiri. Jefkins (2004, hal. 19) mengungkapkan demikian :

“Citra tidak selamanya mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya atas sesuatu hal karena citra semata-mata berdasarkan informasi yang tersedia. Dengan demikian, informasi yang benar, akurat, lengkap, memadai dan tidak memihak benar-benar penting bagi munculnya citra yang tepat. Variasi informasi mengakibatkan variasi citra walaupun subyek yang terlibat sama.”

Dalam pernyataan di atas, Jefkins mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan haruslah benar, akurat, lengkap, memadai, dan yang paling penting tidak memihak. Tidak memihak di sini berarti humas harus memberikan informasi secara terbuka dan berimbang. Baik informasi yang positif maupun negatif harus secara jelas dan terbuka disampaikan kepada media.

Selain hambatan tersebut, hambatan lain juga datang dari dalam internal Kemendikbud sendiri, di mana menurut peneliti, kurangnya pemahaman mengenai *media relations* dari unit-unit kerja lain juga menjadi salah satu alasan mengapa *media relations* di Kemendikbud belum berjalan dengan baik. Beberapa unit kerja masih menilai *media relations* sebagai suatu hal yang tidak penting sehingga beberapa kali pihak humas mengaku kesulitan untuk memberikan informasi kepada wartawan sebab pihak humas sendiri tidak bisa mengakses informasi dari unit kerja lain. Hal ini memperlihatkan masih kurangnya *power* Humas di mata unit kerja lain. Padahal humas berperan sebagai fasilitator komunikasi (*the communication facilitator*), di mana humas seharusnya mampu memediasi dan menjaga komunikasi dua arah yang terbuka antara organisasi dan publiknya, serta berusaha menghilangkan batasan-batasan dan menciptakan

hubungan saling mengerti di antara pihak-pihak yang berkepentingan (Theaker, 2004).

Menurut interpretasi peneliti, kurangnya *power* humas dalam mengakses informasi di lingkungan Kemendikbud sendiri disebabkan karena posisi humas yang kurang strategis dalam struktur organisasi Kemendikbud (Lamp.15). Dalam struktur organisasi Kemendikbud, PIH yang menjalankan fungsi Humas di Kemendikbud berada di bawah Sekretaris Jenderal, yang menunjukkan bahwa PIH berada di jajaran eselon II, III dan IV. Karena posisi dan pangkat inilah yang pada akhirnya menyebabkan Humas Kemendikbud kesulitan mengakses informasi-informasi penting dari pejabat eselon I sebab secara struktural, Humas Kemendikbud berada di bawah para pejabat eselon I sehingga memang sulit bagi Humas Kemendikbud untuk mengatur keluar-masuknya informasi dari pejabat-pejabat eselon I.

Meskipun banyak menghadapi hambatan dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, baik humas dan wartawan sama-sama mengaku bahwa adanya keterbukaan yang mulai diterapkan oleh Mendikbud di lingkungan Kemendikbud menjadi satu hal baik yang sangat mendukung terbentuknya hubungan media yang baik antara humas dan wartawan. Keterbukaan itu ditunjukkan sendiri oleh Mendikbud yang selalu dengan tangan terbuka menerima dan menjawab setiap pertanyaan wartawan kapanpun dan dimanapun.

Selain itu, humas juga menjelaskan bahwa pucuk pimpinan pun menaruh kepedulian yang besar terhadap hubungan media yang terbentuk di Kemendikbud. Beliau percaya bahwa wartawan merupakan mitra yang tepat untuk membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat secara cepat dan masif. Kepedulian inilah yang melatarbelakangi Mendikbud untuk selalu mengajak wartawan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya sebagai Mendikbud.

Meskipun sebelumnya dijelaskan bahwa humas kurang menguasai isu atau informasi seputar Kemendikbud, namun wartawan mengaku humas selalu mudah dihubungi. Meskipun hanya untuk mencari tahu seputar agenda acara, namun

kemudahan untuk dihubungi tersebut menjadi poin lebih yang mendukung keterbukaan di lingkungan Kemendikbud.

Sebagai lembaga pemerintah yang terus disoroti oleh media massa, pemberitaan negatif merupakan hal yang wajar bagi Kemendikbud. Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti melihat bahwa Humas Kemendikbud tidak berusaha menyudutkan pihak-pihak yang memuat pemberitaan negatif tentang Kemendikbud. Meskipun terkadang wartawan didekati secara personal dengan perbincangan yang “menyentil”, namun hal tersebut dibawa dalam suasana santai dan tidak menjadikan humas membatasi akses informasi bagi pihak-pihak yang memuat pemberitaan negatif tersebut. Selain itu, tanggapan terhadap pemberitaan negatif berupa pelaksanaan jumpa pers juga dinilai tepat untuk mengklarifikasi pemberitaan negatif yang beredar di masyarakat. Dalam hal ini, humas telah melaksanakan Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 1 ayat 11, yaitu “Hak jawab adalah hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.”, serta pasal 5 ayat 2, yang berbunyi: “Pers wajib melayani Hak Jawab”.

Pemberitaan negatif seringkali disangkutpautkan dengan ada atau tidaknya pemberian uang amplop. Uang amplop yang dimaksudkan adalah pemberian kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemberitaan yang positif di media massa. Kemendikbud sendiri secara tegas melarang pemberian uang amplop untuk tujuan pemberitaan positif. Humas biasanya memberikan uang dalam bentuk akomodasi dan transportasi sebagai pengganti biaya peliputan wartawan ke luar kota. Pemberian uang transport untuk kegiatan seperti jumpa pers sangat jarang dilakukan dan hanya dilakukan pada kondisi tertentu, seperti misalnya saat ada kelebihan anggaran. Namun ditegaskan bahwa hal tersebut bukan untuk tujuan pemberitaan yang positif. Hal ini sesuai dengan Kode Etik Humas Pemerintah pasal 12 pun menyatakan bahwa “Anggota Humas Pemerintah tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian

barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi (publisitas) pribadi/ golongan/ organisasi/ instansinya.

Wartawan pun mengaku merupakan pihak yang independen sehingga adanya penyediaan fasilitas seperti akomodasi dan transportasi tidak akan mempengaruhi pemberitaan yang akan mereka buat. Menurut mereka, humas tidak pernah melakukan tekanan untuk membuat pemberitaan yang positif melalui setiap pelayanan dan fasilitas yang mereka berikan kepada wartawan. Pengaturan mengenai pemberian amplop sendiri memang telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disusun oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), di mana dalam pasal 14 dijelaskan bahwa : “Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan”. Sogokan yang dimaksud dalam pasal ini adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.

Merangkum seluruh penjabaran di atas, peneliti melihat bahwa bagaimana humas melaksanakan praktik *media relations* di Kemendikbud sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kapabilitas tim humas Kemendikbud itu sendiri. Dari seluruh data yang dihimpun, peneliti melihat bahwa belum semua personil humas memiliki kapabilitas yang dibutuhkan sebagai seorang humas. Misalnya saja, masih banyak personil humas Kemendikbud yang belum mampu menghasilkan materi komunikasi yang baik bagi wartawan. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya personil humas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ataupun keterampilan di bidang humas dan jurnalistik. Selain itu, kebanyakan personil humas Kemendikbud juga belum bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan wartawan akan informasi-informasi seputar kementerian. Humas cenderung pasif dan tidak memiliki inisiatif untuk mendekati wartawan terlebih dahulu. Hal ini mungkin dikarenakan pemahaman personil humas Kemendikbud yang masih kurang terhadap fungsi dan peran humas itu sendiri. Sebab pada hakekatnya, humas berperan sebagai manajer komunikasi, di mana melalui peran itu, humas berfungsi menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Ruslan, 2008, p.19). Kata

‘menciptakan’ di atas menunjukkan bahwa humas seharusnya menjadi pihak yang proaktif membangun komunikasi dengan wartawan, sebab inti dari hubungan dengan wartawan adalah proses memberi dan melayani (Anggoro, 2000, p.173).

Selain kapabilitas Humas Kemendikbud, peneliti juga melihat kapabilitas wartawan sebagai hal penting lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud. Hampir seluruh wartawan yang meliput di Kemendikbud telah mengantongi gelar sarjana, meskipun tidak semuanya berlatar pendidikan jurnalistik. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa meskipun tidak semua wartawan memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, namun mereka tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai wartawan dengan baik sebab mereka memiliki keterampilan jurnalistik yang didapat dari pengalaman mereka terjun langsung mencari dan menulis berita di lapangan. Menurut interpretasi peneliti, adanya tuntutan untuk membuat berita yang berkualitas dari media tempat para wartawan bernaung itulah yang mendorong mereka untuk mau tidak mau melengkapi diri mereka dengan keterampilan jurnalistik.

Dari seluruh data yang dihimpun, peneliti juga menemukan bahwa media tempat wartawan bernaung menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi perbedaan pendapat wartawan terhadap pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud. Wartawan yang berasal dari media-media terdepan (*leading media*) seperti Kompas dan LKBN Antara cenderung menganggap pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan mereka menilai Humas Kemendikbud secara holistik, di mana mereka menilai Humas Kemendikbud belum dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dalam melayani kebutuhan wartawan melalui praktik *media relations* tersebut. Di sisi lain, wartawan dari media tier kedua (*second-tier media*) seperti Koran Jakarta dan Waspada pun menilai pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud belum berjalan dengan maksimal, namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Wartawan dari media berskala menengah ke bawah cenderung memfokuskan pelaksanaan *media relations* pada fasilitas ruang pers yang disediakan bagi wartawan, di mana mereka menganggap fasilitas ruang pers Kemendikbud masih kurang memadai. Selain itu, mereka juga menggarisbawahi masalah akses

peliputan ke daerah bagi wartawan dari media berskala menengah ke bawah yang dirasa masih sangat dibatasi oleh Humas Kemendikbud.

Secara keseluruhan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud memiliki beberapa kelebihan yang menjadi nilai tambah bagi Kemendikbud, sebut saja terkait keterbukaan akses dan kemudahan wartawan dalam menghubungi personil Humas Kemendikbud. Dibandingkan dengan lembaga pemerintah lain seperti Kementerian Kesehatan, Kemendikbud memiliki akses informasi yang cenderung lebih baik di mata wartawan. Di samping itu, masih terdapat pula beberapa kekurangan dalam pelaksanaan *media relations* tersebut yang perlu mendapat perhatian ekstra dari Humas Kemendikbud. Sebab sebagai salah satu kementerian besar di Indonesia, dengan alokasi APBN terbesar dibandingkan kementerian negara lainnya, sudah sepatutnya Kemendikbud mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pula bagi para wartawan agar penyebaran informasi mengenai program dan kebijakan kepada masyarakat dapat lebih optimal. Dengan demikian, Kemendikbud pun dapat menjadi acuan bagi kementerian lain dalam melaksanakan *media relations* di lingkungan lembaga pemerintah sekaligus dapat menghapus stigma negatif terkait kinerja humas pemerintah yang berkembang di kalangan wartawan.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasi selama penelitian ini, peneliti sampai pada beberapa poin kesimpulan terkait pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud :

1. Dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, humas lebih banyak mengambil peran sebagai teknisi dan fasilitator komunikasi. Sebagai teknisi komunikasi, humas berperan sebagai pembuat dan pelaksana kegiatan *media relations*, di mana humas tidak ditempatkan sebagai sumber informasi dalam kegiatan *media relations* tersebut. Sedangkan sebagai fasilitator, humas berperan sebagai penghubung wartawan dengan narasumber yang lebih menguasai isu-isu yang ditanyakan oleh wartawan. Dari kedua peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa humas bukan merupakan corong utama bagi wartawan untuk mendapatkan informasi di lingkungan Kemendikbud. Dalam hal ini, humas belum mampu menjalankan tugas sebagai perwakilan Kemendikbud, terutama sebagai sumber informasi utama bagi wartawan di lingkungan Kemendikbud.
2. *Media relations* dilakukan oleh Humas Kemendikbud dalam dua bentuk, yaitu kegiatan formal dan informal. Untuk kegiatan formal, Humas rutin mengadakan konferensi pers, penyebaran rilis, *press tour*, media visit, peliputan kegiatan, dan wawancara. Sedangkan untuk kegiatan yang bersifat informal, Humas rutin mengadakan kegiatan kebersamaan minimal satu tahun sekali bersama seluruh anggota Fortadik untuk membangun hubungan interpersonal dengan pihak wartawan. Selain itu, sebagai bentuk apresiasi Humas terhadap wartawan, setiap akhir tahun Humas juga memberikan penghargaan kepada wartawan yang aktif meliput di Kemendikbud.

3. Dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud, humas membuka akses seluas-luasnya bagi wartawan untuk bertemu langsung dengan narasumber. Dalam hal ini, wartawan tidak perlu melalui humas terlebih dahulu jika ingin menemui narasumber. Di satu sisi, keterbukaan akses informasi tersebut menjadi nilai tambah bagi Humas kemendikbud sebab hal tersebut dapat menghapus stigma negatif mengenai kementerian yang sebelumnya dikenal sangat birokratif. Namun di sisi lain, wartawan justru menganggap hal tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan humas dalam melayani kebutuhan wartawan akan informasi dan menganggap humas tidak menguasai isu-isu seputar Kemendikbud. Pada akhirnya, humas hanya ditempatkan sebagai sumber informasi seputar agenda kegiatan saja.
4. Untuk mendukung keseluruhan kegiatan *media relations* di Kemendikbud, Humas menyediakan sebuah *press room* yang khusus diperuntukkan bagi wartawan yang meliput di Kemendikbud, yang di dalamnya dilengkapi dengan fasilitas komputer dan koneksi internet. Namun demikian, perawatan terhadap fasilitas *press room* tersebut masih sangat kurang karena masih banyak fasilitas di dalam *press room* yang rusak sehingga menghambat kerja wartawan.
5. Dalam menanggapi pemberitaan yang bernada negatif, Humas melakukan dua pendekatan, yaitu institusional dan personal. Secara institusional, Humas mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh narasumber terkait untuk mengklarifikasi pemberitaan negatif yang beredar. Sedangkan secara personal, Humas membangun perbincangan secara *person-to-person* dengan wartawan yang memuat pemberitaan negatif tersebut. Namun Humas tidak pernah mencoba menyudutkan ataupun membatasi akses informasi bagi wartawan terkait. Di samping itu, Humas juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan pemberian uang amplop di Kemendikbud untuk tujuan memperoleh pemberitaan positif. Segala bentuk kompensasi yang diberikan hanya ditujukan sebagai biaya pengganti perjalanan bagi wartawan dan wartawan pun mengaku tidak

terpengaruh serta tidak pernah dituntut untuk membuat pemberitaan yang positif.

6. Pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud masih mengalami beberapa hambatan. Dari sisi Humas, hambatan yang ditemui antara lain adanya keterbatasan SDM dan anggaran, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya *media relations* dari unit kerja lain sehingga sedikit menghambat tugas Humas dalam melayani kebutuhan wartawan akan informasi dan berita di lingkungan Kemendikbud. Dari sisi wartawan, hambatan yang dialami adalah Humas dirasa kurang asertif dalam mencari tahu kebutuhan informasi wartawan, di mana hal ini menyebabkan Humas terlihat tidak siap dalam memenuhi permintaan informasi dan data yang diperlukan oleh wartawan. Hal tersebut pada akhirnya membuat pelayanan informasi yang diberikan Humas bagi wartawan dirasa belum memadai. Wartawan cenderung harus mencari langsung narasumber untuk mendapatkan informasi yang memadai. Di samping itu, beberapa wartawan juga masih merasakan adanya perbedaan-perbedaan yang dilakukan Humas terhadap wartawan, terutama dalam hal peliputan ke daerah, serta masih kurang memadainya fasilitas yang ada di dalam *press room*.
7. Baik Humas maupun wartawan sepakat bahwa mulai diterapkannya keterbukaan akses informasi di Kemendikbud menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan *media relations* yang baik di Kemendikbud. Di samping itu, dukungan dan perhatian Menteri yang besar terhadap wartawan dan hubungan media juga menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan *media relations* tersebut. Karena keterbukaan dan dukungan datang langsung dari pucuk pimpinan, maka secara tidak langsung seluruh pihak di bawahnya pun didorong untuk ikut terbuka dan memberikan dukungan yang positif bagi pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud. Selain itu, secara personal, semua jajaran PIH sebagai Humas Kemendikbud selalu siap membantu wartawan, baik dalam menyediakan data atau mempertemukan wartawan dengan jajaran

di Kemendikbud untuk melakukan wawancara ataupun mendapat jawaban atas pertanyaan wartawan untuk kepentingan pemberitaan.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi Akademis

Penelitian ini hanya mendalami bagaimana pelaksanaan *media relations* di lingkungan Kemendikbud tanpa melihat *output* maupun *outcome* dari pelaksanaan *media relations* tersebut sehingga peneliti tidak bisa menilai tingkat efektivitas pelaksanaan *media relations* tersebut. *Output* yang dimaksud adalah hasil dari pelaksanaan *media relations* yang bersifat *tangible*, seperti kliping berita dan jumlah partisipasi wartawan dalam setiap kegiatan *media relations*, sedangkan *outcome* yang dimaksud adalah hasil dari pelaksanaan *media relations* yang bersifat *intangible*, seperti perubahan sikap, opini dan perilaku wartawan serta masyarakat terhadap Kemendikbud. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan agar kedua elemen tersebut diikutsertakan untuk memperkaya dan memperdalam kajian mengenai pelaksanaan *media relations* di lembaga pemerintah.

Selain itu, penggunaan metode campuran (*mix methods*), yaitu metode kuantitatif dan kualitatif, juga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar dapat membandingkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara dengan data statistik. Dengan demikian, pelaksanaan *media relations* dapat dilihat secara lebih menyeluruh.

7.2.2 Rekomendasi Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh Humas di lembaga pemerintah untuk merancang kembali aktivitas *media relations* yang lebih efektif dan optimal, serta dapat pula digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan *media relations* sebelumnya. Bagi Kemendikbud sendiri, untuk menghilangkan anggapan bahwa Humas hanya berfungsi sebagai agenda acara, seluruh pejabat dan staf PIH perlu lebih bersikap proaktif, asertif dan responsif dalam melayani kebutuhan wartawan

terhadap informasi, sehingga PIH dapat menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal, terutama dalam mewakili lembaganya dan menjadi sumber informasi yang kredibel bagi wartawan.

Kepala PIH selaku kepala Humas Kemendikbud juga sebaiknya mampu menjadi juru bicara kementerian. Hal ini dapat ditempuh jika Kepala PIH rutin mengikuti permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat, yang berkaitan dengan isu pendidikan dan kebudayaan, dan cepat menyiapkan jawaban terhadap permasalahan tersebut. Jawaban bisa didapat dengan cara berkoordinasi langsung dengan pejabat yang bersangkutan, atau mempersilahkan pejabat yang bersangkutan untuk menjelaskan permasalahannya secara langsung kepada wartawan dengan tetap didampingi oleh Kepala PIH.

Besarnya lingkup kerja Kemendikbud memang mempersulit pejabat dan staf PIH dalam memahami dan menyediakan seluruh informasi dan isu yang dibutuhkan oleh wartawan, oleh karena itu perlu adanya pembagian tugas yang jelas antar setiap staf PIH agar semua informasi yang dibutuhkan wartawan dapat di-*cover* oleh Humas. Dengan demikian, PIH dapat mengambil posisi tidak hanya sebagai fasilitator, melainkan juga sebagai sumber informasi. Selain itu, Kepala atau perwakilan PIH juga sebaiknya selalu diikutsertakan menjadi moderator dalam setiap konferensi pers yang diadakan di Kemendikbud, sehingga lebih dapat membuktikan peran PIH sebagai Humas Kemendikbud di mata pers dan para pejabat lain di lingkungan Kemendikbud.

Adanya keterbukaan akses dalam sebuah lembaga pemerintah memang merupakan hal yang baik, namun hal ini tidak serta-merta berarti Humas Kemendikbud, dalam hal ini PIH, boleh lepas tangan terhadap informasi yang keluar-masuk di lingkungan lembaga pemerintah tersebut. Humas perlu tetap mengawal setiap informasi yang keluar dari unit kerja lain agar informasi yang diterima masyarakat tidak menjadi simpang siur, melainkan tetap sejalan satu sama lain. Untuk itu, koordinasi dengan setiap unit kerja lain dalam sebuah lembaga pemerintahan pun perlu lebih intensif lagi dilakukan oleh Humas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Aceng. (2001). *Press Relations: Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Anggoro, M. Linggar. (2000). *Teori dan Profesi kehuasan serta Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardianto, Elvinaro & Erdinaya Lukiati Komala. (2005). *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Baskin, Otis, Craig Aronoff & Dan Lattimore. (1997). *Public elations: The Profession and The Practice*. Brown & Benchmark Publishers.
- Cangara, Hafied. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Clear, A., Weideman, L.. (2004). *Dynamics of Public Relations and Journalism: A Practical Guide For Media Studies*. Cape Town: Juta Academic.
- DeFleur, Melvin L. and Everette E. Dennis. (1998). *Understanding Mass Communication*. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
- Effendy, Onong Uchyana. (1994). *Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Holtz, S. (2002). *Public Relations on the Net Second Edition*. New York: Amacom.
- Hutabarat, Arum. (1993). *Praktek Public Relations dan Menulis*. Jakarta: Ganesia PR.
- Iriantara, Yosol. (2005). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Jefkins, Frank. (2004). *Public Relations*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jethwaney, Jaishri N., Varma, Adarsh K., dan Narendra Nath Sarkar. (1994). *Public Relations: Concepts, Strategies, and Tools*. New Delhi: Sterling Publisher.
- Kotler, Philip dan Alan R. Andreasen. (1995). *Strategi Pemasaran dan Organisasi Nirlaba*. New York: Prentice Hall.

- Lattimore, Dan, et al.. (2010). *Public Relations Profesi dan Praktik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- McQuail, Denis. (1996). *Teroi Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, Denis. (2000). *Mass Communication Theories Fourth Edition*. London: Sage Publication.
- Mulyana, Deddy. (2000). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursito, BM.. (2006). *Memahami Institusi Media*. Surakarta: Lindu Pustaka.
- Naina, Akhmadsyah, et al.. (2008). *75 Tahun M. Alwi Dahlan: Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Parsons, Patricia J.. (2008). *Ethics in Public Relations: A Guide to Best Practice*. London: Kogan Page.
- Rachmadi, F. (1996). *Public Relations dalam Teori dan Praktek: Aplikasinya dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riswandi. (2009). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Rumanti, Maria Assumpta. (2004). *Dasar-Dasar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ruslan, Rosady. (2001). *Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Seitel, Fraser P. (2004). *The Practice of Public Relations 9th Edition*. Pearson Prantice Hall.
- Simamora, Bilson. (2002). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudibyoy, Agus dkk.. (2001). *Kabar-kabar Kebencian, Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Theaker, A. (2004). *The Public Relations Handbook Second Edition*. Oxfordshire: Routledge.
- Wardhani, Diah. (2008). *Media Relations (Sarana Membangun Reputasi Organisasi)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Karya Ilmiah

- Afdjani, Hadiono. (2007). *Dampak Globalisasi Media Terhadap Masyarakat Dan Budaya Indonesia*. Dalam “Jurnal Budiluhur Vol.2 No.2, Mei 2007”.
- Andari, Vivi. (2002). *Perbedaan Persepsi antara Wartawan dan Praktisi Humas mengenai Pelaksanaan Fungsi Kegiatan Media Relations*. Depok: Universitas Indonesia.
- Isnaini, Santi. (2006). *Mencermati Pasang-Surut Hubungan Antara Public Relations Dengan Media Massa*. Dalam “Masyarakat, Kebudayaan dan Politik”, Th.XIX No.4.
- Samsup, Jo, & Yungwook, Kim. (2004). *Media or Personal Relations? Exploring Media Relations Dimensions in South Korea*. Dalam “Journalism & Mass Communication Quarterly”.
- Supa, Dustin W., & Zoch, Lynn M.. (2009). *Maximizing Media Relations Through a Better Understanding of the Public Relations-Journalist Relationship: A Quantitative Analysis of Changes Over the Past 23 years*. Dalam “Public Relations Journal Vol.3, No.4, Fall 2009”.

Internet

- Admin. (1999). *Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. 15 November 2011. <http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.pdf>.
- Bakohumas. (2007). *Kode Etik Humas Pemerintah*. 15 November 2011. [http://bakohumas.kominfo.go.id/files/pdf/Kode Etik Kehumasan.pdf](http://bakohumas.kominfo.go.id/files/pdf/Kode_Etik_Kehumasan.pdf).
- Aliansi Jurnalis Indonesia. (2008). *Kode Etik Jurnalistik*. 15 November 2011. http://www.ajiindonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=155.
- Admin. (2011, Maret 21). *Bersahabat Dengan Media*. 15 Oktober 2011. http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=505&Itemid=34.
- Admin. (2011, Juli 19). *Pemerintah Tidak Serius Kelola RSBI?*. 20 Oktober 2011. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/07/243200/293/14/Pemerintah-tidak-Serius-Kelola-RSBI>.
- Akuntono, Indra. (2011, Juli 24). *Kusustnya Penyaluran Dana BOS*. 20 Oktober 2011.

<http://edukasi.kompas.com/read/2011/06/24/10171558/Kusutnya.Penyaluran.Dana.BOS>

Depkeu. (2010). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*. 14 Oktober 2011. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU%2010%20-%202010%20-%20APBN%202011.pdf>.

Depkeu. (2011). *Nota Keuangan Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2011*. 14 Oktober 2011. <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-11-16,%20NKAPBNP2011.pdf>.

Depkominfo. (2008, Agustus 5). *Undang-Undang Nomor 14/ 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*. 1 Oktober 2011. <http://www.ptpn13.com/data/UU RI No 14 Thn 2008 KIP.pdf>.

Hapriyani, Richka. (2011, Februari 4). *Pers, Kekuatan Politik Keempat Yang Dikuasai Pengusaha*. 6 Oktober 2011. http://suaraonline.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=533:pers-kekuatan-politik-keempat-yang-dikuasai-pengusaha&catid=34:kampus&Itemid=29.

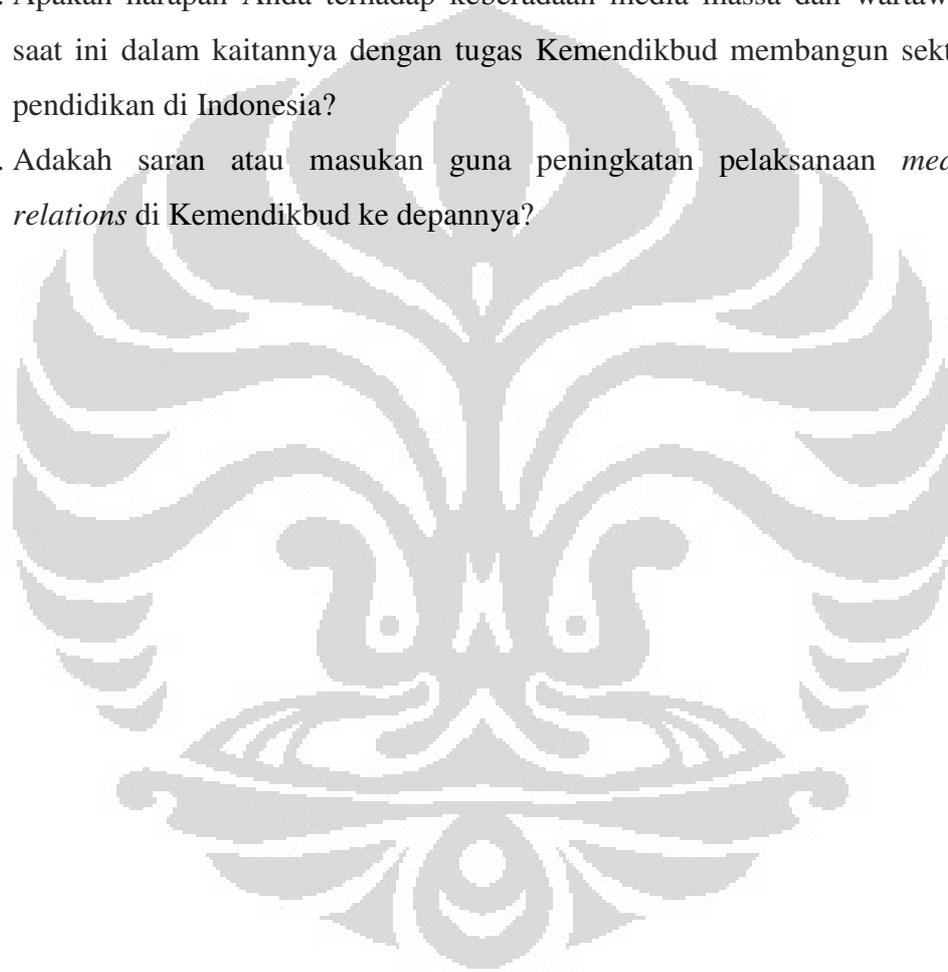
Jusuf, Widodo S.. (2011, Oktober 18). *Presiden Bentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. 19 Oktober 2011. <http://www.antaraneews.com/berita/280437/presiden-bentuk-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan>.

Musa. (2011, Maret 24). *Cybermedia: Paradigma Baru Media Online Di Era Konvergensi*. 15 Oktober 2011. <http://www.pasca.undip.ac.id/agenda-ujian-doktor/kuliah-umum/246-cybermedia-paradigma-baru-media-online-di-era-konvergensi.html>.

Lampiran 1
Panduan Wawancara Humas

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya *media relations* di lembaga pemerintah, khususnya di Kemendikbud?
2. Bagaimana peran Humas dalam pelaksanaan *media relations* tersebut?
3. Apa saja kegiatan *media relations* yang telah dilakukan oleh Humas Kemendikbud?
4. Bagaimana akses informasi yang disediakan bagi wartawan di Kemendikbud?
5. Informasi seperti apa yang biasanya banyak diminta atau menarik minat para wartawan?
6. Jika ada informasi yang dibutuhkan oleh wartawan, siapa pihak dalam Kemendikbud yang biasanya dihubungi pertama kali?
7. Adakah fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan untuk mendukung peliputan yang dilakukan oleh wartawan?
8. Media apa saja yang kooperatif dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?
9. Media apa saja yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?
10. Bagaimana pendapat Anda terhadap pemberitaan yang beredar di media massa?
11. Apakah pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan harapan Kemendikbud?
12. Bagaimana pendapat Anda seputar pemberitaan negatif tentang Kemendikbud di media massa?
13. Tindakan apa yang dilakukan untuk menanggapi pemberitaan seperti itu?
14. Apakah Humas pernah tersangkut masalah dengan wartawan selama pelaksanaan *media relations*?
15. Apa saja hambatan yang ditemui dalam melaksanakan *media relations* di lingkungan Kemendikbud ini?
16. Hal-hal apa saja yang mendukung pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?

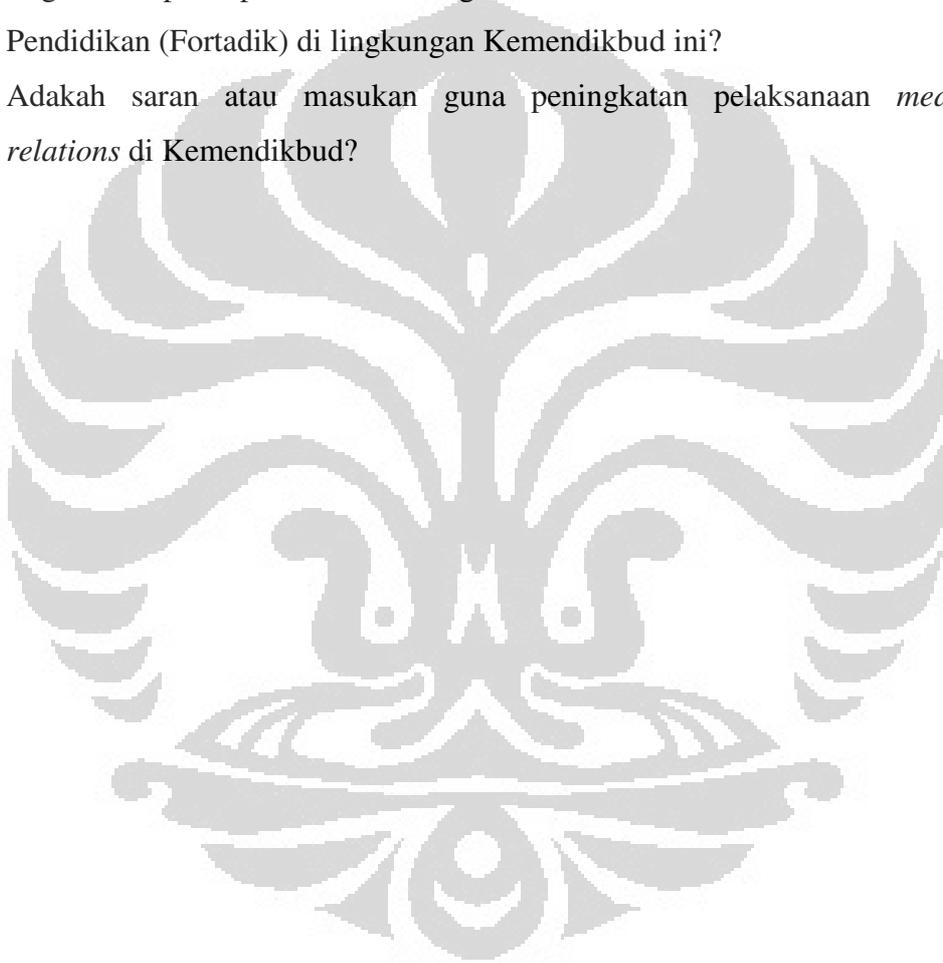
17. Bagaimana pandangan Anda terhadap *media relations* yang telah dijalankan oleh Humas Kemendikbud selama ini?
18. Apakah Humas Kemendikbud sering mengadakan kegiatan informal untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak media massa/wartawan?
19. Bagaiman pendapat Anda mengenai keberadaan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di lingkungan Kemendikbud ini?
20. Apakah harapan Anda terhadap keberadaan media massa dan wartawan saat ini dalam kaitannya dengan tugas Kemendikbud membangun sektor pendidikan di Indonesia?
21. Adakah saran atau masukan guna peningkatan pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud ke depannya?



Lampiran 2
Panduan Wawancara Wartawan

1. Apakah *media relations* penting bagi keberlangsungan tugas jurnalistik wartawan, khususnya di Kemendikbud?
2. Bagaimana hubungan media (*media relations*) yang ideal menurut Anda?
3. Apa saja kegiatan *media relations* yang Anda ketahui telah dilakukan oleh Humas Kemendikbud?
4. Bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan-kegiatan tersebut?
5. Bagaimana akses informasi yang disediakan Kemendikbud?
6. Siapa pihak yang dicari jika membutuhkan informasi atau data untuk pembuatan berita?
7. Informasi seperti apa yang biasanya diminati oleh wartawan?
8. Apakah informasi yang diinginkan itu selalu dapat dipenuhi oleh Humas?
9. Informasi seperti apa yang biasanya diberikan oleh Humas Kemendikbud?
10. Adakah fasilitas-fasilitas khusus yang disediakan untuk mendukung peliputan yang dilakukan oleh wartawan?
11. Jika Humas Kemendikbud mengundang Anda untuk ikut dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh Humas Kemendikbud, tentu mereka berharap agar ada publikasi. Bagaimana tanggapan Humas jika ternyata berita tersebut tidak Anda publikasikan?
12. Jika ada pemberitaan negatif, apa ada tindakan khusus yang dilakukan oleh Humas terhadap media massa/ wartawan yang mempublikasikan berita tersebut?
13. Pernahkan Humas Kemendikbud meminta Anda untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?
14. Apakah Anda pernah tersangkut masalah dengan Humas Kemendikbud?
15. Hal-hal apa saja yang mempermudah/ menjadi pendukung dalam hubungan Anda dengan Humas Kemendikbud?
16. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?

17. Apa saja hal-hal yang mendukung pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?
18. Bagaimana pandangan Anda terhadap *media relations* yang telah dijalankan oleh Kemendikbud?
19. Apakah Humas Kemendikbud sering mengadakan kegiatan informal untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pihak media massa/wartawan?
20. Bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di lingkungan Kemendikbud ini?
21. Adakah saran atau masukan guna peningkatan pelaksanaan *media relations* di Kemendikbud?



Lampiran 3
Transkrip Wawancara 1

Narasumber : HI, Kepala Pusat Informasi & Humas Kemendikbud RI

7 Desember 2011, 14:38 (50 menit)

Penanya (P) : Selamat sore, Pak. Akhirnya bisa ketemu juga nih, Pak. Iya jadi saya ingin tanya-tanya tentang media relations di sini, Pak. Sebenarnya menurut Bapak, bagaimana sih pentingnya media relations untuk sebuah lembaga pemerintahan seperti Dikbud ini, Pak?

Informan (I) : Jadi pemerintah itu kan banyak programnya, banyak kegiatannya, banyak kebijakannya. Nah kebijakan, program, kegiatan itu kan seluruhnya didedikasikan untuk masyarakat, untuk rakyat ya. Kalau a.. kebijakan itu, maksud saya kebijakan itu harus sampai ke masyarakat. Nah di sinilah titik pentingnya. Seandainya nih tidak dibantu oleh wartawan, oleh media, itu yag namanya kebijakan pemerintah, program, kegiatan, ngga mungkin sampai ke masyarakat, padahal harus sampai. Pertama karena semua kebijakan, program, kegiatan itu didedikasikan untuk rakyat. Tugas Humas menyampaikan kebijakan, program, kegiatan itu. Kalau tidak dibantu oleh media, itu tidak sampai. Dan kalau mau disampaikan sendiri oleh pemerintah itu sangat amat mahal sekali, misalnya melalui iklan, melalui sosialisasi ke daerah-daerah, ngga sanggup seluruh Indonesia. Tapi dengan berhubungan baik dengan wartawan, wartawan menulis, besoknya sudah tersebar. Dengan kata lain, sangat luar biasa pentingnya media relations antara a.. pemerintah, dalm hal ini Kemdikbud, dan jangan sekali-sekali melukai hubungan tersebut haha.

P : Jadi kalau posisi wartawan sendiri bagi Humas Kemendikbud itu seperti apa, Pak?

I : Jadi di sini, di Kemdiknas, sejak lama sebelum saya ada yang namanya Fortadik. Fortadik itu adalah kumpulan forum wartawan yang meliput bidang pendidikan. Nah, Kemdiknas sampai hari ini memilih posisi hanya memfasilitasi. Dalam pengertian hanya menyediakan ruang, menyediakan a.. peralatan seperlunya, tapi tata kelolanya, memilih ketuanya segala macam itu mereka sendiri. Dan ketika setiap ada pertemuan, ada press conference atau ada kegiatan, pihak Humas, dalam hal ini ditunjuk kementerian, akan menghubungi Fortadik, lalu mereka dengan sendirinya akan saling memberitahu. Dan ketika menulis, kami tidak memberikan tekanan apapun, bebas menulis. Mau menulis ke kanan, ke kiri, tidak pernah kami berpesan supaya menulis harus ke kanan, tidak pernah. Jadi free. Makanya hubungan kami dengan teman-teman media kesetaraan, partner.

P : Seperti mitra begitu ya, Pak?

I : Iya, mitra, partner, karena tidak menempatkan media di bawah struktur. Mereka juga memandang kita sebagai sumber saja.

P : Kalau kegiatan media relations yang rutin dilakukan oleh Humas ada apa saja, Pak?

I : Jadi yang utama itu ada dua ya yang saya alami. Pertama, biasanya adalah press conference itu. Yang kedua adalah a.. mengajak wartawan Fortadik itu, bisa semuanya, bisa selektif bergiliran, ke lokasi di mana kegiatan kementerian berada.

P : Jadi semacam press tour ya?

I : Iya betul, press tour. Dua yang utama. Selebihnya, teman-teman media sendiri yang aktif mencari berita di sini karena bukan hanya Pak Menteri sebagai narasumber, ada Dirjen dan lainnya. Yang utama itu, tapi yang lain-lain, pasok informasi jalan. Menyediakan rilis itu jalan.

P : Kalau kunjungan ke kantor media, Pak?

I : Itu kita jalan juga, bahkan kita bukan hanya media di Jakarta. Humas kita juga kunjungan ke media-media di daerah. Nah cara kerja di kantor kementerian atau pemerintah itu kan ada programnya. Kalau tahun ini ada programnya ya itu dilaksanakan. Kalau tahun depan tidak ada ya tidak dulu. Jadi pelaksanaannya pas waktu tiba masa anggarannya turu. Ketika sudah mulai turun anggarannya, itu jalan. Dan kunjungan itu menjelaskan kebijakan-kebijakan Kemdiknas terakhir bagaimana, updating lah. Kita pernah kalau di Jakarta itu misalnya Kompas.

P : **Kalau terkait dengan yang peliputan tadi, kalau media yang diajak itu selektif, pertimbangan memilih medianya bagaimana, Pak?**

I : A.. tergantung isu atau sifat liputannya. Kalau misalnya peliputannya itu berskala nasional, itu koran-korannya skala nasional. Pertimbangannya juga adalah ini.. coverage dari media itu. Kalau misalnya Kompas kan coveragenya nasional, itu termasuk diambil. Lalu prinsip selain coverage adalah frekuensi. Misal si ini udah jadi yang lain. Prinsip a.. pemerataan. Karena ini media relations, jangan juga hanya aspek substansi dan efek pemberitaannya saja, tapi hubungan dengan media harus baik. Jadi semua yang di Fortadik itu pernah diajak oleh Pak Menteri. Ada yang diajak ke Papua, ke Ambon, ke Aceh terakhir.

P : **Lalu kalau wartawan yang tidak banyak mendapat kesempatan diajak, ada yang sering mengeluh ngga, Pak?**

I : Ada, 'kok si itu-itu saja'. Kita yakinkan ke mereka ya kalau kalian yang agak kurang sering, medianya ngga kelihatan sebetulnya. Tapi kalau koran-koran seperti Republika, Sindo, Kompas, Media Indonesia, kan kelihatan di pasar, jadi ya diajak dong sering haha. Tapi kan ada juga koran yang jarang kelihatan di publik, walaupun resmi wartawannya. Itu jadi bahan pertimbangan. Mengakalnya itu ya tadi giliran, jadi ya memang tidak sesering media-media nasional. Tapi ya itu bukan berarti kita merendahkan.

Permasalahannya kan kita membutuhkan opini publik. Tapi pada prinsipnya semua pernah. Pernah ada yang datang ke saya bertanya kenapa yang diajak itu-itu saja. Saya bilang sambil bercanda ya karena tulisannya jelas, medianya kelihatan, seperti itu. Tulisannya jelas itu bukan berarti menulis yang bagus-bagus ya, bebas kalau kami. Sering itu wartawan jalan dengan Pak Menteri, tapi menulis beritanya tetap yang kritik-kritik, dan kita tidak terpengaruh, kita menghargai independensi. Pak Menteri juga selalu menyerahkan ke wartawan, tidak diarahkan untuk agar citra kementerian selalu bagus, tidak.

P : Kalau akses informasi yang disediakan bagi wartawan yang meliput di Kemendibud itu seperti apa, Pak?

I : Pada prinsipnya, semua informasi, semua narasumber dibuka, silahkan wartawan akses ke setiap pejabat. Bahkan Humas, kami di sini menempatkan diri sebagai fasilitator. Ingin ketemu siapa? Ingin masalah apa? Masalah sertifikasi guru misalnya, langsung ke Bapak ini karena bagian sertifikasi guru. Kalau ingin tentang beasiswa atau isu-isu kediktian, langsung ke Dikti. Saya lebih banyak menyarankan wartawan itu untuk langsung ke ahlinya saja lah. Humas lebih banyak jadi narasumber di radio, talkshow. Karena kalau di radio kan butuh yang bisa langsung jawab dengan cepat, dan biasanya kalau di radio itu hal-hal umum jadi Humas cukup menguasai. Kalau yang cetak begitu, karena biasa isu yang diangkat teknis sekali, jadi narasumbernya langsung pihak yang bertanggung jawab terhadap isu itu.

P : Jadi jika ingin bertemu narasumber, wartawan tidak harus selalu menghubungi lewat Humas?

I : Tidak, tidak selalu. Melalui Humas itu kalau misalnya ada konferensi pers. Tapi kalau mereka sendiri punya akses langsung dengan Pak Dirjen atau yang lain, silahkan langsung.

P : Kebebasan akses seperti itu apakah tidak mempersulit Humas untuk mengontrol isu yang keluar-masuk di lingkungan Kemendikbud, Pak?

I : Tidak, a.. alhamdulillah ini pejabatnya karena terbiasa berhubungan dengan wartawan itu jadi tahulah mana yang harus dikemukakan atau tidak. Kalau mereka habis mengeluarkan statement atau diwawancarai begitu, mereka juga tidak selalu menginformasikan ke kita. Kecuali kalau ada acara yang besar atau konferensi yang besar, mereka baru minta tolong kita untuk menghubungi wartawan. Saya pikir apa yang diterapkan PIH terdahulu sudah bagus ya, jadi Humas tidak dijadikan bumper, jadi apa-apa Humas begitu. Jadi seharusnya itu Humas membuka jalan. Jadi pejabat merasa free, wartawan free juga, kita juga tidak terlalu kaku. Dan kebijakan dasar dari kementerian juga tidak menjadikan Humas satu-satunya corong di sini. Artinya semua orang boleh bicara. Saya pun diberikan kebebasan oleh Pak Menteri untuk memberi tanggapan, tapi kan saya sebagai Humas, siapapun Kepala Humas harus mengucapkan kembali apa yang diucapkan pimpinan kan. Ngga boleh kan menteri ucap ke kanan, kita ke kiri kan. Bukan Humas namanya haha.

P : Wartawan itu jadi kalau ke Humas kalau mencari informasi yang seperti apa, Pak?

I : Bagi wartawan yang baru, nanyain orang ‘pak, saya mau buat berita tentang ini, wawancaranya siapa pak?’ begitu. Tapi kalau yang Fortadik itu, dia akan sudah akrab ya, sudah tahu kalau masalah ini ke siapa, itu ke siapa. Kami memantau saja pemberitaannya melalui klipings setiap hari. Jadi media relations di sini dibangun atas dasar trust, kepercayaan. Kita percaya dengan media, media juga demikian ke kita. Kita percaya dengan seluruh pejabat juga akan memberikan pernyataan yang positif untuk institusi, semua saling trust saja. Pak Menteri juga demikian, tidak

pernah beliau mengarahkan kalau semua keterangan harus dari Humas, itu ngga ada arahan seperti itu.

P : Jadi peranan Humas dalam aktivitas media relations itu sendiri sebenarnya bagaimana sih, Pak?

I : Itu tadi, fasilitator. Kalau ada hal media relations yang belum lancar ya ke kita, kalau sudah lancar ya langsung, biarkan saja. Bahkan kalau ada wartawan baru yang ingin meliput di sini, kita serahkan ke Fortadik itu, biar mereka yang istilahnya menyeleksi. Jadi karena kita sudah dekat hubungannya, sudah saling percaya, jadi seperti itu.

P : Kalau fasilitas yang disediakan untuk wartawan meliput di Kemendikbud itu ada apa saja, Pak?

I : Ada press room yang di bawah itu ya. Di dalamnya itu ada internet, dispenser untuk minum, ada tempat untuk ngetik-ngetik. Nah, press room itu juga hasil persahabatan kita dengan wartawan. Jadi tadinya ruangan wartawan itu gabung dengan ada namanya gerai informasi di bawah itu. Gerai informasi sendiri itu dilaksanakan terkait UU KIP ya, keterbukaan informasi publik. Nah itu tadinya gabung dengan ruang pers. Akhirnya wartawan bilang kalau mereka perlu punya ruangan sendiri. Itu terus diolah oleh kita akhirnya ruang itu dijadikan ruang wartawan. Pak Menteri juga mendukung, hadir sendiri dalam peresmiannya. Dan Pak Menteri sangat dekat dengan wartawan. Bahkan kalau setelah jumpa pers, Pak Menteri selalu bertanya ke wartawan masih ada pertanyaan atau tidak, jadi benar-benar dilayani dengan baik. Nah waktu mengurus masalah ruangan itu, Humas berkoordinasi dengan ada namanya Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Media, namanya Pak Kemi. Beliau itu bisa dikatakan yang membantu memberikan saran ke Pak Menteri secara personal terkait masalah hubungan media. Jadi kami pun di sini melakukan kegiatan media relations itu selalu berkoordinasi dengan staf khusus itu.

P : Dalam hubungan media yang sudah terjalin selama ini, media apa saja yang menurut Bapak cukup kooperatif, baik dari sisi wartawannya maupun pemberitaannya?

I : Kami setiap ada kegiatan jumpa pers itu tetap ada rilis ya. Tapi sepenuhnya rilis itu hanya referensi mereka. Cara mereka menulis sepenuhnya ada di tangan mereka. Tetapi sepanjang saya ikuti, walaupun tidak diarahkan ya, apa yang diucapkan di dalam jumpa pers atau peristiwa yang diikuti, itu yang ditulis oleh wartawan di sini. Kecuali yang ramai itu misalnya ada sekolah rusak seperti itu, itu tidak ada pernyataan dari kementerian, itu kan versi mereka. Tapi kalau di sini semuanya sejalan saja. Nggak ada yang bertentangan atau ekstrim banget. Paling angle berita saja yang berbeda. Tapi substantifnya sama. Jadi menurut saya semua yang ada di Fortadik itu kooperatif lah dalam pembuatan berita. Katakanlah media yang paling kritis itu di sini misalnya Media Indonesia, itu biasa saja kritisnya.

P : Biasa saja itu maksudnya masih mengkritisi yang dalam batas wajar begitu, Pak?

I : Iya betul, dalam artian masih dalam batas wajar.

P : Nah menurut Bapak, pemberitaan tentang Dikbud yang saat ini beredar di media massa itu bagaimana?

I : Ada dua maknanya. Ada yang narasumbernya dari Kemdikbud, ada yang sumbernya dari masyarakat. Biasanya, kalau saya pantau dari kliping ya, biasanya kalau narasumbernya dari Kemdikbud, dari Menteri sampai stafnya itu, kalau menurut saya sudah akomodatif. Jadi memang pemberitaannya sudah sesuai kenyataan. Tapi kalau yang di luar Kemdikbud itu kan persoalannya macam-macam, ada guru honorer yang di lapangan misalnya, itu seringkali pemberitaannya menjadi perhatian kementerian. Dan itu bentuk media relations yang kami lakukan juga, jadi kami tidak hanya memanggil saat perlu saja, tapi pekerjaan mereka pun kami pantau.

Untuk membangun media relations, kami juga memberi penghargaan kepada wartawan.

P : Wah, ada penghargaan juga, Pak?

I : Iya, yang menulisnya bagus, bagus bukan dalam artian yang memuji-muji kita ya, bagus yang berimbang maksudnya, lalu yang penulis terbanyak seperti itu.

P : Biasanya penghargaan itu diberikannya kapan, Pak?

I : Akhir tahun biasanya haha. Tapi intinya hubungan saling percaya dalam media relations yang kita bangun, bukan hubungan kepentingan. Saya lihat Pak Menteri menempatkannya seperti itu.

P : Kalau misalnya ada pemberitaan yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Kemendikbud, yang sifatnya negatif begitu, bagaimana Humas menanggapi?

I : Begini a.. suatu hari ada pemberitaan mengenai biaya pendidikan tahun baru kan, nah itu narasumbernya bukan dari Kemendikbud, tapi dari masyarakat. Nah untuk menjawab keresahan itu, kita adakan press conference, tapi bukan meluruskan berita itu sistem kami. Jadi kalau ada isu X, kami tidak langsung menjawab isu itu. Kami jelaskan ini lho yang terjadi sebenarnya, jadi tidak directly head-to-head dengan isu tersebut. Jadi sifatnya untuk semua wartawan, bukan hanya yang menulis. Cara kami merespon perbedaan pandangan pemberitaan di publik seperti itu.

P : Kalau pendekatan secara personal ada, Pak?

I : Tentu ada. Kalau ada misalnya, saya secara pribadi juga suka 'wah bagaimana nih, kunjungan dengan menteri tapi yang jadi headline bukan menterinya' haha ketawa mereka. Jadi sifatnya sambil bercanda tapi nyentil gitu lho haha. Itu kan bentuk humas relations kami dengan wartawan. Bercanda, foto-foto bareng, makan sama-sama.

P : Kalau kegiatan informal yang sifatnya institusional begitu, maksudnya yang semua wartawan bisa terlibat, ada tidak, Pak?

I : Biasanya kami punya forum. Tahun ini ada dua kali yang sudah dilaksanakan, pertama kebetulan bulan puasa, forumnya buka puasa bersama kami, jadi Humas dengan wartawan. Lalu ada buka puasa bersama Pak Menteri, yang sekaligus peresmian ruang pers itu. Lalu ada juga pertemuan Fortadik juga ya, di Bandung waktu itu. Jadi ada tiga kali ya. Itu membangun media relations sekaligus human relations. Diskusi lah.

P : **Mohon maaf ini agak sedikit sensitif pertanyaannya, Pak. Kalau di sini itu disediakan uang transport atau sejenisnya tidak Pak untuk wartawan yang misalnya datang ke jumpa pers atau kegiatan lainnya?**

I : A.. kami menyadari bahwa amplop itu tidak boleh juga ya. Untuk menyasati soal amplop itu kan kalau ada wartawan sedang berkunjung ke daerah, mereka kan harus dikasih tiketnya, lalu akomodasinya, lalu uang perjalanannya, itu saja. Tapi kalau yang liputan-liputan yang press conference, itu ngga ada. Dan dari Fortadik pun ngga ada yang minta. Yang repot itu kalau yang liputan ke daerah, suka ditongkrongin sama wartawan bodrex di daerah itu haha. Jadi intinya kami hanya memberikan biaya-biaya untuk kalau perjalanan ke daerah karena itu kan istilahnya biaya pengganti begitu ya, mereka sudah mau ikut kita, meninggalkan kantornya, masa kita biarkan begitu saja? Tentu kita sediakan secukupnya akomodasi, transport, dan lainnya. Kadang memang kalau ada kelebihan dana, ya kita berikan sebagai uang transport bagi mereka, tapi mereka tidak minta karena semua wartawan yang meliput di sini terdaftar di Fortadik. Itu juga tapi tidak selalu.

P : **Tidak diberlakukannya uang amplop di lingkungan Kemendikbud itu berdampak pada pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan tidak, Pak?**

I : Karena kami juga tidak pernah pesan berita, mereka juga tidak pernah dikasih amplop, jadi fair saja akhirnya, enak jadinya. Tapi bahwasanya kita memperhatikan wartawan, misalnya mau lebaran

begitu ya, kita kasih uang lebaran pernah, tapi bukan berarti setiap press conference ada amplop, tidak ada, tidak seperti itu. Jadi presscon ngga ada, kalau bonus lebaran misalnya, pernah, selebihnya tidak. Ya karena itu tadi prinsipnya, kita ngga pernah pesan berita ke mereka. Kita tidak pernah minta pemberitaan harus seperti ini atau itu. Walaupun kunjungan dengan Pak Menteri, mereka mau menulisnya seperti apa terserah.

P : Selama ini, sebagai Humas, hambatan apa saja sih yang sering Bapak temui saat melaksanakan media relations di sini?

I : Jadi tanpa bermaksud besar kepala, pendidikan itu kan masalah yang penting bagi semua orang, kepentingan semua orang. Wartawan pun melihat pendidikan sebagai sesuatu yang penting untuk diberitakan, jadi banyak wartawan yang akhirnya meliput. Jadi itu hambatannya, kami tidak bisa secara persis memuaskan keinginan semua pihak. Ada yang merasa 'kok si itu-itu terus'. Jadi hambatannya itu dalam hal pemerataan. Tapi itu juga bukan melulu kebijakan Humas. Kadang kalau ada kunjungan ke daerah itu, pimpinan yang menentukan mau media apa. Kalau sudah permintaan beliau kan tidak bisa diubah. Kalau misalnya Pak Menteri menyerahkan kepada Humas siapa yang diajak, baru bisa kami terapkan pemerataan tadi itu. Tapi semua pernah diajak kunjungan dengan Pak Menteri meskipun frekuansinya beda-beda. Ya terus terang orang lihat reputasinya juga ya, kalau seperti Republika, Kompas, Sindo, itu kan kelihatan jadi wajar kalau diingat terus. Tapi pada prinsipnya semua diberi kesempatan.

P : Pembatasan itu apa terkait dengan anggaran, Pak?

I : Kami memang menyesuaikan dengan jumlah anggaran. Kadang misalnya Pak Menteri minta ajak 5 orang wartawan, kita bilang ke Pak Menteri ini anggarannya tipis, jadi akhirnya 3. Pak Menteri maklumi. Jadi memang harus disesuaikan dengan anggaran.

P : Kalau hambatan dari dalam Humas atau Kemendikbudnya sendiri ada tidak?

I : Alhamdulillah kalau yang saya ikuti sekarang ya, kalau ada peristiwa besar, unit lain itu minta bantuan ke PIH sini, jadi kami yang atur pengundangan wartawan, artinya mereka menyadari pentingnya media relations. Dalam Humas sendiri juga, sepanjang saya ikuti, mereka tahu kalau wartawan itu penting, jadi menghargai. Apalagi yang bidang kemitraan, itu akrab sekali dengan wartawan. Dan saya pun selalu ajak semua kabid di PIH ini untuk hadir dalam jumpa pers sebab orang luar tahunya yang kerja di PIH itu ya Humas, padahal kan sebenarnya ada bidang lain misalnya TU ya kan, tapi karena dia bagian dari PIH, jadi dianggap Humas, jadi dia juga harus tahu isu yang sedang berkembang di sini. Jadi saya kira dari sisi personilnya, terutama di kemitraan itu ya yang berhubungan langsung dengan media, sudah cukup baiklah.

P : Kalau tadi hal-hal yang menjadi hambatan, sekarang yang menjadi pendukung dalam terjalinnya hubungan yang baik dengan media dan wartawan itu apa, Pak?

I : Tentu dukungan Pak Menteri seperti yang saya ceritakan tadi ya. Beliau sangat akrab dengan wartawan dan kita juga didorong untuk terus membina hubungan dengan wartawan. Bahkan beliau sampai minta karpet di ruang press room diganti supaya wartawan lebih banyak, luar biasa lah Pak Menteri haha. Bahkan sampai ditanyain di ruang pers itu ada kopi dan gula ngga, sampai seperti itu perhatiannya.

P : Humas pernah tersangkut masalah yang sampai membesar begitu tidak Pak dengan wartawan?

I : Kalau Humas, sepanjang saya di sini rasanya tidak pernah ya. Malah saya pernah, ada yang mau wawancara dengan saya, tapi dia salah wawancara orang, dia wawancara Ibnu juga tapi bukan saya, jadi dia salah orang begitu haha. Lalu dia turunkan pemberitaanya “menurut Ibnu Hamad, tender di mana begitu akal-akalan”. Saya bilang, masa ada kepala Humas jelek-jelekin institusinya. Akhirnya

wartawannya yang minta maaf ke saya, tapi saya sih tidak membesar-besarkan. Saya bilang cukup Anda bilang itu kekeliruan saja haha.

P : Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud sampai saat ini?

I : Ya menurut saya sudah sesuai dengan prinsip, katakanlah dengan teori dan konsep Ilmu Komunikasi Kehumasan ya. Setidaknya-tidaknya sejak saya 1 Februari di sini sampai saat ini.

P : Apa harapan Bapak terhadap keberadaan media massa dan wartawan saat ini dalam kaitannya dengan tugas Kemendikbud membangun sektor pendidikan di Indonesia?

I : Ya kembali ke ilmu dasar jurnalistik saja, ilmu media bahwa dalam menyajikan realitas itu sesuai fakta. Ngga usah lebih, ngga usah kurang. Jadi kalau narasumber bilang A ya sampaikan seperti itu. Saya ngga pernah minta untuk menulis yang bagus-bagus saja, tidak. Tulis saja seperti apa yang disampaikan narasumber. Itu kan moral obligations pemberitaan kan, menyajikan realitas sesuai realitas, tidak lebih, tidak kurang. Harapannya itu. Harapan lainnya adalah kita lanjutkan lah hubungan yang sudah terbangun ini, hubungan yang atas dasar kepercayaan. Jadi enak, kita tidak menekan wartawan, wartawan pun tidak menekan kita.

P : Kalau harapan untuk media relations di Kemendikbud ke depannya bagaimana, Pak?

I : Ya tentu kreativitas ditingkatkan karena jenis media sekarang bertambah kan ya. Kita harus mengikuti terus trend kehumasan. Sekarang ada media online, itu perlu kita perhatikan juga karena sekarang orang mungkin lebih sering akses berita lewat hp kan, lewat internet begitu. Lalu Kemdikbud ini kan skalanya nasional, saya harap, sudah saya sampaikan juga ke teman-teman di sini, pikirannya harus pikiran nasional. Jadi kalau memikirkan media relations, jangan hanya media yang di Jakarta begitu. Dan dalam praktiknya, alhamdulillah sudah mulai berjalan seperti itu. Jadi kita

keliling ke daerah, berkunjung ke kantor-kantor media untuk menjelaskan kalau misalnya ada kebijakan baru atau apa. Bagi yang ngga paham suka protes, katanya ngapain seperti itu, boros-borosin uang masyarakat. Padahal itu untuk media relations.

P : Yang terakhir nih Pak, masalah Fortadi. Fortadik itu apa sudah cukup menjembatani Pak hubungan antara Humas dengan wartawan di sini?

I : Fortadik itu kan konsentrasinya di sini, di Senayan. Kalau untuk menjembatani kami dengan wartawan di sini sih sudah cukup, kami cukup dekat juga, sering tukar ide lewat forum ataupun sekedar ngobrol-ngobrol. Tapi kalau secara keseluruhan Fortadik saja belum cukup ya, kegiatan Kemdiknas itu kan tidak hanya di Jakarta saja, banyak yang di daerah juga. Jadi di luar Fortadik pun, kami membangun hubungan dengan partner-partner di daerah.

P : Baik, Pak. Sepertinya sudah cukup tanya-tanyanya. Terima kasih banyak ya Pak, saya sudah dapat informasi banyak sekali nih.

I : Iya sama-sama, tidak apa-apa kok. Sukses ya.

Lampiran 4
Transkrip Wawancara 2

Narasumber : TS, Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Kemendikbud
21 November 2011, 10:16 (58 menit)

Penanya (P) : Pagi, Pak. Maaf ya sebelumnya Pak, saya jadi mengganggu. Ini Pak, saya ingin tanya-tanya soal media relations di sini. Menurut Bapak, sebenarnya media relations itu penting nggak sih untuk sebuah lembaga pemerintahan seperti Kemendikbud ini?

Informan (I) : Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya melihat dari mulai Pak Menteri Pak Nuh, Pak Bambang Sudibyo, dan menteri sebelumnya itu memandang Humas itu penting, strategis. Oleh karena itu a.. melihat sejarah di Kementerian Pendidikan Nasional, itu dulu namanya Biro Hukum dan Humas, kemudian ada Biro Kerjasama Luar Negeri dan Humas, dan saat ini di era Pak Nuh, posisi bagian Humas menjadi Kepala Pusat Informasi dan Humas.

P : Oh, jadi bernama PIH itu baru saat Pak Nuh naik jadi Menteri ya, Pak?

I : Iya, jadi lebih fokus menjadi sebuah unit kerja yang mengurus bagian kehumasan, di mana di dalamnya ada bidang pengembangan kemitraan, terus ada bidang informasi, bidang pencitraan dan bidang tata usaha. Saya melihat mulai dari Pak BS dan Pak Nuh itu sangat memperhatikan hubungan dengan media. Ini terbukti dengan Pak Menteri selalu mengundang media jika ada kebijakan atau program yang aktual, atau persoalan yang menjaid perbincangan publik, itu mengundang jumpa pers. Lalu kalau ada kunjungan-kunjungan baik seremonial atau tidak, itu selalu menyertakan wartawan untuk ikut. Selain itu juga ada forum khusus untuk wartawan, kegiatan itu yang intinya juga memberikan

background kepada teman-teman media. Jadi memang kita memandang media relations itu penting agar arus informasi antara Kemendikbud dengan wartawan itu lancar. Selain itu juga di bawah ada gerai informasi media itu, itu dibuka untuk umum, jadi siapa saja yang ingin mencari informasi seputar Dikbud bisa datang ke gerai itu. Gerai itu dikelola oleh bidang pencitraan yang memang khusus memberikan pelayanan bagi masyarakat.

P : Oh kalau yang gerai itu memang untuk masyarakat umum ya, Pak?

I : Iya, itu terbuka untuk umum. Mbak Elsy juga kalau mau tanya-tanya ke situ bisa, sekaligus untuk melihat bagaimana penerapan keterbukaan informan publik di sini. Kalau kami di bidang pengembangan kemitraan baru yang lebih kepada hubungan media.

P : Jadi menurut Bapak, seberapa pentingkah keberadaan media massa bagi Kemendikbud?

I : Tentu sangat penting, penting sekali karena itu salah satu mitra kita. Tanpa ada tangan media, tidak mungkin informasi bisa tersebar dengan cepat. Masyarakat itu a.. setelah kami melakukan berbagai macam a.. katakanlah riset ya, kepada guru, siswa, kepada orang tua, itu mereka lebih banyak menerima informasi dari media. Oleh karena itu, setiap ada sebuah kebijakan, kita selalu cepat untuk mengundang media. Media lebih prioritas untuk menyampaikan kepada masyarakat.

P : Contohnya kebijakan disampaikan melalui media itu seperti apa, Pak?

I : Contoh misalnya BOS ya, itu setiap tahun ada aturan-aturan yang berubah. Misalnya tahun lalu itu mekanisme penyaluran dananya melalui provinsi, tahun ini berubah melalui kabupaten kota dan jadi banyak kendala. Jadi saat ini sedang dilakukan evaluasi lagi untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana BOS itu. Nah akhir tahun ini akan ada hasil evaluasinya dan setelah itu, kita akan langsung sosialisasikan ke media agar media menyampaikan

kepada publik dan publik sebagai stakeholder pendidikan akan lebih cepat menerima informasi tersebut ketimbang kami harus menyampaikan melalui mekanisme reguler, jadi Kemdiknas kirim surat ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, lalu Kepala Dinas Provinsi kirim ke Kepala Dinas Kabupaten Kota dan seterusnya, nah itu panjang sekali mekanismenya dan kurang efektif.

P : Oh, lalu peranan Humas itu sendiri dalam aktivitas media relations itu di sini bagaimana, Pak?

I : Dalam media relations itu tentunya Humas berperan sebagai penghubung ya antara wartawan dengan Dikbud itu sendiri. Jadi jika ada kebijakan atau program itu kita sampaikan kepada wartawan.

P : Program-program media relations itu semua dibuat oleh Humas di sini, Pak?

I : Program untuk hubungan dengan media itu memang dibuat oleh Humas, dalam hal ini Pusat Informasi dan Humas (PIH) ya, tapi ada juga beberapa yang diturunkan langsung dari pimpinan pusat. Misalnya pimpinan ingin ada jumpa pers, ada kunjungan pers, itu ya kita memfasilitasi.

P : Terkait penyusunan program-program media relations tersebut, apakah PIH memiliki akses langsung ke pimpinan pusat?

I : Kepala PIH tentu punya akses langsung ke pimpinan pusat, dalam hal ini Pak Menteri ya, punya akses juga ke Dirjen, ke Wakil Menteri, ke pejabat eselon I. Kalau kepala bidang dan sub-bidangnya tidak, harus melalui Kepala PIH dulu. Tapi Kepala PIH sebagai top manager di sini tentu punya akses langsung ke Pak Menteri dan Kepala pusat itu juga menjadi juru bicara, jadi kalau menyampaikan informasi kepada publik itu ya kepala pusat.

P : Kegiatan media relations apa saja sih yang biasanya dilakukan oleh Humas Kemendikbud, Pak?

I : Kita membuat jumpa pers. Kita juga membuat rilis, itu kan juga salah satu bentuk media relations ya. Terus ada forum wartawan seperti itu, lalu ada workshop dengan teman-teman media. Workshop ini memang dikembangkan oleh teman-teman wartawan sendiri, itu rutin dilakukan setahun sekali.

P : Selain itu ada apa lagi, Pak?

I : Jadi wartawan di sini itu cukup proaktif ya, kalau ada sesuatu yang baru itu dia kerjasama dengan unit-unit kerja di sini, misal Dirjen Dikdas atau Dirjen Dikmen dan lainnya, lalu mereka juga menyambut jadi ya terlaksana. Termasuk juga ada kunjungan media, katakanlah Pak Menteri ke Kompas, ke a.. Metro TV, itu masih terus dilakukan setiap tahun.

P : Itu semuanya rutin dilakukan, Pak?

I : Semua kegiatan itu rutin dilakukan, kalau jumpa pers itu malah hampir setiap minggu ada karena program di Kemendikbud ini kan cukup banyak ya. Tahun depan malah kita rencananya akan ada coffee morning juga, itu sifatnya lebih untuk background media ya.

P : Kalau akses informasi yang disediakan bagi wartawan yang meliput di Kemendikbud itu seperti apa, Pak?

I : Ya kalau akses ke wartawan di sini itu dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk menghubungi langsung ke narasumbernya, tetapi juga kalau ingin difasilitasi kita ya kita bantu. Khusus kepada Pak Menteri, itu dari awal sudah membuka kesempatan kapan saja kepada siapa saja terkait dengan informasi kebijakan yang diberikan oleh pejabat di Dikbud. Hanya terkadang kesibukan Pak Menteri itu banyak, sehingga jika ingin memperoleh sesuatu yang sifatnya penting ada mekanismenya, ada pakai surat. Tapi kalau mau cepat tidak pakai surat juga bisa, jadi ikut saja kalau Pak Menteri lagi kemana begitu, lalu nanti langsung doorstop.

P : Kalau misalnya wartawan boleh menghubungi secara langsung narasumber di Kemendikbud, lalu bagaimana Humas

mengontrol keluar-masuknya informasi di Kemendikbud ini, Pak?

I : Mengontrolnya itu kan kita melalui klipring berita ya yang dilakukan oleh bidang pencitraan. Tetapi itu memang hanya beberapa wartawan saja kok yang langsung mengontak ke narasumber, terkadang mereka itu juga berkoordinasi dengan kita. Misalnya dia ingin Pak Dirjen tapi tidak tembus, itu nanti mereka ke kita. Jadi kita sampaikan apa yang ingin ditanyakan oleh wartawan ke narasumber yang terkait, lalu nanti kita siapkan waktu untuk wartawan bertemu dengan narasumber di dalam lingkungan Dikbud ini.

P : Apakah di Kemendikbud tidak ada kebijakan satu pintu atau one gate policy, Pak? Maksudnya agar mempermudah pengontrolan informasi.

I : Kalau informasi, itu memang akan diatur melalui Permendiknas yang mengatur tentang layanan informasi publik. Nah layanan informasi publik itu, setiap publik yang meminta informasi itu harus melalui satu pintu yaitu Pusat Informasi dan Humas (PIH), yaitu di bidang pencitraan di sub-bidang aspirasi masyarakat yang bagiannya adalah di gerai informasi di bawah itu. Itu pintu masuk segala informasi terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

P : Oh, kalau untuk wartawan, kebijakan satu pintu itu berlaku ya, Pak. Lalu kalau untuk wartawan sendiri?

I : Nah tapi kalau wartawan itu memang agak istimewa, itu a.. karena ya kemitraan itu, jadi kita berikan kemudahan yang sifatnya membuka a.. ruang selebarnya kepada wartawan untuk memperoleh informasi, tetapi tetap kita pantau sepanjang itu memang informasi yang dikuasai.

P : Kalau wartawan di sini itu sukanya cari berita yang seperti apa sih, Pak?

I : Jadi wartawan yang sering meminta informasi ke kita itu hanya media-media tertentu saja. Tidak semua wartawan media itu kritis

a.. proaktif mencari berita itu tidak. Hanya beberapa saja lah, kalau saya hitung itu ada 5 besar seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika, a.. Suara Pembaruan a.. ya sebatas itu, yang lainnya itu lebih banyak pasif. Jadi kebanyakan hanya menerima saja dari kita.

P : Kalau wartawan-wartawan yang aktif bertanya itu Pak, biasanya mereka bertanya tentang informasi yang seperti apa, Pak?

I : Kalau yang sering ditanyakan tentu isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, beberapa ada yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan sensitif. Katakanlah kasus persoalan Rektor UI, masalah itu mereka sering bertanya ke Pak Menteri atau Dirjen. Di setiap a.. kegiatan formal ataupun nonformal itu selalu ditanyakan. Lalu perkembangan BOS, pokoknya yang banyak menyentuh persoalan publik, persoalan masyarakat yang mereka rasakan. Katakanlah penerimaan siswa baru yang harganya mahal, lalu masalah anggaran pendidikan seperti itu. Banyak persepsi yang keliru di masyarakat tentang anggaran 20% dari total APBN itu ke Kemdiknas, itu keliru. Total 20% dari APBN itu sekitar 287 triliun, yang diterima Kemdiknas itu hanya 57 triliun, sisanya itu tersebar di 14 kementerian lembaga, itu ada di Depkes, di Depag dan lainnya. Terus tersalurkan ke dana transfer daerah provinsi, kabupaten kota, termasuk di situ adalah tunjangan profesi pendidik. Jadi yang diterima Kemdiknas itu hanya 57 triliun, nah persepsi di masyarakat itu kan kebanyakan berpikir bahwa wah dana Kemdiknas kan besar begini begini.

P : Lalu apa kekeliruan persepsi itu sudah pernah disampaikan klarifikasinya ke publik melalui media massa?

I : Oh sudah, sudah sering sekali, termasuk wartawan pun sering keliru, apalagi wartawan yang baru ganti begitu ya, dia tanya begitu, itu keliru.

P : Kalau tadi wartawan dikatakan diberi kebebasan untuk langsung menemui narasumber, jadi mereka datang ke PIH kalau mencari data yang seperti apa, Pak?

I : Biasanya kalau mereka mau cari data dan informasi itu mereka ke kita dulu. Dari kita nanti ke Pak Ibnu, lalu nanti disampaikan ke pihak yang terkait. Tapi kalau itu sifatnya sangat teknis, kita kan tidak menguasai. Humas itu secara umum mengetahui, tetapi secara teknis itu tidak. Katakanlah soal BOS, itu peruntukannya untuk siapa saja, terus kabupaten yang sudah terima atau belum itu mana saja, nah itu kan kita perlu berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Kalau bisa kita hubungkan, kalau tidak a.. wartawannya kontak langsung.

P : Dalam hubungan media yang sudah terjalin selama ini, media apa saja yang terbilang kooperatif dalam berhubungan dengan Humas Kemendikbud, Pak?

I : Kalau media-media yang termasuk kooperatif itu kan ya seperti yang tadi saya sebutkan itu, ada Kompas, Koran Tempo, Republika, Media Indonesia, ya yang seperti itu.

P : Kalau Kompas begitu misalnya Pak, itu mereka kan pasti juga sering menulis berita yang sifatnya mengkritisi, itu tetap kooperatif, Pak?

I : Ya kita kan berharapnya ada perimbangan berita. Jadi kalau Kompas misalnya, berita yang opininya dia juga a.. biasanya ada diimbangi dengan narasumber dari Dikbud yang menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi. Jadi katakanlah ada media yang sedang menyoroti tentang BOS, di mana di terjadi penyimpangan-penyimpangan di daerah begitu. Seharusnya jika ada pemberitaan seperti itu, seharusnya ada dong narasumber dari kita supayaimbang. Ya seperti itu harapan kita.. Itu yang sering kita sampaikan dalam forum dengan wartawan.

P : Lalu kalau media yang kurang kooperatif itu ada apa saja, Pak?

I : Kalau menurut saya hanya Media Indonesia itu saja, itu pun kurang kooperatif bukan dalam artian yang bagaimana ya, hanya terkait pemberitaannya saja yang kurang berimbang.

P : Kurang berimbang itu seperti apa, Pak?

I : Kalau saya lihat itu agak a.. hanya kepentingan redaksi saja itu. Kalau sudah kepentingan redaksi itu kan cakupannya luas, ada kepentingan politik, ada faktor lainnya begitu, kepentingan-kepentingan seperti itu. Kalau berimbang itu kan juga jangan hanya berita yang negatif saja yang diangkat, kalau kita ada pencapaian atau prestasi juga ya seharusnya diberitakan, seperti itu harapan kita. Tidak hanya mengangkat berita-berita yang punya nilai jual, yang negatif-negatif, tetapi kalau ada sebuah prestasi yang dibuat oleh Kemdiknas, apakah itu prestasi kinerjanya ataukah prestasi siswanya, itu harusnya ya ikut diangkat dong. Tapi saya lihat masih kurang yang seperti itu.

P : Menurut Bapak, bagaimana pemberitaan tentang Kemendikbud yang beredar di media massa? Apa sudah sesuai dengan harapan Kemendikbud?

I : Menurut saya sepertinya belum ya, belum seluruhnya seperti itu. Masih banyak yang pemberitaannya itu belum berimbang. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi kendala mereka. Jadi mungkin juga karena a.. media kan punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau saya melihat katakanlah Kompas a.. itu sudah cukup berimbang. Hanya kalau Media Indonesia yang mungkin ada kepentingan-kepentingan a.. redaksi, kritisnya itu menurut saya a.. kurang bisa menjaga keseimbangannya seperti itu, berat sebelah.

P : Kalau terkait dengan pemberitaan yang tidak berimbang atau yang cenderung negatif tersebut, apa ada tindakan khusus dari Humas Kemendikbud untuk menanggulangnya?

I : Yang jelas kita analisis dulu berita itu, jadi itu positif atau negatif atau netral. Kalau itu sifatnya negatif, sasarannya itu kemana dulu.

Yang menangani pendidikan itu kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, lalu ada provinsi dan kabupaten.

P : Contohnya seperti apa misalnya, Pak?

I : Misalnya ketika itu ada sekolah rusak, itu adalah tanggung jawab kabupaten kota, bukan persoalan kementerian sini. Karena otonomi daerah itu dari SD sampai menengah itu tanggung jawab kabupaten kota. Kebanyakan mengkaitkan dengan Kemdiknas, padahal itu tanggung jawab kabupaten kota, termasuk BOS itu tidak mutlak punya Kemdiknas sini, tapi kabupaten kota juga bertanggung jawab menyediakan dana BOS pendamping untuk dana BOS pusat.

P : Oh, jadi kadang ada yang bukan masalah Dikbud tapi disalahkannya ke Dikbud begitu, pak?

I : Ya, jadi kadang masyarakat dan wartawan itu masih berpikir kalau permasalahan pendidikan itu permasalahan Kemdiknas, padahal belum tentu, dilihat dulu substansinya berita itu.

P : Lalu terhadap pemberitaan yang negatif atau keliru seperti itu, apa tindakan yang biasanya dilakukan oleh Humas Kemendikbud?

I : Jadi kalau penanganan berita itu kan ada di bidang pencitraan ya. Dia mengkliping lalu dia mengevaluasi apa pemberitaan yang ada, lalu biasanya kita bahas bersama. Berita negatif yang perlu mendapat tanggapan akan kita tanggapi, biasanya yang memojokkan Kemdiknas kita analisis, kita diskusikan dengan Staf Khusus Mendiknas Bidang Media, apakah itu dibeirkan hak jawab atau tidak. Kalau perlu, kita susun berita untuk hak jawab, tapi kalau itu sifatnya mengkritik untuk memberi masukan, itu kita diskusikan lalu biasanya kita siapkan penjelasan yang akan diberikan melalui biasanya jumpa pers.

P : Oh, jadi penjelasannya tidak hanya untuk wartawan yang menulis berita negatif itu saja, Pak?

I : Betul, jadi kita tidak hanya memberi penjelasan ke media A yang menulis itu, tapi kita beri penjelasan ke semua media supaya paham semua, seperti itu.

P : Tadi sempat disebutkan kalau PIH berkoordinasi dengan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikas Media, sebenarnya hubungan antara keduanya itu bagaimana, Pak?

I : Hubungannya dengan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media itu ya setiap ada program atau kebijakan yang berhubungan dengan media itu harus selalu dikoordinasikan dengan staf khusus, kalau tidak nanti tidak sevisi dong, jadi harus sama. Kalau kita berikan usulan, nanti staf khusus akan berikan masukan. Secara struktural itu kan Pak Menteri dengan PIH hubungannya, tapi secara nonformal, itu Pak Menteri hubungannya dengan staf khusus itu, jadi kita harus selalu koordinasi.

P : Untuk mendukung tugas peliputan wartawan di sini, fasilitas-fasilitas apa yang disediakan oleh Humas Kemendikbud untuk wartawan, Pak?

I : Teman-teman wartawan itu kita fasilitasi dengan press room yang berada di Gedung C lantai dasar. Di situ kita sediakan komputer yang terhubung dengan akses internet sehingga bisa mengirim berita saat liputan di sini. Katakanlah siang ini dia meliput pelantikan Pak Menteri, selesai pelantikan dia bisa langsung bekerja dan mengirim berita di bawah. Selain itu wartawan di sini juga memiliki forum yang dapat menjalin kerjasama dengan unit-unit lain di sini melalui kita, PIH.

P : Sekarang mengenai hambatan nih, Pak. Selama ini ada hambatan apa saja sih selama melaksanakan media relations di sini?

I : Hambatan itu ya kalau kita mengundang jumpa pers, saya paham ya keterbatasan waktu, jadi kalau misalnya kami undang jam 9, biasanya tidak datang tepat waktu mungkin karena sebelumnya pulang malam atau bagaimana. Jadi di kala ada jumpa pers dari Pak

Menteri yang penting, wartawan datang terlambat. Yang kedua juga kami ingin mengajak wartawan ke daerah, kita minta koran A, B, C itu terkadang tidak semudah a.. harapan kita karena sama redaksi terkadang tidak dikirim. Itu sebetulnya event penting yang harus diikuti mereka tapi jadi tidak ikut. Hambatan lain itu ya harapan kami, setiap ada jumpa pers, penjelasan atau apa, langsung dipublikasikan, tapi kenyataannya tidak, apalagi yang sifatnya seremonial itu sulit untuk mereka angkat, itu juga menjadi kendala di kita.

P : Terkait dengan liputan seperti yang Bapak bilang tadi, biasanya mekanisme pemilihan media yang diundang itu seperti apa, Pak? Ada prioritas-prioritas tertentu nggak, Pak?

I : Jadi kalau event yang sifatnya nasional itu kita ajak semua, katakanlah rembuk nasional pendidikan, itu semua media kita undang. Tetapi di saat sifatnya ke daerah, itu kan anggarannya terbatas, tidak bisa semua, paling hanya 3-5 media, jadi kita pilih dong. Karena kita kan juga ingin supaya media yang jangkauannya nasional itu bisa cepat kan menyampaikan informasi ke masyarakat. Kita sudah mengeluarkan sesuatu kan tentu harapannya dengan media nasional yang kita ajak itu informasi lebih bisa tersebar dengan luas dibandingkan dengan yang sifatnya lokal. Kalau misalnya di Jakarta, koran-koran Warta Kota, Pos Kota, itu tidak bisa. Terbit, Pelita, itu tidak bisa. Kita inginnya media yang besar, harapannya ya yang seperti itu dan itu permintaan pimpinan juga. Tapi juga kita gilir, biasanya kita adakan giliran katakanlah kalau ada 4 media, 3 itu media yang nasional, 1 itu yang media menengah ke bawah dalam arti jangkauan informasi yang disampaikan ke publik itu tidak banyak. Atau kita juga menyesuaikan, kalau Pak Menteri ke daerah Cirebon, kita lebih mengajak Pikiran Rakyat yang koran lokal situ kan, jadi pemberitaannya pasti akan masuk di situ. Jadi kita

pertimbangkan dari beberapa sisi. Itu tentu koran-koran yang jelas ya, kalau yang tidak jelas itu tidak kita fasilitasi.

P : Kalau dari segi personil Humas di sini, khususnya yang berada dalam sub-bidang kemitraan media, apakah ada hal yang menjadi hambatan juga, Pak?

I : Kalau dari pandangan saya sih, dari sisi teman-teman Humas itu sudah mencukupi. Jadi kita berikan pelatihan-pelatihan terkait hubungan dengan media. Jadi kalau dari sisi personilnya sih tidak ada masalah meskipun tidak ada latar belakang Humas atau jurnalistiknya, secara relasi itu tidak menghambat, mungkin hanya sedikit kesulitan kalau harus menulis berita kalau tidak punya latar belakang jurnalistik ya, tapi selebihnya sih tidak menghambat.

P : Kalau dari segi anggaran bagaimana, pak? Sudah mencukupi?

I : Kalau dari sisi anggaran juga sudah mencukupi. Persoalan yang agak sulit itu kan beberapa teman media yang masih dalam tanda petik masih meminta uang transport saat liputan seperti itu, biasanya media yang sifatnya menengah ke bawah. Tapi kalau yang media nasional itu ngga. Yang menengah ke bawah itu yang saya lihat masih sangat mengharapkan seperti itu. Tapi kita tidak bisa memfasilitasi setiap kegiatan itu ada.

P : Jadi saat ini kebijakan yang diterapkan di Kemendikbud terkait pemberian uang itu bagaimana, Pak?

I : Saat ini kita 50:50. Katakanlah terkadang kita berikan, terkadang juga tidak. Biasanya yang diberikan itu kalau yang keluar kantor, tapi kalau jumpa pers di sini biasanya tidak.

P : Kalau tadi hal-hal yang menjadi hambatan, sekarang yang menjadi pendukung dalam terjalinnya hubungan yang baik dengan media dan wartawan itu apa, Pak?

I : Yang jelas itu PIH mendapat dukungan dari Pak Nuh sendiri supaya informasi apapun diberikan kepada wartawan, termasuk Pak Nuh sendiri di setiap event selalu melayani pertanyaan wartawan

sampai pertanyaan itu habis, termasuk kalau liputan ke daerah itu, Pak Nuh selalu mengajak wartawan untuk makan bersama, itu didampingi kita.

P : Wah, perhatian Pak Nuh berarti sangat besar ya untuk wartawan di sini?

I : Iya, perhatian beliau terhadap media itu sangat besar dan selalu berpesan kepada kita untuk mengurus teman-teman media. Tapi memang kalau ke daerah itu anggaran yang terbatas jadi kita tidak bisa ajak semua. Banyak yang suka mengeluh juga sih kalau tidak diajak, tapi memang kita melihat pertama itu medianya kan, apakah jangkauannya luas atau tidak. Kita mengajak ke daerah dengan biaya yang besar kan tentu ingin ada imbalannya begitu kan, jadi kita memilih.

P : Ada tidak Pak wartawan yang sering mengeluh kalau tidak diajak peliputan ke daerah begitu?

I : Ya keluhan seperti itu memang selalu ada, tapi memang seperti itu kebijakan pimpinan, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memilih seperti itu. Tapi kita kan nanti akan beri giliran bagi media-media yang menengah ke bawah itu. Kalau yang tidak ikut liputan juga tetap dapat berita, ada di sini namanya Agung yang membuat berita kalau ada liputan atau acara seperti itu, lalu kita kirim beritanya ke semua wartawan.

P : Selain keluhan-keluhan seperti itu, apakah Humas pernah tersangkut masalah lain dengan wartawan yang meliput di sini?

I : Pernah, tapi kalau era Pak Nuh ini lebih banyak pendekatan yang persuasif, yang tidak perlu harus ke Dewan Pers seperti itu. Pak Nuh tidak mau bersikap reaktif terhadap pemberitaan-pemberitaan yang negatif, beliau lebih suka memberikan penjelasan-penjelasan untuk menjawab terkait persoalan tulisan-tulisan yang diangkat media. Biasanya berita-berita itu dipelajari dulu duduk persoalannya itu apa sih, setelah itu kita jelaskan. Beda dengan Pak

BS, beliau itu reaktif. Setiap pemberitaan yang negatif itu kita berikan hak jawab. Pernah kasus sampai dimediasi Dewan Pers, itu dengan TV One dan Kompas, itu persoalan ujian nasional, di mana TV One memberitakan ada contek massal, disorot. Kita minta data di mana sekolahnya untuk kita cek tapi tidak diberikan, jadi kita ajukan keberatan ke Dewan Pers lalu dimediasi, sampai dua kali kita ke sana. Kalau Kompas juga sama, persoalan UN atau apa ya a.. oh persoalan evaluasi UN, mereka punya persepsi yang berbeda dengan kita, tentang penentuan kelulusan itu. Padahal kelulusan itu tidak semata-mata dari UN.

P : Untuk menjalin kedekatan dengan wartawan di sini, Humas sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang formatnya santai dan informal begitu nggak, Pak?

I : Forum wartawan itu, biasa kita lakukan di luar kantor, ke Bogor. Pak Nuh juga ikut. Lalu acara buka puasa, itu rutin dilakukan. Acara akhir tahun juga biasa kita lakukan. Kalau forum itu juga rutin, itu kita biasanya ajak untuk menjelaskan program-program atau kebijakan, tapi bukan untuk tujuan dipublikasikan, lebih untuk background saja. Forum itu juga secara tidak langsung membantu kami ya Humas untuk memfilter wartawan-wartawan yang abal-abal haha. Itu kan namanya Fortadik ya, jadi biasanya kalau wartawan yang datangnya hanya sekali-sekali begitu tidak masuk dalam Fortadik.

P : Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud sampai saat ini?

I : Ya menurut saya hubungan dengan media masih harus terus dibangun, dibina, dilakukan kemitraannya. Tapi memang intensitasnya perlu ditingkatkan. Katakanlah forum wartawan itu kan hanya setahun sekali, mungkin bisa ditambah. Pertemuan informal itu juga harus ditingkatkan.

P : Harapan Bapak sendiri terkait keberadaan teman-teman wartawan yang meliput di sini bagaimana, Pak?

I : Kalau saya harapannya dengan teman wartawan ya itu a.. dari sisi pemberitaan yang berimbang, diundang bisa hadir begitu, mudah. Ke daerah juga redaksi melepas dan ikut serta. Terus komunikasi kita itu terus ditingkatkan.

P : Kalau harapan untuk media relations di Kemendikbud ke depannya, Pak?

I : Ya harapannya kalau untuk Humas ya dan media relations di sini, ya ke depannya perlu ditingkatkan lagi lah kegiatan-kegiatan media relations di sini ya, tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas. Terutama ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal ya, ya kumpul-kumpul dengan wartawan itu perlu ditingkatkan intensitasnya supaya hubungan yang terbangun juga baik dan dekat ya.

P : Baik Pak, sepertinya sudah cukup untuk sekarang. Terima kasih banyak ya Pak, maaf sudah mengganggu waktunya.

I : Ya Mbak Elsy, sama-sama.

Lampiran 5
Transkrip Wawancara 3

Narasumber : DT, Kepala Subbidang Kemitraan Media Kemendikbud

8 November 2011, 15:19 (73 menit)

Penanya (P) : Selamat sore, Pak. Iya jadi saya ingin tanya-tanya seputar media relations di sini, Pak. Pertama-tama ingin tanya dulu pendapat Bapak soal pentingnya media relations dalam sebuah lembaga pemerintah itu bagaimana, Pak?

Informan (I) : Media relations ya sangat penting ya. Apalagi di era IT sekarang ini ya, yang mana informasi-informasi itu sangat mudah didapatkan oleh masyarakat melalui media yang ada, tidak hanya media konvensional seperti cetak, tapi juga sekarang sangat berkembang media online. Jadi ya media relations sangat penting sekali, bagi.. terutama bagi kami-kami yang bekerja di Humas ya, untuk mensosialisasikan mempublikasikan berbagai kebijakan-kebijakan di kementerian kami, sehingga kebijakan-kebijakan itu dapat dipahami oleh masyarakat dan tentu harapan kami ya mendapat dukungan ya dari masyarakat terhadap kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah.

P : Jadi menurut Bapak, seberapa pentingkah keberadaan media massa bagi Humas Kemendikbud?

I : Media massa sangat pentinglah. Tugas pokok kami itu kan sebenarnya bagaimana bisa menyosialisasikan ya.. mempublikasikan berbagai kegiatan kebijakan yang dari kementerian ya. Dan itu kan tidak mungkin kita lakukan untuk menjangkau ya.. seluas mungkin khalayak masyarakat kalau tidak melalui media. Memang ada juga sosialisasi yang dilakukan secara face to face ya, tapi tentu itu jangkauannya tidak seluas melalui media. Umpamanya kalau kami ingin ada kebijakan baru,

kemudian kami ingin apa.. mempublikasikan menyosialisasikan pendapat kami, kami mungkin ya seperti tadi, kita adakan konferensi pers, kemudian kita undang pendapat yang berkompeten terhadap kebijakan tersebut. Nah kemudian melalui media, tadi kan di sana dilihat ada cetak, televisi, online, sehingga ya itu.. luas jangkauan apa yang disampaikan itu akan ..akan sangat menjangkau khalayak masyarakat.

P : Oh begitu, Pak. Lalu kalau peranan Humas itu sendiri dalam media relations seperti apa? Terutama dalam konteks Kemendikbud ya, Pak.

I : Aa.. Humas itu sebenarnya, kalau boleh dikatakan, banyak masyarakat mengatakan Humas kan semacam corong katanya ya, corong dari kementerian gitu ya. Saya pikir itu ada benarnya gitu ya, sehingga akses Humas begitu ya.. pada pejabat-pejabat di kementerian itu memang agak-agak beda dibanding dengan unit kerja yang lain.

P : Maksudnya beda itu bagaimana, Pak? Lebih mudah menghubungi begitu ya?

I : Kita sebagai orang Humas setiap saat bisa mengontak, katakanlah pimpinan-pimpinan di kementerian ini, terkait.. katakanlah kalau misalnya ada masyarakat atau media yang meminta klarifikasi dan penjelasan untuk hal-hal yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Karena sebagai Humas di kementerian yang sebesar ini, saya merasa tidak yakin juga teman-teman akan menguasai ya.. semua isu-isu mengenai kementerian. Nah sehingga untuk isu-isu yang misalnya kita belum terlalu menguasai, karena mungkin kalau nanti kita asal ngomong, datanya tidak akurat kan juga nanti jadi kontraproduktif ya kan. Jadi kita di Humas punya akses itu. Kita punya nomor kontak.. hotline dengan pimpinan kementerian.

P : Di sini kegiatan media relations yang rutin dilakukan itu ada apa saja, Pak?

I : Ya banyak sekali ya. Tentu ada jumpa pers dan rilis ya. Kalau kita kaitkan dengan program yang ada di.. ini namanya bidang pengembangan kemitraan ya, atau dahulu itu Humas ya, jadi ini hanya masalah nama aja, tapi pekerjaan kita tetap pekerjaan Humas gitu ya. Selain tadi kita melakukan jumpa pers, kita juga punya namanya kegiatan katakan.. ada namanya pendampingan kunjungan kerja pimpinan kementerian dengan pers. Jadi katakanlah Pak Menteri kunjungan kerja ke daerah gitu ya, kita biasanya membawa wartawan-wartawan nasional ya.. untuk ikut kunjungan kerja Pak Menteri dengan tujuan untuk nanti mereka bisa mempublikasikan, mensosialisasikan, memberitakan kegiatan-kegiatan Pak Menteri di sana. Kemudian kita juga punya namanya kegiatan press tour. Press tour ini kunjungan media untuk mengekspos, terutama implementasi kebijakan kementerian di daerah, apakah sudah terlaksanan sesuai dengan harapan gitu ya, sesuai dengan kebijakan yang digulirkan. Kemudian kita juga punya kegiatan yang sifatnya a.. ada talkshow gitu, talkshow dengan media-media televisi dan radio, dan itu tidak hanya kita lakukan di Jakarta dengan media nasional gitu ya, tapi kita juga punya program-program yang kerjasama dengan televisi-televisi daerah supaya lebih menjangkau ke masyarakat. Kemudian kita juga punya kegiatan namanya Forum Wartawan Pendidikan, Fortadik.. Kegiatan Forum Wartawan Pendidikan ini dalam rangka mensosialisasikan kebijakan kementerian, tapi dengan format yang lebih.. in-depth gitu ya, lebih mendalam. Nah untuk kegiatan fortadik ini kita angkat beberapa isu misalnya, jadi wartawan yang menjadi peserta dalam Fortadik itu, mereka bisa menggali lebih dalam lagi mengenai kebijakan-kebijakan yang kita gulirkan. Kemudian juga bisa juga memberikan input masukan kepada kita.

P : Kalau yang paling sering dilakukan itu apa, Pak?

I : Saya pikir yang paling kita sering lakukan ya ini.. jumpa pers, a.. liputan gitu ya, liputan kegiatan. Itu ya yang paling sering. Kalau

misalnya kita kuantitatif gitu, itu setahun untuk jumpa pers, liputan pers gitu, itu hampir 300-an. Jadi hampir setiap hari ada kegiatan-kegiatan itu.

P : Kalau untuk liputan ke daerah tentu itu kan tidak semua media bisa diajak ya, Pak. Lalu pertimbangan memilih media si A, si B, si C yang diajak liputan itu apa, Pak?

I : Saya pikir a.. apa ya a.. ya kita kan berhitung ya, berhitung. Prinsip ekonomi juga berjalan di sana. Pasti kita lebih memprioritaskan media-media nasional dan oplahnya tinggi gitu ya, pengaruhnya besar gitu ya.. dalam pengertian tentu kita ingin biaya yang kita keluarkan, karena kan kalau kita mengajak mereka ke daerah gitu ya, biasanya kita kan a.. menanggung semua biaya akomodasi mereka, walaupun kadang ada media yang istilahnya menanggung sendiri biaya mereka, tapi tidak selalu juga. Jadi ada pertimbangannya lah, tapi tidak melulu media besar yang kita ambil. Tetap kita mix, ada media besar, ada media kecil juga. Tapi secara presentasi memang kita lebih prioritaskan media nasional.

P : Kalau akses informasi yang disediakan oleh Humas Kemendikbud bagi wartawan di sini bagaimana, Pak? Semua harus selalu lewat Humas atau bagaimana?

I : Prosedur formalnya, harusnya akses informasi.. formal ya, itu melalui PIH. Katakanlah misalnya media, media X misalnya kan, ingin klarifikasi berita Y begitu kan..Secara apa.. katakanlah secara institusi, media yang bersangkutan ya a.. melalui PIH mendapatkan akses klarifikasi isu-isu yang diinginkan. Itu formal gitu kan. Tapi ternyata gitu kan, a.. secara personal, media ini kan representasinya wartawan, secara personal kita ngga bisa membatasi kalau misalnya wartawannya langsung telpon Pak Menteri dan Pak Menteri bersedia, kan ngga mungkin Pak Menteri bilang harus melalui PIH dulu dong, begitu kan. Formal, memang harus melalui PIH. Secara personal, tidak bisa dibatasi. Silahkan sepanjang pejabatnya mau.

P : Ketidaksesuaian prosedur itu jadi mempersulit PIH nggak untuk mengontrol informasi yang keluar-masuk di sini, Pak?

I : Saya pikir begini, kalau itu misalnya keluar dari Pak Menteri, kemudian keluar dari a.. katakanlah pejabat eselon 1 sendiri, itu memudahkan kita karena apapun a.. informasi itu kan kita dapatkan juga dari kebijakan beliau-beliau kan. Jadi kalau secara personal wartawannya bisa punya akses langsung ke Pak Menteri dan pejabat eselon 1, itu membantu. Nggak mungkin kan Pak Menteri dan pejabat eselon 1 memberikan penjelasan yang akan kontraproduktif. Pasti beliau sudah punya apa namanya.. a.. kontrol sendiri kan. A.. yang agak merepotkan mungkin kalau misalnya pejabat-pejabat di bawah itu. Mereka memberikan apa.. penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan kepada wartawan yang kadangkala bisa apa namanya.. a.. ya katakanlah tidak sejalan dengan kebijakan Pak Menteri, katakanlah ya. Tapi itu sangat-sangat jarang sekali. Dan di Kementerian Pendidikan Nasional ini kita punya aturan main, surat edarannya sampai saat ini belum dicabut gitu ya. Jadi saat ini yang boleh memberikan penjelasan ke wartawan itu, selain Pak Menteri dan pejabat eselon 1, kemudian PIH sebagai juru bicara kementerian.

P : Kalau pihak PIH yang banyak memberikan informasi ke wartawan itu siapa, Pak?

I : Tentu Kepala Pusat Informasi Humasnya, sehingga kalau misalnya mbak sebagai wartawan wawancara saya, saya nggak mau. Saya bilang ada aturan mainnya, saya nggak bisa diwawancara. Tapi kalau sekedar memberikan latar belakang kebijakan gitu, okelah kita sharing. Tapi juga atas sepengetahuan PIH. Sebagai media, kalau dikutip resmi itu atas nama Kepala Humas. Tapi kalau misalnya sharing latar belakang pendapat atau kebijakan yang keluar, saya bisa.

P : Teman-teman wartawan di sini itu biasanya tertarik kalau mencari informasi yang seperti apa sih, Pak?

I : Sebenarnya isu-isu pendidikan itu kan isu-isu yang a.. sudah bergulir tiap tahun begitu-begitu aja dan tidak berubah. Katakanlah kalau misalnya a.. bulan-bulan Mei gitu kan, itu kan Hari Pendidikan Nasional. Nah biasanya isu-isunya seputar apalah.. pendidikan secara keseluruhannya, bagaimana kondisi pendidikan kita, katakanlah itu masih perlu ditingkatkan terus. Kemudian sarana pendidikan masih ada yang kurang layak. Terus nanti bergulir setelah Mei, kita punya a.. katakanlah sekitar bulan Juni, Juli, saat-saatnya penerimaan siswa baru. Nah itu bergulir terus, katakanlah itu ada dana pemungutan untuk seragam, buku-buku dijual di sekolah gitu kan. Itu seputar penerimaan itu bergulir gitu kan. Jadi sebenarnya isunya bergulir begitu aja. Kemudian isu tahunan itu misalnya ada BOS gitu ya, biaya operasional sekolah. Itu biasanya selalu apa namanya.. ada terus begitu. Kemudian ada program tunjangan guru.

P : Oh, jadi setiap tahun itu isunya berulang itu-itulah saja ya, Pak?

I : Iya, jadi isu-isunya itu akan berpusat di situ aja, konstan berpusat di situ aja tiap tahun. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang Humas kreatif dan di-support gitu ya, sebenarnya isu-isu yang sudah kita kuasai, misalnya tanya tentang UN, nah kita sudah bisa punya jawabannya. Pasti ngga akan a.. bergeser misalnya kalau UN itu a.. batas minimal kelulusan itu kan. Kalau sudah terlaksana nanti oh.. ada kebocoran soal gitu kan. Itu-itulah aja sebenarnya. Jadi kerja di Humas kementerian ini, kita sebenarnya isunya banyak, tapi isu itu biasanya musiman gitu dan itu-itulah aja.

P : Kalau Bapak amat-amati, media apa saja sih Pak yang dapat dibidang kooperatif selama pelaksanaan media relations di Kemendikbud ini?

I : Jadi gini lho, kita sebagai orang Humas tidak.. tidak akan apa a.. tidak punya keinginan, kalau saya pribadi ya, sebagai orang Humas kita tidak berpretensi, kita tidak berinisiasi untuk media itu menjadi kooperatif dengan kita. Karena kalau misalnya kita pakai kata-kata

kooperatif, itu ada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terlalu positif di situ. Jadi kita hanya ya itu prinsipnya, silahkan memberitakan. Tapi mohon kalau memberitakan, kalau itu memang bagus, jangan dong dibilang jelek. Kemudian kalau memang itu jelek, kan ngga semua kan yang kita lakukan akan terus semuanya bagus gitu kan. Pasti ada hal-hal yang negatif dari kita kan, kalau memang itu masih ada kekurangannya, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ayo dikritisi. Jadi saya pikir di Humas tidak ada pemetaan seperti itu. Kita punya analisis media sekali sebulan. Kita liat trend pemberitaan media mengenai Kemdiknas gitu ya. Tapi tidak ini kooperatif, ini tidak kooperatif, ngga seperti itu. Jadi biasanya cuma ini mendukung, ini tidak mendukung, ini abu-abu gitu.

P : Kalau misalnya media yang mendukung itu seperti apa, Pak?

I : Jadi ngga selalu juga, setiap bulan bisa berbeda dan isunya juga kita petakan. Tadi isu pendidikan ada BOS, mengenai sertifikasi guru, mengenai penerimaan siswa baru, nah itu semua. Misalnya penerimaan guru ada berapa media yang memuat, mengenai penerimaan siswa baru ada berapa yang memuat. Nah media yang memuat ini trend-nya apa, positif atau negatif, kemudian masih bias. Termasuk juga kita analisa dari wartawannya. Jadi tidak hanya medianya, jadi ini siapa yang nulis nih. Si Y misalnya, ini tulisannya cenderung negatif melulu nih ya kan. Di Kompas misalnya, ada si Y dan si X. Si Y nih kecenderungannya nulis negatif terus. Si X ya lumayan lah, ada positifnya. Jadi sampai sejauh itu kita analisa a.. jadi medianya gimana kecenderungannya. Tapi itu kita bagi per isu, kemudian dari sisi wartawan yang menulisnya. Kalau misalnya ada media yang nulisnya negatif terus, kita sebagai orang Humas ya pengennya mendekati mereka lagi. Bisa jadi katakanlah yang turun ke lapangan kan wartawan, kemudian nanti yang menentukan trend beritanya ini seperti apa kan ada redaksi. Nah mungkin redaksinya yang kurang memahami

kebijakan-kebijakan di Kementerian kita. Nah nanti kita ada yang namanya kunjungan media. Jadi pak menteri nanti ketemu dengan pimrednya, ini lho kita ada kebijakan ini. Jadi ngga cuma wartawannya aja yang kita selalu berikan penjelasan, selalu kita kasih informasi, tapi di tingkat pimpinan redaksi pun perlu karena pimpinan redaksi inilah yang nanti akan menentukan kan beritanya jadi seperti apa. Jadi memang perlu dikunjungi, kalau perlu oleh pak menterinya langsung. Kita sudah pernah ke Kompas, Suara Harapan, Sindo. Pak Menteri juga sebagai menteri ingin mendekatkan diri lagi dengan pimpinan redaksi media yang bersangkutan, pertemanannya lah.

P : Tapi ada tidak Pak wartawan yang sulit dikontrol? Misalnya ada pemberitaan yang salah dan sudah kita klarifikasi, tapi tetap saja tidak nurut..

I : Saya pikir tidak ada karena untuk hal seperti itu, kita kan bukan dengan wartawannya. Itu kan ada mekanisme hak jawabnya yang diatur oleh UU Pers gitu kan. Sehingga kalau ada pemberitaan yang kurang tepat, tidak sesuai dengan fakta, jangan wartawannya yang kita uber. Kita ikuti saja prosedur yang ada, kita lakukan klarifikasi melalui hak jawab. Pernah kami a.. menyampaikan hak jawab tahun-tahun.. waktu masih Pak Bambang Sudibyo.. ya beberapa kali kami dimediasi oleh Dewan Pers, itu pernah.

P : Waktu dimediasi itu, bermasalahnya dengan media apa, Pak?

I : Jadi a.. ya itu, kita pernah dimediasi beberapa kali dengan media cetak dan juga media tv terkait dengan apa a.. menurut kita, pemberitaannya itu ngga sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Medianya sendiri berkeras kalau punya narasumber. Mediasi kan itu kan, masing-masing pihak bersikeras dengan pendapatnya masing-masing sehingga perlu ada pihak ketiga yang memediasi. Itu pernah kita.

P : Waktu itu masalahnya tentang apa, Pak?

I : Saya masih ingat kalau dengan televisi itu.. tayangan a.. Ujian Nasional. Jadi kita menganggap tayangan di televisi itu, saya sebut saja TV One gitu ya, a.. mereka men-shoot anak-anak yang sedang ujian a.. kemudian di situ ada tayangan yang menggambarkan kecurangan anak-anak. Jadi anak-anak ambil contekan gitu kan, yang kalau menurut SOP-nya Ujian Nasional, itu tidak akan terjadi hal seperti itu. Jadi bisa dia shoot dengan gambar yang di-close up, itu pasti harus masuk ke ruang kelas gitu lho kameramennya. Sedangkan di SOP Ujian Nasional itu kan tidak ada boleh orang yang masuk ke ruangan kelas itu saat ujian berlangsung selain peserta ujian dan guru yang mengawasi saat ujian. Menteri sekalipun ngga boleh lho kalau sidak ujian itu masuk ke kelas karena akan mengganggu konsentrasi anaknya gitu kan. Jadi dari SOP itu saja kami beranggapan mereka sudah salah. Kalau dengan media cetak, kita pernah dengan Kompas. Itu terkait Ujian Nasional juga yang kalau tidak salah waktu itu mereka tetap mengkritisi Ujian Nasional, bahwasanya itu melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional gitu lho, karena a.. kelulusan siswa a.. menurut Sistem Pendidikan Nasional, itu ditentukan oleh guru atau sekolah. Jadi menurut pemahaman mereka, yang nentukan kelulusan Ujian Nasional itu bukan guru, tapi pemerintah pusat yang menentukan kelulusan. Nah itu kan bisa kita perdebatkan lagi gitu kan.. karena tetap aja kelulusan itu, kalau menurut versi kita, ya tetap guru yang menentukan gitu lho. Tapi itu sepanjang sekolah atau peserta Ujian Nasional bisa memenuhi syarat minimum kelulusan. Jadi ya seperti itu.

P : Lalu itu akhirnya bagaimana, Pak? Masalahnya selesai nggak?

I : Kayaknya a.. karena isu itu bergulir terus ya, jadi kita dimediasi. Jadi ya akhirnya.. tidak ada ini juga sih.. tidak ada titik temu juga. Seperti itu..

P : Oh begitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, pemberitaan yang dimuat di media-media sekarang ini bagaimana, Pak?

I : Jadi gini, karena Kapus saya itu sekarang orang.. pakar komunikasi ya kan. Tapi sebenarnya beda juga sih sebagai pakar kemudian.. dalam tataran teori kemudian praktek gitu kan. Media itu kan ngga murni misalnya apa namanya.. independen gitu kan. Ada hal-hal dibaliknyanya kan. Katakanlah Media Indonesia ya kan, di belakangnya ada kepentingan Surya Paloh yang juga ikut apalah.. meramaikan suasana politik di tanah air. Katakanlah ada yang bilang Kompas itu independen gitu kan, tapi sebagai pribadi juga saya ngga lihat Kompas sangat-sangat independen gitu, ada suara-suara juga yang dibawanya di sana kan. Jadi ngga bisa kalau misalnya kita sangat berharap apa namanya.. semua kebijakan kementerian atau apalah yang dari kita disuarakan sesuai dengan harapan kita. Ada tendensi-tendensi lain lah di sana. Jadi gini, patokannya.. kalau pak menteri itu patokannya kalau Kemdiknas itu melakukan hal yang bagus, beritakan itu bagus. Kalau misalnya itu jelek, beritakan itu jelek. Jadi kita juga tidak ingin a.. hal yang jelek kemudian kita minta dikemas bagus dalam media, tidak.. tidak seperti itu.

P : Oh Pak Menteri itu jadi sebenarnya terbuka juga ya dengan berita-berita yang negatif atau mengkritisi begitu, Pak?

I : Iya, tapi kita juga sebaliknya jangan hal yang sudah bagus, masyarakat juga sudah mengakui kebijakan itu bagus, jangan dikemas menjadi kebijakan yang ngga bagus. Jadi kalau pak menteri sekarang dengan media harapannya itu aja. Silahkan lah beritakan, kita transparan. Jadi ngga ingin kita misalnya berita harus bagus-bagus semua, ngga..

P : Tapi mayoritas pemberitaan sudah sesuai harapan belum, pak?

I : Ya saya pikir, kalau kita sudah puas, Humas sudah bekerja maksimal dan pemberitaan sudah bagus semua, nanti Humas ngga

perlu lagi dong. Jadi ya tetaplah kita masih kurang puas, pemberitaan-pemberitaan di media itu ya.. masih perlu kita apa.. kita.. supaya lebih bagus lagi lah. Nanti kalau kita bilang udah bagus, Humasnya warungnya ditutup gitu kan.

P : Kalau seputar pemberitaan negatif yang beredar mengenai Kemendikbud, tanggapan Bapak bagaimana?

I : Berita negatif ya, berita negatif dalam pengertian berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu kan. Nah terhadap hal seperti itu kan di UU Pers kan sudah diatur itu kan. Kita punya hak jawab gitu kan, punya hak jawab. Kita punya hak koreksi, ya kita gunakan hak itu kalau memang ada pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian juga tidak hanya sekedar itu, a.. kita juga biasanya mengundang kembali wartawan-wartawan bersama pak menteri. Misalnya kemarin a.. ada pemberitaan mengenai apa a.. Oktober awal a.. pemerintah akan a.. Pak Menteri me-launching gitu ya a.. gerakan rehabilitasi gedung sekolah SD dan SMP yang rusak berat. Kemudian a.. sekitar akhir Oktober kemarin, atau bukan.. dalam minggu-minggu ini lah ya, minggu-minggu kemarin, ternyata Kompas memuat ya.. Kompas memuat a..inti beritanya ternyata rehabilitasi itu, gerakan nasional rehabilitasi sekolah itu, itu cuma a.. cuma jalan waktu peresmian itu aja, setelah peresmian ternyata tidak ada tindak lanjutnya gitu kan. Kita kan agak gimana juga gitu kan, kok bisa wartawan Kompas ambil kesimpulan seperti itu. Akhirnya kita bergerak, kita kumpulkan fakta-fakta yang ada di kita. Ternyata tidak seperti itu keadaannya. Sebenarnya sudah berjalan, tapi ada beberapa SMP dan SD, yang karena kesalahan administratif, uangnya ngga mereka terima sehingga ya gimana mau bergerak ya kan. Tapi untuk sekolah lain sudah berjalan. Nah, itu kita berikan semacam klarifikasi pada Kompas, kemudian sorenya kita juga undang wartawan lagi untuk memberitahukan gitu ya, tidak hanya untuk Kompas doang melalui hak jawab, hak koreksi, tetapi juga untuk teman-teman wartawan yang lain.

P : Oh, klarifikasinya tidak hanya khusus untuk Kompas ya? Semua jadi diundang juga?

I : Betul. Nah, kita berikan konfirmasi di situ, kita berikan penjelasan di situ dengan fakta-fakta yang ada. Contoh SMP yang dijadikan Kompas di berita yang dimuatnya itu.. ternyata SMP itu punya masalah. Dia punya rekening yang sudah ngga aktif, sehingga ketika uang itu dikirim kesana, karena rekening mati, uang itu kan akhirnya kembali lagi. Ya seperti itu penjelasannya, jadi jangan terus digeneralisir kalau tidak jalan.

P : Untuk mendukung tugas peliputan wartawan di sini, ada fasilitas apa saja yang disediakan, Pak?

I : Fasilitasnya itu kita di bawah ada namanya gerai informasi dan media. Kemudian ada ruang konferensi pers gitu lho. Nah di sana itu memang kita siapkan ruangan untuk teman-teman media bekerja di sana. Jadi di situ kita lengkapi dengan fasilitas a.. komputer yang bisa akses internet, kemudian juga a.. ya kita siapkan lah wartawan bisa bekerja di situ, termasuk ruangan itu juga fasilitasnya. Jadi kalau kita mau adakan konferensi pers, kita bisa adakan di situ. Selain itu juga ya itu, apapun pendampingan kerja pak menteri ke daerah itu, itu kan ada berdampak ekonomis juga untuk wartawan kan. Kita siapkan akomodasi, transportasi. Mungkin kalau dari mereka, dari media-media yang biasa aja kan kalau tidak kita fasilitasi seperti itu, kapan lagi kan mereka bisa jalan-jalan ke Papua misalnya kan, yang tiketnya itu pulang pergi bisa sampai 10 juta. Kapan lagi mereka bisa nginep dengan fasilitas menteri ya kan, dengan fasilitas hotel bintang 5 misalnya kan. Jadi ada aspek-aspek ekonomis seperti itu kan, walaupun memang bukan itu tujuan kita.

P : Selama ini, hambatan apa saja sih yang sering ditemui selama berhubungan dengan wartawan, Pak?

I : Saya pikir begini, kita keterbatasan anggaran kan ya. Jadi misalnya untuk pendampingan kunjungan pak menteri itu ya, kita

kan ngga bisa akomodasi wartawan semua. Wartawan kan ada 40 orang, sementara kita untuk satu kali kunjungan kerja itu bisa cuma bisa fasilitasi maksimal 5.

P : Itu biasanya media yang jadi prioritas media apa saja, Pak?

I : Karena hitung-hitungan benefit tadi itu, jadi memang kita prioritaskan media-media besar. Kemudian internal satu lagi, akses informasi memang tidak semulus yang kita harapkan gitu. Kementerian Pendidikan Nasional ini kan kementerian yang paling besar ya dan yang paling banyak disoroti oleh masyarakat karena apa.. sekarang siapa sih anak-anak yang tidak sekolah? Ngga ada kan anak di suatu keluarga yang tidak mendapatkan akses pendidikan, sehingga ya itu, semua masyarakat melihat. Jadi kalau kita kurang-kurang pinter mengelola kementerian ini, ya ribut terus. Jadi kalau kata pak menteri kita itu, Pak Nuh, jangan takut kekurangan masalah di Kementerian Pendidikan Nasional hehe..

P : Tadi Bapak katakan kalau akses informasi kurang mulus. Itu maksudnya bagaimana ya, Pak?

I : Jadi kita ini di Humas kan bukan Superman gitu ya. Kita juga orangnya sangat terbatas. Katakanlah yang akses langsung dengan wartawan itu kan teman-teman saya ini, di Subdit Kemitraan Media. Di Kemitraan Media itu personilnya cuma ada 6 orang gitu lho, sementara kita mencover seluruh kegiatan kementerian. Apalagi kalau dapat menteri seperti Pak Nuh gitu kan, yang orangnya sangat enerjik gitu kan, jalan-jalan melulu, kegiatannya banyak sekali dan itu kan kita.. ngga bisa ngga terlibat di sana. Jadi kalau ditanyakan kenapa komunikasinya kurang lancar, ya itu pertama SDM-nya kurang secara kuantitas. Kemudian juga banyak unit kerja yang masih apa ya.. tidak menganggap penting Kehumasan ini sehingga mereka lebih asik dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ada permintaan konfirmasi dari media misalnya kan, tolong dong kasih penjelasan tentang ini.. kita sampaikan daftar pertanyaannya.. kita sampaikan

ke unit yang bersangkutan, itu kalau ngga kita uber-uber gitu lho.. Sudah kita uber-uber juga tetap lama, karena mereka memang tidak memprioritaskan itu. Terus karena orangnya sedikit, isu pendidikannya sangat banyak, sehingga penguasaan isunya jadi tidak apa ya.. tidak terlalu maksimal. Sehingga ya itu, kita membutuhkan komunikasi yang lancar. Jadi kalau suatu saat ada wartawan nanya, baik melalui daftar pertanyaan atau lisan begitu, ya harusnya kita dapat apa.. layanan yang anulah ya.. yang segera juga gitu lho. Tapi ternyata saya merasa itu masih apa.. belum optimal.

P : Kalau hambatan dari wartawannya sendiri ada tidak, Pak?

I : Kalau dari wartawannya itu yang tadi, wartawan mengeluh kok yang diajak pergi itu-itu aja. Kemudian a.. apa ya.. saya pikir kalau eksternal itu saja, masalah media yang diajak peliputan ke daerah itu.

P : Lalu kalau hal-hal mendukung terjalinnya hubungan yang baik antara Humas dengan teman-teman media dan wartawan apa, Pak?

I : Saya pikir a.. dukungan dan keterbukaan dari Pak Menteri ya, itu sangat membantu kami sekali dalam memberikan pelayanan yang juga terbuka kepada wartawan yang meliput di sini.

P : Dalam menjalin hubungan dengan wartawan, Humas sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya informal nggak, Pak? Yang formatnya santai begitu.

I : Jadi begini a.. Forum Wartawan Pendidikan itu tidak melulu caranya serius gitu lho, tidak melulu kita mensosialisasikan kebijakan-kebijakan kita secara lebih mendalam gitu kan, tapi itu juga kita barengi dengan gathering. Jadi misalnya katakanlah pelaksanaannya 2 hari gitu kan. Nah sehari itu memang formal gitu ya, ada narasumber, ada wartawan yang jadi peserta. Nah kemudian hari berikutnya ada semacam gathering gitu, ya untuk keakraban

aja seperti gathering yang lain-lain gitu. Untuk kondisi-kondisi tertentu juga kita beberapa kali mengunjungi kantor media.

P : Jadi dari pandangan Bapak, pelaksanaan media relations di Kemendikbud ini bagaimana? Sudah optimal belum?

I : Kalau menurut saya memang masih perlu penguatan-penguatan, misalnya saya pernah usulkan.. tapi ini kan tergantung a.. karena kan di pemerintah ini kan semua-semuanya berujung di anggaran ya kan. Saya pernah mengusulkan ya itu.. misalnya ada coffee morning gitu ya. Jadi katakanlah dalam sebulan itu dua kali ada pertemuan santai, pimpinan Kemdiknas, ngga harus pak menteri gitu ya, dengan wartawan untuk apalah.. ya untuk informasi kebijakan-kebijakan apa yang sekarang sedang digarap di sini, bergiliran aja. Kemudian a.. mungkin juga a.. kunjungan liputan ke luar negeri misalnya pak menteri. Jadi tidak melulu misalnya pemberitaan pak menteri untuk kegiatan yang di dalam negeri aja. Tapi kan biasanya karena tidak ada wartawan yang memberitakan, kunjungan pak menteri di luar negeri itu ngga bunyi. Padahal kan katakanlah di Kementerian Pendidikan Nasional ini kan katakanlah kita punya TKI-TKI kita, misalnya di Malaysia dan Arab Saudi, mereka kan beranak-pinak juga kan di sana. Terus pendidikan mereka bagaimana? Nah itu kan perlu dipikirkan juga. Kemudian juga apa ya.. talkshow-talkshow.. itu kan juga anggarannya sangat-sangat kecil juga gitu lho. Itu kan juga perlu apa.. katakanlah talkshow secara rutin di TV, tidak hanya di TVRI ya, tapi juga di TV swasta. Bukan untuk membentuk citra ya a.. tapi supaya masyarakat paham gitu lho kebijakan kita. Jadi ya mereka bisa merasa kalau pendidikan kita bergerak ke arah yang lebih bagus.

P : Kalau terkait dengan peranan Humas Kemendikbud sendiri dalam kegiatan media relations tersebut, apa sudah cukup baik menurut Bapak?

I : Ya saya pikir perlu ditingkatkan terus lah ya, perlu ditingkatkan terus. Seperti yang saya bilang tadi, kita dari segi SDM secara kuantitas masih kurang untuk mem-back up kegiatan kementerian yang sangat besar ini. Kemudian juga a.. penerimaan pegawai negeri itu kan kadang-kadang tidak me.. tidak melihat latar belakang pendidikan gitu ya, ngga taulah ke depan ke depannya ini bagaimana. Kita di sinikan perlu teman-teman yang basicnya apalah.. ilmu komunikasi gitu ya, sehingga kalau misalnya mereka punya latar belakang ilmu komunikasi, jurnalistik gitu kan, itu kan jadi lebih mudah untuk tune in kerja di sini kan. Nah itu masih belum ini juga.. masih belum seperti itu. Sehingga temen-temen di sini kadang latar belakangnya kurang sesuai dengan pekerjaan Kehumasan. Misalnya saja saya, saya kan Fakultas Hukum kan, ditaruh di sini. Ya otodidak saja.

P : Nah, harapan Bapak untuk keberadaan teman-teman wartawan yang meliput di Kemendikbud sini apa, Pak?

I : A.. harapan kita sebagai Humas itu semakin banyak media, kita semakin terbantu, semakin a.. kerja Humas semakin ringan gitu kan. Kemudian tentu, ada tapinya kan.. Kita harapkan semakin banyak media tentu media yang bertanggungjawab gitu lho. Pemberitaan yang mereka buat itu sesuai dengan fakta dan data yang ada. Jadi tidak a.. media yang mengobok-obok masyarakat gitu kan, tidak mengadu domba masyarakat gitu kan. Atau media yang keberadaannya cuma untk sesaat gitu. Jadi tentu media yang kita harapkan itu yang a.. bisa memberikan a.. informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi apa.. lebih luas wawasannya, menjadi lebih bagus pemahamannya. Dan yang paling penting itu kan kita plural ya, yang tidak hanya menyuarakan kelompok-kelompok tertentu. Jadi media yang sifatnya plural, memperkaya informasi masyarakat, yang mencerdaskan masyarakat. Itu sih harapan kita.

P : Kalau harapan Bapak terhadap kinerja Humas sendiri, khususnya dalam menjalankan media relations di sini itu seperti apa, Pak?

I : Saya a.. kalau di PIH sendiri harapannya tentu itu, karena begitu luasnya jangkauan pekerjaan yang kita a.. kita lakukan gitu, pertama ya saya kira SDM kita masih kurang, jadi perlu ada penambahan SDM. Penambahan SDM tentu tidak hanya penambahan orangnya, tapi tentu SDM yang sudah punya bekal katakanlah untuk melakukan tugas-tugas Kehumasan. Nah untuk itu kan perlu SDM yang berlatar pendidikan terkait dengan tugas-tugas Kehumasan itu.

P : Ada yang lainnya, Pak?

I : Kemudian tentu juga a.. perlu dukungan anggaran yak an. Saya bilang dukungan anggaran ya itu, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk keberadaan Humas ya, untuk bagaimana a.. pemahaman masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan kita ini bisa lebih luas lagi daya jangkauannya, tentu perlu adanya dukungan dana. Saya bilang tadi ada talkshow yang belum maksimal kita garap gitu kan. Kemudian juga pimpinan media relations gitu kan, semakin sering pimpinan kita ketemu dengan wartawan tentu kita harapkan semakin memahami mereka ya kan. Tidak hanya kebijakan tetapi juga secara person to person juga.

P : Saya rasa sudah cukup nih ngobrol-ngobrolnya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah dibantu sayanya.

I : Oke, sama-sama.

Lampiran 6
Transkrip Wawancara 4

Narasumber : KS, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi Media

9 November 2011, 08:51 (71 menit)

Penanya (P) : Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak sudah mau diganggu waktunya pagi-pagi. Saya ingin ngobrol tentang pelaksanaan media relations di sini. Sebelumnya, menurut Bapak, apakah media relations itu penting untuk sebuah lembaga pemerintahan seperti Kemendikbud ini?

Informan (I) : Jadi a.. di era informasi ini, hubungan dengan media menjadi penting. Karena apa? Karena seringkali orang melihat bahwa pekerjaan itu apa yang dilakukan, apa yang ditulis, atau apa yang disuarakan media. Kita kerja membabi-butakan siang malam tapi kalau kemudian tidak diberitakan oleh media, orang tidak akan menganggap. Pak Menteri pernah bilang dalam suatu forum baru-baru ini, bukan saatnya lagi masing-masing unit kerja itu bekerja dengan baik, benar dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya itu. Ada satu tahapan lain yang harus kita lakukan yaitu mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan itu kepada publik. Lewat apa? Lewat siaran pers, jumpa pers, pariwisata, mengajak teman-teman media ke pusat-pusat atau kegiatan program di daerah. Itu yang kita kemas.

P : Jadi posisi wartawan itu sendiri kalau bagi Bapak seperti apa?

I : Sangat penting, dan itu disadari benar oleh Pak Menteri. Bukan dalam pengertian saat ini a.. oh, itu sih cuma kegiatan cari-cari popularitas, bukan.. Tapi bagian dari tanggung jawab kepada publik bahwa ini lho.. kami sudah melakukan apa yang kami programkan, apa yang diinginkan oleh publik. Jadi kalau kita ada

ada program ke daerah, kita pasti ajak wartawan. Bukan ingin popularitas atau pencitraan. Saya justru tidak sepakat kalau orang ramai-ramai membicarakan pencitraan. Kenapa? Karena pencitraan atau citra sebuah institusi akan terbentuk dengan sendirinya dari aktivitas kegiatan kita yang baik. Jadi menurut saya sangat-sangat perlu.

P : Nah sebagai staf khusus bidang komunikasi media, Bapak secara tidak langsung kan ikut menjalankan fungsi Humas ya Pak, khususnya dalam menjalin komunikasi dengan wartawan. Kalau boleh tahu, apa saja peranan staf khusus bidang komunikasi media dalam media relations itu sendiri?

I : Jadi kalau saya, selain memberikan masukan-masukan mengenai pentingnya media, apa yang harus disampaikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ke media, juga mencari celah-celah bentuk kerja sama dengan pimpinan-pimpinan yang ada di media itu, misalnya buat pariwisata atau apa. Selain itu juga menjembatani Pak Menteri kalau mau berbicara ke media, lalu memberikan masukan kapan harus mengundang media, karena memang terkadang ada kebijakan-kebijakan yang mungkin hanya perlu mengundang redaktur-redaktur saja. Ya saya memfasilitasi seperti itu.

P : Apa semua kegiatan media relations di sini itu selalu datang dari Pak Menteri? Maksudnya, apa ada juga yang dirancang oleh Humas itu sendiri?

I : A.. kalau terkait kegiatan media relations, tidak selalu datangnya dari Pak Menteri, terkadang juga datang dari kita. Misalnya tentang Human Index kemarin, itu tidak ada Pak Menteri, jadi dari kita inisiatif mencari siapa yang paling mengerti tentang indeks tersebut, kita ajak diskusi lalu kita adakan jumpa pers, seperti itu. Pak Menteri sepenuhnya memberi kewenangan kepada bawahannya untuk melakukan hal-hal yang memang perlu direspon positif. Kadang kalau ada teman-teman wartawan datang minta klarifikasi, tapi PIH ngga berani hehe.. kalau saya karena sudah

hubungan dekat gitu, saya jelaskan bagaimana persoalannya, lalu wartawan bilang nanti pakai nama saya ya, tapi saya bilang jangan, tulis saja Pak Menteri. Jadi saya mewakili Menteri, saya sampaikan ke Bapak kalau tadi ada wartawan begini begini, Bapak yang bicara, sudah clear. Karena kita tahu kalau wartawan akan lebih bangga di depan redaktornya kalau berhasil mewawancarai Menteri iya kan haha..

P : Haha iya betul, Pak. Lalu kalau kegiatan media relations yang rutin dilakukan oleh Humas Kemendikbud itu ada apa saja, Pak?

I : Iya, yang rutin itu jumpa pers, press release juga kita buat. Kemudian mengajak kunjungan ke tempat-tempat a.. program Kemdiknas. Misalnya kemarin mau ada Hari Aksara Internasional. Kita koordinasi dengan unit yang menangani itu, lalu kita buat kunjungan ke tempat-tempat pemberantasan buta aksara. Wartawan dipersilahkan mau tanya apa saja, jangan dibatasi, yang penting kita punya pegangan apa goal kita. Pembagian kelompoknya juga kita pikirkan. Jangan sampailah Sindo, Kompas, Media Indonesia jadi satu grup haha..

P : Oh, jadi kalau koran-koran besar seperti itu nggak boleh digabung jadi satu ya?

I : Koran kan pasti bersaing, jadi koran kelas 1 tidak disandingkan dengan koran kelas 1 juga. Kita kasih Kompas, ya temannya mungkin Suara Karya, Pikiran Rakyat Bandung, atau yang lain. Kita juga suka ajak wartawan untuk mendampingi Pak Menteri kunjungan ke daerah-daerah. Kadang-kadang kita siapkan kunjungan Pak Menteri ke kantor medianya, itu rutin. Terutama kalau ada kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya masif dan menyeluruh, termasuk ke media-media besar di daerah. Jadi memang hubungan dengan media itu perlu dijaga, tapi sekali lagi bukan dalam tujuan membangun pencitraan atau membangun

image yang bagus di mata publik, nah kita bukan seperti itu. Kita semata-mata ingin mengkomunikasikan program-program.

P : Kalau misalnya liputan-liputan ke daerah begitu, tentu kan tidak bisa mengajak semua media. Nah pertimbangannya media A, B, C yang diajak itu apa, Pak?

I : Satu, yang punya peran selama ini memberitakan kegiatan-kegiatan kita, jadi ngga sembarangan. Kadang suka ada yang mengeluh kenapa yang diajak yang itu-itu aja, ya jelas karena mereka yang banyak kasih kontribusi berita. Kan ngga mungkin saya mengabaikan kontribusi mereka lalu mengajak yang jarang atau tidak berkontribusi. Jadi tidak ada alasan kalau ada yang protes, saya jawab begitu. Pemilihan media itu juga termasuk untuk iklan, jadi kalau kita pasang iklan, kita pasang di media-media yang memang banyak berkontribusi untuk kita, kita kasih iklan ke Media Indonesia, ke Sindo, yang lain tunggu dulu, liat dulu kontribusinya. Jadi ada ukuran-ukuran yang kita miliki.

P : Media yang paling banyak memberikan kontribusi pemberitaan bagi Kemendikbud itu misalnya seperti media apa, Pak?

I : Setiap bulan berbeda. Tapi yang memegang posisi itu selalu Kompas, karena punya halaman khusus pendidikan, lalu Pikiran Rakyat Bandung, Media Indonesia, sama Sindo, itu selalu menempati posisi.

P : Terkait dengan akses informasi, sebenarnya akses informasi yang disediakan untuk wartawan yang meliput di sini itu bagaimana sih, Pak?

I : Jadi yang pertama, rilis kita taruh di web. Di web itu, berita atau apapun bisa diunduh. Informasi-informasi lain kita siapkan dalam bentuk informasi-informasi yang sifatnya standar. Standar itu misalnya jumlah sekolah rusak. Bahkan setelah jumpa pers, biasanya Pak Menteri minta agar materinya dikirimkan ke wartawan dan karena kita dalam bentuk email group, jadi yang

tidak datang juga dapat. Jadi sama sekali ngga kita tahan arus informasi di sini.

P : Kalau misalnya wartawan ingin mencari informasi untuk berita yang mau mereka buat, itu biasanya yang paling sering dicari pertama kali siap, Pak?

I : Ya pimpinan tertinggi, Pak Menteri biasanya. Kalau Pak Menteri ngga ada baru saya yang sampaikan. Kadang juga Pak Menteri suruh langsung ke unit yang terkait. Jadi kita memang tidak pernah membatasi akses informasi. Yang dibatasi oleh Pak Menteri itu satu, tidak boleh menghambat orang lain untuk mencari informasi. Nah itu yang digariskan. Semua pihak berhak memberikan informasi dalam batasan koridor-koridor yang kita kerjakan. Kalau kita ngga kerjakan ya janganlah komentar. Jadi memang dari Pak Menteri, kalau soal yang satu itu, informasi itu tidak pernah harus begini begini..

P : Memangnya wartawan itu sukanya cari berita-berita yang seperti apa sih, Pak?

I : Kalau menurut saya banyak yang suka berita-berita positif, ada juga yang bertanya soal kasus pencairan dana BOS yang belum lancar, itu ngga apa-apa. Justru di situ kita jelaskan persoalan yang sebenarnya. Kalau saya selalu pandangannya positif sih, walaupun negatif pasti bisa kita tumpangi. Jangan panas atau apa, berita negatif pasti bisa kita tumpangi. Nah Humas itu kan fungsinya seperti itu. Jadi bukan malah bikin somasi atau apa, itu malah bikin kita ngga dapat tempat di media. Kalau kita itu biasanya ada yang digarisbawahi bahwa ini lho yang harus dikomunikasikan ke publik. Satu, program-program yang menyangkut kehidupan banyak orang, beasiswa, BOS, tunjangan guru, itu menjadi perhatian kita.

P : Oh jadi bukan semata-mata mereka cari yang negatif-negatif ya. Lalu kalau fasilitas yang disediakan untuk wartawan yang bertugas di sini, ada apa saja, Pak?

I : Jadi kita berikan ruangan khusus wartawan, dikelola oleh wartawan. Jadi ada komputer, ada dispenser, silahkan dipakai dan dirawat. Kita berikan juga akses internet di sana. Jadi ada ngga ada jumpa pers, di ruangan itu pasti ada wartawan. Jadi kita berikan fasilitas itu, di samping ada kegiatan-kegiatan PIH rutin untuk diskusi dengan teman-teman wartawan. Ada FGD, diajak teman-teman wartawan. Jadi hubungan itu yang harus kita jaga, walaupun kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu belum sepenuhnya a.. wartawan merasa nyaman karena memang kita menganut azas tidak memberikan sesuatu kepada wartawan. Jumpa pers ya jumpa pers. Jadi kalau Anda mengharapkan amplop, jangan ke Diknas. Tapi kalau Anda mengharapkan informasi, cari ke Diknas.

P : Oh jadi memang kebijakan di sini itu tidak ada uang-uangan begitu ya, Pak?

I : Kita biasanya memberikan uang ke wartawan kalau mereka ikut aktivitas, misal kunjungan Menteri ke mana. Nah itu kita kasih dalam bentuk uang hotel, uang saku harian, jadi bisa dipertanggungjawabkan.

P : Lalu apakah azas tidak memberikan apapun kepada wartawan tersebut mempengaruhi pemberitaan yang dibuat oleh wartawan, Pak?

I : Saya rasa tidak ya. Wartawan itu kan profesi yang profesional juga, jadi mereka menulis berita bukan atas dasar apa yang mereka terima, melainkan apa yang memang terjadi di sekeliling masyarakat. Jadi a.. saya rasa tidak berpengaruh sama sekali ya. Biasa itu kan yang minta uang amplop kalau dari media yang tidak jelas. Jadi ya ngga perlu takut mereka akan memberitakan berita yang buruk, karena toh medianya saja tidak jelas jadi pasti mereka tidak akan bisa memproduksi berita untuk disebar ke masyarakat. Itu biasanya namanya wartawan bodrex, jadi yang medianya jadi-jadian begitu haha.

P : Selama ini dari yang Bapak amati, media yang kooperatif, dalam artian pemberitaannya itu sesuai fakta dan berimbang, itu ada media apa saja?

I : Ya yang itu tadi ada Kompas, Media Indonesia a.. Republika, Sindo juga.

P : Kalau yang kurang kooperatif apa saja, Pak?

I : Kita tidak pernah melihat yang seperti itu. Ya sekecil apapun, kita melihat dia sangat kooperatif. Jadi misalnya Pelita, Suara Karya, Koran Jakarta, itu ya yang di level bawah, itu menurut saya ngga ada. Pokoknya sepanjang itu tadi, kita ingin membuat tidak ada celah sedikitpun wartawan menulis yang negatif tentang kita. Negatif dalam pengertian perspektif dia. Bagaimana caranya? Ya kita berikan informasi sebanyak-banyaknya. Karena saya melihat, kalau orang mau cari informasi dihambat, itu yang keluar kemungkinan besar dari informasi-informasi yang ada di luar kita, sehingga ya ngga boleh kalau ada yang tanya tapi ngga kita berikan penjelasan.

P : Lalu bagaimana pendapat Bapak seputar pemberitaan negatif tentang Kemendikbud di media massa?

I : Jadi karena saya mantan wartawan, saya tau persis bagaimana mengolah yang negatif itu menjadi positif haha, jadi kita balik. Makanya saya bilang, kalau ada tulisan-tulisan negatif begitu sudah jangan bingung. Kemarin ada Kompas menulis berita tentang pembangunan sekolah yang hanya berjalan di awal saja, wah semua di sini kebakaran jenggot. Saya bilang sudah tenang saja, kalau kita meladeni apa yang ditulis media, kita malah akan terbawa dalam agenda media itu. Jadi kita buat agenda sendiri, kita cari apa akar masalahnya. Kita adakan jumpa pers, bukan untuk meng-counter itu. Kalau kita counter, Kompas kegedean nanti kepalanya haha. Kita adakan jumpa pers tentang evaluasi hasil rehab, kebetulan waktu itu satu bulan setelah pemasangan batu pertama. Ya jadi artinya, kalau Kompas tidak muat berita itu karena sungkan, ya

media lain tetap akan muat dengan angle bahwa sekian persen rehab sekolah jalan. Jadi jangan kita sudutkan media yang memberitakan seperti itu, justru kita berterima kasih.

P : Oh begitu, Pak. Jadi sebenarnya pemberitaan negatif itu wajar-wajar saja ya, Pak?

I : Iya, jadi pemberitaan negatif itu wajar, tinggal kita balik untuk menjadi positif. Jadikan pemberitaan negatif itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya.

P : Nah selama ini kan tentu dalam menjalankan media relations, Bapak dan staf Humas lainnya tentu mengalami hambatan-hambatab. Boleh diceritakan apa saja hambatannya, Pak?

I : Yang pertama itu sumber daya. Yang tidak kalah menarik adalah perasaan, kekhawatiran teman-teman di dalam. Tidak hanya di bawah, tapi di Eselon I saja ada yang pernah bertanya kenapa kita harus melayani rekan-rekan wartawan, wartawan kan begini begini begini.

P : Wah, masih ada ya pak pejabat yang berpikir begitu?

I : Kalau saya sih melihatnya orang seperti itu berarti ada masalah di belakangnya, sudah begitu saja kesimpulannya haha. Jadi orang yang tidak terbuka dengan wartawan, pasti di belakangnya ada masalah. Kalau ngga ada, buat apa ditutup-tutupi. Jadi itu yang selalu saya katakan, hubungan dengan wartawan itu ya harus selalu kita layani, apalagi sekarang ada UU Keterbukaan Informasi Publik.

P : Mungkin bisa dikatakan pemahaman tentang pentingnya media relations itu sendiri masih kurang ya, Pak?

I : Ya jadi bisa dikatakan begitu, pemahaman terhadap media relations itu masih kurang di beberapa unit, dan saya pikir itu penyakit birokrasi di Indonesia. Saya selalu bilang bahwa jangan undang wartawan kalau pada saat kita perlu saja, tanpa kita perlu pun ayo kita dialog. Manfaatkan wartawan itu sebagai bagian dari Humas kita supaya timbul empati di antara kita. Oh iya, hambatan

lain, di sini itu masing-masing unit utama itu punya anggaran sendiri-sendiri. Jadi sulit bagi PIH untuk melakukan kontrol, misalnya terhadap publikasi yang dilakukan unit lain, karena mereka merasa itu uang mereka. Tapi untungya Pak Menteri sudah jelaskan bahwa iklan harus begini, apa harus begini, di bawah koordinasi PIH karena PIH yang tahu persis apa konten yang harus dimuat.

P : Kalau hambatan dari sisi wartawannya, ada tidak, Pak?

I : Jadi seringkali wartawan itu kukuh pada pendirian awalnya, dan memang itu sifat wartawan. Ya saya tau persis karena dulu saya wartawan haha. Jadi kalau mereka mau datang ke kementerian mau nanya, mereka itu sudah punya mindset tentang ini ini ini. Tapi ya menurut saya ngga apa-apa, kita berikan saja pengertian-pengertian. Jadi seringkali wartawan kukuh pada mindset awal yang ingin dia bangun dan kita paham itu. Ya itu wajarlah, kita kan di sini membangun relasi, membangun hubungan yang saya pikir riak-riak seperti itu wajar, sepanjang memang tidak terlalu frontal.

P : Apakah Kemendikbud sendiri pernah tersangkut masalah dengan wartawan selama pelaksanaan media relations?

I : Selama saya di sini ngga pernah. Tapi sebelum saya di sini katanya ada, sampai ke Dewan Pers, difasilitasi Dewan Pers.

P : Kalau yang dulu itu bagaimana ceritanya, Pak?

I : Jadi ada pemberitaan, dianggap itu tidak sesuai, harus ralat dan lain sebagainya, ngga diralat-ralat lalu mengadu ke Dewan Pers, nah itu kan cape. Lebih baik kan kita pakai cara kemarin, ada jumpa pers, itu lebih elegan. Jadi saya katakan sudahlah untuk apa, itu lagu lama, ngga usah diulang lagi.

P : Lalu kalau hal yang mendukung atau mempermudah terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak wartawan apa saja, Pak?

I : Yang jelas dukungan Pak Menteri itu cukup membawa dan memberi arti kepada pelaksanaan media relations di sini. Jadi Pak

Menteri mengatakan bahwa kita tidak hanya bekerja bagus, baik, administratif, tapi kita juga harus memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk hubungan ke media. Jadi saya pikir dukungan terbesar itu ada di Pak Menteri terkait media relations. Karena kemauan itu bukan datang dari seorang Humas, PIH, atau apa, bukan.. tapi dari pimpinan tertinggi, yaitu Pak Menteri. Contohnya ya tadi itu, pucuk pimpinan memberikan keleluasaan dan memberikan pengertian tentang pentingnya media relations.

P : Di sini kan ada cukup banyak wartawan yang meliput ya, Pak. Lalu apa ada kegiatan-kegiatan informal yang dilakukan Humas yang tujuannya untuk saling mendekatkan Humas dan wartawan itu?

I : Kita ada kegiatan informal dengan wartawan yang difasilitasi PIH. Dengan redaktur-redaktur pendidikan dan wartawan-wartawan, kita kumpul, jadi apa yang sudah kita lakukan, bagaimana menurut pandangan mereka. Ada gathering juga, lalu saat puasa kita ada buka puasa juga untuk mendekatkan itu.

P : Itu rutin, Pak?

I : Jadi gathering ke luar kota, outbond, itu rutin setahun dua kali. Itu kita isi bukan outbond saja, ada sosialisasi kebijakan baru lalu besok paginya outbond.

P : Jadi secara keseluruhan, bagaimana pandangan Bapak terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud sampai saat ini?

I : Kalau saya sendiri termasuk tipe orang yang tidak pernah puas dalam pekerjaan-pekerjaan. Karena itu selalu kita buat, cari lagi, cari lagi. Apa misalnya.. sekarang ini kita berubah jadi Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana dipikirkan kita melakukan sosialisasi dengan media-media tradisional, itu kan baru, tanggap ketoprak, wayang kulit, tapi sebagai suatu sosialisasi program. Sehingga apa, sehingga kita ngga boleh puas.

P : Apa nih harapan Bapak terhadap keberadaan teman-teman wartawan yang saat ini meliput di Kemendikbud?

I : Ya harapannya menjaga objektivitas karena kementerian itu tidak ingin yang jelek ditulis bagus, yang bagus ditulis jelek. Objektivitasnya adalah yang jelek ditulis jelek, yang bagus ditulis bagus. Sehingga yang jelek kita perbaiki untuk jadi bagus, yang bagus kita tingkatkan untuk jadi lebih bagus lagi. Jadi kita tidak menghalang-halangi untuk menulis jelek, yang jelek silahkan ditulis jelek, yang bagus ditulis bagus.

P : Kalau harapan atau saran dan masukan bagi Kemendikbud sendiri, khususnya bagi Humas dan unit-unit lain yang menjalankan media relations apa, Pak?

I : Ya harapannya satu, ada koordinasi yang lebih baik antara unit-unit utama yang memang punya anggaran masing-masing terkait kegiatan media relations itu. Selama ini, saya melihat titik koordinasinya masih lemah.

P : Kalau dari sisi personil Humasnya, apa sudah memadai, Pak?

I : A.. sumber daya juga harus ditingkatkan terhadap pemahaman media relations. Kita memang seringkali mengadakan pelatihan-pelatihan, terutama untuk teman-teman yang berada di garis depan, kita berikan pelatihan cara menulis, cara mengundang jumpa pers, ya seperti itu kita berikan.

P : Oh begitu, Pak. Baik kalau begitu, sepertinya sudah cukup info-infonya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau diganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak.

I : Iya, tidak apa-apa kok. Sama-sama, mudah-mudahan membantu ya.

Lampiran 7
Transkrip Wawancara 5

Narasumber : AL, Reporter

18 November 2011, 14:41 (54 menit)

Penanya (P) : Halo, selamat siang, Mbak. Maaf ya Mbak mengganggu siang-siang begini. Aku ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang media relations di Kemendikbud. Menurut Mbak, media relations itu penting nggak sih untuk membantu tugas-tugas wartawan?

Informan (I) : Nah itu, ya penting. Humas yang menjalankan media relations itu kan menjadi penghubung kita toh. Jadi kalau misalnya wartawan itu ngga ada a.. ngga ada Humas, sebenarnya bisa saja. Kita itu tanpa Humas bisa. Yang selama ini dilakukan teman-teman Kompas itu juga sebenarnya tanpa Humas. Kita jalan saja sendiri cari isu. Tapi ada kalanya Humas dan media relations itu menjadi penting ketika mereka mengadakan konferensi pers yang Menteriya a.. Humas itu kan sebenarnya jembatan antara wartawan dengan narasumber di dalam. Misalnya Pak Nuh mau buat konferensi pers yang besar, nah di situ perlu bantuan Humas. Tapi kalau misalnya satu atau dua orang saja yang mau ketemu, biasanya langsung sms saja ke sekretarisnya, jadi ngga perlu Humas. Jadi Humas itu hanya diperlukan untuk mendukung acara. Tapi kalau aku pribadi, mendingan ngga usah pakai Humas karena Humas itu bikin ribet.

P : Ribetnya itu bagaimana maksudnya, Mbak?

I : Ribetnya itu Humas di sebagian besar lembaga pemerintah, termasuk di Kemendikbud, itu tidak berfungsi profesional. Mereka itu menunggu saja, ngga asertif gitu. Humas kan seharusnya menyediakan, memberikan semua informasi kan, tapi ini ngga.

P : Humas lembaga pemerintah itu cenderung diam begitu maksdunya, Mbak?

I : Iya, mereka diam saja, kita yang harus gerak, paling ngasih tahu kalau ada acara aja. Seharusnya Humas itu mempermudah kerja wartawan tapi kenyataannya ngga. Misalnya saya ke salah satu Humas Kemendikbud, saya mau ketemu pak ini, minta tolong bisa ngga carikan data ini, itu mereka akan selalu jawab ngga bisa. Mereka biasanya bilang ‘oh mba, ke pak ini aja langsung’, disuruh cari sendiri. Jadi oh ya sudah, selama ini aku memang sudah cari data sendiri jadi ngga butuh kalian. Aku akan lebih kejam dengan bilang aku ngga butuh Humas karena sudah terbiasa jalan sendiri.

P : Lalu sebenarnya, media relations yang ideal menurut Mbak itu yang bagaimana?

I : Kalau menurutku ya tentu yang bisa melayani kebutuhan wartawan ya, terutama dalam hal penyediaan data dan informasi untuk buat berita. Aku pernah bilang ke siapa gitu, Humas-Humas di pemerintahan itu seharusnya diubah semua dengan PR-PR yang profesional, contohnya seperti yang di Sampoerna itu, Sinarmas, nah media relations itu ya yang seperti itu. Semua informasi itu disuplai, semua informasi itu dibuka sehingga aku ngga perlu berhubungan langsung dengan.. ya bisa juga sih tapi ngga perlu-perlu banget karena mereka sudah menyediakan semua, sebelum aku minta itu mereka sudah sediakan semua. Jadi yang seperti itu idealnya, bukan seperti Humas Diknas yang harus diminta dulu. Sudah minta saja kadang ngga dapet.

P : Oh seperti itu ya, Mbak. Jadi kalau di swasta itu, apa-apa langsung dikasih, jadi lebih asertif begitu ya?

I : Iya begitu. Jadi Humas di pemerintahan itu perlu belajar lagi lah media relations itu seperti apa, kalau perlu diganti saja dengan swasta-swasta karena memang mereka kerjanya lebih bagus. Humas di pemerintahan itu banyak alasannya, ada yang bilang ‘kan gajinya gini gini’ atau ‘karena ngga suka kerjanya’, ya kalau

begitu aku bilang keluar saja, daripada menghambat kan. Karena aku itu paling marah sama teman-teman Humas kalau mereka menghambat tugasku. Kalau ngga bantuin ngga apa-apa, tapi jangan menghambat. Kan kita itu sebenarnya sama-sama butuh, sama-sama membantu. Aku bantu Menteri kalian mengkampanyekan program-programnya, kalian bantu juga dong berikan informasinya. Kadang aku minta data saja mereka ngga tau. Harusnya Humas itu jangan hanya tahunya undang-undang saja, menghubungi wartawan, bukan.

P : Jadi seharusnya Humas menjalankan media relations itu seperti apa, Mbak?

I : Seharusnya mereka itu sekarang jadi pengumpul data, pengumpul informasi, semua informasi itu seharusnya mereka sudah punya sebelum diminta agar suatu ketika kalau ada yang butuh itu keluarnya cepet. Selain itu, media relations itu idealnya adalah partner diskusi, bukan justru jadi tukang dalam arti ‘pak, saya mau minta data ini cepet ya harus ada’, bukan seperti itu, tapi masalahnya mereka sendiri yang menyebabkan mereka terlihat seperti tukang.

P : Kalau kegiatan media relations yang biasanya dilakukan oleh Humas Kemendikbud itu ada apa saja, Mbak?

I : Ya jumpa pers, liputan ke mana ke mana, lalu pernah juga kunjungan ke kantorku sepertinya. A.. rilis juga, tapi kalau ada jumpa pers saja.

P : Rilis yang diberikan itu sudah sesuai belum Mbak dengan standar teman-teman wartawan?

I : Jadi ada orang Humas namanya Mas Agung, dia itu yang sekarang buat media release. Dulu itu ngga ada yang bisa buat rilis. Itu dulu saya yang minta, saya bilang ada ngga orang Humas yang tertarik belajar buat media release yang bener gitu, lalu ada Agung ini. Nah kita itu sekarang membantu Agung itu untuk membuat rilis yang bagus. Biasanya kalau dia sudah buat dia akan tanya ‘Mba, ini

sudah benar belum’, bukan secara isi ya, tapi secara susunannya, kalau isinya kan pasti dia akan bilang ‘pemerintah telah berhasil ini ini ini’, jadi yaudahlah biarin saja, memang itu kerjanya jadi ngga bisa diatur. Tapi dia sekarang itu bisa bikin rilis sempurna, dipakai sama teman-teman kalau misalnya mereka tidak datang acara. Nah, Humas-Humas itu sayangnya ngga seperti Agung ini, mereka ngga mau belajar. Aku juga suka merasa terhambat kalau minta data ke Humas. Misalnya aku minta data anak putus sekolah, wah itu mereka langsung bingung. Lama-lama kan kesel ya terus aku jadi cari sendiri.

P : Jadi Mbak lebih sering mencari informasi langsung ke narasumber atau melalui Humas Kemendikbud terlebih dahulu?

I : Aku sih lebih suka langsung ke personalnya saja supaya ngga ribet. Ya abis tanya ke mereka juga mereka ngga tahu, ngga punya gitu lho data-datanya. Aku pernah beberapa kali, seringlah, aku kunjungan dengan Pak Menteri. Kalau kunjungan itu kan singkat ya, nah kita kan butuh data misalnya kenapa sekolah itu diberi bantuan, terus minta profilnya, terus minta nomor kontak sekolahnya, itu kan informasi dasar ya, standar-standar, karena kan kita ngga bisa dalam waktu yang singkat mendapatkan data-data itu karena harus mengikuti Pak Menteri itu yang cepat jalannya. Minta ke Humas tapi ya ngga bisa diandalkan, ‘waduh, sebentar ya mbak’, ‘wah, ngga punya ternyata’, ‘kalau besok bagaimana’, yah itu sih keburu tutup korannya haha.

P : Sampai saat ini Humas masih suka tidak bisa menyediakan data begitu, Mbak?

I : Sering seperti itu, makanya aku ngga pernah mengandalkan Humas. Teman-teman lain juga sebenarnya merasakan hal itu, cuma mungkin mereka ngga enak. Ada alasan lain mungkin mereka ngga bisa menjelek-jelekkan Dikbud, kalau aku sih ngga ada urusan apa-apa sama Dikbud, aku gregetan soalnya.

P : Kalau terkait akses informasi yang disediakan oleh Humas Kemendikbud, tanggapan Mbak bagaimana?

I : Ya aku sih masih merasa terbatas, kan harus nyari sendiri toh. Ya ngga apa-apa sih, aku ngga keberatan karena memang harus seperti itu, hanya kadang-kadang ada hal-hal yang ngga bisa kita tembus tapi bisa ditembus oleh teman-teman Humas. Kadang ada pejabat yang ngga mau bicara kalau ngga lewat Humas, itu ada. Ya aku ngga tahu kenapa. A.. aku itu lebih terbantu sama Humas Dikbud itu untuk acara-acara saja, jadi sebatas memberi tahu ada acara ini ini ini, begitu saja.

P : Oh begitu ya, Mbak. Kalau informasi yang Mbak suka dari Kemendikbud itu sebenarnya informasi yang seperti apa sih, Mbak?

I : A.. Tergantung, tergantung isu apa yang sedang jadi trend. Kalau misalnya tentang sekolah rusak, yaudah cari data-datanya tentang sekolah rusak.

P : Lalu apa informasi yang dibutuhkan untuk membuat berita tersebut selalu dapat dipenuhi oleh Humas Kemendikbud?

I : Ngga sih haha. Ya mungkin kalau teman-teman pasrah saja ya, tapi kalau aku sih ngga, aku banyak cari sendiri dan memang sebagian besar ngga dapat dari Humas sih. Aku sudah bertanya ke Humas tapi akhirnya ya aku harus mengusahakan sendiri. Bahkan untuk nanya nomor telepon saja itu mereka bisa lho ngga punya. Humas tuh. Terus aku tanya ke siapa ya kalau kalian ngga punya, gitu. Terus aku tanya ke teman-teman pasti ada.

P : Jadi malah lebih efektif tanya ke teman ya, Mbak?

I : Iya, lebih efektif bertanya ke teman-teman sesama wartawan di Dikbud daripada ke Humas.

P : Kalau informasi yang sering diberikan oleh Humas Kemendikbud itu informasi yang seperti apa, Mbak?

I : Info kegiatan saja. Rilis itu biasa diberikan saat acara saja kan, jadi yang diberikan itu ya info acara sama rilisnya. Kalaupun ada

acara terus aku di situ ya aku ngga pakai rilisnya toh berarti. Selama ada Agung itu, ya ada rilis. Agung ngga ada ya ngga ada rilis.

P : Oh, jadi kalau nggak ada Mas Agung itu, Humasnya nggak buat rilis, Mbak?

I : Jadi pernah waktu apa itu, Agung lagi cuti atau apa, terus ada acara, ya ngga ada rilis. Aku tanya kan 'jadi kalau Agung libur, rilisnya juga libur?', terus kata mereka 'ya iya mbak, habis bagaimana dong'. Ngga ada yang kemudian misalnya 'oke, aku menggantikan posisimu ya Gung, kamu libur berapa hari? Aku gantikan deh', ngga ada yang seperti itu. Makanya kita selalu mengusahakan deh kalau ada liputan Pak Menteri itu kita selalu hadir, jadi ada atau ngga ada Agung itu ngga jadi persoalan.

P : Mbak pernah nggak misalnya diajak liputan kemana begitu, lalu beritanya telat naik cetak atau bahkan nggak naik sama sekali?

I : Haha.. a.. nah ini, itu ada latar belakangnya sebenarnya. A.. kalau teman-teman lain iya. Kalau teman-teman lain itu pasti ditanya sama Humas di Dikbud ya. Mereka biasanya ditanya sama Pak Ir naik atau ngga beritanya, tapi tidak ada satupun makhluk di Humas itu yang berani nanya ke aku, ke Kompas.

P : Lho, kenapa begitu ya, Mbak? Jadi Mbak nggak pernah ditanya sama Humas kalau beritanya nggak naik?

I : Ke Kompas tuh mereka ngga ada yang pernah nanya naik atau ngga beritanya, ngga tau kenapa. Kata anak-anak mungkin mereka ngga berani sama aku haha. Ya aku ngga tau, tapi teman-teman Kompas yang sebelum aku juga ngga pernah ditanya.

P : Kalau terkait dengan pemberitaan yang Mbak tulis seputar Kemendikbud yang sifatnya mengkritisi atau bernada negatif, apakah ada tindakan khusus dari Humas Kemendikbud?

I : Langsung ditelepon Pak Nuh haha, ditanyalah tentang pemberitaan itu, lalu kalau saya sih biasanya minta mereka buat

bantahannya saja. Jadi mereka itu biasanya buat konpres. Jadi anak-anak itu, kalau mendadak ada konpres yang ngga tau juntrungannya, itu anak-anak pasti menduga ngapain nih haha. Karena selalu Pak Nuh itu untuk mengklarifikasi ini ini ini, itu biasanya memang karena beritaku tayang. Mungkin menurut dia itu perlu ada penjelasan lebih mendalam, harus dikoreksi, gitu gitu.

P : Kalau dari Humasnya tidak ada tindakan apa-apa?

I : Dari Humas itu beneran deh, mereka itu cuma bagian kasih tau ada acara apa. Jadi kalau misalnya pagi Pak Nuh telepon, lalu saya bilang untuk kasih klarifikasi saja, nanti ngga lama baru Humasnya sms : ‘mbak, ada konpres, jam segini’, terus nanti telepon untuk ngundang lagi, ‘mbak, nanti ada konpres’. Terus aku sih biasanya bilang ‘iya, barusan Pak Nuh telepon aku, ya itu nangepin beritaku’, lalu mereka bilang ‘oh begitu ya mbak, ya ya’. Jadi Humas itu sebatas ngasih tahu kalau ada acara, mereka ngga tahu latar belakangnya kenapa nih Pak Nuh mengadakan itu. Seharusnya Pak Ibnu itu lebih, nah ini dia, ngga tahu ini salahnya siapa tapi seharusnya Pak Ibnu itu sebagai kepala lebih asertif untuk mencari tahu gitu, kenapa Pak Nuh bicara tentang ini, kenapa kok sampai keluar isu ini, supaya kalau misalnya Pak Nuh atau siapa itu berhalangan, atau wartawan manapun telepon Pak Ibnu itu Pak Ibnu bisa menjelaskan. Seharusnya dia itu bisa menjelaskan begini lho. Humas itu kan sebenarnya jubirnya departemen kan, dia bisa suatu saat menggantikan si Menteri atau pejabat manapun untuk bicara, seharusnya.. Tapi ternyata ngga kan, ya begitu.. Sepertinya Pak Ibnu juga ngga mau tahu.

P : Tapi Humas pernah tidak Mbak melarang wartawan untuk menulis berita-berita tertentu?

I : Kalau masalah pemberitaan sih mereka cukup terbuka ya. Itu sepertinya karena memang dari Pak Nuhnya sangat terbuka. Jadi kita bisa tanya apapun kapanpun langsung ke dia. Tapi kalau misalnya dia Pak Nuh bilang jangan dipublikasikan dulu, itu dia

serius memang minta untuk kita jangan mempublikasikan isu atau berita tertentu dulu. Biasanya itu karena isunya masih dibicarakan oleh internal Dikbud atau belum selesai evaluasi. Jadi kalau Pak Nuh bilang jangan dipublikasikan, kita biasanya nurut. Dulu pernah dia bilang jangan dulu diberitakan soal RSBI, itu karena memang dia belum selesai, bukan karena dia ngga mau ngasih tahu. Jadi karena Pak Nuhnya terbuka, sampai ke Humas pun juga ngga ada yang pernah minta-minta untuk tidak memberitakan isu tertentu gitu.

P : Kalau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Humas Kemendikbud untuk mendukung peliputan wartawan di Kemendikbud ada apa saja, Mbak?

I : Ya ruangan pers itu, itu kan ada komputer, lalu ada jaringan wifi. Ya itu saja, itu sudah lebih baik sih. Menurutku itu baguslah dibandingkan dengan.. ngga tau, kata teman-teman yang pernah di Kesehatan sih Dikbud lumayan lebih bagus. Di Deplu juga, aku pernah di Deplu, itu jauh lebih bagus di sini. A.. artinya kalau kita sering mengeluh juga ngga tau diri juga kali karena di tempat lain itu tidak lebih baik juga.

P : Selama ini Mbak mengalami hambatan apa saja ketika berhubungan dengan Humas?

I : Ya yang tadi itu, Humas itu ngga berfungsi sebagaimana mestinya. Aku sih merasa mereka kurang asertif terhadap wartawan, apa sih yang dibutuhkan wartawan, mereka perlu data-data yang seperti apa sih, jadi mereka cenderung diam saja menunggu kita wartawan yang datang untuk minta data, jadi bukan dipasok sebelum diminta. Mereka itu hanya aktif kalau ngundang untuk datang ke jumpa pers atau liputan, ya yang pokoknya ngundang-ngundang lah haha. Kurang asertifnya juga kelihatan saat kita pindah ruangan dari gerai informasi ke ruang pers.

P : Masalah pindah ruangan itu juga Humas kurang asertif, Mbak?

I : Ya mereka ngga tanggap gitu lho kalau wartawan itu butuh ruangan sendiri, perlu kita yang minta langsung ke staf khusus Menteri. A.. apalagi ya, Humas itu juga kurang membantu dalam hal mengumpulkan data. Kalau diminta itu pasti ada saja alasannya, 'waduh mbak, apa ya' atau 'waduh mbak, ngga ada e', atau sering juga langsung disuruh ke pihak yang terkait.

P : Kalau hal-hal yang mendukung terjalinnya hubungan yang baik dengan pihak Humas apa saja, Mbak?

I : A.. ngga ada sih sepertinya yang mendukung haha. Pokoknya begini, Humas itu buatku hanya berfungsi sebagai agenda, jadi ada apa hari ini, ya begitu saja. Selebihnya itu harus cari sendiri. Ya memang seharusnya seperti itu sih, wartawan itu harus bisa mencari sendiri. Jadi Humas itu sifatnya membantu saja. Aku ini kan memang biasa mencari sendiri, nah ketika aku ngga bisa dapat data-data tertentu dan minta tolong ke Humas terus Humasnya ternyata ngga bisa bantu, sebel ngga tuh haha. Ya gitu deh pokoknya, aku sering tuh marah-marah kalau masalah itu haha.

P : Mbak pernah tidak tersangkut masalah dengan Humas Kemendikbud?

I : Paling ya yang ditelepon-telepon itu, ditanya tentang pemberitaanku, tapi itu juga sama Pak Nuh langsung sih, sama Humas hampir ngga pernah. Humas tuh ngga ada urusan deh. Aku sering berhubungan cuma ketika ada acara dan kunjungan saja.

P : Selama Mbak tugas di Dikbud, sering ada kegiatan-kegiatan informal begitu nggak bareng teman-teman wartawan dan Humas?

I : Hm.. kalau di Kementerian lain sih banyak yah, seperti outbond gitu, tapi paling setahun itu dua kali. Kalau di Dikbud itu terakhir kemarin itu karena judulnya pelatihan pemberian apa gitu untuk wartawan, jadi kita menganggap itu ngga benar-benar informal, mungkin semiformal ya. Itupun kita yang minta karena kita merasa kok kita ngga tahu ya program-program di Dikbud itu apa aja, jadi

bisa ngga dibikinkan forum untuk dikasih tahu ada program apa saja, benar-benar untuk belajar saja bukan untuk diberitakan. Jadi ya Dikbud itu setahun ini ngga ada apa-apa. Paling apa ya, a.. buka puasa mungkin ya kemarin itu.

P : Jadi bagaimana pandangan Mbak terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud?

I : Aku ngga tau ya dulunya bagaimana, tapi kalau buat aku, Dikbud ini kasusnya special. Ini ilustrasi kecil aja ya kenapa aku bilang Humas Dikbud ngga berfungsi sama sekali. Aku mau sedikit cerita yang masalah pindah ruangan itu. Dulu itu ruang wartawan gabung dengan gerai informasi. Gerai informasi itu kan semua boleh masuk kan, masyarakat umum yang mencari informasi itu bisa masuk ke situ, pakai komputer dan lain-lain. Nah kita merasa waktu itu tidak ada privacy untuk kita bekerja, selalu kita itu mengalami kesulitan untuk memakai komputer. Nah kita sudah bilang ke Humas, melalui Pak Taufik. Kita tanya kira-kira ada ruangan lain ngga ya yang isinya itu benar-benar untuk wartawan saja. Nah di Dikbud ini, ruangan dan fasilitas yang diberikan untuk wartawan itu jauh lebih baik dibanding dari Kementerian lain. Ya pokoknya ngga jelek-jelek banget tapi juga ngga bagus-bagus banget, tapi ya lebih baiklah dibanding yang lain. Nah perpindahan dari gerai ke ruang wartawan yang sekarang itu ngga pakai Humas, Humasnya kita bilangin itu diam saja. Mereka itu ngga mensupport, ngga mendengarkan keluhan. Jadi hanya 'iya..iya', 'oh begitu', 'terus bagaimana ya?', ya seperti itu, gregetan aku. Waktu rapat ke Bogor itu, temen-temen juga gregetan bagaiman caranya. Tapi karena mungkin mereka ngga enak, jadi aku yang suka disuruh bicara. Yaudah aku akhirnya tanya bisa tidak kita punya ruangan khusus wartawan. Akhirnya bisa, tapi itu ya aku harus bicara langsung sama staf khusus Menteri bagian komunikasi media, Pak Sukemi itu. Kita saking gregetannya itu langsung bicara ke Pak Kemi, nah karena Humas mungkin takut ambil keputusan, akhirnya justru Pak

Kemi yang memutuskan ‘oke,minggu besok pindah’, dan ya bener pindah. Nah itu salah satunya kenapa aku bilang Humas itu ngga berfungsi sama sekali di Dikbud. Jadi kalau menurutku sih ya sama sekali belum optimal media relationsnya. Contoh lainnya ya, tugas Humas itu mengetahui segala sesuatu yang ada di lingkungan Dikbud, termasuk pejabat-pejabat sampai eselon III itu mereka harus tahu, siapa namanya, jabatannya, bidangnya apa, urusannya apa. Kalau wartawan itu kan ngga mungkin hafal karena Kementerian yang kita pegang kan banyak, jadi yang kita andalkan siapa? Humas toh. Nih, ilustrasi paling gampang aku kasih tahu. Aku tanya salah seorang Humas yang senior di situ, ada pejabat di acara pelantikan gitu, Pak Nuh yang melantik eselon II atau eselon III gitu, aku tanya nih ke Humasnya Dikbud nama pejabat yang dilantik itu, itu dia bisa ngga tahu lho. Pantas ngga ada Humas yang ngga tahu itu pejabatnya sendiri? Wajar ngga? Terus dia nanya ke orang lain, yang ditanyain juga ngga tahu. Alasannya itu kan orang di sini banyak, kalau menurutku ngga boleh tuh ada alasan itu. Kalau mereka saja nggak tahu apalagi aku. Harusnya tuh mereka tahu semua yang ada di ruangan ini, harusnya itu mereka pegang data, pegang list siapa saja yang dilantik. Jadi ketika sewaktu-waktu ada yang tanya, itu Humas bisa langsung cepat kasih informasi.

P : Wah begitu ya ternyata, Mbak. Lalu ada saran atau masukan nggak Mbak untuk memperbaiki kinerja Humas itu?

I : Bisa ngga ya dibubarkan saja? Haha. Diganti dengan mbak-mbak dan mas-mas dari Fortune PR atau apa gitu haha. Apa ya.. Humas Kementerian itu kan punya perkumpulan ya. Aku itu diceritain Bu Tiva, katanya Humas semua Kementerian itu habis mengadakan pertemuan Humas Kementerian Se-Indonesia, katanya untuk mempersatukan hubungan Humas antar Kementerian, gitu. Tapi aku lihat, setelah acara itu, ngga ada pengaruhnya tuh. Aku bahkan sempat ketemu ketuanya, bapak-bapak gitu, itu Humasnya

Kominfo ya, itu aku lihat ya begitu saja, sama saja seperti yang lain, ngga ada semangatnya gitu. A.. ngga ada semangat untuk berbagi informasi atau mendukung kerja wartawan, atau paling ngga mendukung program-program kementeriannya, misalnya dengan mendukung publikasi, mempermudah siapa saja mendapatkan informasi, itu ngga ada, termasuk di Dikbud. Mereka itu hanya gencar kalau menelpon untuk datang ke acara. Aku pernah sampai marah ke mereka, aku bilang jangan dipaksa-paksa dong karena kerjaanku banyak, sampai kesal aku karena ketika aku butuh, mereka juga ngga mebantu, jadi ngapain aku bisa-bisanya dicecer seperti itu.

P : Jadi intinya harus lebih asertif begitu mungkin ya, Mbak?

I : Intinya ya mereka harus bisa lebih menjalankan fungsi Humasnya, harus lebih asertif mencari tahu dan memenuhi tentunya kebutuhan wartawan, jangan hanya mencari saat perlu saja.

P : Kalau masalah Fortadik nih bak, menurut Mbak forum itu sudah cuykup mewedahi kepentingan teman-teman wartawan di sini belum?

I : Hmm.. dalam banyak hal, iya membantu. Tapi ya a.. gini. Seperti misalnya yang urusan gerai kemarin, itu memang ketuanya yang maju kan, itu Mba Tri yang langsung ngomong sama Pak Taufik atau Pak Setiono atau Pak Ibnu, jadi ya berfungsi sih, menjembatani kita kalau misalnya ada masalah-masalah seperti gerai itu.

P : Oke Mbak, sudah habis pertanyaannya. Terima kasih banyak Mbak sudah mau berbagi cerita.

I : Yo, sama-sama. Kalau ada apa-apa bilang saja ya.

Lampiran 8
Transkrip Wawancara 6

Narasumber : AR, Reporter

16 November 2011, 12:54 (15 menit)

Penanya (P) : Hai Mbak. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya masalah media relations di sini. Pertama aku ingin tahu seberapa penting media relations untuk wartawan itu sendiri. Kalau menurut Mbak, seberapa penting?

Informan (I) : Kalau buat ngasih informasi acara itu sih penting, buat.. jadi kita tau program apa saja yang lagi dijalankan kementerian, terus apa aja yang sudah dicapai. Jadi pentingnya itu ya a.. untuk memperlancar arus informasi seperti itu tadi.

P : Kalau menurut Mbak, bagaimana media relations yang ideal bagi wartawan?

I : Hm.. seperti yang di Dikbud sini mungkin cenderung udah cukup ideal ya. Jadi ketika saya minta informasi, agenda, data ke Humas sih gampang lah kalau di sini, akses informasinya gampang lah.

P : Kalau kegiatan media relations yang biasanya dilakukan oleh Humas Kemendikbud itu ada apa saja, Mbak?

I : Hmm.. Yang sering paling jumpa pers. Terus kadang diundang kalau ada liputan ke luar kota. A.. kalau rilis, biasanya barengan sama jumpa persnya itu.

P : Kalau media visit ke kantor Koran Tempo pernah, Mbak?

I : Selama saya di Tempo sih setahu belum pernah ya.

P : Mbak kalau ingin mencari informasi untuk berita yang dibuat, apakah selalu mencari pertama kali ke Humas atau bagaimana Mbak?

I : Seringnya sih saya justru ngga ke Humasnya kalau mau cari informasi, lebih seringnya sih langsung ke orangnya, jadi secara

personal gitu. Paling ke Humas itu kalau saya minta a.. informasi acara kali, jadi kayak agenda acaranya apa aja gitu paling.

P : Kalau klarifikasi berita, sering ke Humas tidak, Mbak?

I : Kalau klarifikasi juga biasanya langsung secara personal saja. Misalnya mau cari data-data tentang SD, biasanya langsung nyari ke Direktorat SD-nya. Jadi ke Humas, kalau buat saya, hanya sebatas untuk agenda saja.

P : Kalau terkait akses informasi yang disediakan oleh Humas Kemendikbud, tanggapan Mbak bagaimana?

I : Ya lumayan sih. Mereka terbuka sih kalau ditanya info-info. Tapi karena ya itu tadi, saya lebih seringnya cari langsung ke personal narasumbernya. Ke Humas ya hanya kalau cari data-data pendukung saja, itu pun tidak selalu dapat jadi ya akhirnya cari sendiri lagi.

P : Informasi yang diminati oleh Mbak dan teman-teman wartawan yang lain itu yang seperti apa, Mbak?

I : Itu sih tergantung medianya ya. Kalau misalnya dari koran saya itu biasanya mencari a.. ya lebih mencari kritik untuk pemerintah, kurangnya dari program ini apa, kurangnya dari pemerintah pusat untuk jalanin program ini apa, masih jalan atau ngga program itu, masyarakat merasakan program itu atau ngga. Yang gitu sih biasanya. Kalau saya biasanya lebih sering bikin hardnews ya dibanding softnews atau feature-feature gitu. Kalaupun feature juga pasti dicari yang tanda kutip negatifnya.

P : Lalu apa informasi yang dibutuhkan untuk membuat berita tersebut selalu dapat dipenuhi oleh Humas di sini?

I : Ya kadang-kadang. Kalau yang seperti itu biasanya harus kita yang proaktif mencari ya karena kalau dari mereka selama ini sepertinya kebanyakan berita-berita yang positif ya yang dikasih tahu. Kalau yang negatif biasanya sih kita sendiri yang harus nanya haha.. Tapi mereka cukup terbuka sih kalau ditanya-tanya seputar yang agak negatif gitu. Yang penting kitanya bertanya.

P : Kalau misalnya wartawan diundang untuk meliput suatu kegiatan itu tentu Humas berharap agar beritanya kan langsung naik. Kalau misalnya ada liputan yang beritanya tidak naik cetak atau terlambat naiknya, tanggapan Humas seperti apa, Mbak?

I : A.. biasanya saya pilih-pilih juga ya kalau datang ke acaranya Dikbud, jadi ngga semua saya ikut. Biasanya kalau yang saya datangi itu ya saya angkat beritanya. Hmm.. kalau yang acaranya seperti jumpa pers gitu, kalau saya datang ya biasanya sih naik beritanya. Kalau yang kegiatannya liputan ke luar kota gitu sih bkebetulan saya belum pernah karena memang agak susah dapat izin dari kantor. Tapi kalau di luar Dikbud saya pernah liputan ke luar kota, dan itu juga beritanya pasti naik cetak. Kalau yang terlambat naik itu ya kadang-kadang saja sih ditanyain Humas, tapi ya sebatas ditanya-tanya saja kenapa.

P : Kalau terkait dengan pemberitaan yang Mbak tulis seputar Kemendikbud yang sifatnya mengkritisi atau bernada negatif, apakah ada tindakan khusus dari Humas Kemendikbud?

I : A.. kalau saya itu biasanya mengikuti kaidah jurnalistik saja. Kalau misalnya saya mau buat berita yang mengkritik gitu pasti akan saya buat cover both side dengan saya menghubungi orang Dikbudnya, entah sementok-mentoknya saya hubungi Kepala Humasnya untuk mendapatkan klarifikasi, atau misalnya ke Direktoratya langsung, atau ke Menterinya. A.. tapi pernah juga sih dihubungi pihak sini. Itu kalau ngga salah pemberitaannya tentang penetapan tersangka KPK dari Dikbud sini. Cuma itu memang kurangnya karena belum ada konfirmasi dari Dikbud karena a.. Menterinya kalau ngga salah itu lagi susah dihubungi, tapi konfirmasi itu sudah ada keluar dari pihak lain duluan, jadi ya dinaikin aja beritanya. Belakangan, Humasnya yang menghubungi saya. Mereka klarifikasi gitu sih.

P : Mbak pernah tidak diminta oleh Humas untuk tidak menulis berita-berita tertentu?

I : Ngga pernah sih, mereka membebaskan aja mau menulis pemberitaan tentang apa, yang penting tahu aturan saja.

P : Kalau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Humas Kemendikbud untuk mendukung kerja wartawan di sini ada apa saja, Mbak?

I : A.. seperti ini sih yang keliatan, ada ruang pers, ada komputer dan internetnya. Ya ini aja sih..

P : Hambatan apa saja yang selama ini Mbak temui saat menjalin hubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Hmm.. kadang sih saya masih suka ngga terima sms kalau ada acara dari Humasnya. Jadi biasanya malah dapat dari teman-teman wartawan yang lain. Terus a.. kadang rilisnya ada yang kurang lengkap datanya, tapi biasanya kalau kurang gitu sih saya ngga minta ke Humasnya tapi saya sendiri yang lengkapi. A.. tapi dibanding yang lain sih rilis di sini sudah lebih baik ya, sudah lumayan runut dan cukup informasi.

P : Kalau hal-hal yang mendukung terbentuknya hubungan yang baik antara Mbak dan teman-teman wartawan lainnya dengan pihak Humas apa saja, Mbak?

I : Hmm.. Humas itu gampang dihubungi. Mereka cukup terbuka juga ya. A.. karena saya biasanya kalau menghubungi itu ke Kepala Humas atau ke Kepala Medianya, itu Pak Taufik, a.. meskipun kadang mereka ngga tau apa yang saya minta, biasanya mereka akan mengalihkan ke orang lain yang lebih berwenang atau minta waktu untuk mencari informasinya.

P : Humas sering nggak Mbak mengadakan kegiatan yang sifatnya informal dengan teman-teman wartawan di sini? Seperti gathering atau sejenisnya begitu.

I : Gathering sepertinya sih ada ya, tapi saya jarang ikut kalau yang ke luar kota gitu. Pernah sih waktu itu juga kayak ngadain sharing

temu wartawan juga sih di Bandung. Cuma waktu itu saya ngga bisa ikut karena 3 hari acaranya, ngga dapat izin dari kantor. Kalau selain itu kayaknya a.. ngga ada.

P : Jadi bagaimana pandangan Anda terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud selama ini?

I : Hm.. kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya. Humasnya cukup mudah dicari kalau mau minta data-data gitu, cukup terbuka juga. Yang agak kurang itu paling ya, kalau secara personal, yang tadi itu a.. mengenai sms acara itu. Kalau misalnya mau kirim undangan acara ngga usah dipilih-pilih gitu. Jadinya kan mereka terkesan membatasi jumlah undangan. Mereka sih alasannya terlewat saat kirim undangan itu, tapi ya ngga tau lah haha. Jadi saya ya taunya dari teman-teman aja.

P : Adakah saran dan masukan untuk meningkatkan kinerja Humas, khususnya media relations di Kemendikbud?

I : Saran ya? A.. yang tadi satu itu kali ya, kalau mengirim undangan ngga usah dibeda-bedakan. Soalnya saya juga pernah ngobrol dengan beberapa teman wartawan, ada sih yang merasa dibeda-bedakan juga gitu, tapi saya ngga bisa sebut medianya ya, jangan haha..

P : Terakhir nih Mbak, Fortadik yang ada di sini itu apa sudah cukup menjembatani kepentingan wartawan yang meliput di Kemendikbud ini?

I : Di sini itu Fortadik membantu sekali. Ngga hanya menjembatani kita-kita dengan pihak Humas saja, a.. kadang kan ada suatu isu yang misalnya pengen kita kejar bareng-bareng tapi narasumber itu agak susah ditemui gitu kan. Kadang kita di Fortadik, ya mengatasnamakan Fortadik, tanda kutip mendesak narasumber untuk ayolah ngomong gitu. Jadi sangat membantu sekali.

P : Oke deh kalau begitu Mbak. Sudah cukup sepertinya, terima kasih banyak ya Mbak sudah dibantu.

I : Iya, sama-sama, Sya..

Lampiran 9
Transkrip Wawancara 7

Narasumber : OS, Reporter

14 November 2011, 11:58 (19 menit)

Penanya (P) : Selamat siang Bang. Minta waktu sebentar untuk wawancara ya, Bang. Pertama-tama ingin tanya a.. apakah media relations itu penting Bang untuk mendukung pekerjaan wartawan?

Informan (I) : Ya penting dong, sangat penting malah, apalagi di era sekarang. Media relations itu kan hubungan kita sebagai wartawan dengan suatu lembaga, dengan Humasnya. Humas itu semacam jubirnya, jadi Menteri, Dirjen, ngga selalu harus bicara, cukup dengan Humasnya itu. Selain jadi jubir itu, dia juga corong dan a.. back up, jadi kalau misalnya Menteri susah dihubungi, dia harus siap jawab itu. Jadi pentinglah, terutama untuk mendapatkan berita atau klarifikasi berita. Jadi kita ngga perlu selalu menghubungi Menteri atau Dirjennya, bisa melalui Humasnya saja. Menteri dan Dirjen itu kan orang birokrasi ya, jadi mungkin sibuk atau apa, kadang-kadang kita jadi bisa kontak Humasnya kan, ada kegiatan apa.. sms, telepon. Nah makanya Humas yang ideal itu harus well-informed dan serba bisa, a.. menguasai semua isu-isu yang terkait dengan lembaganya.

P : Jadi sebenarnya media relations yang ideal itu yang seperti apa Bang kalau dari sudut pandang wartawan?

I : Idealnya ya yang pasti akses informasinya mudah a.. lalu yang tadi itu, Humasnya harus menguasai isu-isu yang ada di bidangnya, terutama yang sering ditanya oleh wartawan karena itu menyangkut citra lembaga tersebut. Jadi kalau sewaktu-waktu Pak Menteri atau siapa gitu ya a.. susah dihubungi, Humas sebagai unit yang menjalankan media relations harus siap.

P : Di Kemendikbud sini, kegiatan media relations yang biasanya dilakukan itu ada apa saja ya, Bang?

I : Ya standarlah ya seperti di Kementerian lain, ada jumpa pers, ada liputan ke daerah atau ke mana, terus ada a.. rilis kegiatan, itu termasuk juga kan ya? Terus apa lagi ya a.. itu sih yang paling sering. Jumpa pers itu sering sekali di sini.

P : Kalau media visit ke Kantor Media Indonesia pernah, Bang?

I : Sepertinya belum pernah.

P : Lalu kalau akses informasi yang disediakan untuk wartawan mencari informasi di sini bagaimana, Bang?

I : Ya sementara cukup baik saja haha.. Artinya informasi-informasi kegiatan cukup sering diberikan, disms, diemail. Cuma dalam konteks fasilitas pelayanan yang diberikan untuk wartawan di sini, ada peningkatan tapi masih ada kekurangan. Komputer saja kan ini kurang memadai. Kalau sebuah lembaga itu profesional atau lembaganya besar, maka fasilitas ruang persnya itu harus memadai dan a.. siap. Jadi kalau kita wartawan habis liputan kayak tadi kan, kan ngga semua wartawan punya laptop kan, ketika dia datang kesini internetnya nyala kan dia bisa langsung mengirim berita kan, mempercepat kerja memberitakan peristiwa-peristiwa di Diknas. Kayak sekarang nih, saya mau ngirim berita tapi internetnya mati haha..

P : Selain fasilitas ruangan ini, ada fasilitas apalagi Bang yang disediakan oleh Humas?

I : Ya ini saja sepertinya, ruangan pers, a.. sudah cukup, ya walaupun untuk ukuran lembaga besar seperti Kemdikbud harusnya lebih memadai lagi. Tapi ini sebuah terobosan. Ini baru beberapa bulan lho. Sekian puluh tahun kita belum bisa terobos. Kita terobos terus Pak Ibnu dan Pak Staf Khusus Menteri, baru bisa ini.

P : Jadi ruangan ini ada karena permintaan dari wartawan, Bang?

I : Iya, ini karena gerakan kita dari wartawan, karena sebelumnya masih menyampur dengan Gerai Informasi dan Media yang di depan itu. Kan di situ ada kerjaan juga, mungkin yang di gerai itu terganggu dengan keberadaan kita. Kita juga terganggu dengan keberadaan mereka kan. Jadi ini terobosan baru di Diknas ada ruangan ini, walaupun fasilitasnya masih terseok-seok ya, perlu penyempurnaan. Fasilitas internetnya perlu diperbaiki, karena ini sebuah lembaga besar pendidikan lho, di mana masyarakat perlu informasi-informasi yang cepat.

P : Biasanya Bang kalau mau cari info-info untuk bikin berita, caranya ke Humas atau langsung ke personal narasumbernya?

I : Biasanya sih lebih sering ke personalnya langsung. Kita kenal Dirjen, langsung kita kontak Dirjennya a.. Dirjennya, Menterinya, Wamennya, ya kita bisa smsan.

P : Jadi biasanya menghubungi Humas itu kalau dalam kondisi seperti apa?

I : Biasanya ke Humas itu kalau misalnya mau cari tahu tentang kegiatan kementerian, menteri-menteri dan dirjen-dirjen. Menterinya di mana, ke mana.. Selain itu juga kalau perlu klarifikasi isu-isu aktual pendidikan, kita terkadang minta difasilitasi mereka untuk bertemu dengan siapa yang terkait. Jadi selain meminta klarifikasi langsung ke Humas, juga kadang meminta untuk difasilitasi agar bisa klarifikasi dengan pihak lain. Tapi memang lebih sering secara personal sih karena orang Kemendikbud sangat welcome terhadap kita, jadi memang ngga harus selalu lewat Humas.

P : Informasi yang biasanya diminati oleh Bang itu informasi yang seperti apa, Bang?

I : Ya yang a.. kasustis lah ya. Misalnya ada sekolah rusak.. BOS telat, kenapa sih itu. Kita klarifikasi langsung dengan Dirjen terkait. Jadi kasustis dan hal-hal aktual yang sedang terjadi di dunia pendidikan lah yang biasanya kita minati.

P : Lalu informasi-informasi itu selalu bisa disediakan oleh Humas?

I : A.. tergantung kasusnya. Kalau masalah umum-umum seperti sekolah rusak, itu lumayan cepat dipenuhinya. Tapi kalau soal KPK, soal-soal korupsi, itu memang perlu proses. Jadi kalau soal korupsi itu mereka memang terlihat agak hati-hati. Mereka ingin pihak yang berwenang saja seperti Pak Menteri yang memberikan klarifikasinya. Tapi kalau soal kebijakan, mereka cukup terbuka, termasuk kalau ada masalah dalam kebijakan tersebut seperti BOS yang terlambat itu, mereka biasanya jelaskan a.. kenapa bisa terlambat a.. lalu ada beberapa perwakilan wartawan yang dikirim langsung ke daerah untuk mengecek langsung. Jadi ya seperti itu.

P : Kalau informasi yang biasanya diberikan oleh Humas itu informasi yang seperti apa, Bang?

I : Yang positif ya tentunya, kan terkait pencitraan juga. Tapi kadang kalau yang negatif gitu ya, seperti BOS ngga lancar atau apa gitu a.. ya dikasih tau juga sih. Mereka terbuka lah intinya tentang apa yang sedang terjadi atau dihadapi di sini..

P : Sekarang terkait dengan pemberitaan yang bernada negatif nih Bang, biasanya reaksi Humas terhadap pemberitaan yang bernada negatif atau sifatnya mengkritisi itu seperti apa, Bang?

I : A.. reaksinya itu ada a.. misalnya tentang Humas Index yang kemarin itu yang kata Menkokesra rendah, mereka langsung ada jumpa pers, mereka antisipasi. Ada juga yang ngga mereka.. ngga mau dipolemikkan. Jadi ada yang dibiarkan, ada yang direspon. Kalau yang direspon itu biasanya yang sifatnya nasional dan menyangkut pencitraan Kemendikbud. Soal buku juga dulu pernah heboh kalau ngga salah, buku.. buku SBY masuk sekolah, nah itu ditanggapi oleh mereka dan juga oleh Menteri langsung.

P : Kalau tindakan secara personal terhadap wartawan yang menulis pemberitaan negatif begitu ada tidak, Bang?

I : Ngga ada sih sepertinya, jadi semua melalui jumpa pers saja atau kadang juga doorstop langsung ke Menterinya atau Wamennya itu bisa.

P : Humas Kemendikbud pernah tidak Bang meminta untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?

I : Kayaknya ngga deh. Mereka a.. menyerahkan saja pada wartawan, yang penting cover both side. Jadi kalau kita memberikan kritikan, mereka diberikan kesempatan juga untuk berbicara.

P : Kalau misalnya ada liputan yang beritanya tidak naik cetak atau terlambat naik cetaknya, biasanya ada tindakan khusus tidak Bang dari Humas?

I : Kalau saya sih selalu diberitakan ya, walaupun tidak semua itu diberitakan. Ada yang penting, ada yang tidak penting. Jadi yang diberitakan itu yang sesuai dengan apa yang mau kita angkat. Ada juga sih yang misalnya beritanya telat belum kita beritakan, nah itu biasanya sih ditanyain sama Humasnya juga, ayo dong beritakan misalnya, karena mereka kan butuh untuk klipng, buat laporan perjalanan, jadi itukan seperti bukti kalau memang sudah melakukan perjalanan begitu.

P : Humas di sini sering tidak mengadakan kegiatan informal yang memang sifatnya santai untuk menjalin kekerabatan begitu, Bang?

I : Sekarang itu sudah jarang ya kayaknya. A.. terakhir itu buka puasa kemarin, itupun sekaligus peresmian ruangan ini. Idealnya kan ya setiap bulan ya supaya ngga putus hubungannya. Dulu sih kita pernah mencetuskan untuk diadakan setiap bulan, tapi ya gatau ya gimana itu a.. ngga ada kelanjutannya. Ngga jalan sih sepertinya.

P : Selama ini, hambatan-hambatan apa yang sering ditemui dalam menjalin hubungan dengan Humas di Kemendikbud ini, Bang?

I : Hm.. kalau dalam konteks saya di Media Indonesia, dulu itu kan halaman Humaniora ada setiap hari, tapi sekarang itu mingguan a.. 2 halaman seminggu sekali. Jadi berita pendidikan tidak selalu dimuat tiap hari. Sebagai penggantinya itu biasanya masuk ke online, kita ada website kan. Jadi ya itu hambatannya, berita-berita pendidikan harian tidak bisa setiap hari diterbitkan di cetaknya. Selain itu ya itu tadi, fasilitas kurang.

P : Kalau dari segi personil Humasnya bagaimana, Bang?

I : A.. kalau dari orang Humasnya ya biasalah, ada yang betul-betul profesional, ada juga yang masih kurang memahami kebutuhan wartawan. Ada yang memang profesional, baik, mengerti betul-betul kebutuhan wartawan, tapi ada juga yang masih perlu ditraining lagi lah. Misalnya kadang-kadang mau undang acara tapi mendadak ngabarannya. Terus misalnya ke luar kota, kadang mereka janjikan akan mengakomodasi, tapi ternyata ada akomodasi yang tidak beres. Ada yang begitu.

P : Kalau liputan ke luar begitu, selain akomodasi, disediakan apa lagi Bang oleh Humas?

I : Standarlah, akomodasi terus transportasi. Biaya perjalanan kayak biasa ke luar kota saja.

P : Kalau perjalanannya ditanggung seperti itu, Bang jadi ada rasa tidak enak begitu ngga Bang untuk menulis berita-berita yang negatif tentang Kemendikbud?

I : Biasanya itu justru ngga enak menulis yang jelek-jelek karena kita sudah dekat sama Humasnya, bukan karena dikasih uang atau apa. Saya percaya yang di Fortadik ini semua bekerjanya profesional ya, jadi memang pemberitaannya tidak bergantung dari uang transport, yang lainnya. Kamu tanya saja ke Humas, saya kan juga sering menulis berita yang sifatnya mengkritisi.

P : Oh iya iya Bang. Lanjut ke hambatan lagi Bang, ada hambatan lainnya yang sering dihadapi juga di sini?

I : Kemudian masalah berita, kadang suka ditanyain mana beritanya, padahal sudah dimuat di online. Jadi kadang ada yang masih berpikir beritanya harus keluar di cetak, tapi ada juga yang sudah paham kalau tidak harus di cetak. Ya seperti itu.

P : **Selain hambatan, kalau hal atau kondisi yang mendukung terjalannya hubungan yang baik antara wartawan dengan Humas Kemendikbud itu apa, Bang?**

I : Kalau yang mendukung itu orang-orang di sini sangat terbuka sama kita. Nggak hanya Humasnya, Pak Menteri, Dirjen dan yang lainnya juga sangat terbuka. Hmm apa lagi ya.. a.. ya itu sih terutama, mereka sangat terbuka.

P : **Bang pernah tersangkut masalah tidak dengan Humas Kemendikbud?**

I : Masalah besar sih nggak ya, tapi pernah lah ada masalah gitu. Jadi waktu itu kalau tidak salah soal apa ya a.. tentang buku SBY kalau tidak salah. Jadi saya menulis editorial gitu, lumayan besar sih sampai diberitakan juga di Metro. Jadi ya saya menulis tentang manfaat buku itu, untuk apa sih diterbitkan begitu kan, ada unsur politiknya atau nggak. Nah itu saya sempat ditelepon, tapi bukan sama Humas, yang menelepon itu Pak Nuh, diklarifikasi lah gitu sampai akhirnya ya sama-sama saling mengerti saja haha..

P : **Jadi bagaimana pandangan Bang terhadap media relations yang telah dijalankan oleh Kemendikbud sampai saat ini?**

I : A.. sudah cukup baik sih, tapi ya perlu terus ditingkatkan. Fasilitas diperbaiki lagi supaya kita wartawan lebih mudah kirim berita atau apa gitu kan. Lalu kegiatan informal kekeluargaan gitu sepertinya perlu ditambah deh. Sekarang itu kan kayaknya cuma setahun sekali, nah itu perlu ditambah lagi. Oh iya satu lagi, a.. lebih sering lagi kasih info-info ya a.. bisa disms, atau melalui email atau rilis gitu.

P : Apa saran-saran Bang untuk peningkatan kinerja Humas, khususnya terkait dengan media relations di Kemendikbud ini?

I : Kalau secara teknis sih ya fasilitasnya ya ditambah, kan ini lembaga besar, jadi perlu fasilitas yang memadai. Kegiatan informal juga perlu ditambah, dibuat rutin gitu ya berapa bulan sekali. Kalau setahun sekali rasanya sangat kurang. Forum-forum juga sekarang sudah jarang dilakukan a.. saya pikir itu perlu dihidupkan kembali ya.

P : Terkait dengan Fortadik nih Bang, apa Fortadik sudah cukup menjadi kembatan antara Humas dengan wartawan di Dikbud sini?

I : Saya kira cukup menjembatani ya. Kadang Fortadik ini bisa jadi fasilitator wartawan untuk berhubungan dengan Humas atau unit lain di Kemendikbud. A.. tapi sekarang itu kan sedang masa transisi kepengurusan ya, seharusnya itu bulan apa ya a.. beberapa bulan yang lalu lah pokoknya, itu seharusnya sudah ganti kepengurusan, tapi sampai sekarang belum ada penggantinya. Jadi rasanya sekarang itu kurang greget ya karena belum ada pengurus baru yang menggerakkan Fortadik ini. Mungkin karena itu juga jadi ada beberapa wartawan yang kurang membaur, terpisah gitu jadinya. Itu masalah di internalnya sih, tapi secara keseluruhan sudah cukup menjembatani.

P : Iya sudah sepertinya nih Bang wawancaranya. Terima kasih banyak Bang atas bantuannya.

I : Oke oke, sama-sama..

Lampiran 10
Transkrip Wawancara 8

Narasumber : FD, Reporter

14 November 2011, 14:41 (26 menit)

Penanya (P) : Siang Bang. Mau wawancara sebentar boleh ya Bang tentang media relations di sini. Pertama ingin tanya masalah seberapa pentingnya media relations untuk wartawan. Menurut Bang bagaimana?

Informan (I) : Penting, karena kan kalau misalkan a.. hampir di semua pos itu kan pasti ada media relations ya, mau di polisi juga pasti ada. A.. karena itu berkaitan dengan apa yang mau kita liput, terus apa yang kita a.. running. Misalnya ada kasus X gitu, tentu kan kita harus punya jalinan, harus kita jaga baik-baiklah hubungan dengan Humas itu. Dan info juga mesti banyak dari mereka, misalnya ada agenda apa gitu. Selain agenda itu kan kita juga bisa tanya-tanya ke mereka. Jadi ya penting, penting.

P : Kalau dari kaca mata wartawan sendiri, media relations yang ideal itu seperti apa, Bang?

I : Kalau saya sih melihatnya yang ngga pelit informasi ya. Maksudnya pelit informasi itu kan bukan cuma sebatas pemberitahuan ada acara apa, tapi a.. misalnya kita lagi buat tulisan, kita butuh info gitu, data tentang sesuatu, kita dikasih akses gitu kan, kemudahan-kemudahan akses gitu lah.

P : Kalau di Kemendikbud sendiri, bagaimana akses informasi yang disediakan oleh Humasnya, Bang?

I : Selama ini sih a.. lumayan gampang ya, kalau misalkan dari mereka, Humas itu kalau ngasih data itu ya lengkap karena data yang dipaparin dari Menteri itu biasanya dikirim ke kita. Jadi kita kalau mau buat tulisan lagi, backgroundnya uda ada lah gitu.

P : Biasanya kalau ingin mencari data atau informasi untuk berita yang akan ditulis, pertama kali yang ditemui itu Humas, Bang?

I : Hmm.. biasanya sih personal ya nyari data narasumbernya. Kalau misalnya kita butuh data kementerian itu baru lewat PIH. Misalkan nanya data-data awal gitu atau kalau mau ketemu Menteri, harusnya sih lewat PIH, tapi kita biasanya langsung ke sekretarisnya haha.. Tapi di sini fleksibel sih ya, karena memang kita sama-sama butuh. Kementerian perlu untuk pencitraannya, kita butuh informasi dari dia.

P : Kalau informasi yang diminati oleh wartawan itu yang seperti apa, Bang?

I : Hmm.. data pendukung aja sih sebenarnya, seperti jumlah siswa miskin yang ngga lanjut sekolah, kaya gitu. Terus jumlah sekolah yang ambruk, seperti gitu. Kalau mau tentang sebab-penyebab itu, seperti sekolah rusak itu ya contoh kecilnya, itu sebenarnya ngga bisa disalahkan ke Kementerian kalau kita nilai objektif karena itu tanggung jawab pemerintah daerah ya. Tapi karena akses informasi di Kementerian sini itu lebih terbuka ya dibanding dengan di pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tertutup ya kalau ditanya-tanya. Jadi yang diminati itu, kalau saya ya, cenderung data apa ya a.. data-data angka ya mungkin disebutnya.

P : Apakah semua informasi yang dibutuhkan itu dipenuhi oleh Humas Kemendikbud?

I : Dikasih sih biasanya kalau data-data seperti itu. Lagipula kan di sini ada websitenya ya dan itu lumayan lengkap. Jadi kita bisa juga liat-liat dari situ.

P : Kalau informasi yang sering diberikan oleh Humas Kemendikbud itu yang seperti apa, Bang?

I : A.. campur-campur sih ya. Ngga cuma yang bagus-bagus aja yang dikasih tau. Kayak penyaluran dana BOS yang terhambat, itu dipaparin sama mereka apa aja penyebabnya. Kalau kemarin yang

masalah BOS itu sih mereka bilangnya itu a.. kebijakan pemerintah daerah. Lalu saat dikonfirmasi ke pemerintah daerah, bilangnya mereka masih butuh waktu. Jadi terkesannya itu a.. saling membela diri gitu. Tapi kalau misalnya diminta data tentang berapa sekolah yang belum menerima atau sekolah apa saja yang belum terima, itu langsung dikasih. Jadi berimbang lah, positif dikasih tahu, negatif juga tapi dengan alibi masing-masing haha.

P : Fasilitas yang disediakan oleh Humas untuk mendukung kerja atau peliputan wartawan di Kemendikbud ini ada apa saja, Bang?

I : Apa ya a.. ya paling ini aja sih ruang wartawan. Ini udah lumayan juga sih, karena kita sebelumnya itu kan gabung sama Gerai Informasi. Ya kan maksudnya kalau di sini, kita jadi jauh lebih bisa a.. berkreasi lah bahasanya haha.. dibandingkan kalau kemarin-kemarin kan ngga enak, kalau mau bercanda atau apa gitu kan susah. Meskipun di dalam sini pun belum optimal ya, misalnya komputernya ini ada yang mati. Tapi kalau saya sih tidak begitu mempermasalahkannya ya karena a.. saya bawa laptop sendiri. Tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang tidak ada laptop, cukup susah juga. Kemudian a.. kalau misalnya ada sidak-sidak gitu, kita disediakan mobil. Ya paling gitu-gitu aja sih.

P : Kalau terkait dengan pemberitaan yang sifatnya mengkritisi kebijakan atau program Kemendikbud, atau yang bernada negatif seperti itu Bang, ada tidak tindakan khusus yang dilakukan oleh Humas terhadap pemberitaan seperti itu?

I : Oh saya kebetulan dulu pernah seperti itu haha. Waktu itu saya menulis tentang konteks massal atau apa gitu ya, terus saya dihubungi oleh Humas di sini, dibilangin kalau beritanya jangan keras-keras. Ya bukan saya aja sih, ada beberapa teman lain juga yang dihubungi, mereka mendekati secara personal, minta tolong supaya beritanya jangan terlalu keras begitu.

P : Bang kalau misalnya meliput kegiatan Kemendikbud, lalu beritanya terlambat naik cetak atau mungkin malah tidak naik cetak beritanya, itu reaksi dari Humas biasanya seperti apa?

I : A.. kalau saya sih biasanya selalu saya publikasikan ya karena sebelumnya sudah koordinasi dulu dengan kantor, jadi kantor sudah bilang mau beritanya yang begini begini, kalau bisa jangan yang umum, yang feature-feature. Jadi ya dari kegiatan tersebut, saya buat berita yang sesuai dengan yang diperintahkan kantor. Cuma memang kalau misalnya pergi 4 hari, saya paling cuma bisa bikin berita untuk 3 hari, satu hari satu berita karena sisanya habis di jalan.

P : Pernah tidak Bang Humas di sini meminta untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?

I : Ngga sih kayaknya ya. Jadi mereka terbuka aja, apa yang mau ditulis ya silahkan ditulis, yang penting kan prinsipnya cover both side. Jadi kalau ada satu sisi yang a..berbeda pendapat harus diimbangi dengan pendapat lainnya gitu.

P : Kalau kegiatan media relations yang sering dilakukan di Kemendikbud apa saja ya, Bang?

I : Paling ya jumpa pers, terus a.. rilis, itu dibagiin pas acara atau jumpa pers itu. Jadi kalau ngga ada acara, ngga ada rilis. A.. tapi pernah juga sih ngga dikasih rilis pas acara haha. Peliputan daerah juga pernah diadain, tapi saya sih baru sekali ikutnya.

P : Kalau peliputan seperti itu, biaya akomodasi dan uang saku disediakan oleh Humas?

I : Iya biasanya begitu, jadi semua yang terkait perjalanan mulai dari transport, hotel dan uang saku semua mereka tanggung.

P : Kalau dari Kemendikbud mendatangi kantor Jurnas pernah tidak, Bang?

I : Sepertinya belum pernah ya.

P : Hambatan-hambatan yang selama ini ditemui dalam menjalin hubungan dengan Humas Kemendikbud apa saja, Bang?

I : Palingan a.. informasi itu dadakan. Jadi kayak 3 jam sebelum acara, biasanya kan kalau informasi acara itu dua atau tiga hari sebelumnya ya, kalau di sini kadang pas hari-H baru dikasih tahu. Itu sih paling.

P : Kalau dari sisi personil Humasnya bagaimana, bang?

I L Kalau dari Humasnya sih sudah cukup kooperatif ya, cukup memahami kita sebagai wartawan, mungkin ya ada beberapa personil yang masih sedikit kurang tapi itu sangat jarang sih.

P : Kalau hambatan yang dari internal Bang sendiri bagaimana?

I : Hm.. kalau dari internal sih biasanya masalah berita yang dipublikasikan. Waktu itu pernah saya tulis berapa berita gitu, tapi banyak yang ngga terbit karena kolom saya dipakai iklan haha..

P : Kalau sebaliknya, yang mempermudah atau mendukung hubungan antara wartawan dengan Humas di sini apa, Bang?

I : Yang mempermudah a.. ya itu, Humasnya mungkin sudah biasa bergaul sama wartawan jadinya ya orangnya a.. ngga kaku-kaku banget, sudah luwes lah. Ya apalagi kan ada beberapa yang mantan wartawan juga, jadi itu membantu banget, tahu banget bagaimana caranya memperlakukan.. maksudnya tau bagaimana wartawan, harus diperlakukan begini-begini.. Ya itu sih, keluwesan mereka secara personal sangat membantu. Selain itu a..info-info kegiatan juga cukup lancar dikasih tahu. Meskipun terkadang suka mendadak ngasih tahunya, tapi seringkali juga dikasih tahu beberapa hari sebelumnya. Ya seperti itu sih.

P : Di sini sering ada kegiatan yang sifatnya informal begitu tidak Bang, yang benar-benar untuk menjalin keakraban antara Humas dengan wartawan?

I : Gathering itu ada. Terakhir itu sebelum puasa sama pas buka puasa itu ada gathering. Selama tahun 2011 ini sih kayaknya baru itu aja yang diadain. Yang sebelum puasa itu ke luar kota, lalu yang pas buka puasa itu di sini sekalian peresmian ruangan ini.

P : Jadi secara keseluruhan, pandangan Bang terhadap media relations yang telah dilakukan oleh Humas Kemendikbud seperti apa?

I : Kalau menurut saya sih sudah cukup baik ya, kalau kasih informasi acara itu jelas, agendanya apa jelas. Kalau dihubungi juga cukup mudah. Selain itu ada situs-situs Kementerian juga, di situ cukup lengkap juga.

P : Ada saran atau masukan dari Bang untuk peningkatan kinerja Humas, khususnya media relations di Kemendikbud?

I : A.. lebih terbuka lagi ya, karena bagaimanapun juga kita sama-sama butuh, selain itu untuk kedekatan kita-kita juga. Kegiatan informal ditambah a.. minimal setahun dua kali lah. Sebelum puasa itu ada gathering karena memang ada permintaan dari wartawan. Ke depannya mungkin harus dari sana yang bikin program, bukan kita. Jadi kalau mereka merasa butuh dekat dengan wartawan ya.. mungkin mereka aja yang ngerancang. Karena kita kan ngga enak kalau kita yang minta atau gimana gitu. Jadi baiknya kalau mau ada kegiatan informal itu dari mereka aja. Karena kalau kita kan sebenarnya ngedeketin narasumber sendiri bisa secara pribadi.

P : Di sini kan ada Fortadik ya, Bang. Itu apa sudah cukup berfungsi dengan baik? Dalam artian bisa menjembatani hubungan wartawan dengan Humas.

I : Iya tentu. Kadang misalnya suka tanya-tanya nomor narasumber yang belum dekat gitu misalnya, itu biasanya lewat teman-teman Fortadik. Sangat menjembatani jadi. Apalagi sekarang pembesar-pembesarnya ibu-ibu, jadi kan semangatnya beda gitu ya haha.. ya ngayomi banget lah. Hubungannya juga cukup dekat di sini.

P : Sudah bang, sudah cukup sepertinya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak ya Bang.

I : Sip, sama-sama.

Lampiran 11
Transkrip Wawancara 9

Narasumber : LC, Reporter

18 November 2011, 17:52 (34 menit)

Penanya (P) : Halo Mba, akhirnya ketemu juga Mbak. Jadi aku mau nanya tentang media relations di Kemendikbud nih Mbak. Tapi sebelumnya, pendapat Mbak tentang media relations di sebuah lembaga pemerintah itu sebenarnya penting atau nggak sih?

Informan (I) : Penting, itu kaitannya dengan keterbukaan informasi itu kan. Jadi media relations itu penting bagi Humas agar penyaluran informasi ke wartawan itu bisa berjalan dengan lancar, penting juga bagi wartawan untuk mendapatkan informasi seputar program atau kegiatan Kementerian itu seperti apa.

P : Media relations yang ideal bagi wartawan itu seperti apa kalau menurut Mbak?

I : Kalau menurut aku pertama yang pasti harus terbuka, itu nomor satu karena kan wartawan itu yang sangat dibutuhkan ya informasinya itu kan. Lalu juga sebagai Humas, sebisa mungkin jangan membeda-bedakan media, semua harus diperlakukan sama ya karena media relations itu kan bukan hubungan dengan satu atau dua media saja ya, tapi semua media karena ya semua media itu rekannya sebuah perusahaan atau lembaga, apalagi Kementerian kan, semua harus punya akses informasi yang sama.

P : Kalau di Kemendikbud sini, kegiatan media relations yang sering dilakukan oleh Humas ada apa saja, Mbak?

I : Ada jumpa pers, lalu di jumpa pers itu diberikan rilis. Karena mereka intensitas kegiatannya termasuk banyak ya, lumayan ramai, jadi setiap minggu suka ada sih rilis-rilis apa. Tapi kita jadi wartawan juga harus hati-hati kan ya, mereka memang kasih informasi banyak, tapi kita harus pilih-pilih juga, perlu kritis a.. ya

pokoknya kita harus tetap berpihak sama masyarakat lah ya, jadi kontrol sosial gitu.

P : Berbicara masalah informasi, akses informasi yang disediakan oleh Humas di Kemendikbud ini bagaimana, Mbak?

I : A.. kalau menurutku nih ya, ya mungkin ada yang bilang Diknas itu jelek, tapi kalau dibanding dengan Kementerian lain, dari yang jelek-jelek itu, ya Diknas inilah yang paling mending. Bener deh, masalah kelengkapan data, keterbukaan, pelayanan terhadap wartawan itu a.. lumayan deh. Kalau aku sih termasuk ngga kesulitan untuk mengakses informasi di Diknas.

P : Jadi Mbak kalau mau mencari data untuk membuat berita, sering langsung ke Humas?

I : Ngga lah, lebih sering langsung ke narasumber yang terkait, mungkin ke Pak Menteri atau Dirjen. Kalau dari internalku sendiri, dari kantorku, itu Humas itu ngga bisa a.. ada kan kalau di tempat lain itu Humas boleh bicara, Humas ada niai beritanya, nah kalau di tempatku itu ngga bisa. Humas itu ngga bisa dijadikan narasumber, jaranglah kalau Pak Ibnu bicara begitu terus aku kutip, karena kantorku meminta usahakan langsung narasumbernya, misalnya Dirjennya atau Menterinya atau apanya. Jadi mereka sebatas memfasilitasi saja sih bagaimana agar narasumber dari Dikbud bisa bertemu dengan wartawan dalam momen yang kreatif begitu, jadi bukan hanya wawancara saja.

P : Informasi yang biasa Mbak cari untuk dijadikan berita itu informasi yang seperti apa?

I : A.. jadi setiap media itu kan punya karakter, punya kepentingan masing-masing lah dan kita tuh harus hafal karakter dan kepentingan media kita itu apa.

P : Maksudnya bagaimana itu, Mbak?

I : Jadi ada media yang milik pemerintah, ada yang milik partai. Pokoknya kepentingan sebuah media itu sangat ditentukan oleh

kepemilikannya. Pemiliknya itu siapa pasti akan jelas kepentingannya itu apa. Misalnya Jurnas, dia kan korannya SBY, pemerintah punya, otomatis a.. coronglah, corongnya cenderung memberitakan yang bagus-bagus. Kadang ya juga ada pemberitaan yang buruk-buruk, tapi dominan sih yang bagus-bagus.

P : Kalau Koran Jakarta sendiri bagaimana?

I : Nah kalau koranku itu sih lebih suka ke informasi yang menyangkut semakin banyak orang itu semakin suka. Misalnya sertifikasi guru, dana BOS, ya begitu. Pertama karena pembacanya akan banyak, terus kan menyangkut kepentingan orang banyak. Jarang sih kalau memberitakan yang Diknas mendapat apa, yang seremoni-seremoni itu biasanya susah naik di koranku. Jadi aku lebih suka berita-berita yang begitu. Bukan berarti koranku selalu memberitakan yang buruk-buruk, a.. lebih ke konstruktif sih. Walaupun kita cari jeleknya tapi ya harus ada arahnya, kita harus tahu bagaimana supaya pemberitaan yang seperti itu bisa membantu pendidikan kita.

P : Lalu apa informasi yang diinginkan itu selalu dipenuhi oleh Humas?

I : Kadang-kadanglah. Kalau misalnya mereka bisa bantu ya biasanya dikasih. Kadang juga ngga terpenuhi karena mereka juga ngga bisa dapat data atau info yang aku mau.

P : Kalau dari Humasnya sendiri, informasi yang sering diberikan itu yang seperti apa?

I : Tentu ya kesuksesan-kesuksesan program mereka. Kebanyakan yang seremonial-seremonial begitu. Kadang juga informasi yang sifatnya tanggapan, maksudnya misal mereka mendengar ada pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta yang mereka miliki, nah itu mereka biasanya dalam jumpa pers memberikan informasi-informasi untuk menjelaskan persoalan sebenarnya dari berita atau isu yang berkembang di masyarakat itu. Seperti kemarin yang UNDP, Menkokesra kan bilang ranking indeks mutu hidup

Indonesia turun, nah setelah itu langsung dibuat jumpa pers, Pak Nuh menjelaskan kalau sebenarnya tidak turun, yang seperti itu.

P : Di Kemendikbud itu fasilitas yang disediakan untuk wartawan ada apa saja, Mbak?

I : Ya kalau fasilitas sih sama ya di mana-mana. Di Diknas itu lumayan sih ada ruang khusus pers, tapi yang sering kita keluhkan itu kan Diknas itu anggarannya yang paling besar begitu ya, a.. jauhlah sama departemen-departemen lain yang anggarannya kecil, itu termasuk mable ya, internetnya.

P : Mbak kalau misalnya ikut meliput kegiatan Kemendikbud, lalu beritanya terlambat naik cetak atau mungkin tidak naik cetak, itu reaksi dari Humas seperti apa?

I : Pokoknya intinya begini, karena kita kan posnya di situ ya a.. setiap apa yang kita liput pasti kita tulis, tapi masalah naik atau ngga itu beda cerita. Di redaksi itu kan banyak berita masuk, dari tempat si A, dari tempat si B. Kan yang paling banyak a.. yang pembacanya paling besar yang mana, yang menarik itu yang mana, yang paling update yang mana. Makanya kita sebagai wartawan itu berlomba-lomba di kantor bagaimana supaya berita kita itu naik. Kita harus cari angle yang bagus, narasumber yang bagus, supaya setiap berita kita itu ada nilai beritanya. Kalau ngga naik itu biasanya sih hanya ditanya saja mana beritanya, hanya sekedar begitu saja.

P : Kalau terkait dengan pemberitaan yang bernada negatif atau yang sifatnya mengkritisi begitu, reaksi dari Humas Kemendikbud sendiri seperti apa, Mbak?

I : Humas itu kan tugasnya memang mengamati media kan, itu memang tugas mereka. Pasti kalau ada berita apapun di media kita, apalagi yang sering ngepos di situ kan mereka sensitif ya, tergantung berita ini mengganggu mereka atau ngga. Tergantung juga itu media nasional atau lokal.

P : Boleh kasih ilustrasi atau contohnya nggak, Mbak?

I : Seperti misalnya Kompas. Kompas itu menulis apa saja pasti akan selalu menapat perhatian dari Kemendikbud, ya dari Humasnya ya dari unit lainnya. Hampir setiap Kompas menulis jelek pasti besoknya ada konferensi pers, itu hampir selalu. Nah kalau aku itu karena koranku bukan koran apa-apa ya haha, jadi ya jarang ada tanggapan atau dibuat konferensi pers begitu kalau ada berita-berita jelek yang kita tulis.

P : Humas Kemendikbud pernah meminta wartawan untuk tidak mempublikasikan suatu berita nggak, Mbak?

I : Kalau aku sih nggak pernah seperti itu. Teman-teman juga seperti itu nggak ya. Kita di Dikbud itu bebas saja, terbuka asal ya sesuai lah dengan kenyataan, cover both side saja sih yang penting.

P : Selama ini, hambatan apa saja yang sering ditemui Mbak dalam berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Kalau yang paling mengganggu aku sih adalah karena aku bukan dari media yang besar begitu, kadang kendalanya itu mereka suka mengundang itu pilih-pilih begitu. Padahal informasi itu kan seharusnya dibuka seluas-luasnya kepada media. Ya mungkin mereka punya berbagai alasan ya, anggaran atau apa, mungkin makan siangnya kurang atau apa, tapi please deh kalau undangan itu disebar saja ke semua wartawan, masalah nggak dapat makan siang atau apa begitu ya biar saja. Itu kan sangat disayangkan. Tapi ya kadang meskipun nggak diundang ya kita sih tetap datang kalau memang bagus beritanya. Kadang misalnya kita nggak dapat transport, ya kita datang saja sendiri. Pada prinsipnya kita itu kerja mandiri, ada atau tanpa Humas kita bisa kerja.

P : Kalau hal-hal yang mempermudah atau mendukung hubungan Mbak dan teman-teman wartawan lain dengan Humas di Kemendikbud apa, Mbak?

I : Keterbukaan mereka. Kalau dicari itu relatif mudah ditemui dan ditelepon atau disms pun pasti dijawab. Tidak hanya Humasnya ya. Nah ini satu kelebihan di Dikbud, di Dikbud itu hampir sangat

mudah untuk bertemu atau membuat janji dengan pejabatnya, ya Pak Menteri, ya Dirjen, itu semua sangat mudah ditemui. Humas itu sebisa mungkin lah membantu apa kebutuhan kita, kalau kita butuh narasumber ya oke dicarikan narasumber, atau kita kebutuhan data, ya kadang-kadang batu ya kadang-kadang ngga haha. Intinya mereka itu cukup kooperatif lah dibandingkan Kementerian lain. Kalau di tempat lain itu misalnya mau ketemu Menteri atau pejabat begitu, birokrasinya susah dan berbelit-belit. Nah kalau di Dikbud itu lumayan lebih mudah bertemunya, baik melalui atau tanpa Humas. Pejabatnya sendiri juga terbuka di sana. Intinya bersyukur lah Humas Dikbud karena punya Menteri dan pejabat-pejabat yang terbuka karena semua itu tergantung Menterinya kan.

P : Mbak pernah tersangkut masalah tidak dengan Humas di Kemendikbud?

I : Ngga lah haha. Dua tahun ini sepertinya sih biasa-biasa saja ya aku, maksudnya aku ngga pernah yang sampai kena masala yang besar secara personal gitu dengan Humas. Mungkin karena ya yang tadi itu, koranku kan koran lokal, jadi perhatian Humas ke pemberitaanku juga ngga terlalu yang bagaimana gitu haha.

P : Apakah Humas Kemendikbud sering mengadakan kegiatan yang sifatnya informal atau santai, Mbak? Yang tujuannya untuk menjalin keakraban saja begitu.

I : Ada sih tapi jarang. Kalau yang informal banget, yang sifatnya hanya senang-senang atau kekerabatan begitu jarang, mungkin setahun sekali saja ya, buka puasa atau apa begitu. Kalau yang semiformal juga setahun paling sekali, itu biasanya ke luar kota yang dekat-dekat sini. Biasanya dicampur ada acara hiburannya, ada juga seminar atau pelatihannya, begitu.

P : Jadi kalau menurut Mbak, media relations yang sudah dijalankan oleh Humas Kemendikbud selama ini bagaimana?

I : A.. kalau menurutku itu media relations dan Humas di Dikbud itu jadi lebih ke EO (event organizer), jadi hanya memberitahu ada acara ini itu mengakomodir saja kalau ada acara, misalnya mereka mengundang wartawan, ya begitu-begitu saja sih kalau sepenglihatanku. A.. secara keseluruhan ya sedang lah menurutku. Karena kita relatif mandiri ya kalau liputan, jadi ngga ada Humas juga ngga apa-apa sih sebenarnya. Dia cuma membantu hal-hal kecil saja sih, jadi ya begitu lah.

P : Mungkin ada saran atau masukan dari Mbak untuk meningkatkan kinerja Humas, khususnya media relations di Kemendikbud?

I : Mungkin mereka harus lebih menjembatani lagi ya kemauan-kemauan wartawan, masukan-masukan begitu lebih terbuka, lebih mau dikritik lah begitu dari segi layanannya saja sih. Dan Humas itu juga harus lebih punya power juga untuk ke dalamnya karena Humas itu kan juga kadang masih suka disepelekan ya sama unit lain di situ.

P : Power bagaimana maksudnya, Mbak?

I : Jadi misalnya mereka itu punya power untuk memperjuangkan kebutuhan wartawan ke pejabat, begini lho misalnya data-data yang dibutuhkan wartawan. Seperti kemarin tuh si Luki perlu data tentang jumlah apa gitu Dirjen tapi agak susah, lalu minta ke Humas pun Humasnya sulit menembus. Kadang misalnya Balitbang mereka saja itu ngga rapi. Humas itu kan harusnya menampung kritik-kritik wartawan supaya bisa disampaikan, jadi mereka juga berkembang kan, informasinya juga berkembang. Jadi lebih terbukalah sama saran, kritik dan masukan karena kita kan partner kerja ya. Sama kegiatan informalnya lebih ditambah kali ya, sepertinya kalau setahun sekali itu kok sepertinya agak kurang ya haha. Begitu saja sih, selebihnya oke.

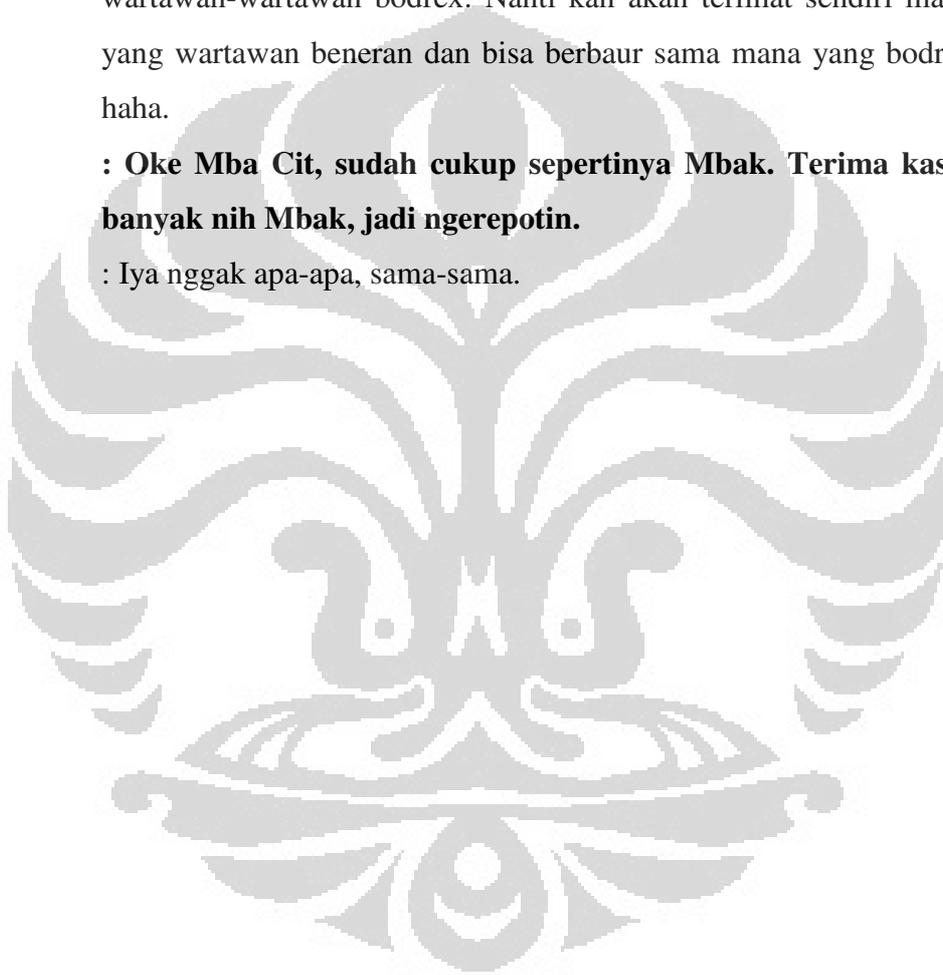
P : Terkait dengan Fortadik sebagai wadah bagi para wartawan pendidikan di sini, apakah keberadaan Fortadik telah cukup

menjembatani wartawan untuk berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Sangat membantu sekali. Biasanya itu karena ada Fortadik, karena kita bareng-bareng jadi lebih kuat sih. Kalau kita jalan sendiri cari narasumber itu akan lebih susah pasti, tapi kalau mengatasnamakan Fortadik itu biasanya lebih diperhatikan lah. Fortadik ini juga sangat membantu Humas-Humas itu untuk membantu menyaring wartawan-wartawan bodrex. Nanti kan akan terlihat sendiri mana yang wartawan beneran dan bisa berbaur sama mana yang bodrex haha.

P : Oke Mba Cit, sudah cukup sepertinya Mbak. Terima kasih banyak nih Mbak, jadi ngerepotin.

I : Iya nggak apa-apa, sama-sama.



Lampiran 12
Transkrip Wawancara 10

Narasumber : WD, Reporter Waspada
18 November 2011, 17:12 (30 menit)

Penanya (P) : Selamat sore Mbak. Mengganggu sebentar ya, Mbak. Saya ingin tanya-tanya nih Mbak masalah media relations Kemendikbud. Tapi sebelumnya mau nanya secara umum dulu tentang pentingnya media relations itu sendiri bagi wartawan itu seperti apa, Mbak?

Informan (I) : Ya penting, ya dia kan perantara antara kita sama lembaganya kan, nah kadang-kadang memang kalau kita mau menemui kliennya langsung itu dia ngga paham, jadi fungsi media relations itu kan untuk namanya media relations begitu kan, jadi penghubung antara media dengan pihak yang diwakilinya itu supaya kita data-datanya lebih teratur.

P : Jadi kalau menurut Mbak, media relations yang ideal itu yang seperti apa?

I : Jadi seharusnya itu media relations diisi dengan orang-orang yang memahami dunia jurnalistik, mengerti karakter wartawan orang per orangnya, lalu karakter pekerjaannya begitu, jadi seperti itu. Jadi yang ideal itu yang memahami pekerjaan kita. Pekerjaan wartawan itu cepat, apalagi yang harian, online, itu cepat-cepat kan. Nah media itu kan sekarang banyak, mereka harus peka, paham, sekarang media itu sudah multimedia kan, ada yang online, cetak, majalah, tabloid, nah itu masing-masing kebutuhannya beda-beda. Jadi pokoknya yang baik itu adalah yang memahami masing-masing jenis media, masing-masing kebutuhan dari media itu sendiri, di samping juga harus memahami keinginan dari lembaga yang diwakilinya itu kan.

P : Kalau menurut Mbak, media relations yang ada di Kemendikbud itu bagaimana?

I : Ya lumayan. Kita kan punya media center, bagus. Dia bagus, cukup lumayan dan cukup a.. lumayan inilah, memahami kebutuhan peliput yang hari-hari meliput di situ begitu, terutama dengan kehadiran media center, itu penting. Kita kan ngga selamanya ada di situ, kita mungkin liputan di tempat lain, kita ketinggalan kan, tapi karena kita punya mailing list yang jadi media center itu, terbantu deh.

P : Kalau dari personil Humasnya sendiri apakah mereka cukup proaktif mendekati wartawan sebelum wartawan datang mencari berita?

I : Cukup, itu buktinya media center adalah sebuah bentuk itu a.. mereka bisa terdepan, berusaha ada di depan karena media center itu ada semacam tanda kutip wartawan yang dari Humas itu, jadi setiap ada liputan itu dia selalu datang dan akan selalu mengirimkan hasil liputannya, data-data informasi, ya semacam rilis yang diterbitkan oleh mereka. Soal muat ngga muat itu urusan kita. Nanti kita tinggal konfirmasi ulang kalau kita tidak datang. Kalau datang kan itu bisa dijadikan untuk informasi tambahan,

P : Dalam mencari berita di Kemendikbud, akses informasi yang diberikan Humas ke wartawan bagaimana, Mbak?

I : Masih harus ditingkatkan sih, belum semua.. karena dia kan cakupannya luas ya, apalagi sekarang ada budaya begitu, masih perlu ditajamkan lagi sih. Jadi sepertinya karena.. memang ngga mudah sih karena informasi terlalu banyak, dan pendidikan itu dinamis begitu, jadi ya Humasnya itu memang harus ditambah lagi orang-orang yang berkualitas, terutama untuk menambah data-data terbaru terkait a.. fungsi penelitian dan pengembangan itu ya, itu sepertinya masih kurang. Tapi merekanya sendiri sih mudah ditemui ya, orang-orang Humasnya itu ngga susah kalau mau ditemui.

P : Kalau misalnya Mbak ingin mengklarifikasi berita ke Humas, apa mereka menguasai berita atau isu yang Mbak tanyakan?

I : Ya ngga selalu, kadang juga ngga dapat tapi ya kita kan memaklumi mereka ya Humas di Kementerian yang skupnya luas, jadi kita harus.. ya karena kita sudah hubungan lama, jaid kita harus saling bekerjasama lah, kita tunggu sebentar. Kalau memang deadline ya kita kan wartawan harus punya jalan lain dong, jadi ngga terbatas hanya dengan Humas. Kalau ngga dapat dari Humas ya pasti kita cari langsung ke narasumbernya.

P : Kalau ingin mencari informasi untuk berita yang dibuat, Mbak lebih sering menghubungi narasumber langsung atau melalui Humas terlebih dahulu?

I : Tentu harus langsung ke narasumber. Ke Humas itu kalau cari apa ya haha. Cari data yang ya.. sebenarnya Humas itu kalau di Dikbud kan banyak juga program, apalagi sekarang sudah satu pintu ya, jadi banyak juga kita melalui mereka kok. Dulu-dulu mungkin, tapi sekarang sudah teratur karena sistem satu pintu itu jadi Pusat Informasi dan Humasnya itu sering mengadakan jumpa pers. Hampir setiap hari itu ada jumpa pers jadi sepertinya jarang juga yang luput. Jadi kita belum kemana-kemana sudah diberikan berita yang barum sajian yang baru jadi mereka sudah lebih proaktif lah.

P : Kalau dipersentasekan, lebih banyak mencari informasi melalui PIH atau langsung ke narasumbernya, Mbak?

I : Melalui PIH.

P : Di Kemendikbud itu, kegiatan media relations yang sering dilakukan itu ada apa saja, Mbak?

I : Jumpa pers yang rutin, apa lagi ya yang kita punya. Oh iya, workshop, seminar, kadang penulisan buku. Jadi mereka yang adakan, biasa setahun sekali, kita jadi pesertanya. Liputan ke daerah juga sering.

P : Kalau rilis sering diberikan tidak, Mbak?

I : Itu yang melalui media center itu, sekarang sudah elektronik, melalui email. Kadang kasih hardcopy juga, tapi setelah itu dikasih emailnya juga. Kadang paparan slide-slide itu juga mereka kasih, ah tapi jadi menuh-menuhin saja, jangan seperti ini dong, maunya yang sudah dalam bentuk rapi begitu, dalam bentuk rilis yang rapi, jangan dalam bentuk slide proyektor dikasih semua, bikin tambah pusing.

P : Kalau kunjungan dari Kemendikbud ke kantor media Mbak pernah tidak?

I : Oh pernah, ke kantor pusatnya kan, kalau saya ya di Medan kantor pusatnya. Biasanya setiap ganti Menteri itu, mereka kunjungan. Atau kalau ada kunjungan ke daerah juga mampir.

P : Mbak sendiri tertarik dengan isu atau informasi yang seperti apa sih kalau di Kemendikbud itu?

I : Aku tertariknya itu yang menyangkut kepentingan banyak orang a.. dana BOS, beasiswa, yang menyangkut orang banyak apalagi yang menyangkut uang ya haha.

P : Itu biasanya beritanya cenderung mengkritisi program tersebut atau bagaimana, Mbak?

I : Mengkritisi jelas. Tergantung sih, tergantung segmen korannya ya. Kalau aku kan koran pembangunan ya, jadi kita beritanya konstruktif lah, tidak selalu destruktif lah. Tidak selamanya bad news is good news, tidak selamanya. Kadang-kadang kita juga harus melihat itu proporsional, apalagi misalnya dana BOS menyimpang. Boleh kita menulis seperti itu tapi dijelaskan mengapa, dilakukan oleh oknum tertentu, tidak semua, sistem keuangan dari pusat memang susah, jadi seperti itu lah. Tidak selamanya harus hit and run, tidak selalu harus yang sifatnya kriminal. Jadi kegagalan itu penting diberitakan karena itu untuk introspeksi, kalau kesuksesan terus yang diberitakan itu seperti sayur tanpa garam, hambar. Jadi kegagalan itu bagus tapi pencapaian juga penting, jadi berimbang lah.

P : Humas di Kemendikbud itu seringnya memberikan informasi yang seperti apa sih Mba ke wartawan?

I : Ya pastilah yang positif-positif. Mana ada sih berita dari Humas yang jelek-jelek. Kalau yang jelek-jelek ya pasti menunggu kita yang bertanya, semua Humas saya rasa seperti itu. Kalau ada berita jelek baru pada kebakaran jenggot. Ya itulah dinamika Humas. Secara naluri pastilah mereka ingin membela diri, ngga ada yang mau menunjukkan boroknya sendiri, jarang, apalagi Departemen, Kementerian, yah.. Begitu, tapi ya tinggal tergantung pintar-pintarnya wartawan. Kita kan biasanya cover both side.

P : Kalau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Humas Kemendikbud untuk membantu kerja peliputan wartawan itu ada apa saja, Mbak?

I : Kita punya ruang pers, ada beberapa komputer tapi perlu ditingkatkan lagi, khususnya terkait dengan hotspot, dengan bandwidthnya ya harus diperbanyak, jadi ngga maksimal. Ya meskipun komputernya ada, tapi banyak yang ngga konek internet, nah itu. Jadi masalah-maslaah kecil teknis itu juga penting karena cukup mengganggu tuh. Padahal sebenarnya sudah bagus ada ruang pers, tapi sarananya harus ditingkatkan lagi, lebih dibagusin lagi. Ini banyak yang ngga berfungsi sih. Saya bingung apalagi yang lain ya Kementerian yang uangnya lebih sedikit. Tapi Kementerian yang lain ya, Kementerian Agama itu bagus internetnya konek semua, besar-besar lagi lagi. Jadi ternyata uang banyak itu tidak berpengaruh, tidak berbanding lurus, tergantung willnya begitu. Ya terus terang kalau di Dikbud itu awalnya bagus, tapi akhir-akhir ini menurun nih fasilitasnya.

P : Mbak kalau misalnya meliput Kemendikbud kemana begitu, lalu liputannya terlambat diberitakan atau misalnya tidak diberitakan sama sekali, dari Humas apa yang biasanya dilakukan?

I : Kalau aku kebetulan selalu naik ya, jadi ngga pernah ada masalah.

P : Nah, tadi kan Mbak bilang kalau Mbak juga cukup sering menulis berita yang sifatnya mengkritisi, itu dari Humasnya ada tindakan-tindakan khusus ke Mbak tidak?

I : Sepertinya ngga ada deh. Mungkin memang yang saya tulis benar kali haha. Ya jadi mau diapain lagi. Kalau salah iya mungkin dihubungi, kalau mengkritisinya memang benar ya ngga. Tapi saya sendiri sih kebetulan belum pernah ditelepon sih ya.

P : Humas Kemendikbud pernah tidak meminta Mbak untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?

I : Sepertinya belum pernah deh, kalau ke aku sih belum pernah ya, ngga tau kalau yang lain.

P : Hambatan apa saja sih yang selama ini sering ditemui dalam berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Hambatannya? Ya paling kadang mereka suka a.. liputan itu suka, karena ini kata mereka terkait anggaran, jadi misalnya liputan ke daerah itu ngga semua dibawa. Itu saja hambatannya, padahal kan sebenarnya penting. Tapi untung ada media center itu kan, jadi mereka bisa kasih infonya untuk yang ngga ikut pergi ke luar kota. Sama fasilitas yang tadi itu lah.

P : Kalau hal-hal yang mempermudah hubungan antara Mbak dengan Humas itu apa saja, Mbak?

I : Keterbukaan mereka, karena kita sudah kenal lama ya. Tak kenal maka tak sayang haha. Biasanya kita suka diskusi sama Kepala Humasnya, ngobrol tentang program apa nih yang mau dibuat ke depannya. Kita wartawan ini kan istilahnya intelektual juga ya, jadi kita juga kan punya kreativitas, jenuh ya kalau hanya liputan-liputan sjaa, jadi kita bikin apa begitu ke depannya. Itu kan bisa terjadi kalau punya hubungan yang intensif, artinya sudah terjalin kemitraan yang baik.

P : Jadi kalau disimpulkan, pandangan Mbak terhadap media relations di Kemendikbud selama ini bagaimana?

- I : Masih banyak yang perlu ditingkatkan, ya fasilitas, SDMnya juga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- P : Mbak pernah merasa ada personil Humas yang kurang memadai pengetahuannya tentang kebutuhan wartawan, Mbak?**
- I : Oh iya ada, pasti ada. Dalam melayani wartawan kadang-kadang suka ngga paham, mungkin karena PNS baru ya, dia bingung. Apalagi kalau sudah wartawan senior ya. Jadi kurang tanggap begitu lho kalau wartawan perlu data yang cepat, akurat, seperti itu.
- P : Kalau kegiatan yang sifatnya informal ada tidak Mbak? Yang kegiatannya santai untuk keakraban saja antara wartawan dan Humas.**
- I : Seminar tadi itu ya, tapi itu semiformal ya. Kalau yang informal ada gathering-gathering gitu untuk kekerabatan, itu rutin setahun sekali lah untuk menjalin keakraban. Tapi tahun ini sepertinya belum ya, biasanya akhir tahun atau awal tahun.
- P : Mbak pernah tersangkut masalah dengan Humas Kemendikbud? Atau mungkin teman-teman yang lain?**
- I : Nggak, sampai sekarang ini belum pernah. Semua baik-baik saja, lancar lah.
- P : Adakah saran atau masukan untuk meningkatkan pelaksanaan media relations di Kemendikbud, Mbak?**
- I : Saran a.. sarannya harus lebih sabar ya melayani wartawan. Terus mereka juga harus punya a.. harus intensif menjalin hubungan dengan unit-unit terkait. Di situ kan banyak ya di Kemdikbud, ada Dirjen ini, Dirjen itu, Direktorat ini itu. Nah mereka harusnya punya bank data soal mereka, terus punya a.. punya hubungan-hubungan khusus yang kira-kira kalau misalnya kita butuh sama orang itu, mereka cepet lah bisa memfasilitasi kita. Kalau kita wartawan senior mungkin bisa langsung, tapi kalau yang baru kan biasanya lewat Humas. Nah kalau 'saya mau ketemu bapak ini' lalu 'oh susah mbak', nah kalau mereka sendiri ngga kenal sama unit

utamanya bagaimana? Akhirnya kan lari sendiri wartawannya begitu. Karena terlalu besar, terlalu luas, jadi kadang-kadang suka ngga kenal, ngga kenal unit-unit utamanya, atau susah untuk dimintai memfasilitasi.

P : Di Kemendikbud itu kan ada forum khusus wartawan yang meliput di situ ya Mbak, Fortadik. Itu apa sudah cukup menjembatani antara wartawan dengan Humas, Mbak?

I : Ya lumayan lah, jadi kita punya.. itu kan sebenarnya organisasi nonformal ya, tidak mengikat. Forum itu sebenarnya guyub saja, jadi kekuatannya hanya moral, tidak ada kekuatan mengikat. Jadi kita sama-sama satu rasa, satu profesi, ya apa salahnya sih kita guyub. Ya cukup membantu, artinya kita punya bargaining power di.. baik kepada pihak Humas, kementerian juga secara keseluruhan. Jadi kan artinya ada proses seleksi tahap awal buat wartawan yang kesehariannya mau meliput di situ. Jadi sebenarnya membantu Humas itu, ya secara tidak langsung Humas terbantu. Kan jadi ngga gampang masuk bodres, kita yang sortir.. ‘mau apa lo?’, ‘mau cari berita atau mau malak orang?’, begitu. Penting tuh sebenarnya, tapi kalau Humas masih ada yang takut dengan forum-forum sejenis, salah deh. Sebaiknya diubah paradigmanya. Wartawan itu kalau didekati, dirangkul begitu bisa kok.

P : Wah, sudah cukup sepertinya nih Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya ya, Mbak.

I : Iya, sama-sama.

Lampiran 13
Transkrip Wawancara 11

Narasumber : MZ, Redaktur dan Reporter Senior

21 November 2011, 13:34 (14 menit)

Penanya (P) : Selamat siang Mba, maaf ya Mbak mengganggu siang-siang. Saya ingin tanya-tanya Mbak seputar media relations di sini. Tapi sebelumnya ingin tanya yang mendasar dulu, ada tidaknya media relations itu penting nggak sih Mbak sebenarnya untuk wartawan?

Informan (I) : Pentinglah, penting.

P : Alasannya?

I : Alasannya karena begini, dalam konteks kita ya, dalam media relasi itu kita memerlukan Humas sebagai jembatan ketika kita membutuhkan informasi yang terkait dengan narasumber, terus data-data, kemudian yang lebih spesifik lagi itu kita ingin mempunyai kesempatan misalnya untuk ke yang tidak punya akses begitu, nah itu Humas dan media relasi itu menjadi sangat penting.

P : Oh, jadi media relations yang ideal bagi wartawan itu yang seperti apa, Mbak?

I : Tentunya yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan wartawan akan informasi ya. Yang terbuka dalam memberikan informasi, tidak membedakan. Lalu a.. yang mengerti wartawan, dalam artian mengerti bahwa wartawan itu perlu informasi yang aktual dan punya nilai berita, dan harus cepat dalam menyediakan informasi itu agar keaktualannya terjaga.

P : Di Kemendikbud ini, kegiatan media relations yang sering dilakukan itu apa saja, Mbak?

I : A.. jumpa pers tentunya a.. rilis itu diberikan tapi tidak selalu. Bisa dibidang di luar jumpa pers itu mereka tidak menyediakan rilis ya, padahal sebenarnya rilis itu kalau menurut saya harus rutin

dikirim setiap minggu meskipun tidak ada acara atau jumpa pers di sini karena kita kan setiap saat a.. setiap saat kan kita harus punya ibaratnya a.. membuat berita. Nah ketika di sini ngga ada acara, seharusnya Humas itu idealnya berkreasi menciptakan terus siaran pers dari data-data yang mereka miliki, minimal sekali lah dalam seminggu di luar acara. Selain itu beberapa kali juga saya diundang untuk liputan ke daerah.

P : Kalau kunjungan Humas ke kantor Antara pernah tidak, Mbak?

I : Kalau kunjungan ke kantor saya malah belum pernah.

P : Kalau menurut penilaian Mbak, akses informasi yang selama ini disediakan oleh Humas Kemendikbud bagaimana?

I : Akses informasi menurut saya cenderung terbatas ya kalau dari Humas, lebih banyak dari Menteri atau pejabat eselon. Itupun inisiatif sendiri kita mencari mereka, misalnya doorstop Menteri atau dari acara doorstop lagi. Bisa dibilang Humas itu tidak menyediakan berita di luar acara.

P : Contohnya seperti apa tuh, Mbak?

I : Misalnya ada acara tentang sosialisasi UN, sementara saat itu ada isu menarik tentang sekolah rusak. Nah seharusnya itu Humas harus tanggap ya menurut saya. Akhirnya kita seringkali, karena berita UN sudah biasa, yang di-blow up itu justru yang sekolah rusak.

P : Kalau misalnya ingin cari informasi untuk buat berita, Mbak sering mencari informasinya ke Humas nggak?

I : Jadi kalau saya bisa akses langsung ke narasumber yang terkait dengan pemberitaan saya, saya akses langsung. Tapi kalau saya mengalami kesulitan, misalnya saya tidak tahu siapa narasumber yang tepat untuk memberikan informasi ini, maka saya minta tolong Humas, bertanya ke Humas. Tapi bisa dibilang jarang sih saya ke Humas karena tanpa kesanapun, misalnya saya a.. tetapi kita harus akui juga kalau PIH pun cukup membantu, misalnya

untuk a.. mencari foto, saya perlu foto, atau minta press release, seperti itu saja.

P : Kalau Mbak biasanya tertarik dengan informasi atau berita-berita yang seperti apa di Kemendikbud ini?

I : A.. berimbang lah ya, proporsional. Artinya begini, ketika ada isu yang menarik tentang misalnya pendidikan dasar, kita ingin a.. misalnya isu ini sudah bergulir, kita ingin mereka transparan saja sebenarnya, informasi yang baik atau buruk baiknya sih mereka berikan. Kalaupun ada yang buruk, mereka bisa siapkan semacam counter, apa sih sebenarnya yang terjadi. Kalau sekolah rusak di daerah misalnya, itu sebenarnya bukan kewenangan Diknas, tapi kewenangan pemerintah daerah, tetapi kami sebagai pusat begini begini. Jadi seperti itu misalnya. Kita sebagai wartawan juga harus berimbang ya, walaupun itu sebenarnya berita buruk tapi bisa menjadi proporsional, menjadi berimbang. Jadi kalau saya pribadi tertarik dengan berita atau isu yang sedang bergulir di masyarakat, tapi tidak melulu yang negatif karena yang negatif itu bisa kita imbangin dengan yang positif.

P : Lalu apakah data atau informasi yang dibutuhkan tersebut dapat dipenuhi oleh Humas?

I : Kalau menurut saya Humas yang di atas justru kurang. Yang lebih banyak menyediakan data dengan lengkap itu justru gerai informasi yang di depan itu. Artinya begini, kalau misalnya kita tidak berhasil mendapatkan data dari narasumber itu, biasanya kita bisa mendapatkan data-data dari gerai informasi karena di sana itu menyediakan apa namanya a.. informasi-informasi dalam bentuk buku, buku-buku yang terbaru misalnya buku tentang pendidikan dasar, itu mereka punya updating-nya saya lihat. Dulu mereka itu punya monev, monitoring dan evaluasi, dalam setahun ini ada isu apa yang berkembang atau menonjol, misalnya UN pendidikan dasar, pembangunan sekolah rusak, nah itu mereka biasanya buat data-datanya tentang itu.

P : Oh lebih banyak dari gerai ya Mbak. Kalau dari PIH-nya sendiri bagaimana?

I : Kalau PIH itu bisa dikatakan malah kurang membantu, mereka itu kurang punya pengarsipan yang baik.

P : Humas di sini sendiri itu lebih sering memberikan informasi yang seperti apa, Mbak?

I : Ya cenderung pasti mereka memberikan informasi tentang keberhasilan-keberhasilan mereka, walaupun itu gagal pasti mereka akan mencoba a.. bahkan ada saya lihat, suatu saat itu mereka itu menghindar. Itu ngga bagus ya.

P : Oh seperti itu ya Mbak. Contohnya seperti apa memangnya?

I : Jadi misalnya waktu itu ada isu soal ujian nasional. Kita ingin itu segera supaya ada statement, itu benar ngga sih ada kebocoran di sini, nah itu mereka suka terlambat dalam mengomentari. Akhirnya lempar-lemparan tanggung jawab siapa yang harus menjelaskan begitu. Tetapi belakangan ini, dengan adanya Pak Nuh, eranya Pak Nuh ini lebih terbuka. Kalau jelek mereka katakan jelek tapi mereka minta agar kita juga fair, jadi jeleknya di mana, bagusya di mana. Kalau Humas sendiri saya bilang ngga terlalu berkembang dalam soal counter atau apa, yang berkembang justru Menterinya.

P : Maksudnya bagaimana itu, Mbak?

I : Menteri dan pejabat eselon itu justru lebih terbuka begitu. Kalau Humas itu cenderung stagnan, ngga terlalu banyak berubah dari yang dahulu, cenderung pasif lah. Misalnya counter, kalau ngga datang dari kita misalnya tolong dong adakan jumpa pers atau apa begitu, itu mereka ngga langsung inisiatif mengadakan begitu, kecuali kalau diminta Pak Menteri. Oh saya mau cerita begini, permintaan itu cenderung lebih banyak datang dari Menteri, bukan dari Humas. Itu karena birokrasi kali ya. Jadi biasa bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Yang terjadi selama ini itu ketika Humas mengadakan jumpa pers atau sejenisnya itu, yang

saya lihat itu peran Humas itu bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah.

P : Kalau fasilitas-fasilitas yang disediakan Humas untuk mendukung tugas wartawan dalam meliput di Kemendikbud itu ada apa saja, Mbak?

I : Ruangan ini ya, fasilitas apa lagi ya a.. ya ruangan inilah.

P : Apa ruangan ini sudah cukup optimal dalam mendukung pekerjaan wartawan, Mbak?

I : Belum lah ya, ya internetnya saja masih mati hidup mati hidup, agak susah ya. Tapi kalau untuk ruangan sih sudah agak cukup ya karena tidak di semua kementerian disediakan ruangan seperti ini. Ini ruangan dulu kita yang minta karena sebelumnya kita gabung dengan gerai informasi di depan, mereka terganggu ya, cara kerjanya beda, cara komunikasinya beda, lain dunia begitu ya haha, jadi akhirnya disediakan ruangan ini setelah kita minta.

P : Mbak pernah tidak melakukan peliputan terhadap kegiatan Kemendikbud, tapi beritanya tidak naik cetak?

I : Kalau saya cenderung selalu naik ya karena memang di tempat saya tidak ada pembatasan masalah berita-berita seperti itu, kecuali kalau misalnya dalam satu hari ada lebih dari satu berita itu biasanya prioritas yang mana.

P : Kalau misalnya ada berita yang telat naik cetak bagaimana, Mbak?

I : Mereka suka bertanya ya, mereka suka minta mana copy beritanya yang jumpa pers hari ini, seperti itu. Tapi hanya sebatas itu kok, mereka tidak memaksa ya karena saya pikir memang kita ngga ada kewajiban untuk memuat semua pemberitaan seputar mereka.

P : Sekarang terkait dengan berita yang negatif atau sifatnya mengkritisi, itu ada tidak Mbak reaksi atau tindakan khusus dari Humas terhadap wartawan yang menulis pemberitaan seperti itu?

I : Ya kalau secara formalnya biasanya mereka suka melakukan pendekatan misalnya bertanya kenapa menulis seperti itu. Tapi tergantung tingkat kedekatannya juga ya. Biasanya mereka lobi dengan beberapa teman itu, kebetulan kalau saya belum pernah ya, mereka itu melobi untuk mempertemukan kembali teman-teman wartawan dengan narasumber untuk memberikan klarifikasi atau sejenisnya. Tapi itu perlakuan khusus ke satu dua orang saja, itu pun kalau pemberitaannya sudah jauh dari apa yang mereka harapkan ya.

P : Apa Humas Kemendikbud pernah meminta wartawan untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu, Mbak?

I : Ngga, ngga ada. Mereka semua di sini terbuka ya, semua mulai dari tingkat atas samapai Humas dan yang lainnya itu ya cukup terbuka lah dalam artian tidak pernah melarang wartawan untuk menulis berita apapun.

P : Selama ini ada hambatan apa saja Mbak yang sering ditemui dalam berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Nah itu, kalau saya lihat sepertinya itu masih ada perbedaan persepsi antara pihak Humas, mulai dari pimpinan sampai staf, dengan wartawan. Wartawan butuh berita cepat, wartawan tidak ingin birokrasi, wartawan ingin segera dilayani. Nah di satu sisi mereka masih bersikap seperti birokrat, harus pakai prosedur lah, mereka tidak menguasai materi jadinya lama kalau minta data ke mereka karena mereka harus tanya dulu kan ke pihak yang bersangkutan. Mereka juga merasa tidak berkepentingan terhadap apa yang kita minta, misalnya saya butuh data banget tentang sekolah rusak, nah ngga ada yang secara khusus menguasai. Harusnya itu di Humas dibagi berapa orang untuk updating data atau mengumpulkan data-data segala macem, nah ngga ada yang spesifik ditunjuk untuk melakukan hal itu. Jadi ngga ada yang ditunjuk misalnya dua orang untuk mengeliping data, jadi misalnya

kalau kita butuh, dia tinggal buka arsipnya lalu bisa bantu kita, nah itu ngga ada.

P : Apakah kondisi tersebut sebenarnya imbas dari jumlah SDM yang sangat terbatas di Humas saat ini, Mbak?

I : Kalau menurut saya sebenarnya dengan SDM yang ada seharusnya tetap bisa. Saya lihat itu namanya Humas tapi belum menjalankan tugas-tugas sebagai seorang Humas, misalnya dia jemput bola atau minimal selalu membuka tangan mereka untuk membantu kita, jadi apapun kita minta itu mereka harus siap. Paling tidak nomor satu itu oke kalian butuh data apa, kita siap bantu, yang seperti itu yang kita mau. Kalau di swasta kan seperti itu. Di sini itu Humas masih sebatas sebagai pengingat agenda saja, kegiatan menyelenggarakan jumpa pers, sudah sebatas itu saja.

P : Kalau tadi hal-hal yang menghambat, sekarang hal-hal yang mempermudah hubungan wartawan dengan Humas di sini itu apa, Mbak?

I : Nomor satu karena keterbukaan Menteri ya. Mau tidak mau karena Menteri terbuka, maka Humas juga akan dituntut untuk terbuka. Kadang Menteri kan suka tanya mana Humas atau apa begitu, jadi Humas pun didorong untuk lebih siap. Jadi Humas yang tadinya tidak mau peduli akhirnya jadi peduli karena Menterinya dan beberapa pejabat lainnya terbuka.

P : Mbak pernah tersangkut masalah dengan Humas di sini tidak?

I : Belum pernah ya kebetulan selama ini.

P : Humas di Kemendikbud ini sering tidak Mbak mengadakan acara atau kegiatan yang sifatnya informal untuk mengakrabkan diri dengan wartawan?

I : Banyak.. kalau teman-teman laki-laki sering main futsal bareng. Kadang kita juga masih suka main hanya sekedar untuk kumpul-kumpul saja.

P : Kalau kegiatan informal yang mengikutsertakan semua wartawan di sini, seperti misalnya gathering begitu, ada tidak, Mbak?

I : Kalau gathering itu sepertinya jarang ya, biasanya itu sudah ada acara resminya lalu baru hari keduanya acara santai. Itu rutin dilakukan setiap tahun meskipun frekuensinya sangat sedikit tapi ada.

P : Jadi menurut Mbak, media relations yang sudah dilakukan oleh Humas Kemendikbud selama ini bagaimana?

I : A.. belum bagus ya, belum maksimal. Jadi a.. banyak hal yang mereka belum pahami apa yang menjadi kebutuhan wartawan, misalnya kita setiap saat harus membuat berita, tapi kita harus mencari sendiri. Memang betul itu tugas kita, tapi ada baiknya a.. kan saya meliput di tempat lain juga, kalau di tempat lain itu Humasnya sudah proaktif mendekati wartawan, mereka itu bisa memahami apa yang wartawan butuhkan, wartawan itu dianggap istimewa lho karena wartawan itu bisa jadi corong. Mereka nggak perlu pasang iklan tapi mereka sudah diberitakan. Bahkan berita yang kecil-kecil pun bisa jadi naik cetak lho, itu karena apa? Karena kedekatan, karena kemampuan Humas yang sangat baik untuk mendekati wartawan. Di sini itu cenderung birokrat.

P : Ada pendapat yang lain lagi, Mbak?

I : Di sini itu Humasnya cenderung belum memahami kalau semua media itu sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau di sini itu membeda-bedakan, membeda-bedakan dalam arti mungkin anggaran atau karena permintaan Pak Menteri. Tapi seharusnya sebagai Humas, mereka itu bisa meyakinkan Pak Menteri bahwa semua media itu sama penting, mau mingguan, mau harian, mau daerah, mau nasional, itu penting. Kalau mereka dari Humasnya saja mampu meyakinkan Menteri atau pejabat bahwa semua media penting, saya yakin bahwa a.. informasi dari Mendiknas ini akan lebih maksimal, pemberitaan tentang Mendiknas akan maksimal.

P : Perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh Humas itu seperti apa, Mbak?

I : Perbedaan itu misalnya saat undangan-undangan ke daerah begitu. Mereka belum melihat bahwa masing-masing media itu punya peranan yang besar. Pandangan mereka itu kalau menurut saya masih berfokus ke media besar, padahal itu salah. Media kecil tapi kalau dia media daerah, contoh media daerah kalau dia berada di daerahnya itu menjadi leading, nah itu penting kan untuk dipahami Humas. Misalnya lagi media online, media online selalu dianggap sebelah mata, bukan karena saya kantor berita online ya karena kita memasok berita ke semua, tapi media-media online lainnya yang tidak kalah penting. Harusnya Humas itu memahami bahwa sekarang itu sudah bukan hanya media cetak, mereka harusnya sadar dan bisa mengimbangi juga dengan media lain karena semua media penting. Mereka masih melihat bahwa media nasional cetak itu penting, yang ada bukti korannya. Mereka masih seperti itu.

P : Kalau begitu, adakah saran atau masukan untuk meningkatkan kinerja Humas, khususnya media relations di Kemendikbud ini, Mbak?

I : Nomor satu, Humas itu harus menguasai kebutuhan wartawan. Yang kedua itu mereka harus memahami kategori-kategori media itu ada apa saja, ada mingguan, harian, online, kemudian mereka menerapkan azas semua media sama pentingnya. Itu dasar seorang Humas itu harusnya seperti itu. Saya masih lihat ada perbedaan-perbedaan untuk beberapa wartawan yang medianya ngga jelas begitu, masih ditolak. Sebenarnya seharusnya siapapun tetap diberikan informasi yang sama, nanti dengan berjalannya waktu kan akan terlihat sendiri, akan tersingkirkan sendiri kalau motivasi wartawan-wartawan tertentu itu lain. Jadi harus tahu kategori-kategori media, selain itu harus tahu persis informasi-informasi yang dibutuhkan media, seharusnya memang itu yang dilakukan

Humas. Ketiga, mereka harus punya hubungan yang bagus dengan media-media yang ada. Jadi ketika mereka mengalami pemberitaan yang jelek, mereka tidak kebakaran jenggot, ketakutan menghadapi wartawan dan lainnya.

P : Terkait dengan Fortadik sebagai wadah bagi para wartawan pendidikan di sini, apakah keberadaan Fortadik telah cukup menjembatani wartawan untuk berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Iya, saya lihat banyak manfaatnya. Misalnya a.. ada suatu hal atau ide yang kita pikirkan, ada isu yang ingin kita bahas, nah itu saya nggak perlu langsung ketemu Humas. Itu bisa melalui Fortadik ini untuk ayo dong disusun pertemuan dengan si ini. Selain itu forum ini juga saya lihat memudahkan Humas untuk menyampaikan informasi, menseleksi kegiatan-kegiatan mana yang layak untuk diberitakan, itu bisa sharing di sini. Kita juga masukkan ide-ide di situ. Jadi seperti itu.

P : Iya sudah selesai Mbak tanya-tanyanya, terima kasih banyak ya Mbak atas waktunya.

I : Iya, sama-sama.

Lampiran 14
Transkrip Wawancara 12

Narasumber : AI, Reporter

18 November 2011, 19:13 (32 menit)

Penanya (P) : Selamat malam Mas. Saya ingin ngobrol sedikit tentang pelaksanaan media relations di Kemendikbud nih Mas. Sebelumnya ingin tahu apakah media relations itu penting bagi wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya?

Informan (I) : Penting tapi hanya sebatas a.. untuk membantu mengawal kebijakan yang dibuat oleh Kementerian.

P : Maksudnya bagaimana tuh, Mas?

I : Jadi maksudnya begini, mereka itu menjaga hubungan baik dengan wartawan itu kan pasti karena ingin berita-berita positif tentang mereka itu dipublikasikan. Tapi kalau buat saya sih ngga begitu. Jadi memang saya hubungan dengan pihak Humas itu hanya sebatas saya ingin tahu apa program atau kebijakan yang sedang dijalankan dan saya, atau kita ingin mengawal itu. Jadi memang penting tapi hanya sebatas itu.

P : Oh begitu. Sebenarnya, media relations yang ideal di mata wartawan itu yang seperti apa sih, Mas?

I : Kalau menurut saya sih ngga ada yang ideal ya karena media relations di semua lembaga itu orientasinya pasti ingin yang positif-positif, sedangkan kan yang dibutuhkan kita ngga selalu yang seperti itu. Misalnya kebijakan, ketika ada kebijakan yang dirasa kurang tepat, mereka seharusnya mau terbuka untuk a.. jadi begini lho, kadang kita agak susah menembus mereka begitu lho, misalnya kita ingin dapat data yang akurat itu kadang kita susah, terutama ketika pemberitaan itu kurang menguntungkan bagi mereka gitu.

P : Jadi sebenarnya akses informasi yang disediakan oleh Humas Kemendikbud sendiri itu bagaimana mas?

I : Kalau untuk informasi yang bernada positif sih mereka cukup terbuka ya, dalam artian kalau kita minta ya kadang dicarikan, kadang ya harus cari sendiri, tapi terbuka begitu lho. Tapi kalau terkait berita yang kurang menguntungkan bagi mereka atau cenderung mengancam, hampir kebanyakan mereka susah ditembus untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan itu.

P : Mas tertarik ya menulis berita yang sifatnya mengkritisi kebijakan atau program pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud?

I : Oh kalau yang diinginkan tentu yang baik-baik dong, prestasi seperti itu, juara lomba a.. bukan pengen saja, sangat pengen malah bisa menulis berita yang positif-positif, keberhasilan Dikbud dan lainnya. Tapi kan seringnya, bukan seringnya sih, kadang beberapa kali dalam satu atau dua minggu itu beritanya ngga enak terus. Sebenarnya berat juga menulis beritanya dan pembaca beritanya sedikit. Di tempat saya, pembaca cenderung suka berita yang menyenangkan, prestasi, karya, cenderung.

P : Kalau dari kantor sendiri, ada pembatasan tidak Mas kalau pemberitaan itu harus positif atau harus negatif?

I : Kalau dari kantor saya ngga ada. Kami sih pasti berharapnya bisa memberikan pemberitaan yang sifatnya prestasi atau kesuksesan Dikbud ya, tapi ya bagaimana dong, memang terkadang adanya pemberitaan yang nadanya negatif.

P : Kalau Mas ingin membuat suatu berita tentang Kemendikbud, siapa yang pertama kali ditemui untuk dimintai data atau informasi itu Humasnya?

I : Dulu waktu pertama meliput di sini, yang kita gedor-gedor pertama kali Humas. Tapi ya mereka begitu, udahlah jangan terlalu begini, udahlah jangan terlalu begitu, jadi akhirnya lebih suka langsung cari ke personal narasumbernya saja.

P : Jadi Humas seperti membatasi begitu ya, Mas?

I : Ya biasanya kalau yang mau ditulis itu dirasa akan mengancam, mereka sering bilang jangan terlalu beginilah, jangan terlalu begitulah, ya seperti itulah pokoknya.

P : Humas di Kemendikbud itu seringnya memberikan informasi yang seperti apa sih Mas ke wartawan?

I : Biasanya begini, kalau info-info kesuksesan itu pasti mereka berikan, itu pasti. Tapi ketika kita dapat suatu berita atau info yang bukan dari mereka, yang mungkin dirasa kurang menguntungkan, itu biasanya mereka akan meng-counter. Contoh ya, mereka klaim kalau pembangunan pendidikan itu sukses, sementara kita menemukan daerah yang tidak sejalan dengan pernyataan itu. Lalu kemudian mereka akan membeberkan fakta-fakta lain. Tapi intinya mereka akan selalu memulai memberikan ya yang positif. Kalau yang sifatnya kekurangan atau kegagalan begitu harus mulai dari kitanya.

P : Kalau kegiatan media relations yang sering dilakukan oleh Humas Kemendikbud itu ada apa saja, Mas?

I : Yang paling sering itu jumpa pers, terus a.. liputan kegiatan itu juga lumayan ya. Rilis juga suka dikasih tuh biasanya kalau ada jumpa pers atau event besar yang lain.

P : Kalau media visit dari pihak Humas ke kantor Kompas Online pernah mas?

I : Waduh, saya kurang tahu ya. Tapi selama saya di situ sepertinya belum ya..

P : Kalau kegiatan yang sifatnya informal ada tidak Mas? Yang kegiatannya santai untuk keakraban saja antara wartawan dan Humas.

I : A.. aku kan baru satu tahun ya di sini, jarang sih ya. Tahun ini itu yang aku tahu itu buka puasa kemarin, yang sekalian peresmian pindahan wartawan ke ruang pers. Itu saja yang kutahu, jarang soalnya.

P : Selama satu tahun meliput di Kemendikbud, fasilitas-fasilitas apa yang disediakan oleh Humas untuk membantu kerja peliputan Mas di kemendikbud?

I : Ya ruangan wartawan yang ada di bawah itu. Tapi itu masih kurang sih sebenarnya. Pertama internetnya itu masih sering ngga bisa dipakai, ngga ada telepon, ya pokoknya fasilitas-fasilitas yang mendukung kerja kita lah. Harusnya telepon itu ada lho, tapi sekarang ngga ada.

P : Mas kalau misalnya meliput Kemendikbud di mana begitu ya, terus liputannya terlambat diberitakan atau misalnya tidak diberitakan sama sekali, dari Humas apa yang biasanya dilakukan?

I : Ya.. paling sih ditanya saja mana beritanya, kenapa ngga naik. Tapi sebatas itu saja karena kan mereka juga ngga punya hak untuk menentukan mana berita yang naik atau ngga di kantorku. Kalau memang ngga naik, mereka mau apa? Haha.

P : Kalau liputan seperti itu, biasanya Humas menyediakan uang transport tidak Mas untuk wartawan?

I : Biasanya kalau yang ke luar kota, itu ya disediakan akomodasi, transport, gitu-gitu. Tapi kalau liputan di sini, misalnya jumpa pers gitu sih ngga. Kita juga wartawan sebenarnya kan ngga bergantung sama uang transport atau apapun itu ya. Intinya sih mandiri saja.

P : Lalu kalau diberikan uang seperti itu, Mas jadi terikat untuk harus memberikan pemberitaan yang positif ngga seputar Kemendikbud?

I : Kalau aku sih prinsipnya berimbang saja ya, apa yang baik ya diberitakan baik, apa yang buruk yang diberitakan buruk. Aku sering juga kok menulis pemberitaan yang mengkritisi atau negatif begitu.

P : Lalu kalau reaksi Humas terhadap pemberitaan yang negatif atau cenderung mengkritisi kebijakan pemerintah itu seperti apa, Mas?

I : Nah itu tergantung. Media itu kan ada media lokal, media nasional, ya ada pembagian-pembagian seperti itu, kalau kasta kan kesannya kasar banget ya, jadi ya itu ada yang media daerah, nasional, begitu kan. Nah reaksi Humas itu ya tergantung itu juga. Semakin medianya besar maka reaksinya juga akan semakin besar, misalnya koran daerah itu kan mungkin karena lingkungnya kecil jadi ya tidak sebesar kalau media nasional. Kalau media daerah misalnya koran Jogja atau koran Semarang, kalau mereka menulis berita yang buruk, mungkin dicubitnya ngga sedicubit kalau media besar begitu. Kalau saya pribadi sih pernah dihubungi oleh Humas, ya tapi santai sih, kita sama-sama saling mengerti saja.

P : Humas Kemendikbud pernah tidak meminta Mas untuk tidak mempublikasikan berita-berita tertentu?

I : Oh pernah haha. Bukan dilarang sih, lebih seperti dibercandain, disindir begitu, dibilang 'udahlah ngga usah terlalu bagaimana beritanya'. Waktu itu beritanya tentang a.. bagaimana ya bilangya a.. tentang tata kelola keuangan, tata kelola keuangan saja lah bahasa halusya haha.

P : Lalu setelah beritanya benar-benar naik cetak, reaksi Humas bagaimana, Mas?

I : Setelah beritanya naik sih mereka ngga ada tanggapan khusus ya, tapi mereka jadi lebih perhatian saja.

P : Mas pernah tersangkut masalah dengan Humas Kemendikbud?

I : Masalah yang besar sekali begitu sih ngga pernah ya, paling ya hanya suka ditanya-tanya saja kalau ada berita yang agak mengkritisi atau yang nadanya negatif begitu haha.

P : Hambatan apa saja sih yang selama ini sering ditemui dalam berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : A.. apa ya. Paling sih informasi saja kali ya. Kadang ada info atau data-data yang masih sulit sekali didapat. Seharusnya kan bisa lebih mudah lah ya kalau wartawan mau minta data karena toh

pemberitaannya juga untuk masyarakat umum supaya tahu. Itu saja sih yang saya lihat, sama ya tadi fasilitas di dalam ruang pers itu, ada beberapa peralatan yang rusak dan masih kurang lengkap.

P : Kalau hal-hal yang mempermudah atau mendukung terbentuknya hubungan yang baik antara Mas dengan Humas itu apa saja, Mas?

I : A.. mereka kalau ditanya untuk klarifikasi sih cukup menguasai ya, walaupun hanya kulit-kulitnya sih, tapi ya lumayan lah. Mereka dihubungi juga ngga pernah sulit, ngga pernah karena mereka tahu kalau mereka itu ngga akan pernah bisa memuaskan dahaga kita begitu haha. Saya dulu pernah telepon jam 11 malam, itu semuanya menjawab, termasuk Pak Ibnu, dan jawabannya semua sama, seragam. Mungkin memang sudah diseragamkan atau bagaimana juga saya ngga tahu.

P : Jadi pandangan Mas terhadap media relations yang ada di Kemendikbud bagaimana, Mas?

I : Seperti yang sudah kubilang tadi, kalau dibandingkan dengan kementerian lain, Diknas itu termasuk lebih baik, yang paling enaklah. Tapi terlepas dari itu, ya masih banyaklah yang perlu diperbaiki sana-sini, ada yang kita masih ngga puas.

P : Perbaikan seperti apa Mas yang perlu dilakukan Humas untuk meningkatkan kinerjanya, terutama kinerja media relations di Kemendikbud?

I : Ya informasi itu saja sih itu yang penting, jangan pelit informasi, baik itu informasi yang menguntungkan maupun yang mereka nilai kurang menguntungkan. Jangan hanya yang manis-manis saja, jadi terbuka dalam kondisi apapun lah. Ya begitu saja lah haha.

P : Terkait dengan Fortadik sebagai wadah bagi para wartawan pendidikan di sini, apakah keberadaan Fortadik telah cukup menjembatani wartawan untuk berhubungan dengan Humas Kemendikbud?

I : Membantu, sangat membantu. Buat wartawan, forum ini membantu untuk kalau mau mencari data-data atau info ke Humas atau pihak lain di sini. Karena ini kumpulan banyak wartawan ya, jadi terlihat lebih kuat dan biasanya beberapa narasumber lebih bersedia untuk diwawancara. Selain itu juga sesama anggota bisa berbagi informasi kalau misalnya ada yang nggak sempat ikut acara Dikbud begitu misalnya. Untuk Humas pun membantu nih Fortadik untuk menyaring wartawan-wartawan yang meliput di Dikbud. Karena dari Fortadik ini nanti akan kelihatan mana wartawan yang memang benar dan mana yang jadi-jadian haha. Biasanya kalau yang wartawan bohong-bohongan itu nggak bisa bertahan lama di Fortadik.

P : **Oke deh kalau begitu mas, sudah cukup sepertinya infonya. Terima kasih banyak lho mas sudah mau diganggu.**

I : Iya, santai saja.

Lampiran 16

Daftar Kegiatan Jumpa Pers Sub Bidang Kemitraan Media Tahun 2011

No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
1	- 10 Januari 2011 - GIM Kemdiknas	Klarifikasi Temuan BPK Perihal Sekolah di Kinabalu	1. Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media (Sukemi), 2. Sesditjen Dikdas (Bambang Indriyanto)
2	- 12 Januari 2011 - Ruang Sidang Mendiknas	Louncing SNMPTN Tahun 2011	1.Mendiknas, 2.Dirut Bank Mandiri, 3.Dirut PT. Telekomunikasi.
3	- 21 Januari 2011 - GIM Kemdiknas	Tindak Lanjut dan Progres Temuan BPK di Kemdiknas	1. Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media (Sukemi), 2. Wks. Inspektur Jenderal Kemdiknas (Wukir Ragil).
4	- 25 Januari 2011 - GIM Kemdiknas	Penjelasan Kemdiknas tentang Buku SBY yang Beredar di Kabupaten Tegal,	1. Dirjen Dikdas (Suyanto), 2. Kapuskurbuk (Diah Harianty) 3. Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media (Sukemi)
5	- 28 Januari 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan tentang Peredaran Buku SBY di Tegal, Prop. Jateng	1. Wamendiknas (Fasli Jalal), 2. Dir. PSMP (Didik Suhardi), 3. Kapuskurbuk (Diah Harianty), 4. Plt. Kadisdikpora Kab. Tegal (Edi Pramono).
6	- 29 Januari 2011	Perubahan Persyaratan	1.Ketua SNMPTN

(Lanjutan 2)

	- Ruang Hotel Century Atlet Jakarta	Peserta SNMPTN 2011 Jalur Undangan	2011 (Prof.Dr.Ir.H.Herry Suhardiyanto, M.Sc.), 2. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Prof.Dr.Ir.H. Musliar Kasim,M.S), 3. Moderator Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan (Drs. Setiono,M.Si)
7	- 4 Februari 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Klarifikasi Kelayakan Buku SBY	1. Mendiknas (M. NUH), 2. Ketua Panitia Penilai Buku Pengayaan/Non Teks (Bana Kartasasmita)
8	- 17 Februari 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Kerjasama Ristek Indonesia dengan Austria	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Menteri Ristek Austria (Betrix Karl).
9	- 23 Februari 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan tentang Susu yang Tercemar Berbakteri Enterobacter Sakazakii dari sisi Akademis	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Rektor IPB (Herry S.)
10	- 11 Maret 2011 - GIM Kemdiknas	Rembuknas Pendidikan Tahun 2011, tentang Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Misi 5K Kemdiknas	1. Sesjen Kemdiknas (Dodi Nandika) 2. Plt. Kepala PIH (Ibnu Hamad)
11	- 16 Maret 2011 - Ruang VIP Gedung Pancasila Pusbangtendik	Pembukaan Rembuknas Pendidikan 2011, tentang Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Misi 5K Kemdiknas	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Wamendiknas (Fasli Jalal).
12	- 17 Maret 2011 - Ruang VIP Gedung Pancasila Pusbangtendik	Rembuknas, tentang Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	1. Plt. Dirjen Dikdas (Suyanto), 2. Kadisdik Prop. Jambi (Idham Khalid)

(Lanjutan 3)

			3. Kadisidik Kab. Banyumas (Sanntosa Edy Prabowo)
13	- 18 Maret 2011 - Ruang VIP Gedung Garuda Pusbangtendik	Penutupan Rembuknas, tentang Hasil-Hasil Rembuknas Pendidikan Tahun 2011.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Pejabat Eselon 1 Kemdiknas
14	- 23 Maret 2011 - Ruang DSS Gedung A Lantai 2 Kemdiknas	Penjelasan atas Laporan ICW ke Ombudsman tentang Dana BOS	Mendiknas (Mohammad Nuh), Dirjen Dikdas (Suyanto), Kepala Puspen Kemdagri (Denny Moenek), Dir.Pemb.SMP (Didik Suhardi) Dir. Pemb. SD (Ibrahim B.).
15	- 29 Maret 2011 - GIM Kemdiknas	Penjelasan Kemdiknas tentang Permendiknas Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso), 2. (Dir. Kelembagaan Achamd Jazidie), 3. Staf Khusus Mendiknas Bid. Kom. Media (Sukemi).
16	- 9 April 2011 - Percetakan Balai Pustaka, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	Sidak Persiapan Naskah UN SMA, MA, dan SMK Tahun Pelajaran 2010-2011	Mendiknas (Mohammad NUH)
17	- 13 April 2011 - GIM Kemdiknas	Persiapan UN Tahun Pelajaran 2010-2011	1. Kabalitbang (Mansyur Ramly), 2. Ketua BSNP (Aman Wirakarta Kusuma), 3. Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi

(Lanjutan 4)

			& Media (Sukemi).
18	- 15 April 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pelaksanaan UN SMA, SMK, dan MA Tahun Pelajaran 2010-2011.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Kabalitbang (Mansyur R.), 3. Anggota BSNP (Djaali)
19	- 18 April 2011 - GIM Kemdiknas	Evaluasi Pelaksanaan UN SMA, SMK, dan MA hari pertama.	1. Kabalitbang (Mansyur R.), 2. Anggota BSNP (T. Ramly Z.)
20	- 20 April 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Penutupan Pembekalan Peserta Dharmasiswa.	Wamendiknas (Fasli Jalal)
21	- 21 April 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional SMA Tahun Pelajaran 2010-2011 Hari Pertama.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Kabalitbang (Mansyur R.), 3. Sekretaris BSNP (Richardus Eko Indrajit), 4. Tim Pemantau DKI Jakarta (Supriyanto)
22	- 25 April 2011 - GIM Kemdiknas	Evaluasi Pelaksanaan Ujian Nasional SMP Tahun Pelajaran 2010-2011 Hari Pertama, bersama	1. Staf Khusus Mendiknas Bid. Komunikasi & Media (Sukemi), 2. Kabalitbang (Mansyur R.), 3. Ketua BSNP (Aman W.), 4. plt. Kepala PIH (Ibnu Hamad)
23	- 29 April 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2011.	Mendiknas (Mohammad Nuh)
24	- 2 Mei 2011	Perayaan Peringatan Hari	1. Mendiknas,

(Lanjutan 5)

	- Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pendidikan Nasional Tahun 2011	2. Dirut Balai Pustaka, 3. Perwakilan Jamsostek, 4. Perwakilan Proton. 5. Perwakilan Mobil, 6. Perwakilan Intel Coorp., 7. Microsoft Coorp.
25	- 4 Mei 2011 - Aula Gdg D Lt. 3 Kemdiknas	Penjelasan Mendiknas dan Rektor PTN, tentang Gerakan NII di lingkungan PTN.	1. Mendiknas, 2. Ketua MRPTN, 3. Rektor IPB, 4. Rektor ITB, 5. Rektor UGM.
26	- 5 Mei 2011 - Aula PPKLK Cipete Fatmawati	Inclusive Education Award, bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dikdas, USAID, Hellen Keller Internationa	1. Direktur PPKLK (M. Mudjito), 2. Perwakilan Hellen Keller, 3. Perwakilan USAID.
27	- 6 Mei 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pelepasan Siswa dalam Lomba IT ke Amerika Serikat oleh Mendiknas.	1. Mendiknas (Mohammad Nuh), 2. Dirjen Dikmen (Baedhowi), 3. Perwakilan Intel Coorp.
28	- 13 Mei 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pengumuman Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2010-2011.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Ketua BSNP (M. Aman W.), 3. Direktur SMA (Totok S.), 4. Direktur SMK (Joko S.)
29	- 16 Mei 2011 - Aula Gdg D Lt. 18 Kemdiknas	Pertemuan Indonesia- Jepang Jalin Kerja Sama untuk Meningkatkan Pertukaran Mahasiswa di Kedua Negara.	1. Delegasi Indonesia dari Perguruan Tinggi (Retno Bambang Sudibyoy) 2. Delegasi Jepang (Akihiko Tanaka).
30	- 17 Mei 2011 - Aula Gedung D Lt. 3 Kemdiknas	Pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Jalur Undangan Tahun	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso), 2. Ketua Panitia SNMPTN 2011

(Lanjutan 6)

		2011.	/Rektor IPB (Herry S.), 3. Ketua MRPTN (Musliar Kasim)
31	- 20 Mei 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan Teknis mengenai Hasil UN SMA/MA/SMK Tahun 2010-2011.	Mendiknas (Mohammad Nuh).
32	- 29 Mei 2011 - Aula Gdg D Lt.3 Kemdiknas	Pelaksanaan SNMPTN 2011 Jalur tertulis-Reguler Tahun 2011	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso) 2. Ketua MRPRN (Musliar Kasim) 3. Rektor UNY/Sekretaris SNMPTN 2011 (Rochmat W.)
33	- 31 Mei 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penandatanganan MoU Beasiswa antara Kemdiknas dengan PT. BRI (Persero).	1. Mendiknas (Mohammad Nuh) 2. Direktur BRI (Sofyan Basir)
34	- 1 Juni 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pengumuman Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Pelajaran 2011, bersama	1. Mendiknas, 2. Kabalitbang, 3. Dirjen Dikdas, 4. Sekretaris BSNP.
35	- 15 Juni 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan mengenai Kasus UN SD Tahun Pelajaran 2010-2011..	1. Mendiknas (Mohammad Nuh) 2. Kabalitbang (Masyur Ramly)
36	- 17 Juni 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan Rektor mengenai Survei Enterobater Sakazakii pada Susu Formula	1. Mendiknas (Mohammad Nuh), 2. Rektor IPB (Herry Suhardiyanto), 3. Dirjen Dikti (Djoko Santoso), 4. Tim Peneliti IPB.
37	- 22 Juni 2011 - GIM Kemdiknas	Kompetisi Animasi Lomba Penyelarasan Dunia Kerja dan Pendidikan	1. Direktur Pembinaan Kursus & Pelatihan, Ditjen PAUDNI (Wartanto) 2. Kepala Bidang Pengembangan

(Lanjutan 7)

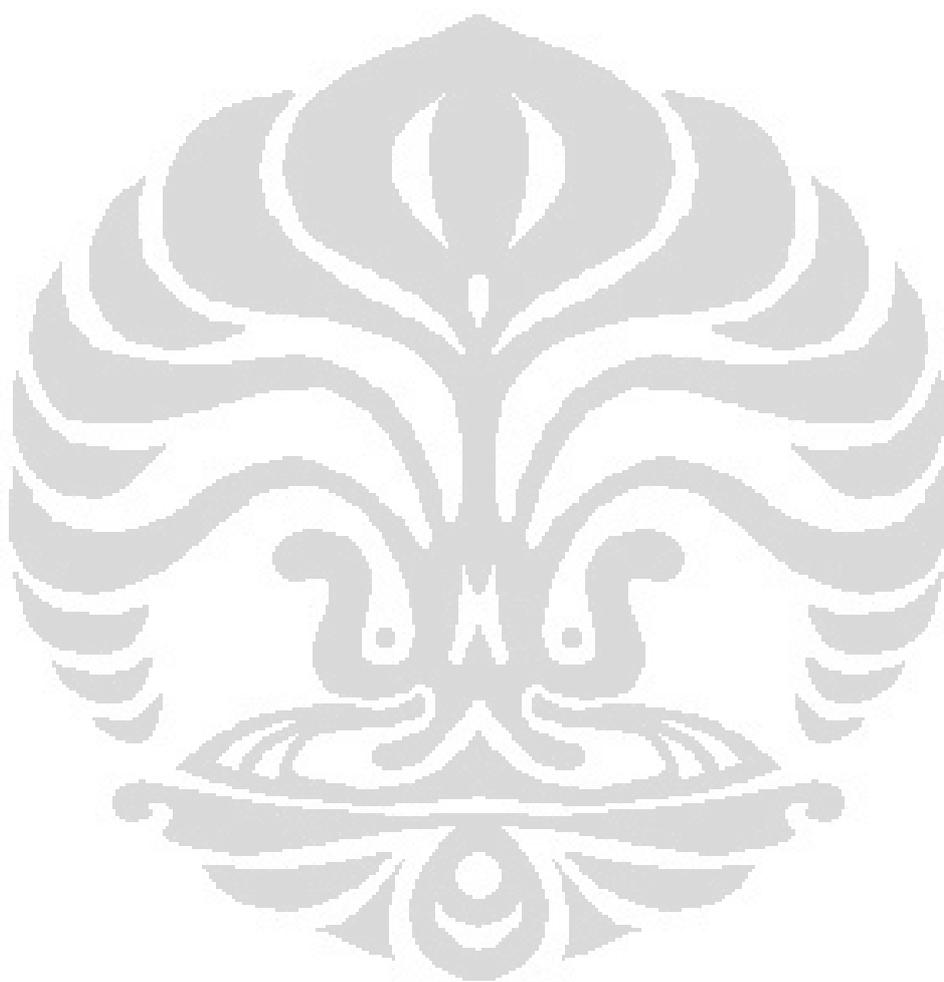
			Kemitraan (Setiono)
38	- 23 Juni 2011 - GIM Kemdiknas	Kontes Raket Indonesia Tahun 2011	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso) 2. Direktur P2M Ditjen Dikti (Suryo Hapsoro).
39	- 27-28 Juni 2011 - Aula Gdg D Lt. 3 Kemdiknas	Pengumuman Hasil Seleksi SNMPTN Jalur Tertulis/Reguler Tahun 2011	1. Ketua SNMPTN 2011 (Herry Suhardiyanto) 2. Rektor UNY (Rochmat Wahab)
40	- 6 Juli 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pendanaan Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	1. Wamendiknas (Fasli Jalal), 2. Dirjen Dikdas (Suyanto), 3. Dirjen Dikmen (Baedhowi), 4. Sekjen Kemdiknas (Dodi Nandika), 5. Wks. Irjen Kemdiknas (Wukir Ragil)
41	- 12 Juli 2011 - Ruang Sidang Gdg D Lt. 3 Kemdiknas	Pendanaan Pada Pendidikan Tinggi	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso) 2. Sesditjen Dikti (Harsis Iskandar),
42	- 14 Juli 2011 - GIM Kemdiknas	Penyelenggaraan “Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional” Tahun 2011.	1. Dirjen Pendidikan Tinggi (Djoko Santoso), 2. Direktur Penelitian & Pengabdian Pd Masyarakat (Suryo Hapsoro), 3. Ketua Panitia PIMNAS (Nasarudin Salam)
43	- 14 Juli 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	MoU Kerjasama Bidang Pendidikan antara.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Menteri Pendidikan Selandia Baru (New Zealand)

44	- 18 Juli 2011 - Intercontinental Hotel Jimbaran Bali	<i>East ASIA Education Ministers Meeting (EAS EMM)</i>	1. Mendiknas, 2. Menteri Pendidikan Australia 3. Wakil Menteri Pendidikan Republika Cina, 4. Menteri Pendidikan Brunai Darusalam, 5. Wakil Sekjen ASEAN.
45	- 1 Agustus 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan Mendiknas tentang Evaluasi Survei mengenai Pungutan PPDB Tahun Pelajaran 2011-2012 di daerah-daerah.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Irjen Kemdiknas (Musliar Kasim)
46	- 2 Agustus 2011 - Gdg D Lt. 3 Kemdiknas	Seminar Setengah Hari tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Peran Berbagai Aktor dalam Era Desentralisasi	1. Wamendiknas (Fasli Jalal) 2. Kepala Prog. Kerjasama Negera Non Partner Member, 3. Direktorat OECD (Ian Whitman)
47	- 24 Agustus 2011 - Aula Gdg D Lt. 3 Kemdiknas	Penjelasan Mengenai Keikutsertaan Mahasiswa Indonesia dalam <i>One Young World</i> di Zurich pada 1-4 September 2011,	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso) 2. Direktur Kelembagaan (Achmad Djasidie).
48	- 25 Agustus 2011 - <i>Press Room</i> PIH Kemdiknas	Penjelasan Mengenai Hasil Kunjungan dan Program Partnership Bidang Perhotelan dan Pariwisata antara Universitas di Indonesia dan Thailand.	1. Kepala SEAMOLEC (Gatot Hari Priowirjanto) 2. Direktur STP Sahid Jakarta (Kusmayadi).
49	- 8 September 2011 - <i>Press Room</i> PIH	Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2011, bersama Direktur Kursus dan di	1. Kelembagaan PAUDNI (Dr. Wartanto), 2. Kasubdit Program dan Evaluasi (Elih Sudiapermana) 3. Kasubbid Kemitraan Media (Taufik

(Lanjutan 9)

			Dahlan)
50	- 19 Oktober 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Penjelasan Mendikbud tentang Program Kemendikbud Kedepan dan Perkenalan dengan Dua Wakil Menteri Pendidikan	1. Mendikbud 2. Wamendikbud Bidang Pendidikan, 3. Wamendikbud Bidang Kebudayaan.
51	- 26 Oktober 2011 - Ruang Sidang Gdg D Lt 17 Kemdikbud	Rekrutmen Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012	1. Kepala BPSDMP & PMP (Sayawal Gultom), 2. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidikan (Unifah Rosidi).
52	- 27 Oktober 2011 - Ruang Sidang Badan Bahasa Rawamangun Jakarta	Persiapan Peringatan Puncak Bulan Bahasa	1. Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Agus Dharma), 2. Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan (Qodrat Wisnu Aji).
53	- 29 Oktober 2011 - Aula Gdg A Lt. 2 Kemdikbud	Indonesia sebagai Tuan Rumah IGC-ICH Unesco 2011 Sesi Ke.6 Komite Antar Pemerintah Unesco untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda.	1. Wamen Bid. Kebudayaan (Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch, Ph.D.), 2. Ketua Biro Komite Sidang ke.6 Warisan Budaya TakBenda Unesco (Prof. Aman Wirakarta Kusuma), 3. Head of Culture Unesco (Manasori Nagaoka)

(Lanjutan 10)



Lampiran 17

Daftar Kegiatan Liputan Daerah Subbidang Kemitraan Media Tahun 2011

No	Waktu/Tempat	Kegiatan	Media
1	- 1-2 Januari 2011 - Kuningan dan Brebes	Kunjungan kerja Mendiknas ke Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Brebes.	1. Koran Jakarta, 2. Sindo,
2	- 3 Februari 2011 - Depok dan Bogor	Kunjungan Mendiknas ke Kediaman Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi UI dan IPB di Kota Depok dan Kota Bogor.	1. Kedaulatan Rakyat, 2. Jawa Pos
3	- 26 Februari 2011 - Sukabumi	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dalam rangka kunjungan ke sekolah-sekolah dan Menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat GP Anshor di Ponpes Al Masthuriyah	---
4	- 27-28 Februari 2011 - Bandung	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam Rangka Peninjauan ke Rumah Mahasiswa Penerima Beasiswa BIDIK MISI di ITB, UPI dan UNPAD di wilayah Bandung.	1. Sinar Harapan, 2. Indo Pos, 3. Suara Pembaruan,
5	- 6-7 Maret 2011 - Magelang, Prop.Jateng	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Magelang, Propinsi Jawa Tengah	1. Media Indonesia 2. Jurnas 3. Republika
6	- 16-18 Maret 2011 - Pusbangtendik Kemdiknas Sawangan, Depok, Jabar.	Rembuknas Pendidikan Tahun 2011	<u>Semua Media</u>
7	- 23 Maret 2011 - Hotel Aston Tropicana, Bandung	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Bandung dalam Menghadiri Forum Pemred Jawa Pos Group.	---
8	- 25-26 Maret 2011 - UTM, Johor Baru Malaysia	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Johar, Malaysia, dalam rangka Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA Menerima Penghargaan Honoriscausa dari	1. Republika, 2. Sindo, 3. Jurnas

(Lanjutan 2)

		Univeristas Teknologi Malaysia.	
9	- 31 Maret - 2 April 2011 - Purwokerto dan Banjarnegara	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Purwokerto dan Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah	1. Republika, 2. Sindo, 3. Jurnas
10	- 18 Mei 2011 - Serang, Banten	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Serang	1. KOMPAS, 2. Republika, 3. Sindo, 4. Sinar Harapan, 5. Suara Pembaruan, 6. JPNN, 7. Harian Terbit, 8. Suara Karya, 9. Pelita, 10. Koran Jakarta, 11. Waspada, 12. Progresif Jaya, 13. RRI, 14. Suara Demokrat, 15. Majalah Baca.
11	- 1-4 Juni 2011 - Merauke & Jayapura	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Papua, dalam rangka Meresmikan Sekolah di Daerah Perbatasan, Meresmikan Universitas Musamus, dan Pertemuan dengan Kadisdik se-Papua.	1. KOMPAS, 2. Republika, 3. Sindo, 4. Jurnas, 5. Koran Jakarta.
12	- 4-6 Juni 2011 - Bali International Convention Center, Nusa Dua Bali	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Bali, dalam rangka Membuka <i>System Assessment Benchmarking for Education Result (SABER)</i> .	1. Suara Pembaruan, 2. Suara Karya.
13	- 11 Juni 2011 - Serang, Baten	Kunjungan Kerja Sesjen Kemdiknas ke Serang, Banten	1. Harian Terbit, 2. Kedaulatan Rakyat, 3. Pelita, 4. Waspada, 5. RRI.
14	- 18-19 Juni 2011 - Surabaya & Gresik Propinsi Jawa Timur	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Surabaya, dalam rangka meninjau SDN 2 Gadel Surabaya.	---

(Lanjutan 3)

15	- 18-20 Juni 2011 - Tanjung Bunga Makasar, Sulsel	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Makasar Sulawesi Selatan, dalam rangka Membuka Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tahun 2011.	1. Media Indonesia, 2. Republika, 3. Waspada, 4. Pelita, 5. Kedaulatan Rakyat.
16	- 24-25 Juni 2011 - Kupang NTT	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam rangka Workshop Percepatan Pembangunan Pendidikan di NTT	---
17	- 9 Juli 2011 - Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB)	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Bandung dlm Rangka Memberikan Orasi Ilmiah Sidang Terbuka & Peringatan 91 Th Pendidikan Tinggi Teknik	---
18	- 17-19 Juli 2011 - Bali	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Propinsi Bali, dalam rangka membuka <i>East ASIA Education Ministers Meeting (EAS EMM)</i> , di Hotel Intercontinental Jimbaran Bali, Membuka Indonesia International Mathematic Competition (IIMC) di Hotel Sanur Paradise Bali, dan Menhadiri Upacara Apel Pendidikan Karakter dan Masa Orintasi Sekolah (MOS) di Lapangan Puputan Badung Denpasar.	1. Sindo, 2. Suara Pembaruan, 3. Indo Pos.
19	- 6 Agustus 2011 - Kabupaten Bogor	Kunjungan Kerja Mendiknas ke SDN2 Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.	1. KOMPAS, 2. Media Indonesia, 3. Sindo, 4. Koran Jakarta, 5. Suara Merdeka, 6. Radio Suara SBY.
20	- 20-21 Agustus 2011 - Tawau, Malaysia dan Tarakan, Prop. Kaltim	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, dan Tawau Malaysia.	1. KOMPAS, 2. Sindo, 3. Republika, 4. Jawa Pos,

(Lanjutan 4)

			5. Radio Suara SBY, 6. TV One
21	- 10-15 Sept' 2011 - Manado, Sulawesi Utara	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Sangihe dan Manado, Sulawesi Utara dalam rangka Membuka Olimpiade Sains Nasional Tahun 2011.	1. KOMPAS, 2. Media Indonesia, 3. Kedaulatan Rakyat, 4. Sinar Harapan, 5. Seputar Indonesia, 6. Harian Pelita, 7. Indo Pos, 8. Trans TV.
22	- 12-13 Sept' 2011 - Ramada Bintang Bali Hotel	Kunjungan Kerja Mendiknas ke Bali, dalam rangka Membuka <i>Third International Policy Dialogue Forum, Ensuring Equity in the Country Policies and Practices for Providing Quality Teachers; Toward Achieving the EFA Goals by 2015.</i>	KOMPAS

Lampiran 18

Daftar Kegiatan Liputan Subbidang Kemitraan Media Tahun 2011

No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
1	- 4 Januari 2011 - Aula Graha Kemenkokesra Jakarta	Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, tentang Program Prioritas Tahun 2011	1. Menkokesra, 2. Mendiknas, 3. Menag, 4. Mensos, 5. Menkes, 6. Menpora, 7. Meneg PP & PA, 8. Menpera, 9. Kepala BNPB, 10. Kepala BKKBN.
2	- 7 Januari 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas Melantik 154 Pejabat Eselon 3 dilingkungan Kemdiknas	Mendiknas (M. Nuh)
3	- 7 Januari 2011 - Aula Graha Gdg D Lt. 2 Kemdiknas	Rapat Sekjen Kemdiknas dengan Sekretaris Kementerian	Sesjen Kemdiknas (Dodi Nandika)
4	- 11 Januari 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas Melantik 3 Pejabat Eselon II Kemdiknas dan 373 Pejabat Eselon IV di lingkungan Kemdiknas	Mendiknas (M. Nuh)
5	- 12 Januari 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas membuka/louncing SNMPTN 2011 bersama Direktur Bank Mandiri dan Direktur Telekomunikasi	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Ketua SNMPTN (Herry S.), 3. Kepala FRPTN (Musliar Kasim)
6	- 13 Januari 2011 - Aula Serba Guna Gdg Kementerian Kominfo, Merdeka Barat	Sidang Awal Ajudikasi Sengketa Informasi Antara Kemdiknas dengan Muhammad H.S. di Komisi Informasi	1. Ketua Majelis Komisioner 2. Kabid. Pengembangan Kemitraan, PIH (Termohon) 3. Muhammad H.S. (Pemohon)
7	- 19 Januari 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lanati 3 Kemdiknas	Pertemuan Kemdiknas dengan Kementerian Lembaga yang terkait dengan Program UNESCO-Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Ketua Harian KNIU (Arif Rahman), 3. Dubes/WRI UNESCO Paris (Tresna Darmawan)

(Lanjutan 2)

No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
		(KNIU)	
8	- 19 Januari 2011 - Ball Room Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta	Pengukuhan Bapak Juwono Sudhasono sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Univeritas Presiden	Dirjen Dikti (Djoko Santoso)
9	- 19 Januari 2011 - Jalan Haji Mas Mansyur, Gang Kebon Pala III, Jakarta Pusat	Mendiknas Melakukan Kunjungan ke Rumah Penerima Bea Siswa Bidik Misi,	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Dirjen Dikti (Djoko Santoso)
10	- 20 Januari 2011 - Aula Serba Guna Gdg Kementerian Kominfo, Merdeka Barat	Sidang Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Antara Kemdiknas dengan Muhammad H.S. di Komisi Informasi, tempat di.	1. Ketua Majelis Komisioner 2. Kabid. Pengembangan Kemitraan, PIH (Termohon) 3. Muhammad H.S.(Pemohon)
11	- 20 Januari 2011 - Aula Graha Gdg D Lt. 2 Kemdiknas	Mendiknas Menerima Batuan 10.000 Piano dan 30.000 Papan Tulis dari BOYOUNG CO.LTD Perusahaan Korea.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Mr Cham Myung Kwan (Chairman Booyoung Co.Ltd)
12	- 20 Januari 2011 - Aula Graha Utama Kemdiknas	Mendiknas Membuka Rapat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional bersama Pejabat Eselon 1,2, dan 3 di Lingkungan Kemdiknas	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Sekretaris Jenderal (Dodi Nandika).
13	- 21 Januari 2011 - Aula Graha Utama Kemdiknas	Sekretaris Jenderal Menutup Rapat Kerja Kementerian Pendidikan Nasional bersama Pejabat Eselon 1,2, dan 3 di Lingkungan Kemdiknas, di.	Sekretaris Jenderal (Dodi Nandi)
14	- 24 Januari 2011 - Aula Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Sekretaris Jenderal Melepas Kepala Sekolah untuk Mengikuti Konferensi Kepala Sekolah Se-Asia Tenggara ke Brunai.	Sekretaris Jenderal (Dodi Nandi)
15	- 31 Januari 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 3 Kemdiknas	Wamendiknas menerima aset perguruan tinggi dari Univeristas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) oleh Gubernur Kepulauan Riau.	Wamendiknas (Fasli Jalal)

16	- 1 Februari 2011 - Kantor Redaksi Media Indonesia	Pertemuan Mendiknas dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Media Indonesia	Mendiknas (M. Nuh)
17	- 7 Februari 2011 - Ruang Sidang Gedung D Lantai 3 Kemdiknas	Wamendiknas membuka Forum Dialog tentang Global Issue bersama 150 Siswa dari 18 Sekolah se-Jabodetabek.	1. Wamendiknas (Fasli Jalal), 2. Ketua Harian KNIU (Arif Rahman)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
18	- 7 Februari 2011 - Aula Wirahadikusuma Kantor BPK	MoU BPK dengan Kementerian Koordinator POLHUKAM, Kemdiknas, Kemhan, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI, tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	1. Ketua BPK (Hadi Purnomo), 2. Wamendiknas (Fasli Jalal), 3. Sesjen Kemdiknas (Dodi Nandika) 4. Sesjen Kemhan (Sjafrie Syamsudin)
19	- 9 Februari 2011 - Terminal Haji Bandara Soekarno Hatta	Wamendiknas Menerima Kedatangan Mahasiswa dan WNI dari Mesir.	Wamendiknas (Fasli Jalal)
20	- 9 Februari 2011 - Aula Gedung D Lt. 18 Kemdiknas	Wamendiknas Menerima Aset Politeknik Bengkalis dari Pemda Kabupaten Bengkalis di Riau dan Politeknik Nusa Utara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe di Nusa Utara.	Wamendiknas (Fasli Jalal)
21	- 9 Februari 2011 - Aula Graha Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Wamendiknas sebagai Pembicara dalam Diskusi Publik dan Loncing Buku ICW ' <u>Sekolah Harapan</u> ' Sekolah Bebas Korupsi.	Wamendiknas (Fasli Jalal)
22	- 15 Februari 2011 - Masjid Jakarta Islami Center, Koja	Mendiknas Memberikan Tausiyah dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.	Mendiknas (M. Nuh)

(Lanjutan 4)

	Jakut.		
23	- 16 Februari 2011 - Aula Graha Utama Kemdiknas	Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Struktural dan Auditor Inspektorat Jenderal Kemdiknas disaksikan Ketua KPK, ketua BPKP, dan MenegPAN.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Ketua KPK (Ferry Wibisono) 3. Irjen Kemdiknas (Wukir Ragil).
24	- 17 Februari 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Temu Awal Kemdiknas dengan BPK RI tentang Audit Laporan Keuangan Tahun 2010 di, tanggal, pukul 10.00 WIB.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Auditor Utama (Abdul Latif)
25	- 17 Februari 2011 - Ruang Tamu Mendiknas, Gedung A Lantai 2 Kemdiknas	Mendiknas menerima Ambassador Republic of Egypt (H.E. Mr. Ahmed El Kewaisny dan First Secretary (Mohammed Eladawy.	1. Mendiknas (m. Nuh) 2. Ambassador Republic of Egypt (H.E. Mr. Ahmed El Kewaisny) 3. First Secretary (Mohammed Eladawy).
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
26	- 17 Februari 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Penandatanganan MoU Mendiknas dengan Menristek Austria.	1. Mendiknas (m. Nuh) 2. Menristek Austria (Betrix Karl)
27	- 18 Februari 2011 - Aula Gedung A Lt. 2 Kemdiknas	Dirjen PAUDNI menerima salah satu lembaga pendidikan dari Singapura	Dirjen PUADNI (Hamid Muhammad)
28	- 1 Maret 2011 - Aula Sasana Bhakti Pradja, Kemdagri	Rapat Percepatan Penyaluran Dana BOS TA 2011 bersama 33 Propinsi Setda, Kadisdik, dan BPKD Se-Indonesia.	Mendiknas (Mohammad NUH) Mendagri (Gamawan Fawzi)
29	- 3 Maret 2011 - PTUN	Sidang Tuntutan Sengketa Informasi Muhammad HS di PTUN.	

(Lanjutan 5)

30	- 4 Maret 2011 - VIP Room Bandara Soekarno Hatta	Wamendiknas Melepas Pengembalian Mahasiswa ke Mesir.	Wamendiknas WAKASAU
31	- 7 Maret 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lt. 3 Kemdiknas	Melantik 9 Orang Pejabat Eselon 1, 2, 3 dan 4 di Lingkungan Kemdiknas.	Mendiknas
32	- 7 maret 2011 - Kantor Kemeneg PAN	Sekretaris Jenderal Kemdiknas menerima Penghargaan LAKIP Terbaik (Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat)	Sesjen Kemdiknas
33	- 7 Maret 2011 - Aula Sasana Bhakti Pradja Kemdagri.	MoU Mendiknas dengan Mendagri tentang Pembentukan Pusat Studi Pendidikan Kebangsaan.	1. Mendiknas 2. Mendagri 3. Rektor UI
34	- 8 Maret 2011 - Gdg D Lt. 9-10 Kemdiknas	Wamendiknas Menerima Delegasi dari British Council (United Kingdom-UK), dalam rangka membahas Kerjasama Penelitian Bidang Pendidikan, Bea Siswa, dan kerjasama lainnya.	Wamendiknas
35	- 9 Maret 2011 - Hotel Century Atlet Jakarta	Wamendiknas sebagai Keynote Speaker dalam Simposium "RSBI/SBI Kebijakan dan Pelaksanaa".	Wamendiknas
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
36	- 9 Maret 2011 - Hotel Kartika Chandra Jakarta	Seminar Nasional dalam rangka Peringatan 100 Tahun Hari Perempuan Se-Dunia.	Wamendiknas
37	- 11 Maret 2011 - Studio MNC Taman Mini Indonesia Indah	Acara Final Pemilihan Juara Anak Cerdas Indonesia Tahun 2011.	Wamendiknas Dirjen Dikdas

(Lanjutan 6)

	Jakarta		
38	- 14 Maret 2011 - Rusi Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pertemuan Pejabat Kemdiknas dg Atdikbud RI.	Wamendiknas Plt. Dirjen Dikdas Plt. Dirjen Dikmen Plt. Dirjen PNFI
40	- 15 Maret 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 3 Kemdiknas	Pelantikan Pejabat Eselon 2, 3, dan 4 di Lingkungan Kemdiknas	Mendiknas
41	- 22 Maret 2011 - Hotel Sahid Jaya Jakarta	Mendiknas Membuka Seminar Kebahasaan (MABBIM).	Mendiknas Plt. Kepala Badan Bahasa
42	- 23 Maret 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Penandatanganan Pakta Integritas dengan Pejabat Eselon 1 dan 2 Kemdiknas, di, tanggal.	Mendiknas Pejabat Eselon 1 dan 2 Kemdiknas
43	- 24 Maret 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lanantai 3 Kemdiknas	Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendiknas dengan Kepala BKN tentang jabatan Fungsional.	Mendiknas Kepala BKN
44	- 24 Maret 2011 - Ruang Sidang Dirjen Dikdas Gdg E Lt. 5 Kemdiknas	Penyerahan Surat Konfirmasi Penghapusan Hutang (Debt Swap) II dari Pemerintah Indonesia (Dirjen Dikdas) kepada Pemerintah Jerman (Direktur KfW), disaksikan Mendiknas dan Dubes Jerman.	Mendiknas Direktur KfW Dirjen Dikdas
45	- 28 Maret 2011 - Aula Graha Utama Kemdiknas	Pelantikan Pejabat Eselon 1 dilingkungan Kemdiknas.	Mendiknas

(Lanjutan 7)

No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
46	- 5 April 2011 - Ruang Sidang Sekjen Kemdiknas	Penandatanganan Kontrak Kerjasama Pustekkom dg PT Telkom ttg Pengadaan Sewa Bandwidth pada Jardiknas.	1. Sekjen Kemdiknas (Dodi Nandika), 2. Direktur Whole Sales and Enterprise Telkom (Arif Yahya) 3. Kapustekkom (Ari Santoso)
47	- 6 April 2011 - Aula Gdg D Lt. 2 Kemdiknas	membuka Lokakarya Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua.	1. Wamendiknas (Fasli Jalal) 2. Setda Prop. Papua 3. Kadisdikpora (Jammes Modouw)
48	- 9 April 2011 - Percetakan Unit II Balai Pustaka, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	Mendiknas Melakukan Sidak Persiapan Naskah UN SMA, MA dan SMK Tahun Pelajaran 2010-2011.	Mendiknas (M. Nuh)
49	- 13 April 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Pelantikan Pejabat Eselon 1 Kemdiknas (Rektor dan Direktur PTN).	Mendiknas
50	- 13 April 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas Menerima Tim Robot ITB dan UGM yang memenangkan Olimpiade Internasional dari USA.	Mendiknas Dirjen Dikti
51	- 18 April 2011 - SMAN 70, SLB Santi Rama Jl. Fatmawati, & SLB A Lebak Buluz	Sidak Pendistribusian dan Pelaksanaan UN SMA, SMK, dan MA TP 2010-2011	Mendiknas (M. Nuh),
53	- 20 April 2011 - VVIP Bandara Halim Perdana Kusuma,	Mendiknas Menerima Kedatangan <i>Sultan Brunei</i> .	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Sultan Brunai (Hassanal Bolkiah) 3. Rektor UI

(Lanjutan 8)

	Jakarta		(Gumilar Ruslinawa)
54	- 20 April 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas Menutup Pembekalan Peserta Dharmasiswa.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Rektor Univ. Nasional (Hassanal Bolkiah) 3. Karo PKLN (Ananto K.S.)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
55	- 25 April 2011 - SMPN 181 Jakarta SMPN 38 Jakarta	Sidak Pelaksanaan UN SMP, MTs, Tahun Pelajaran 2010-2011 di, tanggal.	Wamendiknas
56	- 26 April 2011 - Hotel Borobudur Jakarta	Mendiknas Membuka <i>The 8th Senior Official Committe for ASEAN Sosial Culture Community (SOCA)</i> .	Mendiknas
57	- 27 April 2011 - SD Darusalam Cilincing Jakut	Mendiknas Menyerahkan Beasiswa Miskin dan Bantuan Sosial Pendidikan secara Simbolis kepada Waki Wali Kota Jakut, Kepala Sekolah, dan Peserta Didik.	1. Mendiknas, 2. Dirut SCTV, 3. Wakil Wali Kota Jakut.
57	- 28 April 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Dialog Mendiknas dengan Redaktur Pendidikan Media Cetak.	Mendiknas
58	- 29 April 2011. - Aula Graha Utama Gdg D Lt. 2 Kemdiknas	Mendiknas membuka Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke.86.	1. Mendiknas, 2. KASAD.
59	- 1 Mei 2011 - Raung Kerja Mendiknas	Rekaman Sambutan Mendiknas Pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) Tahun 2011, untuk disiarkan di TVRI Pusat Jakarta.	Mendiknas
60	- 2 Mei 2011 - Plaza Kemdiknas Senayan Jakarta	Upacara Bendera dan Perayaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun	Mendiknas

		2011.	
61	- 4 Mei 2011 - Aula Gdg D Lt. 2 Kemdiknas	Rakor Pimpinan Perguruan Tinggi, bersama Mendiknas, Dirjen Dikti, Pejabat Eselon 2 Ditjen Dikti, Rektor PTN, Direktur PTN, dan Purek III PTN Se-Indonesia.	1. Mendiknas, 2. Dirjen Dikti.
62	- 5 Mei 2011 - Aula PPKLK Cipete Fatmawati	Inclusive Education Award bersama Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dikdas, USAID, Hellen Keller International.	Direktur PPKLK Dikdas (M. Mudjito)
63	- 12 Mei 2011 - Aula Gedung E Lt. 2 Kemdiknas	Penandatanganan MoU antara Balitbang Kemdiknas dengan Yayasan Dharma Tjipta Widjaja (<i>Eka Tjipta Foundation</i>).	1. Sekretaris Balitbang 2. Ela Tjipta Foundation
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
64	- 13 Mei 2011 - Aula Gdg C Lt. 2 Kemdiknas, Cipete Fatmawati Jakarta	Penandatanganan MoU antara Ditjen Dikdas dengan International Departement Partner (IDP) Norway, dan PT Telkom (Tbk).	1. Dirjen Dikdas, 2. Direktur PPKLK Dikdas, 3. Director IDP, 4. Dir.Pemasaran PT.Telkom
65	- 16 Mei 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Mendiknas Membuka Gebyar Apresiasi Karakter Siswa Indonesia (AKSI).	1. Mendiknas, 2. Dirjen Dikmen.
66	- 20 Mei 2011 - Halaman Kantor Kemdiknas	Upacara Peringatan HARKITNAS 2011, sebagai Pembina Upacara Dirjen Dikti.	Dirjen Dikti (Djoko Santoso).
67	- 20 Mei 2011 - Hotel Orxchard Gunung Sahari Jakarta	Pengumuman Lomba Penulisan Artikel/Berita Pendidikan.	Sesjen Kemdiknas
68	- 20 Mei 2011 - Pekan Raya (PRJ) Kemayoran Jakarta	Puncak Peringatan HARDIKNAS dan HARKITNAS 2011	1. Presiden RI, 2. Mendiknas, 3. Menkominfo.

69	- 24 Mei 2011 - Ruang Kerja Mendiknas Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Mendiknas menerima Wartawan Cilik dari Lampung Post.	Mendiknas
70	- 26 Mei 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 3 Kemdiknas	Peresmian 'Rumah Cerdas Anak Bangsa' dan Website Beasiswa Bazarnas.	Wamendiknas
71	- 31 Mei 2011 - SMAN 24 Jakarta, SMAN 82 Jakarta.	Sidak Pelaksanaan SNMPTN 2011.	1. Mendiknas, 2. Ketua SNMPTN/Rektor 3. IPB, Rektor UI.
72	- 31 Mei 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt 3 Kemdiknas	Penandatanganan MoU Program Beasiswa Nusantara Cerdas-Bank BRI.	1. Mendiknas (Mohammad Nuh) 2. Dirut Bank BRI (Sofyan Basir)
73	- 7 Juni 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Pembukaan Rakor BOS Tahun 2011	Mendiknas (M. Nuh)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
74	- 15 Juni 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Pelantikan Pejabat Eselon I, II, III dan IV di Lingkungan Kemdiknas.	Mendiknas (M. Nuh)
75	- 16 Juni 2011 - Kawasan Perkantoran KOMPAS GROUP Palmerah Jakarta	Kunjungan Pejabat Kemdiknas ke Redaksi KOMPAS, dalam rangka Presentasi Perkembangan Pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Dirjen Dikdas (Suyanto) 3. Karo PKLN (Ananto KS) 4. Staf Ahli Bid. Sosial & Ekonomi Pendidikan. (Taufik Hanafi)
76	- 17 Juni 2011 - Ruang Sidang Wamendiknas	Wamendiknas menerima Ketua Komnas Anak (Aris Merdeka Sirait) dan Murid-	1. Wamendiknas (Fasli Jalal), 2. Ketua Komnas

		Murid serta Orang Tua Wali Murid Pelapor adanya Contek Masal di SDN 2 Gadel Surabaya dan SDN 6 Pesanggerahan Jaksel.	Perlindungan Anak (Andi Merdeka Sirait)
77	- 21 Juni 2011. - Hotel Mercure Ancol Jakarta	Pembukaan Seminar Internasional Meningkatkan Keaksaraan Perempuan Bekerjasama dengan Organisasi Perempuan.	1. Mendiknas (Mohammad Nuh), 2. Dirjen PAUDNI (Hamid Muhammad), 3. Dir. UNESCO Jakarta (Hubert Gijzen).
78	- 23 Juni 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Mendiknas memberikan Pengarahan pada Kongres ke.1 Ikatan Guru Indonesia (IGI)	Mendiknas (Mohammad Nuh)
79	- 4 Juli 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Pembukaan Pameran LOMOJARI (Lomba Motivasi Belajar Mandiri) Bidang Keterampilan tingkat SMP Terbuka Tahun 2011 Tingkat Nasional	Dirjen Dikdas (Suyanto)
80	- 5 Juli 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Pelepasan Tim Olimpiade Indonesia	Wamendiknas (Fasli Jalal)
81	- 7 Juli 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 3 Kemdiknas	Pembukaan <i>Focus Group Discussion (FGD) Integrity High Impact Learning</i> antara Kemdiknas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Mendiknas (M. Nuh)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
82	- 10 Juli 2011 - Kawasan Tzu Chi Pantai Indah Kapuk Tangerang	Mendiknas Meresmikan Sekolah Tzu Chi “Budha” Indonesia.	Mendiknas (M. Nuh)

(Lanjutan 12)

83	- 12 Juli 2011 - SMAN 70	Upacara Masa Orientasi Siswa (MOS) SD-SMA di SMAN 70 Jakarta	Wamendiknas (Fasli Jalal)
84	- 15 Juli 2011 - Wilayah Kodam Jaya, Setu Bekasi	Mendiknas Membuka Upacara Penutupan Bedah Sekolah Dasar dan PAUD Tahun Ajaran 2011-2012	Mendiknas (M. Nuh)
85	- 15 Juli 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt.3 Kemdiknas	Mendiknas Meluncurkan Program Layanan TIK Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuha Khusus (SLB Kategori B/Tuna Rungu).	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Kapustekkom (Ari Santoso)
86	- 19 Juli 2011 - Ruang Sidang KNIU Gdg C Lt. 17 Kemdiknas	Pendidikan Karakter Bangsa Melalui Keteladanan Para Pahlawan Nasional: Pembahasan Khusus Kepahlawanan Pangeran Diponegara	1. Ketua Harian KNIU 2. Mantan Mendiknas
87	- 18 Juli 2011 - Bandara Soekarno Hatta	Penyambutan kedatangan Tim Olimpiade Fisika Internasional (International Physics Olympiad/IPhO) dari Thailand, Bangkok	Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemdiknas
88	- 19 Juli 2011 - Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang	Penyambutan kedatangan Tim Olimpiade Kimia Internasional (International Chemistry Olympiad/IChO) dari Turki	Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemdiknas
89	- 25 Juli 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Mendiknas Melantik Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kemdiknas	Mendiknas
90	- 30 Juli 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Wamendiknas Meresmikan/Melouncing <i>Indonesia Campus Stars (ICS) 2011</i> kerjasama Yayasan Putra Putri Kampus Indonesia (YPPKI)	Wamendiknas
91	- 1 Agustus 2011 - Ruang DSS	Mendiknas Menerima 4 Gubernur Kalimantan, dalam	Mendiknas

	Gedung A Lantai 2 Kemdiknas	rangka membahas Program Pendidikan Regional Kalimantan	
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
92	- 1 Agustus 2011 - Kediaman Mendiknas Widya Chandra Jakarta	Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Mendiknas Bapak H. Mohammad Nuh, serta Ibu Hj. Laely Rachmawaty dengan Finalis Pildacil 2011	Mendiknas
93	- 9 Agustus 2011 - Aula Ruang Gedung D Lantai 3 Kemdiknas	Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Mendiknas dengan BEM Nusantara	Mendiknas
94	- 9 Agustus 2011 - Aula Ruang Gedung D Lantai 3 Kemdiknas	Mendiknas Melepas Tim Kontingen Mahasiswa pada Universiade	Mendiknas Ketua KONI
95	- 10 Agustus 2011 - Ruang Sidang Talenta, Dit. PPKLK Dikdas, Cipete, Jakarta Selatan	Louncing Buku Tulkit Lingkungan Inklusif Ramah Terhadap Pembelajaran (LIRP)	Dir. PPKLK, Dikdas (Mudjito, AK)
96	- 10 Agustus 2011 - Aula Gedung Dit.Pemb.SMA Lt. 4 Cipete Jl.RS Fatmawati Jaksel	Pelepasan Tim Olimpiade Ilmu Kebumian ke Italia, Tim Olimpiade Astronomi oleh ke Polandia, dan Tim Olimpiade Debat ke Skotlandia	Dir. Pemb. SMA (Totok Suprayitno)
97	- 12 Agustus 2011 - Ballroom Hotel Sahid Jakarta	Pemberian Penghargaan Gurdasus, Pendidik Khusus Berdedikasi, serta Pemilihan Pendidik Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun 2011	Wamendiknas (Fasli Jalal)
98	- 13 Agustus 2011 - Istana Negara	Ramah Tamah Ibu Ani Yudhoyono dengan Penerima Penghargaan Guru Daerah	1. Ibu Presiden (Ani Yudhoyono) 2. Mendiknas

(Lanjutan 14)

		Khusus, Pendidikan Khusus Berdedikasi, serta Pemilihan Pendidik Tenaga Kependidikan Berprestasi Tahun 2011.	(M. Nuh)
99	- 14 Agustus 2011 - Eco Park Ancol	Ibu-Ibu SIKIB dan Gurdasus Ramah Tamah dan Tabur Benih Iklan	Ibu Laely M. Nuh
100	- 16 Agustus 2011 - Ruang Sidang Menkokesra	Penandatanganan SKB 3 Menteri tentang Percepatan Pencairan Dana BOS Tahun 2011	1. Menkokesra (Agung Laksono) 2. Mendiknas (M. Nuh) 3. Mendagri (Gamawan Fauzi) 4. Menkeu (Agus Martowardijo)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
101	- 16 Agustus 2011 - Plaza Insan Berprestasi Kemdiknas	Silaturahmi Mendiknas bersama Insan Pendidikan Teladan dan Berprestasi	Mendiknas (M. Nuh)
102	- 16 Agustus 2011 - Ballroom 3, Ritz Carlton Pasific Place Jakarta	Ramah Tamah Mendiknas bersama Menteri BUMN dengan Guru Teladan dan Berprestasi.	Mendiknas (M. Nuh) Dirut Bank Mandiri
103	- 17 Agustus 2011 - Halaman Kantor Kemdiknas	Mendiknas Memimpin Upacara Bendera Peringatan HUT RI ke.66.	Mendiknas (M. Nuh)
104	- 18 Agustus 2011 - Hotel Acacia Jakarta	Workshop Forum Diskusi Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Massa bersama	Kepala Badan Bahasa (Agus Dharma)
105	- 18 Agustus 2011 - GIM Gdg C Lt. 1 Kemdiknas	Peresmian Ruang <i>Press Room</i> dilanjutkan Buka Puasa Bersama	Mendiknas (M. Nuh) Pejabat Eselon 1 Kemdiknas
106	- 7 September 2011 - Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur	MoU Mendiknas, Prof. Dr. Ir Mohammad Nuh, DEA dengan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, SE serta	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, SE

		Pejabat Eselon 1 Kemdiknas dg Aster TNI, tentan Kerjasama Bidang Pendidikan	
107	- 7 September 2011 - Gedung D Lantai 10 Kemdiknas	<i>Video Conference</i> tentang OSN Pertamina, antara Direksi Pertamina dengan beberapa Perguruan Tinggi di 33 Provinsi.	1. Dirjen Dikti (Djoko Santoso) 2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Illah Sailah)
108	- 9 September 2011 - Ruang DSS Gedung A Lt. 2 Kemdiknas	Pengarahan Pada Penerima Beasiswa Unggulan Pegawai Kemdiknas.	Mendiknas (M. Nuh)
109	- 12 September 2011 - Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Pembukaan Pameran LOMOJARI SMP Terbuka Bidang Akademik.	Sesditjen Dikdas (Bambang Indriyanto)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
110	- 13 September 2011 - Ruang Tamu Mendiknas	Mendiknas Menerima Menteri Pendidikan Bangladesh.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Menteri Pendidikan Bangladesh (Md.Motahar Hossain)
111	- 14 September 2011 - Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Penutupan Pamean LOMOJARI SMP Terbuka oleh Mendiknas.	1. Dirjen Dikdas (Suyanto) 2. Dir. Pemb. SMP (Didik Suhardi)
112	- 15 September 2011 - Ruang Kerja Wamendiknas Gdg A Lt. 2 Kemdiknas	Wamendiknas menerima Sdri. Dian Inggrawati Raih (<i>Runner-up 2 Miss Deaf World 2011</i>)	Wamendiknas (Fasli Jalal)
113	- 16 September 2011 - Aula Gdg B Lt.6 Kemdiknas	Silaturahmi Mendiknas dengan Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kemdiknas.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Irjen Kemdiknas (Musliar Kasim)

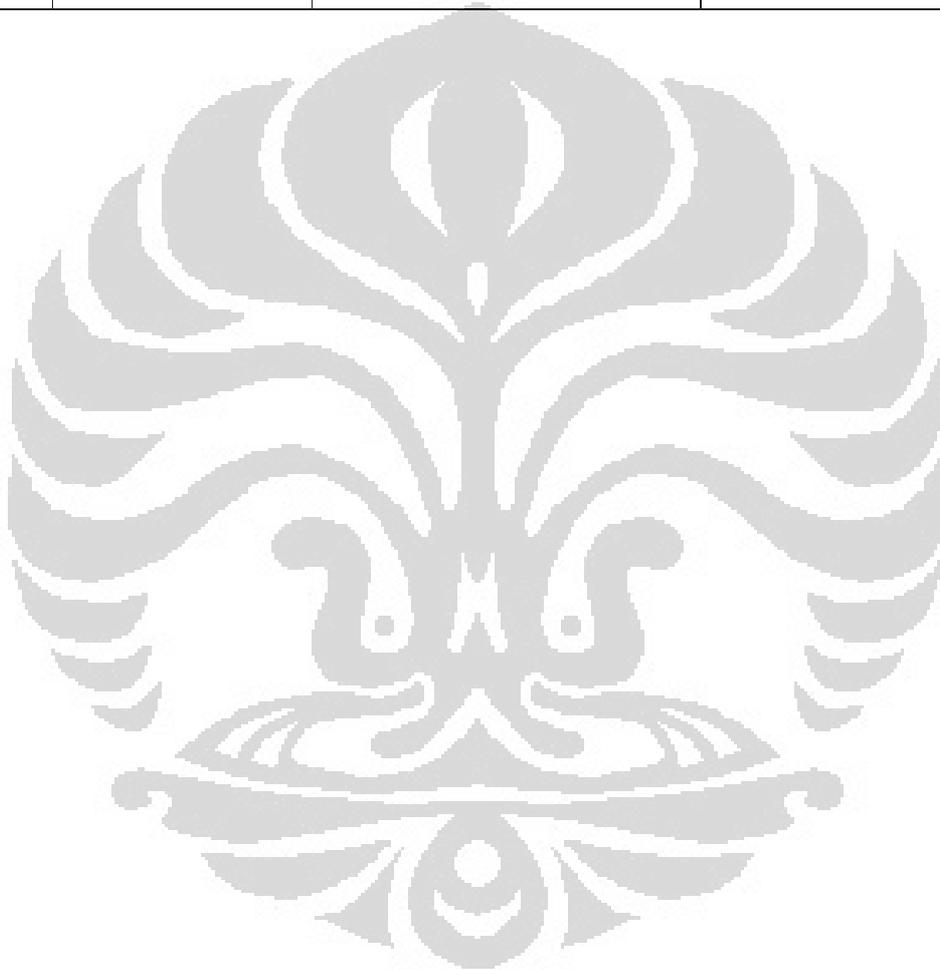
114	- 23 September 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Wamendiknas Membuka Acara Lokakarya Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2012.	1. Wamendiknas (Fasli Jalal), 2. Kabalitbang (Kharil Anwar Notodiputro)
115	- 23 September 2011 - Hotel sahid Jakarta	Opening Secretary Dharma Siswa Program	Scretary Jenderal MoNE (Ainun Naim)
116	- 26 September 2011 - Kampus Universitas Indonesia Depok	Mendiknas Membuka <i>Polar Norway Exhibition</i> .	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Rektor UI (Gumilar R.S.)
117	- 26 September 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Pembukaan Gerakan Nasional Percepatan Rehabilitasi Gedung SD-SMP Tahun 2011.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Dirjen Dikdas (Suyanto)
118	- 28 September 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Mendiknas Melepas <i>Team World Skills Competition London 2011</i> di.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Dirjen Dikmen (Hamid Muhammad) 3. Direktur Pemb. SMK (Joko Sutrisno)
119	- 29 September 2011 - Studio 6 TVRI Jakarta	Mendiknas Rekaman Sambutam/Pidato dalam rangka Peringatan HAPSAK 2011	Mendiknas (M. Nuh)
No	Waktu/Tempat	Topik	Narasumber
120	- 30 September 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdiknas	Penganugerahan MURI Kategori Bahan Ajar Berbasis Komik Pertama di Indonesia kepada Mendiknas yang telah Menetapkannya Berbasis Kurikulum.	1. Mendiknas (M. Nuh), 2. Dirjen Dikdas (Suyanto), 3. MURI (Jaya Suprana).

121	- 1 Oktober 2011 - Monumen Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur	Upacara Bendera Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.	Pemimpin Upacara Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono)
122	- 3 Oktober 2011 - Ruang Kerja Mendiknas	Mendiknas Menerima Kunjungan Dubes Inggris untuk Indonesia dalam rangka Perkenalan Dubes Baru.	Mendiknas (M. Nuh)
123	- 7 Oktober 2011 - Ruang DSS Gdg A Lt.2 Kemdiknas	Rakor Tingkat Menteri tentang Penyaluran Dana BOS 2011 dan Alternatif Penyaluran Dana BOS 2012 bermasa Menkokesra, Mendiknas dan Kementerian Agama.	Menkokesra (Agung Laksono), Mendiknas (M. Nuh),
124	- 7 Oktober 2011 - Aula Graha Utama Gdg A Lt. 3 Kemdiknas	Pelatihan Pejabat Eselon 1 dan 2 Kemdiknas oleh Mendiknas.	Mendiknas (M. Nuh)
125	- 7 Oktober 2011 - JHCC Senayan Jakarta	Mendiknas Menghadiri Kongres Ikatan Keluarga Alumni Institut Teknologi Sepuluh November (IKA ITS).	Mendiknas (M. Nuh)
126	- 7 Oktober 2011 - Ruang Kerja Mendiknas	Mendiknas Menerima Dubes Amerika	Mendiknas (M. Nuh)
127	- 7 Oktober 2011 - Ruang Sidang Gedung D Lantai 3 Kemdiknas	Pembukaan Workshop Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi	Dirjen Dikti
128	- 11 Oktober 2011 - Aula Graha Utama Gedung D Lantai 2 Kemdiknas	Pembukaan Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Tahun 2011 (OPSI)	Mendiknas
129	- 12 Oktober 2011 - Aula Graha Utama	Penutupan Olimpiade Penelitian Siswa Nasional Tahun 2011 (OPSI)	Wamendiknas (Fasli Jalal)

	Gedung D Lantai 2 Kemdiknas		
130	- 17 Oktober 2011 - Ruang Tamu Mendiknas	Kunjungan Delegasi <i>Ministry of Education of The People Republic of China</i> , dalam rangka MoU tentang pengenalan timbal balik dari bidang akademis dan kecakapan di Pendidikan Tinggi.	1. Mendiknas (M. Nuh) 2. Menteri Pendidikan China (Hao Ping) 3. Wamendiknas
131	- 20 Oktober 2011 - Gedung D Lantai 2 Kemdiknas	Pembukaan Pameran dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional ke.46, oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan di Wakilkan Dirjen Pendidikan Menengah.	Dirjen Pendidikan Menengah (Wks. Dirjen PAUD) (Hamid Muhammad)
132	- 21 Oktober 2011 - Gedung D Lantai 2 Kemdiknas	Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional ke.46, dihadiri oleh Mendikbud, Ketua Komisi X DPR RI, dan Ketua Harian SIKIB.	Mendiknas (M. Nuh)
133	- 21 Oktober 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lanati 3 Kemdiknas	Louncing Rencana Aksi Kemdikbud Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).	Mendiknas (M. Nuh)
134	- 22 Oktober 2011 - Hotel Salak Bogor	Lokakarya Peran dan Fungsi Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rangka Reformasi Birokrasi	Wamendikbud Bidang Pendidikan (Musliar Kasim)
135	- 25 Oktober 2011 - Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng	Rekaman Wamendikbud Bidang Kebudayaan, memberikan sambutan dalam rangka Promosi sebagai tuan rumah di Komite Antar Pemerintahan Unesco.	Wamendibud Bdag Kebudayaan (Wiendu Nuryanti)
136	- 27 Oktober 2011 - Studio Blitzmegaplex	Pemutaran Film 'Bulan Bintang dan Mentari' Bersama Kepala Badan Pengembangan	1. Ses Badan Pembinaan & Pengembangan Bahasa (Yeyen Maryani)

(Lanjutan 19)

	Grand Indonesia, Mall of Indonesia	dan Pembinaan Bahasa, dan Sutradara serta Pemain Film.	2. Kepala Pusat Pembinaan & Pemasyarakatan (M.Q. Wisnu Aji)
137	- 27 Oktober 2011 - Aula Graha Utama Gedung A Lantai 3 Kemdikbud	Validasi Jabatan Unit Utama di Lingkungan Kemdikbud.	Sesjen Kemdikbud (Ainun Naim)



Penyaluran Dana Rehabilitasi Sekolah Berjalan Lancar

11/04/2011

Jakarta – Penyaluran dana untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah 2011 berjalan lancar. Sebesar 63,9 persen dari Rp617 miliar yang disediakan untuk rehabilitasi gedung sekolah dasar, sudah disalurkan. Bahkan, untuk rehabilitasi gedung sekolah menengah pertama, yang sudah disalurkan mencapai 95,60 persen, dari total alokasi dana Rp129 miliar.

Poin 1

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sosial dan Ekonomi, Taufik Hanafi menjelaskan, ada empat tahapan yang dilalui dalam menjalankan Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah. Pertama, identifikasi sekolah yang menjadi sasaran. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (MoU – *Memorandum of Understanding*) ketika program diluncurkan.

Poin 2

“Yang ketiga adalah penyaluran dana ke sekolah-sekolah, dan terakhir, dimulainya kegiatan fisik,” ujarnya pada jumpa pers di Gedung C Kemdikbud, pada Jumat, (4/11). Hadir dalam kesempatan ini Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, Sukemi, Direktur Pembinaan SMP, Didik Suhardi, Kepala Subdirektorat Pembinaan SD, Samino.

Menurut Taufik, kelancaran penyaluran dana menjadi tolak ukur kelancaran kegiatan fisik. Saat ini dua daerah yang memiliki perkembangan rehabilitasi yang cepat adalah Serang (Banten) dan Bogor (Jawa Barat). Secara keseluruhan di Indonesia, kegiatan fisik telah dimulai di 193 gedung SD dan 43 gedung SMP. Kegiatan fisik tersebut di antaranya berupa penggalian untuk fondasi bangunan dan penyiapan kusen-kusen secara paralel. “Kalau kegiatan fisik jalan, berarti dananya sudah sampai,” ujar Taufik.

Poin 3

Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Gedung Sekolah ini, Kemdikbud menghadapi beberapa kendala. Misalnya, dalam proses penyaluran dana. Kendala yang dihadapi adalah adanya sekolah yang menyerahkan nomor rekening yang sudah tidak aktif atau sudah tidak berlaku, sehingga dana dikembalikan lagi ke kas negara.

Poin 4a

Sebagai solusinya, kas negara kemudian menyurati Kemdikbud jika rekening sekolah tidak bisa digunakan. Kemdikbud lalu meminta sekolah membuat rekening baru untuk segera disampaikan ke kas negara.

Poin 4b

Kendala lain adalah sedikit terganggunya proses kegiatan belajar mengajar anak didik. Taufik menjelaskan, supaya kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik, anak-anak yang gedung sekolahnya sedang direhabilitasi, dipindahkan sementara ke gedung SD lain yang terdekat. “Jika tidak ada yang terdekat, akan dibuatkan tenda-tenda. Di sinilah pentingnya bekerja sama dengan TNI. Mereka memberikan bantuan dengan menyiapkan tenda-tenda untuk belajar, terutama di daerah Kupang,” ucap Taufik.

Poin 5

Sementara untuk sistem pengawasan, Kemdikbud juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud, Perguruan Tinggi, dan masyarakat, salah satunya melalui komite sekolah. “Peran BPKP memberikan pendampingan tata

Poin 6

Poin 6

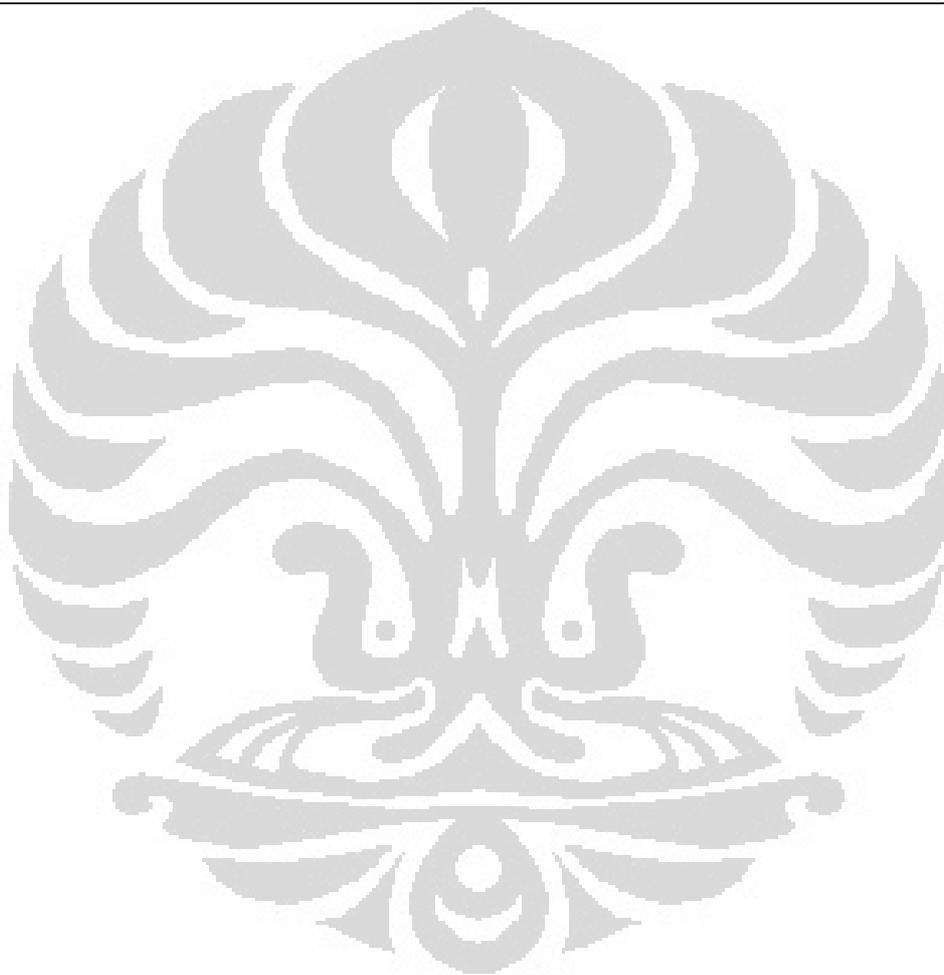
kelola keuangan yang baik. Untuk penyusunan petunjuk teknis atau juknis, kami juga menerima masukan dari BPKP," tutur Taufik.

Poin 7a

Untuk ke depannya, mekanisme pemantauan perkembangan rehabilitasi gedung sekolah akan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau IT (*information technology*), termasuk berbasis situs internet (*web based*). "Jadi teman-teman di daerah akan lebih mudah mengumpulkan data ke pusat. Selain itu, publik juga bisa lebih mudah mengakses".

Poin 7b

Taufik mengatakan, saat ini sistem pemantauan dengan IT masih disiapkan, bekerja sama dengan Pusat Teknologi Komunikasi (Pustekkom) dan Direktorat SD dan SMP Kemdikbud. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai," ucapnya. (lian)



Jumat, 04 2011 21:49 WIB

Sekolah Rusak Jadi Prioritas Rehabilitasi

Penulis : Syarief Oebaidillah



(MI/Tri Handiyatno/rj) JAKARTA--MICOM: Kondisi sekolah rusak yang mengancam keselamatan siswa dan guru mesti mendapat prioritas rehabilitasi atau perbaikan agar suasana belajar dan mengajar kembali berjalan normal.

"Kita minta bantuan media massa untuk menginformasikan sekolah rusak dan mengancam siswa dan guru. Ini harus diprioritaskan rehabilitasi atau perbaikan sekolah itu," kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Taufik Hanafi terkait rehabilitasi sekolah rusak dan menanggapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (4/11).

Saat itu ia didampingi Staf Khusus Mendikbud Bidang Media dan Komunikasi Sukemi, Direktur Pendidikan SMP Kemendikbud Didik Suhardi, dan Kasubdit Program Direktorat SD Kemendikbud Samino.

Dalam kesempatan itu, Taufik melaporkan program rehabilitasi sekolah yang telah berjalan lancar sejak dicanangkan. Untuk SD, penyaluran anggaran Rp617,845 miliar telah tersalur Rp395 miliar atau terserap 63,95 persen. Untuk SMP, penyaluran anggaran dari Rp129 miliar tersalur Rp121 miliar atau terserap 95,60 persen.

"Ini kemajuan yang cukup signifikan dan relatif cepat dalam program rehabilitasi sekolah yang kami jalankan dalam sebulan ke depan kita akan upayakan selesai tepat waktu dengan tata kelola yang baik," tegasnya.

Didik Suhardi menambahkan untuk pembangunan SMP di wilayah Kupang NTT, Banten, dan Bogor akan dipercepat, "Kami berharap akhir November ini pembangunan rehabilitasi SMP di ketiga wilayah itu berjalan lancar dan tuntas," kata Didik. (Bay/OL-2)

Poin 1

Kemdikbud: 95,6 persen dana rehabilitasi tersalurkan

Jumat, 4 November 2011 20:08 WIB | 1625 Views



Berita Terkait

- > [Kemdikbud Luncurkan 1.000 beasiswa unggulan](#)
- > [Kemdikbud kaji ulang pelaksanaan otonomi pendidikan](#)
- > [INPAS laporkan kasus Jardiknas ke Kejagung](#)
- > [45.590 siswa Manado terima dana BOS rp44,36 miliar](#)
- > [Digagas SPP tunggal di PTN](#)

tahun ajaran baru nanti.

Sesuai aturan pemakaian anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sisa anggaran perbaikan sekolah rusak berat, harus dikembalikan paling lambat 15 Desember 2011.

Meski begitu, Taufik tetap berharap penyelesaian perbaikan sekolah dapat selesai sesuai tenggang waktu terakhir yakni 31 Desember 2011.
(T.M-DCP/A011)

Jakarta (ANTARA News) - Dana rehabilitasi kelas rusak berat bagi sd yang sudah tersalur 63,9 persen dari Rp617 miliar dan untuk smp yaitu 95,6 persen dari 128,9 miliar, kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Taufik Hanafi.

Poin 1

Taufik Hanafi mengatakan dalam jumpa pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta, Jumat, sejak peluncuran program perbaikan sekolah pada 3 Oktober 2011, kegiatan rehabilitasi fisik bangunan sekolah sudah berjalan di 193 SD dan 143 SMP, seluruh tanah air.

Poin 3

"Penyaluran dana perbaikan kepada sekolah-sekolah (SD dan SMP) dapat berjalan lancar apabila rekening sekolah yang dikirimkan pihak sekolah berstatus aktif dan jelas. Sayangnya, masih ada sekolah yang mengirim nomor rekening bank yang sudah tidak berlaku. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi penyaluran dana," terang Taufik.

Poin 4

Sementara itu, Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud, Didik Suhardi menerangkan, kemajuan perbaikan fisik sekolah hingga saat ini mencapai 18 persen untuk SD dan 50 persen untuk SMP.

"Di Serang, perbaikan sudah sekitar 40-50 persen. Menurut perkiraan, akhir November 2011 pengerjaan akan selesai," jelas Didik.

Didik pun menjelaskan Kemdikbud akan memantau sekolah-sekolah yang telah diperbaiki untuk mencegah kemungkinan adanya pemungutan dana pembangunan sekolah kepada para murid oleh pihak sekolah saat

Lampiran 22
Matriks Temuan Penelitian

No	Topik Temuan	HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1 & 3	Informan 2	Informan 4
1.	Pemahaman Terhadap Fungsi <i>Media relations</i> di Lembaga Pemerintah	<i>Media relations</i> penting untuk membantu menyampaikan dan mempublikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas	<i>Media relations</i> penting untuk memperlancar arus informasi antara kementerian dengan wartawan.	<i>Media relations</i> penting terkait anggapan yang beredar di masyarakat bahwa apa yang telah dikerjakan oleh sebuah kementerian adalah apa yang ditulis atau disuarakan oleh media massa.
		WARTAWAN		
		Informan 5,6,8,9	Informan 7	Informan 10
		<i>Media relations</i> penting untuk mendapatkan informasi-informasi kementerian, seperti kebijakan, program, agenda kegiatan, dan lainnya.	<i>Media relations</i> penting ketika pucuk pimpinan tidak dapat ditemui. Dalam hal ini, wartawan dapat menghubungi humas sebagai perwakilan dari pucuk pimpinan.	<i>Media relations</i> penting sebagai penghubung antara media dengan kementerian agar data-data yang didapatkan oleh wartawan lebih teratur.
		Informan 11	Informan 12	
<i>Media relations</i> penting sebagai jembatan bagi wartawan untuk mendapatkan akses informasi ke narasumber.	<i>Media relations</i> penting untuk membantu wartawan mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan kementerian agar dapat mengawal kebijakan tersebut.			

2.	Kegiatan Media relations di Kemendibud	HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1,2,3,4		
		Jumpa pers, siaran pers, <i>press tour</i> , <i>media visit</i> , peliputan kegiatan, wawancara, <i>workshop</i> , <i>media gathering</i> .		
		WARTAWAN		
		Informan 5,6,7,8,9,10,11,12		
Jumpa pers, siaran pers, peliputan kegiatan, wawancara, <i>press tour</i> , <i>media visit</i> , <i>workshop</i> , <i>media gathering</i> .				
3.	Akses Informasi	HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1, 2, 4		Informan 3
		Akses informasi kepada semua narasumber dibuka seluas-luasnya. Humas lebih menempatkan diri sebagai fasilitator.		Secara formal, setiap akses informasi harus melalui PIH. Namun pada pelaksanaannya, banyak wartawan yang langsung menghubungi narasumber dan Humas tidak bisa membatasi hal tersebut.
		WARTAWAN		
		Informan 5 & 11	Informan 6 & 7	Informan 8
Akses informasi yang disediakan Humas masih terbatas; Humas tidak siap dalam menyediakan informasi/data yang dibutuhkan	Humas cukup terbuka jika ditanya seputar info kegiatan, namun informasi untuk keperluan pembuatan berita lebih sering didapat langsung	Informasi yang dibutuhkan cukup mudah diakses, namun kebanyakan informasi yang didapat dari Humas sebatas informasi/data pendukung saja.		

		wartawan sehingga wartawan harus mencari sendiri informasi/ data yang seharusnya bisa didapat dari Humas.	dari narasumber. Informasi yang biasa diminta ke Humas hanya sebatas informasi agenda acara saja.	Informasi utama lebih sering didapat langsung dari narasumber.
		Informan 9	Informan 10	Informan 12
		Akses informasi termasuk lebih baik dibandingkan kementerian lain, baik dari sisi keterbukaan, kelengkapan data, maupun pelayanan terhadap wartawan. Namun informasi untuk pembuatan berita lebih sering dipeorleh langsung dari narasumber; Humas hanya sebagai fasilitator.	Akses informasi masih perlu ditingkatkan. Jumlah personil yang sangat terbatas menyebabkan penguasaan dan penyediaan data belum maksimal. Namun Humas sendiri cukup mudah dihubungi.	Informasi yang bernada positif cukup mudah diakses (meskipun wartawan sendiri yang terkadang harus inisiatif bertanya). Namun, Humas akses informasi untuk berita yang bernada negatif cenderung sulit diakses.
		HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1,2,3,4		
		Ruang pers yang dilengkapi dengan komputer dan koneksi internet		
		WARTAWAN		
		Informan 5, 6, 8, 11		Informan 7, 9,10,12
		Ruang pers yang dilengkapi dengan komputer dan koneksi internet. Meskipun belum maksimal, ruang pers di Kemendikbud cenderung sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.		Ruang pers yang dilengkapi komputer dan koneksi internet. Ruang pers belum memadai untuk ukuran kementerian
4.	Fasilitas Yang Disediakan			

			sebesar Kemendikbud.	
5.	Tanggapan Humas Terhadap Berita Yang Bernada Negatif	HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1, 2, 3, 4		
		Secara institusional, Humas mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi pemberitaan yang keliru. Secara personal, Humas mendekati wartawan secara <i>person-to-person</i> .		
		WARTAWAN		
		Informan 5	Informan 6, 7, 8, 10, 11, 12	Informan 9
		Langsung dihubungi oleh Menteri, serta diadakan jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut.	Melakukan klarifikasi melalui jumpa pers, serta terkadang dihubungi secara personal.	Untuk media nasional, Humas biasanya melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi. Tapi untuk media berskala daerah, Humas jarang memberikan tanggapan atau reaksi.
6.	Hal-hal yang mendukung pelaksanaan <i>media relations</i>	HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1, 2, 3, 4		
		Perhatian, dukungan dan keterbukaan dari Menteri terhadap pelaksanaan <i>media relations</i>		
		WARTAWAN		
		Informan 5	Informan 6 & 12	
		Tidak ada.	Personil Humas mudah dihubungi.	
	Informan 7, 9, 10, 11	Informan 8		
	Keterbukaan pihak Kemendikbud terhadap wartawan, mulai dari Menteri, Dirjen, dan unit kerja lainnya.	Keluwesannya personil Humas dalam memperlakukan		

			wartawan; informasi terkait agenda acara rutin diberikan.
		HUMAS KEMENDIKBUD	
		Informan 1	Informan 2
		Humas belum bisa melayani keinginan semua pihak secara maksimal.	Wartawan terkadang sulit diajak bekerja sama; masih ada beberapa wartawan yang mengharapkan “uang transport”.
		Informan 3	Informan 4
		Keterbatasan anggaran dan SDM; kurangnya pemahaman unit kerja lain mengenai pentingnya hubungan media; keluhan dari wartawan terkait media yang diajak peliputan.	Keterbatasan SDM; kurangnya pemahaman unit kerja lain mengenai pentingnya hubungan media; <i>mindset</i> wartawan yang sulit diubah.
7.	Hal-hal yang menghambat pelaksanaan <i>media relations</i>	WARTAWAN	
		Informan 5	Informan 6
		<i>Media relations</i> belum berfungsi sebagaimana mestinya karena Humas kurang asertif dalam menyediakan informasi/ data yang dibutuhkan wartawan. Humas hanya aktif saat melakukan pengundangan acara saja.	Beberapa kali tidak menerima informasi terkait pengundangan acara/ kegiatan Kemendikbud dan justru menerima informasi tersebut dari sesama rekan wartawan.
		Informan 7	Informan 8
		Berita pendidikan tidak selalu dimuat dalam versi cetak setiap hari karena tidak ada halaman khusus pendidikan; fasilitas peliputan belum memadai; belum semua personil Humas bekerja secara profesional.	Berita pendidikan tidak selalu
		Informan 9	Informan 10
		Humas terlihat masih memilih-	Keterbatasan anggaran

		dimuat setiap hari karena masalah iklan; seringkali informasi terkait pengundangan acara/ kegiatan diberikan mendadak; beberapa personil Humas belum bekerja secara profesional.	milih/ membeda-bedakan media saat melakukan pengundangan.	menyebabkan tidak semua wartawan dapat diajak melakukan peliputan ke daerah.
			Informan 11	Informan 12
		Masih ada perbedaan persepsi antara personil Humas dengan wartawan, terutama dalam hal penyediaan informasi; Humas kurang proaktif dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan wartawan.		Masih ada informasi/ data yang sulit diakses oleh wartawan; fasilitas yang belum lengkap dan belum optimal.
		HUMAS KEMENDIKBUD		
		Informan 1	Informan 2	
		Humas harus sadar bahwa Kemendikbud berskala nasional, sehingga <i>media relations</i> yang dilaksanakan juga harus berskala nasional. Wartawan juga diharapkan tetap berimbang dalam melakukan pemberitaan.	Kegiatan <i>media relations</i> perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas, terutama kegiatan informal. Wartawan juga diharapkan lebih berimbang dalam melakukan pemberitaan dan lebih mudah diajak bekerja sama menghadiri kegiatan <i>media relations</i> Kemendikbud.	
			Informan 3	Informan 4
		Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas, terutama yang memiliki latar belakang Humas/ jurnalistik; serta perlu		Koordinasi Humas dengan unit kerja lain perlu ditingkatkan.
8.	Saran Guna Peningkatan <i>Media Relations</i> di Kemendikbud			

	adanya dukungan anggaran yang lebih memadai. Wartawan juga diharapkan dapat lebih berimbang dalam melakukan pemberitaan.	Wartawan pun diharapkan dapat menjaga objektivitas pemberitaannya.
	WARTAWAN	
	Informan 5	Informan 6
	Humas perlu lebih asertif mencari tahu kebutuhan wartawan dan memenuhi kebutuhan tersebut.	Jangan membeda-bedakan wartawan saat melakukan pengundangan.
	Informan 8	Informan 9
	Lebih terbuka lagi dan lebih berinisiatif mengadakan kegiatan informal untuk menjalin kedekatan dengan wartawan.	Lebih terbuka dalam menerima saran dan kritik dari wartawan terkait pelayanan yang diberikan; Humas harus lebih memiliki <i>power</i> di dalam Kemendikbud; kegiatan informal ditambah frekuensinya.
	Informan 11	
	Humas harus lebih menguasai kebutuhan wartawan; Humas tidak boleh membeda-bedakan wartawan karena semua sama pentingnya; Humas harus memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan wartawan.	Informan 12
		Humas harus terbuka tentang semua informasi, baik yang positif maupun negatif.